



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan peraturan di atas, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LAK, LP-SAL, LO, LPE dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna

sesuai dengan kepentingannya. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:

1. Informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selama satu periode pelaporan.
2. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
4. Informasi yang berguna dalam memprediksi potensi sumber daya ekonomi untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang.

1.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka pada posisi antara $105^{\circ}38' - 106^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}3' - 2^{\circ}21'$ Lintang Selatan. Kabupaten Bangka terdiri dari 2 kategori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Sungailiat, sebagian wilayah Kecamatan Merawang, sebagian wilayah Kecamatan Riau Silip, sebagian wilayah Kecamatan Belinyu dan sebagian kecil Kecamatan Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam.

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah kurang lebih 302.879,47 Ha atau 3.028,794 km² dengan batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Tanah di daerah Kabupaten Bangka mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain sehingga memiliki potensi di bidang pertambangan. Wilayah Kabupaten Bangka juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan dan pariwisata karena sebelah utara dan timur berbatasan dengan laut.

1.2.2. Demografi dan Administratif Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bangka berdiri pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2020 adalah 326.265 jiwa bertambah 2,36 persen dari tahun 2019 yang jumlah penduduknya sebesar 318.756 jiwa. Pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan, perikanan, usaha pertambangan dan

penggalan. Sektorsekunder mencakup pekerjaan dalam usaha usaha industri pengolahan dan usaha kontruksi. Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan, 19 Kelurahan, 62 Desa yang merupakan desa definitif dan didukung 258 Dusun dan 88 Lingkungan.

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Dusun/Lingkungan

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun / Lingkungan
1.	Sungailiat	12	1	3
2.	Belinyu	7	5	34
3.	Merawang	-	10	38
4.	Pemali	-	6	22
5.	Puding Besar	-	7	23
6.	Riau Silip	-	9	31
7.	Bakam	-	9	33
8.	Mendo Barat	-	15	74
JUMLAH		19	62	258

1.2.3. Perekonomian Daerah

Kabupaten Bangka memiliki berbagai macam potensi di berbagai sektor yang meningkatkan ekonomi daerah yaitu, sektor pertanian dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pertambangan dan industri, dan sektor pariwisata.

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu program strategis di Kabupaten Bangka, karena memegang peranan yang relatif penting dalam perekonomian masyarakat. Perkebunan di Kabupaten Bangka dibagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Komoditas unggulan pada sektor perkebunan di Kabupaten Bangka yaitu kelapa sawit, karet dan lada. Ketiga komoditas unggulan perkebunan ini mengalami produksi yang fluktuatif selama tahun 2016-2020. Produksi kelapa sawit pada tahun 2016 sebesar 66.940 ton, tahun 2017 sebesar 56.524 ton, tahun 2018 sebesar 38.551 ton, tahun 2019 sebesar 39.067 ton dan tahun 2020 sebesar 88.921 ton. Produksi lada pada tahun 2016 sebesar 5.853 ton, tahun 2017 sebesar 3.175 ton, tahun 2018 sebesar 4.260 ton, tahun 2019 sebesar 4.479 ton sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3.121,5 ton . Produksi karet pada tahun 2016 sebesar 43.399 ton, tahun 2017 sebesar 25.029 ton, tahun 2018 sebesar 22.672 ton, tahun 2019 sebesar 51.034 ton sedangkan pada tahun 2020 sebesar 50.236 ton. Perkebunan besar dikelola oleh 14 perusahaan perkebunan swasta dengan tanaman utama kelapa sawit.

2. Sektor Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Bangka merupakan wilayah pesisir yang panjang dan dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya. Selain memiliki perairan laut yang cukup luas, Kabupaten Bangka juga memiliki perairan payau, rawa, sungai dan kolong (eks galian timah), yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan prospektif bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Jumlah produksi dan nilai tangkapan ikan tahun 2017 yaitu 27.761,04 ton jumlah produksi, dan 751.607.007 (ribu) rupiah nilai tangkapan. Jumlah produksi dan nilai tangkapan ikan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 26.017,09 ton jumlah produksi, dan 703.373.762 (ribu) rupiah nilai tangkapan. Pada tahun 2019, jumlah produksi dan nilai produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 26.346,51 ton dan 832.195.942,71 (ribu) rupiah nilai tangkapan. Pada tahun 2020, jumlah produksi sebesar 27.110,51 ton dan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp1.068.306.297.750,01 (ribu) rupiah nilai tangkapan.

3. Sektor Industri dan Pertambangan

Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah penghasil timah di Pulau Bangka. Aktivitas penambangan timah telah berlangsung lebih dari 200 tahun semenjak zaman kolonial Belanda. Area penambangan timah di Kabupaten Bangka dikuasai oleh PT. Timah Tbk. Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang timah tradisional yang dikenal dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI).

4. Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Kabupaten Bangka. Kekayaan alam serta budaya yang dimiliki memberikan nilai lebih untuk ditawarkan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Peluang investasi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Bangka juga terbuka lebar. Potensi wisatanya antara lain pantai, air panas, peninggalan sejarah, perbukitan, dan beberapa tempat yang baru mulai dikembangkan yaitu air terjun. Pada tahun 2020 jumlah hotel baik berbintang, maupun non bintang terdapat 26 unit yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang dan Mendo Barat.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada landasan hukum yang berlaku.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2020;
- p. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 1.2.1. Kondisi Geografis
 - 1.2.2. Demografi dan Administratif Pemerintahan
 - 1.2.3. Perekonomian Daerah
 - 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2. Kebijakan Belanja daerah
 - 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV** Kebijakan Akuntansi

Terdiri atas entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan

laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kabupaten Bangka. Kondisi perekonomian adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 disusun dengan kajian yang mengacu pada potensi dan objek pendapatan.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pada tahun 2019 perekonomian daerah Kabupaten Bangka yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 13,77 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB-ADHB mencapai 13,94 triliun rupiah.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2019	2018	2017	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.002.833	2.692.780	2.601.388	2.608.416	2.554.170
B. Pertambangan dan Pengalihan	1.321.092	1.350.494	1.472.318	1.592.600	1.476.183
C. Industri Pengolahan	3.006.789	2.949.222	2.986.620	2.865.556	2.574.147
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36.564	34.153	34.890	31.715	26.228
E. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.401	3.168	3.069	2.855	2.504
F. Konstruksi	1.419.578	1.470.457	1.305.428	1.189.439	1.048.010
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.814.909	1.940.236	1.850.586	1.706.861	1.516.729
H. Transportasi dan Pergudangan	320.208	351.047	316.432	292.538	266.014
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402.896	399.725	345.553	320.834	295.147
J. Informasi dan Komunikasi	339.571	303.322	266.649	236.293	214.561
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	358.463	398.503	380.649	352.137	328.233
L. Real Estat	517.185	498.787	475.057	426.885	393.819
M. Jasa Perusahaan	33.924	38.144	34.976	30.555	27.812
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	765.597	747.040	702.767	658.929	598.259
O. Jasa Pendidikan	337.060	327.037	301.186	277.824	256.481
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150.579	146.614	129.596	121.830	111.505
R. Jasa Lainnya	113.680	119.788	103.401	92.669	81.879
Produk Domestik Regional Bruto	13.944.329	13.770.517	13.310.565	12.807.936	11.771.681

Sumber : Badan Pusat Statistik

2. Inflasi

Kabupaten Bangka tidak termasuk dari 66 wilayah di Indonesia yang menjadi daerah terpilih penghitungan inflasi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan yang dilakukan penghitungan inflasi. Hal ini menyebabkan laju inflasi untuk Kabupaten Bangka digunakan pendekatan dengan wilayah terdekat yaitu Pangkalpinang. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2020 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) juga sebesar 0,52 persen.

3. Angka Pengangguran

TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka tahun 2019 sebesar 63,71 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 63,93 persen. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka mengalami kenaikan sebesar 5,42 persendibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,72 persen. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

4. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bangka dari tahun 2010 s.d. tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka (persen), 2010-2020

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bangka										
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.81	5.36	5.57	5.40	5.20	5.63	5.52	5.10	5.47	4.92	4.51

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut menggambarkan persentase penduduk miskin. Diperoleh dari jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali 100.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

bumi bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Menghimpundata subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak.
3. Membangun sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Menyempurnakan regulasi Retribusi Jasa Umum dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Memberikan *reward* kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target.

b. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau. DBH-Pajak Penghasilan terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), PPh Pasal 21 berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi Pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2020.
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi penerimaan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2019, 2018 dan 2017.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, serta Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
- 4) Kebijakan mengenai Alokasi DAK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Desa, Dana Insentif Daerah, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran tersebut didasarkan pada Alokasi Tahun Anggaran sebelumnya.

Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Dana Insentif Daerah adalah dengan memperbaiki performa kinerja pemerintah daerah. Untuk Dana Desa, Pemerintah Daerah mendorong perangkat desa agar realisasi Dana Desa bisa maksimal.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa, penyelenggaraannya digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaringan sosial serta dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Bangka.

Kebijakan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah serta arahan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka tahun 2005 – 2025 melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menysasar pada 6 (enam) prioritas pembangunan daerah yakni (1) sarana dan prasarana; (2) lingkungan

hidup, (3) ekonomi; (4) kesejahteraan sosial; (5) pemerintahan; dan (6) pengembangan sumber daya manusia.

- 2) Memprioritaskan alokasi dana hibah terutama kepada MUI, PMI, KONI, BAZNAS, Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, BOS tingkat SD/SMP swasta, insentif guru TK, guru PAUD serta beberapa lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- 3) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.
- 4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.
- 5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- 6) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi.
- 7) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.
- 8) Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 9) Mengelola defisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Namun jika APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran sebelumnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya

SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran berjalan.

- 3) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan pencairan dana cadangan serta berusaha menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

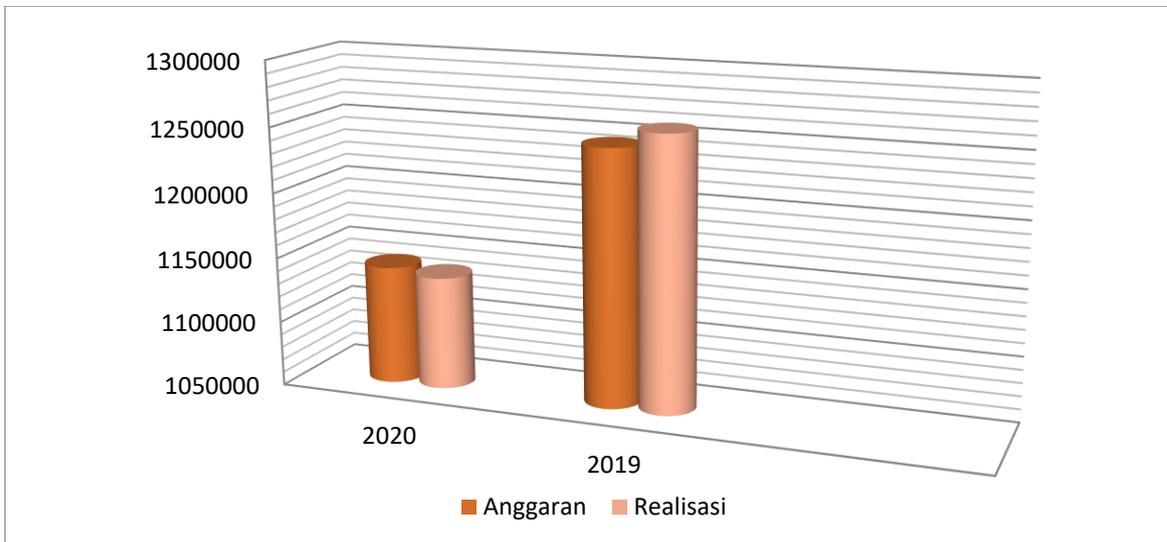
- 1) Pengeluaran pembiayaan daerah diusahakan hanya dialokasikan untuk menutup keperluan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk menganggarkan danacadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

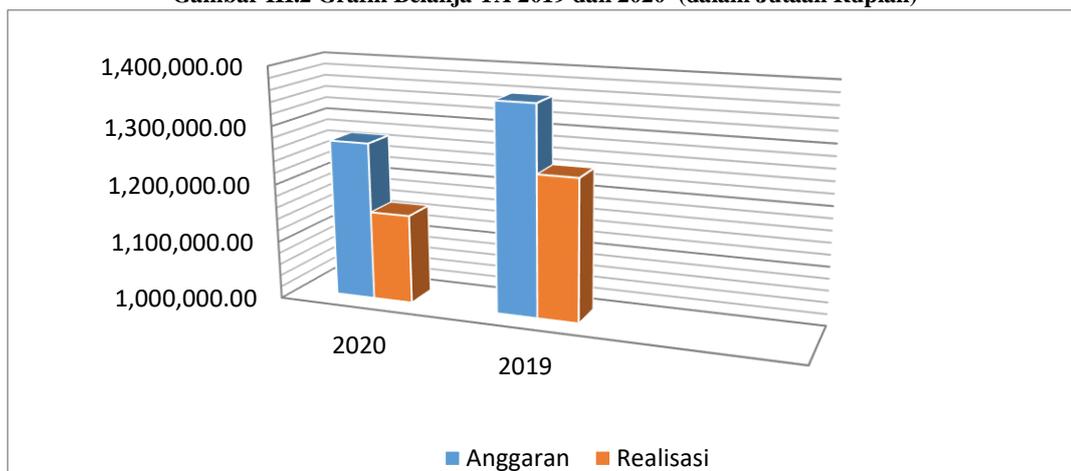
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.140.955.837.297,00 dan realisasi sebesar Rp1.136.647.395.404,40 atau 99,62%. Dibandingkan tahun anggaran 2019 terjadi penurunan untuk anggaran pendapatan sebesar Rp104.738.248.303,00 dan penurunan realisasi sebesar Rp122.210.981.549,38. Sedangkan dari sisi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020, dianggarkan sebesar Rp1.270.841.728.698,23 dan realisasi sebesar Rp1.152.653.865.431,02. Dibandingkan tahun anggaran 2019 terjadi penurunan untuk anggaran belanja dan transfer sebesar Rp85.957.257.723,52 dan penurunan realisasi sebesar Rp89.925.479.880,28.

Gambar III.1 Grafik Pendapatan TA 2019 dan 2020 (dalam Jutaan Rupiah)



Gambar III.2 Grafik Belanja TA 2019 dan 2020 (dalam Jutaan Rupiah)



a. Pendapatan

Anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 1.140.955.837.297,00 dan realisasi sebesar Rp1.136.647.395.404,40 dengan penjelasan sebagai berikut:

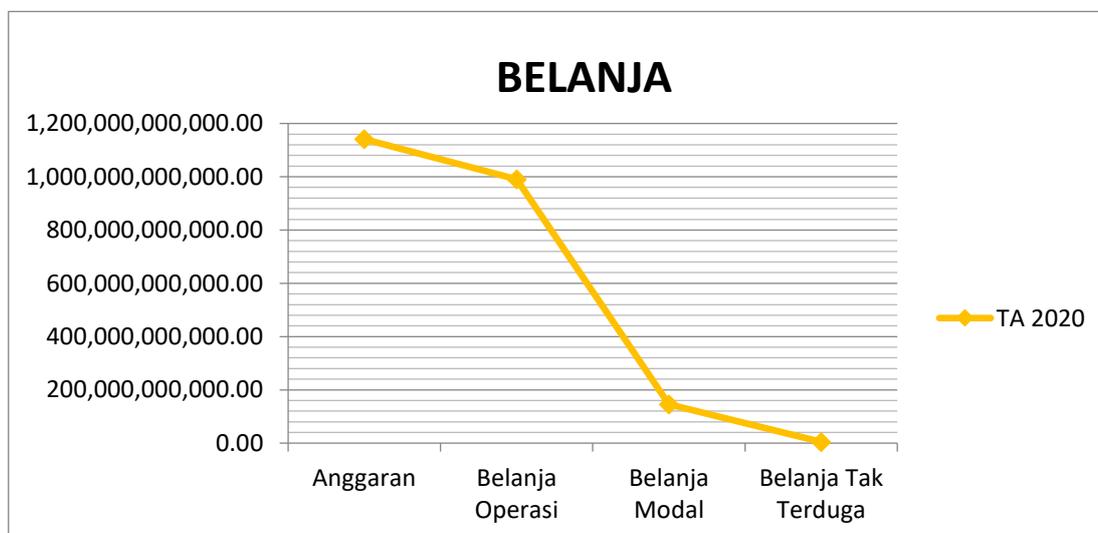
Tabel III.1 Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	123,11
Pendapatan Pajak Daerah	51.960.117.000,00	60.672.648.246,45	116,77
Pendapatan Retribusi Daerah	7.542.425.000,00	8.218.105.256,00	108,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000,00	4.806.743.535,90	108,57
Lain-Lain PAD yang Sah	62.567.462.000,00	82.032.348.722,11	131,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	94,74
Bagi Hasil Pajak	68.789.506.000,00	46.960.833.204,00	68,27
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	65.401.755.900,00	55.788.531.415,00	85,30
Dana Alokasi Umum (DAU)	500.682.611.000,00	498.137.263.000,00	99,49
Dana Alokasi Khusus (DAK)	168.632.274.697,00	160.368.395.926,00	95,10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	111.747.740.000,00	111.747.740.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	111.747.740.000,00	111.747.740.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	50.082.355.700,00	59.568.265.950,94	118,94
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.082.355.700,00	59.568.265.950,94	118,94
Bantuan Keuangan	5.311.400.000,00	4.843.925.000,00	91,20
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.311.400.000,00	4.843.925.000,00	91,20

b. Belanja

Anggaran belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp1.140.863.689.098,23 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp990.053.335.880,03, belanja modal sebesar Rp146.173.948.438,20 dan belanja tak terduga sebesar Rp4.636.404.780,00.

Gambar III.3 Grafik Belanja TA 2020



Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp990.053.335.880,03 dan realisasi sebesar Rp887.667.309.983,50 atau 89,66%, yang terdiri dari:

Tabel III.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	468.637.709.510,01	420.696.684.957,94	89,77
Belanja Barang dan Jasa	479.445.039.170,02	428.928.679.230,56	89,46
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	37.660.587.200,00	35.015.292.795,00	92,98
Belanja Bantuan Sosial	4.310.000.000,00	3.026.653.000,00	70,22
Jumlah Belanja Operasi	990.053.335.880,03	887.667.309.983,50	89,66

Belanja Modal merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan program pada OPD yang hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada tahun 2020, belanja modal dianggarkan sebesar Rp146.173.948.438,20 dan terealisasi sebesar Rp133.634.821.447,52 atau 91,42%, yang terdiri dari:

Tabel III.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	445.000.000,00	144.421.000,00	32,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.602.765.713,20	54.209.532.248,00	92,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.404.672.925,00	60.097.868.448,99	93,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.607.992.800,00	18.188.903.369,53	84,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.113.517.000,00	994.096.381,00	89,28
Jumlah Belanja Modal	146.173.948.438,20	133.634.821.447,52	91,42

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.636.404.780,00 dan realisasi sebesar 1.373.694.400,00 atau 29,63%:

Tabel III.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tak Terduga	4.636.404.780,00	1.373.694.400,00	29,63
Jumlah Belanja Tak Terduga	4.636.404.780,00	1.373.694.400,00	29,63

c. Transfer

Anggaran transfer tahun 2020 sebesar Rp129.978.039.600,00 yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp5.950.254.200,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp124.027.785.400,00.

Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.950.254.200,00 dan realisasi sebesar Rp5.950.254.200,00.

Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp124.027.785.400,00 dan realisasi sebesar Rp124.027.785.400,00.

Tabel III.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer	129.978.039.600,00	129.978.039.600,00	100,00
Bagi hasil Pendapatan	5.950.254.200,00	5.950.254.200,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	5.196.011.700,00	5.196.011.700,00	100,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	754.242.500,00	754.242.500,00	100,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bantuan Keuangan	124.027.785.400,00	124.027.785.400,00	100,00
Bantuan Keuangan Ke Desa	124.027.785.400,00	124.027.785.400,00	100,00

d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

Tabel III.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	130.393.875.401,23	131.157.002.485,23	100,59
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	130.393.875.401,23	130.393.875.401,23	100,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	763.136.777,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	507.984.000,00	507.984.000,00	100,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	7.984.000,00	7.984.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	129.885.891.401,23	130.649.018.485,23	100,59
Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	114.642.548.458,61	0,00

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dari yang telah dianggarkan. Penurunan terutama pada dana-dana yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi yang terealisasi sebesar 96,58%. Dana transfer yang mengalami penurunan terutama bersumber dari dana bagi hasil pajak yang terealisasi sebesar 68,27% dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang terealisasi sebesar 85,30%.

Akan tetapi pendapatan yang bersumber dari PAD, realisasi melampaui target dari yang telah ditetapkan yaitu sebesar 123,11% terutama pendapatan dari pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target. Walaupun pada masa pandemi *covid-19* ini ada sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi akan tetapi secara keseluruhan tidak mempengaruhi dalam pemungutan pajak dan retribusi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Sosial
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Pangan dan Pertanian
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kecamatan Sungailiat
28. Kecamatan Belinyu

29. Kecamatan Riau Silip
30. Kecamatan Mendo Barat
31. Kecamatan Bakam
32. Kecamatan Puding Besar
33. Kecamatan Pemali
34. Kecamatan Merawang

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 2020 berpegang pada asumsi dasar sebagai dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansinya yang terdiri dari.

1. Kemandirian entitas yang berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
2. Kesenambungan entitas yang berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
3. Keterukuran dalam satuan uang yang berarti bahwa semua kegiatan yang disajikan dapat diukur dengan uang.

Pokok-pokok kebijakan akuntansi tersebut adalah:

1. Kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 - b. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

- f. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan
 - a. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.
 - b. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LRA diakui dalam periode berjalan pada saat uang kas diterima. Pendapatan dicatat sebesar uang kas yang diterima selama periode berjalan.
 - b. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan-LRA (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LRA. Pengembalian yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - d. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
 - e. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- f. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan- LO (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LO. Pengembalian yang terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
4. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya ditandatangani oleh pengguna anggaran dan diverifikasikan oleh PPK-SKPD.
 - b. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain yang Sah.
 - c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - d. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 5. Kebijakan Akuntansi Piutang
 - a. Piutang pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
 - b. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima direkening kas umum daerah.
 - c. Aset berupa piutang dineraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
 - d. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*netrealizablevalue*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan
 - e. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang
 - f. Pendapatan diterima di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, apabila transaksi dilaksanakan pada tanggal 15 dan atau dibawah tanggal tersebut, maka dicatat pada bulan yang sama, tetapi apabila transaksi dilakukan setelah tanggal 15 maka dicatat pada bulan berikutnya
 - g. Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2) Kurang lancar, apabila umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
 - 3) Diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen);
 - 4) Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen);
- h. Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2) Kurang lancar, apabila setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen)
 - 3) Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen)
 - 4) Macet, apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)
- i. Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi :
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen)
 - 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen)
 - 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen)
 - 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penyisihan Piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)
- j. Piutang Transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan :
- 1) Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - 2) Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar
6. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- a. Persediaan diakui:
- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya beindah.
 - b. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian,
 - 2) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - 3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - c. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
 - d. Dalam hal persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
 - e. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada pengurus barang
 - f. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - g. Pemerintah Kabupaten Bangka mencatat persediaan secara periodik, dimana jika terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, maka angka yang di akui adalah angka menurut *stock opname*.
7. Kebijakan Akuntansi Investasi
- a. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
 - b. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - 2) Metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - d. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - 1) Tanah.
 - 2) Peralatan dan Mesin.
 - 3) Gedung dan Bangunan.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - 5) Aset Tetap Lainnya.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- b. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud.
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dibagi ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Pengeluaran untuk alat berat, konstruksi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Pengeluaran aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku peustakaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan dalam *on face* neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai aset *extra comptable*.
- e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- h. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

- j. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - k. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - l. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata guna mendapatkan nilai penyusutan per bulan.
 - m. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 - n. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - o. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku peustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - p. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
9. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - b. Suatu bendaberwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - c. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke posaset tetap yang bersangkutan jika kriteriaberkutini terpenuhi:
 - 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
 - d. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
10. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
- a. Aset tak berwujud meliputi:
 - 1) Piranti lunak (*software*) komputer;
 - 2) lisensi dan *franchise*;
 - 3) hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
 - 4) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 5) aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - 6) aset tak berwujud dalam pengerjaan.
 - b. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - 1) kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dimasa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
 - 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

- c. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
- d. Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud.
- e. Umur atau masa manfaat dan/atau tarif amortisasi aset tak berwujud barang milik daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :
 - 1) Aset tak berwujud yang diperoleh secara internal ataupun pihak lainnya atas nama pemerintah daerah, maka ditetapkan umur atau masa manfaatnya 5 (lima) tahun dan batas kapitalisasi adalah 2 (dua) tahun
 - 2) Aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal, maka ditetapkan umur atau masa manfaatnya berdasarkan lisensi/perijinan penggunaan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam rangka mengoperasikan aset tidak berwujud tersebut. Apabila tidak diketahui lisensinya, maka aset tidak berwujud tersebut tidak dilakukan amortisasi.
- f. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straightline method*).
- g. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.
- h. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - 1) Meningkatkan fungsi *software*; dan
 - 2) Meningkatkan efisiensi *software*.

11. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (duabelas) bulan dan lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- c. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- f. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

12. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- a. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- b. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- f. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- g. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- j. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- k. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- m. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

- n. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019
- a. BLUD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) ke BUD dan BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).
 - b. Pejabat penandatanganan SP3BP adalah PA/KPA pada OPD.
 - c. Untuk OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis yang berstatus BLUD yang mana melakukan penunjukan pemimpin BLUD berdasarkan aturan yang berlaku maka wewenang penandatanganan SP3BP ada di pemimpin BLUD yang bertindak sebagai KPA.
 - d. Periode penyampaian SP3BP ke BUD adalah setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - e. SP3BP dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.
 - f. SP3BP disampaikan ke BUD dengan melampirkan :
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh PA / KPA;
 - 2) Berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan OPD;
 - 3) Bukti pengembalian uang dan pendapatan langsung (apabila menurut peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
 - 4) Fotokopi rekening Koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan uang dan pendapatan langsung.
 - g. BUD menerbitkan SP2BP berdasarkan SP3BP yang diajukan oleh OPD setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP.
 - h. Pengujian terhadap SP3BP meliputi:
 - 1) memeriksa kelengkapan lampiran penyampaian SP3BP;
 - 2) memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - 3) memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3BP dengan SPTJ; dan
 - 4) mencocokkan tanda tangan PA/KPA pada SP3BP dan tanda tangan PA/KPA pada SPTJ dengan *specimen* tanda tangan.
14. Kebijakan Akuntansi Belanja Dana BOS APBN berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019
- a. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS APBN yang digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) BOS APBN ke PPKD selaku BUD.
 - b. SP2B BOS APBN dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.
 - c. Periode penyampaian SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD dilakukan satu kali dalam tiga bulan (per triwulan).

- d. Penyampaian SP2B BOS APBN sebagaimana dimaksud dengan melampirkan :
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan Negeri;
 - 2) Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN; dan
 - 3) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana BOS APBN (ditandatangani dan di cap oleh pejabat yang berwenang).
 - e. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) BOS APBN berdasarkan SP2B BOS APBN yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.
 - f. SPB BOS APBN diterbitkan setelah dilakukan pengujian administrasi terhadap SP2B BOS APBN.
 - g. Pengujian secara administrasi meliputi :
 - 1) memeriksa kesesuaian kelengkapan lampiran;
 - 2) memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja sumber dana BOS APBN;
 - 3) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - 4) memeriksa jumlah belanja BOS APBN tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BOS APBN;
 - 5) memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP2B BOS APBN dengan SPTJ; dan
 - 6) mencocokkan tanda tangan Penggua Anggaran pada SP2B dengan specimen tanda tangan.
15. Kebijakan Akuntansi Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2019
- a. Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD.
 - b. Atas Pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa barang/jasa/surat berharga.
 - c. Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh OPD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS.
 - d. Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian.
 - e. Pengujian MPHL-BJS meliputi :
 - 1) memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud;
 - 2) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - 3) menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan specimen tandatangan;
 - 4) mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam SPTMHL;
 - 5) menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan
 - 6) memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan khusus: pemberian nomor dalam bab ini disesuaikan dengan kode rekening akun.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka selama satu periode pelaporan yaitu tahun anggaran 2020.

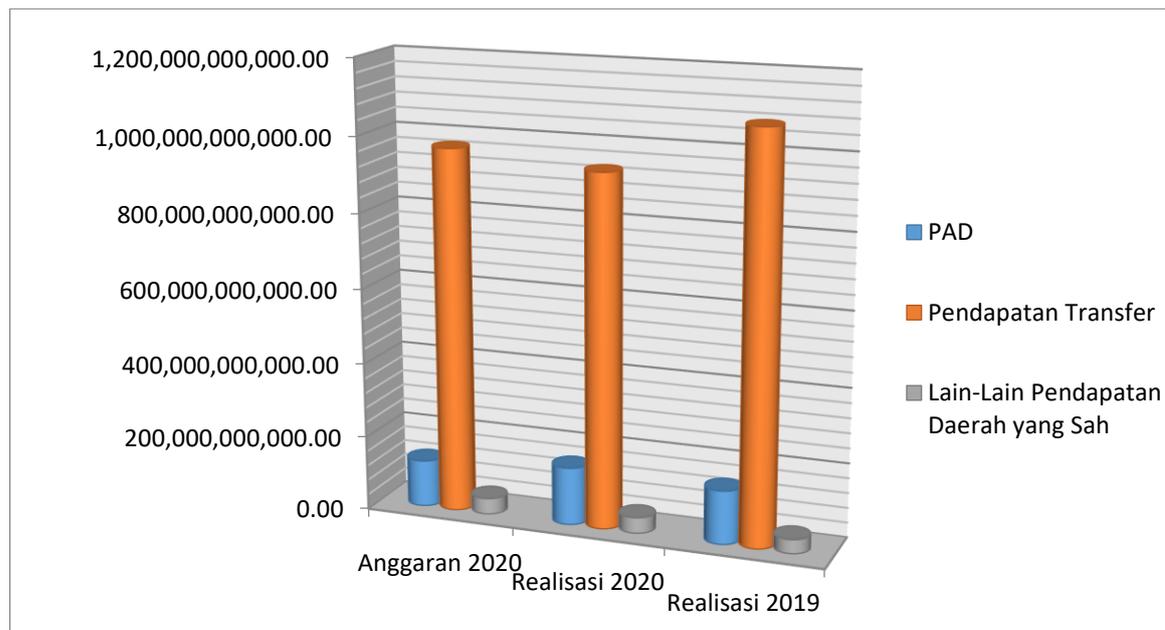
4. PENDAPATAN

Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.140.955.837.297,00 dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.136.647.395.404,40 atau 99,62%. Jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp1.258.858.376.953,78 terjadi penurunan sebesar 9,71%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pendapatan Asli Daerah	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	123,11	144.668.128.852,62	7,65
Pendapatan Transfer	970.647.643.297,00	937.414.954.495,94	96,58	1.075.408.393.302,76	(12,83)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	43.810.690.000,00	43.502.595.148,00	99,30	38.781.854.798,40	12,17
Total	1.140.955.837.297,00	1.136.647.395.404,40	99,62	1.258.858.376.953,78	(9,71)

Gambar V.1 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah



Melihat grafik di atas, maka dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagian besar bersumber dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 82,47%.

4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

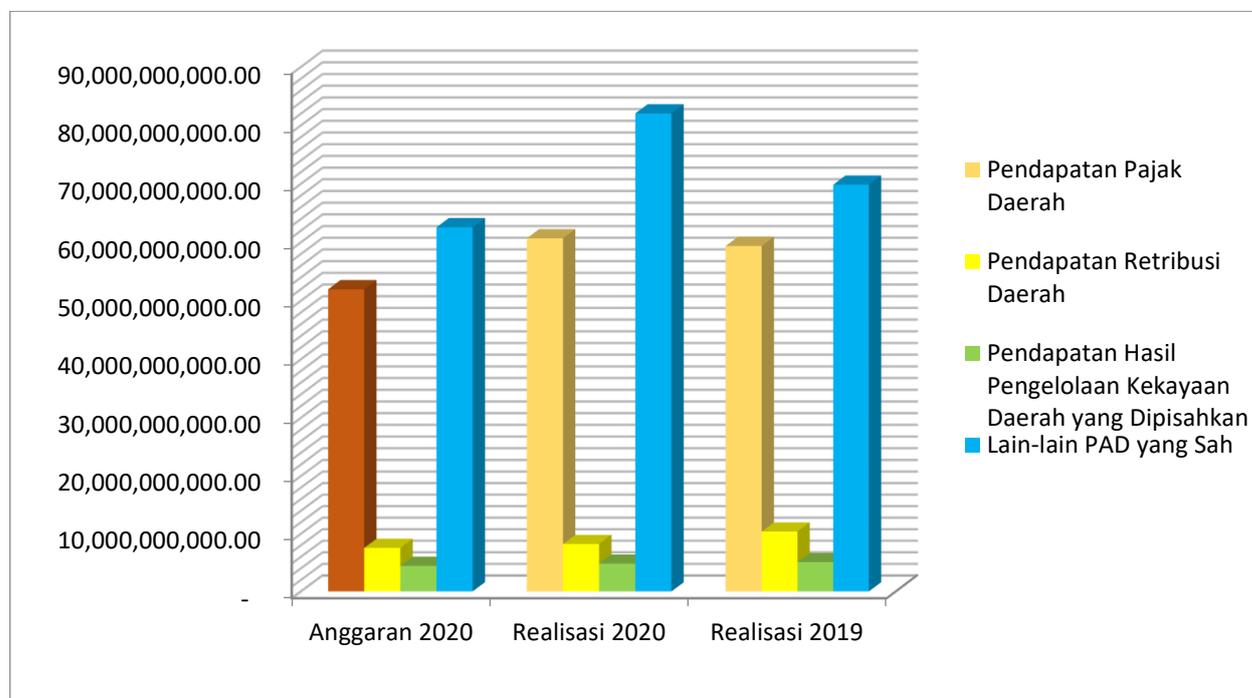
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp126.497.504.000,00 dengan realisasi Rp155.729.845.760,46 atau 123,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp144.668.128.852,62, maka terjadi kenaikan sebesar 7,65% (penjelasan lebih lanjut pada halaman berikut).

Tabel V.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pendapatan Pajak Daerah	51.960.117.000,00	60.672.648.246,45	116,77	59.371.242.190,48	2,19
Pendapatan Retribusi Daerah	7.542.425.000,00	8.218.105.256,00	108,96	10.377.273.660,00	(20,81)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.427.500.000,00	4.806.743.535,90	108,57	5.078.294.605,00	(5,35)
Lain-lain PAD yang Sah	62.567.462.000,00	82.032.348.722,11	131,11	69.841.318.397,14	17,46
Total	126.497.504.000,00	155.729.845.760,46	123,11	144.668.128.852,62	7,65

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

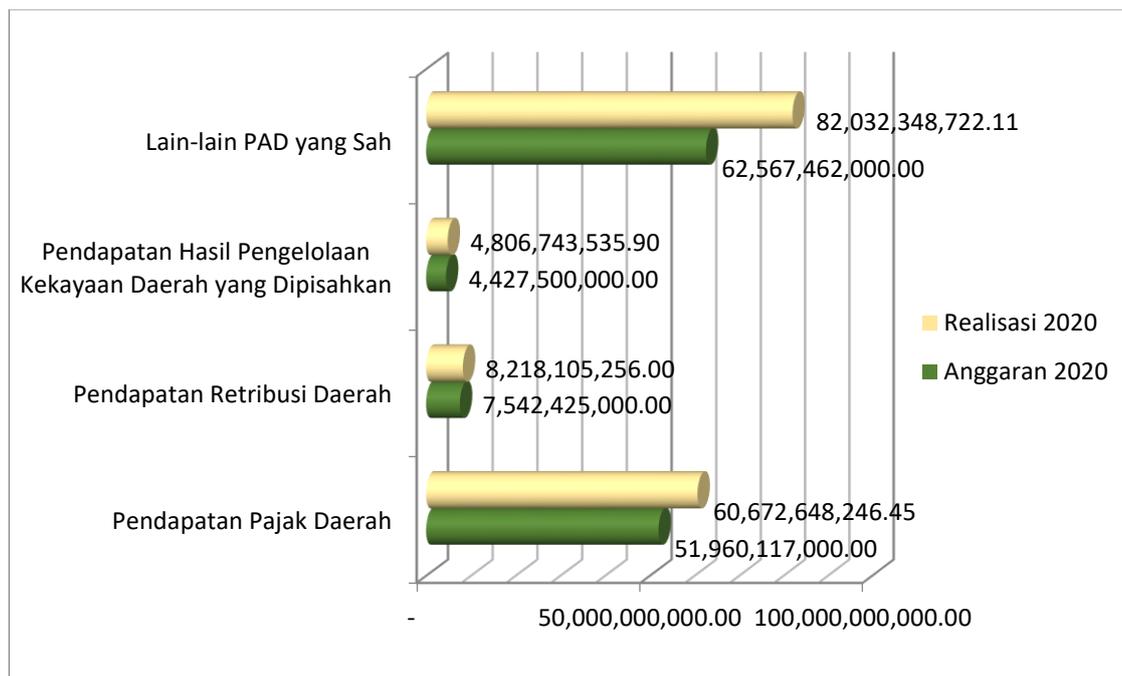
Gambar V.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020



Berdasarkan grafik di atas, Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen terbesar pendukung Pendapatan Asli Daerah. Namun realisasi tersebut bersumber dari pendapatan BLUD Dinkes senilai Rp.67.689.946.625,00, sehingga Kabupaten Bangka tidak dapat menggunakan pendanaan tersebut untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikarenakan peruntukan penggunaan dana tersebut terbatas hanya untuk BLUD saja.

Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar V.3 Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020



4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp51.960.117.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.672.648.246,45 atau 116,77% dan tahun 2019 sebesar Rp55.841.928.250,00 dengan realisasi sebesar Rp59.371.242.190,48 atau 106,32%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

4.1.1.06. Pajak Hotel

Dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp384.938.899,35 atau 109,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.06.01	Hotel	338.600.000,00	358.204.899,35	105,79	1.141.149.772,65
4.1.1.06.03	Losmen/Rumah	5.700.000,00	22.304.000,00	391,30	29.800.000,00
4.1.1.06.04	Gubuk Pariwisata	5.700.000,00	4.430.000,00	77,72	7.220.000,00
	Jumlah	350.000.000,00	384.938.899,35	109,98	1.178.169.772,65

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.178.169.772,65 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu Rp793.230.873,30 hal ini dikarenakan adanya pandemi

covid-19, yang mana kondisi ini menurunkan aktivitas industri perhotelan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan Surat Edaran No:973/2253/BPKAD-VI/2020 tentang Pemberian Relaksasi/Stimulus Pajak Daerah. (LampiranII.10)

4.1.1.07. Pajak Restoran

Dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.928.853.495,65 atau 192,89%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.07.01	Restoran	496.250.000,00	703.761.048,65	141,82	1.264.151.443,35
4.1.1.07.02	Rumah Makan	503.750.000,00	1.225.092.447,00	243,19	1.738.152.305,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.928.853.495,65	192,89	3.002.303.748,35

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.002.303.748,35,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.073.450.252,70 dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang menurunkan tingkat pendapatan restoran, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan Surat Edaran No:973/2253/BPKAD-VI/2020 tentang Pemberian Relaksasi/Stimulus Pajak Daerah. (LampiranII.10)

4.1.1.08. Pajak Hiburan

Anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp62.416.150,00 atau 89,17%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari /Busana	8.500.000,00	10.000.000,00	117,65	0,00
4.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klub malam dan Sejenisnya	51.784.700,00	28.839.400,00	55,69	133.332.100,00
4.1.1.08.07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	1.500.000,00	408.250,00	27,22	5.268.525,00
4.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	2.400.000,00	14.552.500,00	606,35	74.639.500,00
4.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa & Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.815.300,00	8.616.000,00	148,16	18.820.250,00
	Jumlah	70.000.000,00	62.416.150,00	89,17	232.060.375,00

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp232.060.375,00 terjadi penurunan sebesar Rp169.644.225,00, hal ini dikarenakan adanya beberapa objek pajak hiburan yang tidak bisa dipungut lagi karena adanya Surat Edaran No:973/2253/BPKAD-VI/2020 tentang Pemberian Relaksasi/Stimulus Pajak Daerah (LampiranII.10)

4.1.1.09. Pajak Reklame

Anggaran sebesar Rp735.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.164.703.153,00 atau 158,46%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	590.500.000,00	821.628.882,00	139,14	942.531.216,00
4.1.1.09.02	Reklame Kain	54.500.000,00	140.882.562,00	258,50	54.184.864,00
4.1.1.09.11	Reklame Sinar	90.000.000,00	202.191.709,00	224,66	181.325.310,00
	Jumlah	735.000.000,00	1.164.703.153,00	158,46	1.178.041.390,00

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.178.041.390,00 terjadi penurunan sebesar Rp13.338.237,00. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan wajib pajak yang mau memperpanjang pemasangan reklame dikarenakan kondisi pandemi *covid-19*, dan berlakunya Surat Edaran No:973/2253/BPKAD-VI/2020 tentang Pemberian Relaksasi/Stimulus Pajak Daerah. (Lampiran II.10)

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan

Anggaran sebesar Rp31.580.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.105.551.149,09 atau 108,00%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.10.01	PPJ Dihasilkan sendiri	31.485.000.000,00	33.817.947.298,00	107,41	32.006.434.889,00
4.1.1.10.02	PPJ Sumber Lain	95.000.000,00	287.603.851,09	302,74	234.137.287,99
	Jumlah	31.580.000.000,00	34.105.551.149,09	108,00	32.240.572.176,99

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp32.240.572.176,99 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp1.864.978.972,10. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif dari PT PLN Persero karena masih berlakunya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan PT.PLN Persero (Tbk) Wilayah Bangka Belitung No:671.11/264/BP2RD/2019 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Pemerintah Daerah. (Lampiran II.28)

4.1.1.11. Pajak Parkir

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp51.877.400,00 atau 103,75%, dengan rincian:

4.1.1.11.01. Pajak Parkir

Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp51.877.400,00 atau 103,75%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp59.694.800,00 terjadi penurunan sebesar yaitu Rp7.817.400,00. Hal ini disebabkan karena ada beberapa titik parkir yang tutup/tidak dipungut lagi.

4.1.1.12. Pajak Air Tanah

Anggaran sebesar Rp145.500.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp221.737.539,00 atau 152,40%, dengan rincian:

4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah

Anggaran sebesar Rp145.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp221.737.539,00 atau 152,40%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp215.177.338,46 terjadi kenaikan sebesar Rp6.560.200,54. Hal ini disebabkan karena adanya *monitoring* dan *survey* lapangan serta pendataan ulang kepada wajib pajak untuk usaha air isi ulang mengenai penghitungan penambahan penggunaan volume air tanah dari masing-masing wajib pajak air tanah.

4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan anggaran sebesar Rp12.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.279.000,00 atau 143,36%, dengan rincian:

4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran sebesar Rp12.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.279.000,00 atau 143,36%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp18.300.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp21.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa objek pajak sarang burung walet yang tidak berproduksi lagi dan kurangnya permintaan akan sarang burung walet serta harga sarang burung walet mengalami fluktuasi.

4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.091.815.624,36 atau 141,84%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.1.14.15	Kaolin	318.441.900,00	225.750.000,00	70,89	443.660.000,00
4.1.1.14.24	Pasir Kuarsa	2.436.600.000,00	4.388.876.330,00	180,12	2.121.627.000,00
4.1.1.14.28	Tanah Serap	676.958.100,00	622.538.920,00	91,96	1.482.345.436,00
4.1.1.14.30	Tanah Liat	21.000.000,00	30.282.028,80	144,20	62.632.583,20
4.1.1.14.38	Batu Pecah/Batu split	420.000.000,00	650.186.215,00	154,81	888.081.082,00
4.1.1.14.39	Pasir Urug Bangunan	49.000.000,00	71.916.405,00	146,77	89.458.930,00
4.1.1.14.41	Pasir Pasangan	378.000.000,00	285.238.250,00	75,46	618.454.102,08
4.1.1.14.42	Zirkon	700.000.000,00	817.027.475,56	116,72	598.426.071,75
	Jumlah	5.000.000.000,00	7.091.815.624,36	141,84	6.304.685.205,03

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp6.304.685.205,03 terjadi kenaikan Rp787.130.419,33. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan skala penambangan dan produktivitas dari beberapa jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di lokasi penambangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dengan anggaran sebesar Rp7.016.867.000,00 dan realisasi Rp7.225.061.011,00 atau 102,97% dengan rincian:

4.1.1.15.01. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Anggaran sebesar Rp7.016.867.000,00 dan realisasi Rp7.225.061.011,00 atau 102,97%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.145.651.937,00 terjadi kenaikan sebesar Rp79.409.074,00 yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, dilakukannya intensifikasi penagihan, adanya sumbangan pendapatan dari pemutakhiran data yang telah dilakukan masing-masing desa di setiap kecamatan, adanya penyetoran denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya dari wajib pajak serta adanya Surat Edaran Bupati untuk pelunasan PBB bagi ASN di Wilayah Kabupaten Bangka maupun tenaga honorer.

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dengan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.417.414.825,00 atau 140,29%, dengan rincian:

4.1.1.16.01. BPHTB-Pemindahan Hak

Anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi Rp8.417.414.825,00 atau 140,29%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.796.585.447,00 terjadi kenaikan sebesar Rp620.829.378,00 dikarenakan adanya program-program yang diluncurkan oleh pemerintah dan meningkatnya proses jual beli, tukar menukar, hibah dan waris.

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp7.542.425.000,00 dengan realisasi Rp8.218.105.256,00 atau 108,96%. Jika dibandingkan penerimaan retribusi tahun 2019 yaitu Rp10.377.273.660,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.159.168.404,00 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	97.501.377,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	525.000.000,00	543.285.000,00	103,48	532.550.000,00
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	568.500.000,00	576.500.000,00	101,41	643.000.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.150.000.000,00	1.214.737.000,00	105,63	1.362.934.000,00
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	225.000.000,00	208.830.000,00	92,81	231.635.000,00
4.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	20.000.000,00	32.700.000,00	163,50	29.400.000,00
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	10.700.000,00	214,00	0,00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	173.950.000,00	94.013.340,00	54,05	747.150.071,00
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	376.100.000,00	462.701.816,00	123,03	1.420.479.913,00
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	1.403.376.000,00	1.474.210.000,00	105,05	1.548.378.000,00
4.1.2.18	Retribusi Terminal	3.000.000,00	3.438.000,00	114,60	8.562.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	710.000.000,00	790.255.000,00	111,30	1.243.138.800,00
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan	63.000.000,00	78.592.000,00	124,75	90.028.000,00
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	353.399.000,00	392.156.000,00	110,97	322.350.000,00
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.000.000,00	92.623.000,00	114,35	82.611.000,00
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000,00	2.034.106.100,00	116,23	1.797.503.299,00
4.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	20.000.000,00	55.000.000,00	275,00	120.000.000,00
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00	2.175.000,00
4.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	20.000.000,00	60.934.000,00	304,67	32.716.000,00
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	93.600.000,00	92.124.000,00	98,42	64.921.200,00
	Jumlah	7.542.425.000,00	8.218.105.256,00	108,96	10.377.273.660,00

4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran sebesar Rp525.000.000,00 dengan realisasi Rp543.285.000,00 atau 103,48%, dengan rincian:

4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah Dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sampah Sementara

Anggaran sebesar Rp525.000.000,00 dengan realisasi Rp543.285.000,00 atau 103,48%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp532.550.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.735.000,00, hal ini dikarenakan adanya potensi penambahan objek retribusi baru.

4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Anggaran sebesar Rp568.500.000,00 dengan realisasi Rp576.500.000,00 atau 101,41%, dengan rincian:

4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Anggaran sebesar Rp568.500.000,00 dengan realisasi Rp576.500.000,00 atau 101,41%.

Realisasi penerimaan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2019 yaitu Rp643.000.000,00. Terjadinya penurunan sebesar Rp66.500.000,00, dikarenakan penurunan penawaran nilai lelang. Pada tahun 2019 dengan anggaran Rp500.000.000,00 realisasi yang didapat dari hasil penawaran tertinggi lelang adalah Rp643.000.000,00, sedangkan pada tahun 2020 realisasi dari hasil lelang senilai Rp576.500.000,00. Untuk tahun 2020 masih menggunakan titik parkir yang sama dengan tahun 2019.

- 4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar
Anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.214.737.000,00 atau 105,63% dengan rincian:
- 4.1.2.06.03. Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
Anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.214.737.000,00 atau 105,63%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.362.934.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp148.197.000,00. Hal ini dikarenakan banyak pedagang tidak aktif lagi berjualan di masa pandemi *covid-19*.
- 4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.830.000,00 atau 92,81% dengan rincian:
- 4.1.2.07.03. Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Minibus
Anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.830.000,00 atau 92,81%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp231.635.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp22.805.000,00, hal ini dikarenakan minimnya kegiatan audit/inspeksi (razia) kendaraan di jalan raya yang berdampak banyaknya kendaraan angkutan yang tidak memenuhi persyaratan layak uji atau perpanjangan uji kendaraan bermotor dan terjadinya pengurangan anggaran kegiatan audit dan inspeksi (razia).
- 4.1.2.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp32.700.000,00 atau 163,50%, dengan rincian:
- 4.1.2.09.01. Penyediaan Peta Dasar (Garis)
Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp32.700.000,00 atau 163,50%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp29.400.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.300.000,00, hal ini dikarenakan banyaknya investor maupun perorangan yang mengajukan kegiatan melalui rekomendasi atau informasi tata ruang terkait kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungailiat.
- 4.1.2.12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.700.000,00 atau 214%, dengan rincian:
- 4.1.2.12.01. Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
Anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.700.000,00 atau 214%.

Retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan objek retribusi baru di tahun anggaran 2020.

- 4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Anggaran sebesar Rp173.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.013.340,00 atau 54,05% dengan rincian:

4.1.2.14.01. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
Anggaran sebesar Rp173.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.013.340,00 atau 54,05%.

Realisasi penerimaan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2019 sebesar Rp747.150.071,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp653.136.731,00, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari *provider tower* telekomunikasi dalam kewajiban membayar retribusi menara dan tidak ada anggaran APBD untuk tim *monitoring* masalah pemungutan *tower* telekomunikasi.

- 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Anggaran sebesar Rp376.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp462.701.816,00 atau 123,03% dengan rincian:

4.1.2.15.02. Laboratorium
Anggaran sebesar Rp376.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp462.701.816,00 atau 123,03%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.420.479.913,00 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp957.778.097,00. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi *covid-19* yang mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat yang menggunakan jasa sewa PKD dan adanya kebijakan pemerintah daerah dengan terbitnya SK Bupati No:188.45/1123/DINKES/2020, tentang Penetapan Penerima Bantuan Sertifikasi *Laik Higiene* Sanitasi Depot Air Minum, sebagai stimulus perekonomian di masa pandemi *covid-19* (*Lampiran II.29*).

- 4.1.2.16. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
Anggaran sebesar Rp1.403.376.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.474.210.000,00 atau 105,05% dengan rincian:

4.1.2.16.01. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai JenisBarang
Anggaran sebesar Rp1.403.376.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.474.210.000,00 atau 105,05%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.548.378.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp74.168.000,00. Penurunan nilai retribusi terjadi karena sistem pemungutan Retribusi Pasar Grosir, /Pertokoan menggunakan sistem karcis yang dipungut setiap hari oleh juru pungut, karena adanya wabah pandemi *covid-19* berdampak pada berkurangnya jumlah

pedagang yang aktif berjualan.

4.1.2.18. Retribusi Terminal

Anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.438.000,00 atau 114,60% dengan rincian:

4.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

Anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.438.000,00 atau 114,60%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp8.562.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.124.000,00, hal ini dikarenakan retribusi terminal ini hanya dilakukan di terminal Belinyu, sedangkan terminal Sungailiat belum dapat dipungut karena belum memenuhi aspek legalitas sebagai terminal.

4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Anggaran sebesar Rp710.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp790.255.000,00 atau 111,30% dengan rincian:

4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Anggaran sebesar Rp710.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp790.255.000,00 atau 111,30%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.243.138.800,00 terjadi penurunan sebesar Rp452.883.800,00, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi *covid-19* sehingga membuat masyarakat menghindari keramaian.

4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan

Anggaran sebesar Rp63.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.592.000,00 atau 124,75%. dengan rincian:

4.1.2.21.01. Pelayanan Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong

Anggaran sebesar Rp63.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.592.000,00 atau 124,75%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp90.028.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp11.436.000,00, hal ini dikarenakan pandemi *covid-19* yang menyebabkan perekonomian masyarakat tidak stabil sehingga daya beli masyarakat berkurang.

4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga

Anggaran sebesar Rp353.399.000,00 dan realisasi sebesar Rp392.156.000,00 atau 110,97% dengan rincian:

4.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi

Anggaran sebesar Rp353.399.000,00 dan realisasi sebesar Rp392.156.000,00 atau 110,97%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp322.350.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp69.806.000,00, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembayaran di muka melalui lelang/penawaran.

- 4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Anggaran sebesar Rp81.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.623.000,00 atau 114,35% dengan rincian:
4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha
Anggaran sebesar Rp81.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.623.000,00 atau 114,35%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp82.611.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.012.000,00, hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat yang menyukai ikan air tawar sehingga produksi benih juga meningkat.
- 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan realisasi Rp2.034.106.100,00 atau 116,23%, dengan rincian:
4.1.2.26.01. Pemberian Izin untuk Mendirikan Suatu Bangunan
Anggaran sebesar Rp1.750.000.000,00 dengan realisasi Rp2.034.106.100,00 atau 116,23%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.797.503.299,00 terjadi kenaikan sebesar Rp236.602.801,00, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya membuat IMB serta proses pembuatan IMB yang semakin mudah melalui program OSS secara *online*.
- 4.1.2.27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.000.000,00 atau 275,00% dengan rincian:
4.1.2.27.01. Pemberian Izin Untuk Melakukan Penjualan Minuman Beralkohol
Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.000.000,00 atau 275,00%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp120.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp65.000.000,00, hal ini dikarenakan dilakukan penutupan tempat penjualan di masa pandemi *covid-19*.
- 4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek
Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.200.000,00 atau 80,00% dengan rincian:
4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.200.000,00 atau 80,00%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp2.175.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp975.000,00, hal ini dikarenakan keberadaan angkutan umum antar desa dalam kota sudah jauh berkurang sehingga mempengaruhi pendapatan izin trayek dan di masa pandemi *covid-19* masyarakat enggan untuk menggunakan angkutan umum.

4.1.2.30. Retribusi Izin Perikanan

Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.934.000,00 atau 304,67% dengan rincian:

4.1.2.32.01. Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.934.000,00 atau 304,67%

Dibandingkan realisasi tahun 2019, yaitu Rp32.716.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp28.218.000,00, hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan maupun perorangan yang membuka tambak udang Vanamei dikarenakan harga jual udang Vanamei yang relatif mahal, sehingga menjadi daya tarik bagi investor.

4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Anggaran sebesar Rp93.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.124.000,00 atau 98,42% dengan rincian:

4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Anggaran sebesar Rp93.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp92.124.000,00 atau 98,42%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp64.921.200,00 terjadi kenaikan sebesar Rp27.202.800,00, hal ini dikarenakan adanya beberapa perusahaan yang memperpanjang izin TKA, dikarenakan tidak dapat kembali/pulang ke negara asalnya dalam keadaan pandemi *covid-19*.

4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.806.743.535,90,00 atau 108,57% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.3 01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Anggaran sebesar Rp4.427.500.000,00 dengan realisasi Rp4.806.743.535,90,00 atau 108,57 % dengan rincian:

4.1.3 01.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Anggaran sebesar Rp4.400.000.000,00 dengan realisasi Rp4.770.575.858,90 atau 108,42 %.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp5.041.298.936,00 terjadi penurunan sebesar Rp270.723.077,10, dengan rincian sebagai berikut:

- Bank Sumsel Babel pada tahun 2020 sebesar Rp4.770.575.858,90,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar

Rp4.382.548.936,00 terjadi kenaikan Rp388.026.922,90 atau 8,85%.

- BPRS Bangka pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp658.750.000,00 terjadi penurunan Rp658.750.000,00 atau 100,00%. Realisasi Rp0,00 dikarenakan bank tersebut dalam kondisi pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.1.3 01.03. Deviden dari Jamkrida
 Anggaran sebesar Rp27.500.000,00 dengan realisasi Rp36.167.677,00 atau 131,52%.
 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp36.995.669,00 terjadi penurunan sebesar Rp827.992,00.

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp62.567.462.000,00 dengan realisasi Rp82.032.348.722,11 atau 131,11% yang terdiri dari:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	158.250.000,00	0,00	0,00	639.150.000,00
4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya	6.000.000,00	6.097.100,00	101,62	8.845.000,00
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	350.000.000,00	802.604.439,00	229,32	731.233.178,00
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	7.700.000.000,00	8.709.543.625,18	113,11	10.857.929.841,77
4.1.4.33	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	326.811.797,06	0,00	130.420.440,31
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	27.200.000,00	364.969.481,11	1341,80	95.671.610,01
4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	18.900.740,00	0,00	59.243.247,00
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	792.805.483,51	0,00	1.030.634.328,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	3.850.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
4.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.255.698.971,00	112,78	2.556.047.307,59
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	52.322.162.000,00	67.689.946.625,00	129,37	53.530.460.436,00
4.1.4.24.	Pendapatan Lainnya	0,00	1.064.970.460,25	0,00	199.503.008,46
	Jumlah	62.567.462.000,00	82.032.348.722,11	131,11	69.841.318.397,14

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
 Anggaran sebesar Rp158.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, karena penundaan jadwal lelang yang seharusnya dilakukan tahun 2020 akan dilaksanakan pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.01.02. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin
Anggaran sebesar Rp158.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.4.01.06. Hasil Kelebihan Retribusi Kekayaan Daerah
Anggaran sebesar Rp50.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

4.1.4.02. Hasil Penjualan Aset Lainnya
Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.097.100,00 atau 101,62% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.01.01. Hasil Penjualan Aset Lainnya
Anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.097.100,00 atau 101,62%.

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro
Dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi Rp802.604.439,00 atau 229,32%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp731.233.178,00. Kenaikan yang terjadi sebesar Rp71.371.261,00. Rincian realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.4.03.01	Jagir Kas Daerah	280.000.000,00	701.037.677,00	250,37	657.827.049,00
4.1.4.03.05	Jagir Rekening Dinas-dinas	70.000.000,00	101.566.762,00	145,10	73.406.129,00
	Jumlah	350.000.000,00	802.604.439,00	229,32	731.233.178,00

4.1.4.04. Pendapatan Bunga
Dengan anggaran sebesar Rp7.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.709.543.625,18 atau 113,11% dengan rincian:

4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito
Anggaran sebesar Rp7.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.709.543.625,18 atau 113,11%.

Dengan membandingkan realisasi tahun 2019 yaitu Rp10.857.929.841,77 terjadi penurunan terhadap pendapatan bunga deposito sebesar Rp2.148.386.216,59 yang disebabkan karena penurunan persentase bunga deposito. Pada tahun 2019 persentase bunga deposito sebesar 6,90% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,87%.

4.1.4.07. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Dengan anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp326.811.797,06 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.07.10. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp326.811.797,06 atau 0,00%.

Dengan membandingkan realisasi tahun 2019 yaitu Rp130.420.440,31 terjadi kenaikan terhadap pendapatan denda

atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp196.391.356,75. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kontraktor/pihak ketiga yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Berikut merupakan rincian kontrak dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:

Tanggal Setor Denda	Rincian Kontrak (OPD)	Nilai Kontrak (Rp)	Besaran Denda (Rp)
24 Sept 2020	PT Anugrah Argon Medica(Dinas Kesehatan) No SP:027/30/BMHP/AAM/SP/APBD/V/RSUD-DB/2020 tanggal 11 Mei 2020: Pembelian Alere Afinion HbA1c	3.940.800,00	193.099,20
07 Okt 2020	PT Millenium Pharmacon International (Dinas Kesehatan) No. SP:027/10/BMHP/MPI/SP/APBD/IV/RSUD-DB/2020 tanggal 23 April 2020: Pembelian Guedel Airway 2 dan Gudel Airway 3	936.250,00	20.603,00
26 Nov 2020	PT Anugrah Argon Medica(Dinas Kesehatan) No SP:027/22/BMHP/AAM/SP/APBD/IV/RSUD-DB/2020 tanggal 29 April 2020: Pembelian Syringe SlipTip with 8D Precision Glide Needle 3 ml dan Vacutainer K3E 5,4 mg Plus Blood Collection Tube	88.598.000,00	1.683.362,00
01 Des 2020	PT Rajawali Nusindo (Dinas Kesehatan) No. SP:027/01/BMHP/MHJ/SP/APBD/III/RSUD-DB/2020 tanggal 27 Maret 2020: Pembelian Aura I	274.156.706,00	12.793.980,00
08 Des 2020	CV Graha Saga Arroyan (Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga), Addendum Surat Perjanjian No:425/347/SP-ADD/PPK/APBD/X/Dindikpora/I/2020 tanggal 10 Oktober 2020: Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 1 Sungailiat (Peningkatan), SMPN 4 Sungailiat, dan SMPN 2 Pemali	2.302.489.000,00	101.310.000,00
10 Des 2020	CV Hijoacest Synergy (Dinas Kesehatan) No:009.1/SPK-CCO-RSUD-BLY/DAK/2020 tanggal 18 Juli 2020: Paket Pengerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi IPAL (DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Rujukan TA.2020)	184.848.000,00	2.587.872,00
14 Des 2020	CV Ishana Kokka (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) -Surat No:027/001.27.02/PPK/DINPMP2KUKM/2020 tanggal 01 Oktober 2020: Pengadaan Peralatan Rumah Tangga -Surat No:027/001.28.03/PPK/DINPMP2KUKM/2020 tanggal 07 Oktober 2020: Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur	306.055.640,00 403.883.700,00	7.108.444,86
23 Des 2020	PT Titani Abadi Utama (Dinas Kesehatan) No.SP:027/113/ALKES/TAU/SP/APBDP/XI/RSUD-DB/2020 tanggal 11 November 2020: Pembelian Manual Delivery Bed, 3 Crank Gatch Bed, dll	168.863.750,00	1.350.910,00
29 Des 2020	PT Garuda Catur Kencana (Dinas Kesehatan) Surat Perjanjian Nomor:445/16/PPK.IBS/RSUD-DB/2020 tanggal 15 Desember 2020: Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IBS Terpadu/Ruang Operasi	14.796.732.000,00	173.129.408,00
30 Des 2020			26.634.118,00
		Jumlah	326.811.797,06

4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak

Dengan anggaran sebesar Rp27.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp364.969.481,11 atau 1341,80%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.4.08.06	Pajak Hotel	500.000,00	692.749,00	138,55	2.731.336,80

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.4.08.07	Pajak Restoran	7.000.000,00	24.078.908,94	343,98	26.806.042,96
4.1.4.08.08	Pajak Hiburan	100.000,00	94.640,00	94,64	463.500,00
4.1.4.08.09	Pajak Reklame	800.000,00	17.688.225,62	2.211,03	23.570.771,78
4.1.4.08.10	Pajak Penerangan Jalan	150.000,00	2.111.398,59	1.407,60	279.177,96
4.1.4.08.11	Pajak Parkir	100.000,00	139.600,00	139,60	16.410,00
4.1.4.08.12	Pajak Air Tanah	500.000,00	2.723.342,40	544,67	1.647.720,30
4.1.4.08.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000,00	3.960,00	7,92	0,00
4.1.4.08.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000,00	62.423.055,56	416,15	40.156.650,21
4.1.4.08.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.000.000,00	255.013.601,00	8.500,45	0,00
	Jumlah	27.200.000,00	364.969.481,11	1.341,80	95.671.610,01

4.1.4.09. Pendapatan Denda Retribusi

Dengan anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp18.900.740,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.09.01. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp2.526.000,00 atau 0,00%.

4.1.4.09.18. Pendapatan Denda Retribusi Terminal
Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp13.765.040,00 atau 0,00%.

4.1.4.09.26. Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp2.609.700,00 atau 0,00%.

4.1.4.13. Pendapatan dari Pengembalian

Dengan anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp792.805.483,51,00 atau 0,00%, dengan rincian berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.1.4.13.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	146.580.279,00	0,00	222.615.586,00
4.1.4.13.06.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja Pegawai	0,00	646.225.204,51	0,00	808.018.742,00
4.1.4.13.11.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak / Retribusi Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	792.805.483,51,00	0,00	1.030.634.328,00

4.1.4.15. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Dengan anggaran sebesar Rp3.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.15.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Anggaran sebesar Rp3.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dikarenakan tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh pihak ketiga.

4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.255.698.971,00 atau 112,78%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

4.1.4.16.02. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan

Anggaran sebesar

Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi

Rp2.255.698.971,00 atau 112,78%. Realisasi yang melebihi target dikarenakan pada pelaksanaan sewa tahun anggaran 2020 terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kontrak perjanjian sewa lebih dari 1 tahun sehingga berdampak pada penerimaan yang harus dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan lamanya jangka waktu sewa.

4.1.4.18. Pendapatan BLUD

Dengan anggaran sebesar Rp52.322.162.000,00

dan realisasi sebesar Rp67.689.946.625,00 atau 129,37%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Dianggarkan sebesar

Rp52.322.162.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp67.689.946.625,00 atau 129,37%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Puskesmas Kenanga	826.509.652,00
2	Puskesmas Belinyu	1.644.142.032,00
3	Puskesmas Gunung Muda	400.771.835,00
4	Puskesmas Sungailiat	1.452.782.766,00
5	Puskesmas Baturusa	747.407.683,00
6	Puskesmas Pemali	926.731.188,00
7	Puskesmas Bakam	988.870.696,00
8	Puskesmas Riau Silip	1.190.289.960,00
9	Puskesmas Puding Besar	1.005.970.508,00
10	Puskesmas Petaling	1.287.611.962,00
11	Puskesmas Sinar Baru	396.041.323,00
12	Puskesmas Penagan	546.924.292,00
13	RSUD DR. Eko Maulana Ali	662.121.462,00
14	RSUD Depati Bahrin	55.463.816.315,00
15	RSUD Sjafrie Rachman	149.954.951,00
Total		67.689.946.625,00

4.1.4.24. Pendapatan Lainnya

Dengan anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.064.970.460,25 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.24.01. Pendapatan Lainnya

Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.064.970.460,25 atau 0,00% yang merupakan rekening penampung jika dalam APBD TA 2020 tidak dianggarkan atas penerimaan tersebut atau penerimaan yang belum diketahui peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1.	06-Jan-20	Pendapatan Lainnya	000591268/2	4.529,00
2.	06-Mar-20	Pendapatan Lainnya	Set. Dari GPL	0,50
3.	23-Mar-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
4.	30-Mar-20	Pendapatan Lainnya	Set. Pencairan SP2D	2.400,00
5.	02-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set.UPTD Belinyu	137.221,00
6.	06-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
7.	08-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set.Tutup Rekening UPTD Dikbud ke Merawang	842.228,00
8.	15-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set. Rek Tutup UPTD DIKNUD Kec.Sungailiat	136.640,00
9.	15-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
10.	24-Apr-20	Pendapatan Lainnya	Set. Rek Tutup KUPTD Riau Silip	1.322.304,00
11.	20-Mei-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
12.	19-Jun-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
13.	30-Jun-20	Pendapatan Lainnya	Set.DBH Cukai Hasil Tembakau	3.300,00
14.	14-Jul-20	Pendapatan Lainnya	Set.GPL	0,50
15.	25-Aug-20	Pendapatan Lainnya	Set.GPL	0,50
16.	17-Sept-20	Pendapatan Lainnya	000018226/627452	34.680,00
17.	09-Okt-20	Pendapatan Lainnya	Set.PT PLN PERSERO	2.900,00
18.	12-Okt-20	Pendapatan Lainnya	Set. Pembayaran a.n Sian	20.000.000,00
19.	12-Okt-20	Pendapatan Lainnya	Set. Penyetoran Silpa Dana Desa Tahun 2016-2018	1,07
20.	27-Okt-20	Pendapatan Lainnya	000004058/9	239.400,00
21.	16-Nov-20	Pendapatan Lainnya	Set. Kompensasi NGB Tanah Matras	16.099.200,00
22.	19-Nov-20	Pendapatan Lainnya	Set. Kompensai HGB Tanah Matras KGB No.11 a.n Haryanto Widjaya	7.000.000,00
23.	23-Nov-20	Pendapatan Lainnya	000927907/9	107.524,00
24.	23-Nov-20	Pendapatan Lainnya	Set. PT GPL	0,50
25.	26-Nov-20	Pendapatan Lainnya	000021966/360003	199.600,00
26.	14-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum Pedesaan)	982.000.000,00
27.	14-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Gunung Pelawan Lestari	0,50
28.	22-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Pengembalian Pembiayaan Koperasi dari BPRS Syariah Babel	15.295.000,00
29.	22-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Pengembalian Pembiayaan Koperasi dari BPRS Syariah Babel	434.512,05
30.	23-Dec-20	Pendapatan Lainnya	000881300/8 8813 Supriyadi	9.531.241,00
31.	30-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Dari IPKAP	8.400.000,00
32.	30-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Bagi Hasil Rek IPKAP	20.178,49
33.	30-Dec-20	Pendapatan Lainnya	Set. Bagi Hasil Rek KCSR	3.157.596,64
Jumlah				1.064.970.460,25

4.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp970.647.643.297,00 dengan realisasi Rp937.414.954.495,94 atau 96,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pemerintah Pusat	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	94,74	853.236.403.540,00
2.	Pemerintah Pusat - Lainnya	111.747.740.000,00	111.747.740.000,00	100,00	119.427.990.000,00
3.	Pemerintah Daerah Lainnya	50.082.355.700,00	59.568.265.950,94	118,94	72.958.179.327,42
4.	Bantuan Keuangan	5.311.400.000,00	4.843.925.000,00	91,20	29.785.820.435,34
	Jumlah	970.647.643.297,00	937.414.954.495,94	96,58	1.075.408.393.302,76

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp803.506.147.597,00 dengan realisasi Rp761.255.023.545,00 atau 94,74% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

Dengan anggaran sebesar Rp68.789.506.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.960.833.204,00 atau 68,27%. Berdasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020. Nilai realisasi yang rendah dikarenakan adanya *refocusing* dan penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dan perkembangan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (*Lampiran II.32 dan II.17*). Rincian dana bagi hasil sebagai berikut:

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan

Anggaran sebesar Rp60.080.822.000,00 dengan realisasi Rp39.136.557.358,00 atau 65,14%.

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DBH PBB Bagi Rata Tahap I	797.069.100,00
2.	DBH PBB Migas Triwulan 2 (Bagian Daerah)	366.291.750,00
3.	DBH PBB Migas Triwulan 2 (Biaya Pemungutan)	12.734.750,00
4.	DBH PBB Migas Triwulan 1 (Bagian Daerah)	293.033.400,00
5.	DBH PBB Migas Triwulan 1 (Biaya Pemungutan)	10.187.800,00
6.	Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan tahun 2018	3.795.733.949,00
7.	Kurang Bayar DBH PBB Migas tahun 2018 (Bagian Daerah)	7.036.690,00
8.	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya tahun 2018 (Bagian Daerah)	37.346.498,00
9.	Kurang Bayar DBH PBB Non Migas Lainnya tahun 2018 (Bagian Daerah)	25.440.382.911,00
10.	Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan tahun 2018 (Biaya Pemungutan)	168.699.287,00
11.	Kurang Bayar DBH PBB Migas tahun 2018 (Biaya Pemungutan)	244.329,00
12.	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Tahun 2018 (Biaya Pemungutan)	1.296.753,00
13.	Kurang Bayar DBH PBB Non Migas Lainnya Tahun 2018 (Biaya Pemungutan)	883.346.629,00

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
14.	Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Tahun 2018	585.974.334,00
15.	DBH PBB Sektor Lainnya, Minggu ke 1-8 TA 2020(Bagian Daerah)	11.472.400,00
16.	DBH PBB Non Migas Lainnya, Minggu ke 1-8 TA 2020 (Bagian Daerah)	2.120.148.400,00
17.	DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA 2020 (Bagian Daerah)	54.910.000,00
18.	DBH PBB Perkebunan, Minggu ke 1-8 TA 2020	1.272.674.000,00
19.	DBH PBB Migas, Triwulan ke-3 TA 2020	512.808.450,00
20.	DBH PBB Sektor Lainnya, Minggu ke 1-8 TA 2020 (Biaya Pemungutan)	398.400,00
21.	DBH PBB Non Migas Lainnya, Minggu ke 1-8 TA 2020(Biaya Pemungutan)	73.712.400,00
22.	DBH PBB Perhutanan, Minggu ke 1-8 TA 2020 (Biaya Pemungutan)	2.097.200,00
23.	DBH PBB Perkebunan, Minggu ke 1-8 TA 2020(Biaya Pemungutan)	56.556.000,00
24.	DBH PBB Migas, Triwulan ke-3 TA 2020(Biaya Pemungutan)	17.828.650,00
25.	DBH PBB Bagi Rata, Tahap ke-2 TA 2020	1.328.448.500,00
26.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2019	2.999.528,00
27.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Tahun 2019	340.823.633,00
28.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Tahun 2019	9.065.028,00
29.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Tahun 2019	924.382.535,00
30.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Tahun 2019	8.854.054,00
	Jumlah	39.136.557.358,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Anggaran sebesar Rp8.708.673.000,00 dengan realisasi Rp7.824.275.846,00 atau 89,84%.

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
1.	DBH PPh Pasal 21 Triwulan ke-2 TA 2020	1.352.848.400,00
2.	DBH PPh Pasal 25/29 OP Triwulan ke-2 TA 2020	98.486.200,00
3.	DBH PPh Pasal 21 Triwulan ke-1 TA 2020	1.352.848.400,00
4.	DBH PPh Pasal 25/29 OP Triwulan ke-1 TA 2020	98.486.200,00
5.	Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 Tahun 2018	114.971.196,00
6.	Alokasi Sementara KB DBH PPh Pasal 21 TA 2019	997.770.307,00
7.	Kurang Bayar DBH PPh PPh Pasal 25/29 OPTahun 2018	5.710.358,00
8.	Alokasi Sementara KB DBH PPh Pasal 25/29 OPTA 2019	333.548.278,00
9.	DBH PPh Pasal 21, Triwulan ke-3 TA 2020	1.309.619.600,00
10.	DBH PPh Pasal 25/29 OP, Triwulan ke-3 TA 2020	95.339.200,00
11.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2019	1.768.639.047,00
12.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29 OPTahun 2019	296.008.660,00
	Jumlah	7.824.275.846,00

4.2.1.01.05. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 Anggaran sebesar Rp11.000,00 dengan realisasi
 Rp0,00 atau 0,00%.

Berikut merupakan tabel rincian realisasi Bagi Hasil Pajak tahun
 2020:

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Pemerintah Pusat	803.506.147.597,00	761.255.023.545,00	94,74
2.	Pemerintah Pusat - Lainnya	111.747.740.000,00	111.747.740.000,00	100,00
3.	Pemerintah Daerah Lainnya	50.082.355.700,00	59.568.265.950,94	118,94
4.	Bantuan Keuangan	5.311.400.000,00	4.843.925.000,00	91,20
	Jumlah	970.647.643.297,00	937.414.954.495,94	96,58

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
 Dengan anggaran sebesar Rp65.401.755.900,00 dengan realisasi
 sebesar Rp55.788.531.415,00 atau 85,30%, dengan rincian
 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	38.752.400,00	19.024.150,00	49,09	53.036.905,00
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	5.241.704.700,00	3.526.307.200,00	67,27	2.975.227.298,00
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & IuranEksplotasi (Royalti)	57.585.931.000,00	50.550.458.026,00	87,78	109.504.682.107,00
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00	0,00	689.340.471,00
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.592.655.100,00	788.276.289,00	49,49	0,00
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	942.712.700,00	904.465.750,00	95,94	392.248.339,00
	Jumlah	65.401.755.900,00	55.788.531.415,00	85,30	113.614.535.120,00

4.2.1.03. Dana Alokasi Umum
 Anggaran sebesar Rp500.682.611.000,00 dengan realisasi
 Rp498.137.263.000,00 atau 99,49%, dengan rincian sebagai
 berikut :

4.2.1.03.01. Dana Alokasi Umum
 Anggaran sebesar Rp500.682.611.000,00 dengan
 realisasi Rp498.137.263.000,00 atau 99,49%.

4.2.1.04. Dana Alokasi Khusus
 Anggaran sebesar Rp168.632.274.697,00 dengan realisasi
 Rp160.368.395.926,00 atau 95,10%. Dibandingkan dengan

realisasi tahun 2019 sebesar Rp163.138.662.324,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.770.266.398,00. Rincian realisasi tahun 2020 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4.2.1.04.01	Infrastruktur Jalan	10.925.983.000,00	10.206.949.000,00	93,42	18.830.230.357,00
4.2.1.04.02	Infrastruktur Irigasi	2.901.972.000,00	0,00	0,00	2.210.599.000,00
4.2.1.04.03	Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.523.861.000,00
4.2.1.04.04	Infrastruktur Sanitasi	1.213.414.000,00	1.213.414.000,00	100,00	4.933.557.950,00
4.2.1.04.07	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.444.715.000,00	1.357.215.000,00	93,94	1.598.625.000,00
4.2.1.04.08	Kesehatan	54.118.510.000,00	53.174.900.505,00	98,26	18.627.978.761,00
4.2.1.04.09	Kelautan dan Perikanan	1.068.482.896,00	973.381.896,00	91,10	1.227.533.450,00
4.2.1.04.12	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	1.050.550.000,00
4.2.1.04.13	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	608.613.000,00
4.2.1.04.15	Pertanian	336.045.000,00	336.045.000,00	100,00	1.083.259.800,00
4.2.1.04.18	Pendidikan	13.845.777.000,00	13.600.053.572,00	98,23	36.306.824.776,00
4.2.1.04.25	Bantuan Operasional Kesehatan	16.116.740.801,00	17.486.265.453,00	108,50	12.488.372.739,00
4.2.1.04.26	Akreditasi Rumah Sakit	1.209.452.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.27	Jaminan Persalinan	1.168.175.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.28	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.193.000.000,00	4.597.800.000,00	88,54	5.580.600.000,00
4.2.1.04.29	Tunjangan Profesi Guru	51.733.304.000,00	51.733.304.000,00	100,00	51.715.420.080,00
4.2.1.04.30	Tambahan Penghasilan Guru	637.750.000,00	637.750.000,00	100,00	424.135.000,00
4.2.1.04.31	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.376.584.000,00	1.509.087.275,00	63,50	1.062.201.484,00
4.2.1.04.33	Air Minum dan Sanitasi	1.690.000.000,00	1.546.985.379,00	91,54	2.270.440.000,00
4.2.1.04.34	Pariwisata	1.120.720.000,00	489.834.000,00	43,71	521.736.000,00
4.2.1.04.36	Layanan Administrasi Kependudukan	1.114.292.000,00	1.088.052.846,00	97,65	1.074.123.927,00
4.2.1.04.38	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	417.358.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	168.632.274.697,00	160.368.395.926,00	95,10	163.138.662.324,00

4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan sebesar Rp111.747.740.000,00 dengan realisasi Rp111.747.740.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp119.427.990.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp7.680.250.000,00. Hal ini disebabkan adanya pengurangan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020. Rincian realisasi tahun 2020 sebagai berikut:

4.2.2.03. Dana Penyesuaian

Anggaran sebesar Rp111.747.740.000,00 dengan realisasi Rp111.747.740.000,00 atau 100,00% dengan rincian:

4.2.2.03.03. Dana Insentif Daerah

Anggaran sebesar Rp50.257.407.000,00 dengan realisasi Rp50.257.407.000,00 atau 100,00%.

4.2.2.03.06. Dana Penyesuaian Lainnya

Anggaran sebesar Rp61.490.333.000,00 dengan realisasi Rp61.490.333.000,00 atau 100,00%

merupakan dana desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan rincian penyaluran per desa terdapat pada lampiran II.33.

4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp50.082.355.700,00 dengan realisasi Rp59.568.265.950,94 atau 118,94%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp72.958.179.327,42 terjadi kenaikan sebesar Rp13.389.913.376,48. Hal ini disebabkan adanya penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya (KB tahun 2019) sebesar Rp12.382.592.453,24 sedangkan kurang bayar tahun 2020 sebesar Rp13.812.399.230,91. Rincian realisasi tahun 2020 sebagai berikut:

4.2.3.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran sebesar Rp50.082.355.700,00 dengan realisasi Rp59.568.265.950,94 atau 118,94%. Dengan rincian sebagai berikut:

4.2.3.01.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran sebesar Rp50.082.355.700,00 dengan realisasi Rp59.568.265.950,94 atau 118,94%.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	13.747.376.464,41
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.297.292.864,71
Pajak Rokok	12.719.226.119,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.682.850.705,15
Pajak Air Permukaan	1.121.519.797,67
Jumlah	59.568.265.950,94

4.2.4 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp5.311.400.000,00 dengan realisasi Rp4.843.925.000,00 atau 91,20%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp29.785.820.435,34 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp24.941.895.435,34. Hal ini disebabkan sesuai dengan kemampuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian realisasi tahun 2020 sebagai berikut:

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Anggaran sebesar Rp5.311.400.000,00 dengan realisasi Rp4.843.925.000,00 atau 91,20%. dengan rincian:

4.2.4.01.01. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Anggaran sebesar Rp5.311.400.000,00 dengan realisasi Rp4.843.925.000,00 atau 91,20%.

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
DABA Dinas Lingkungan Hidup	199.925.000,00
DABA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.308.000.000,00
DABA Sekretariat Daerah	336.000.000,00
Jumlah	4.843.925.000,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp43.810.690.000,00 dengan realisasi Rp43.502.595.148,00 atau 99,30% dengan rincian sebagai berikut :

4.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran sebesar Rp1.235.690.000,00 dengan realisasi Rp940.135.148,00 atau 76,08% dengan rincian:

4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Anggaran sebesar Rp1.235.690.000,00 dengan realisasi Rp940.135.148,00 atau 76,08%.

4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Anggaran sebesar Rp1.235.690.000,00 dengan realisasi Rp940.135.148,00 atau 76,08%, merupakan pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk uang yang disalurkan kepada OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

4.3.4. Hibah Dana BOS

Anggaran sebesar Rp42.575.000.000,00 dengan realisasi Rp42.562.460.000,00 atau 99,97% dengan rincian:

4.3.4.01. Hibah Dana BOS

Anggaran sebesar Rp42.575.000.000,00 dengan realisasi Rp42.562.460.000,00 atau 99,97%.

4.3.4.01.01. Hibah Dana BOS

Anggaran sebesar Rp42.575.000.000,00 dengan realisasi Rp42.562.460.000,00 atau 99,97%. (Lampiran II.7)

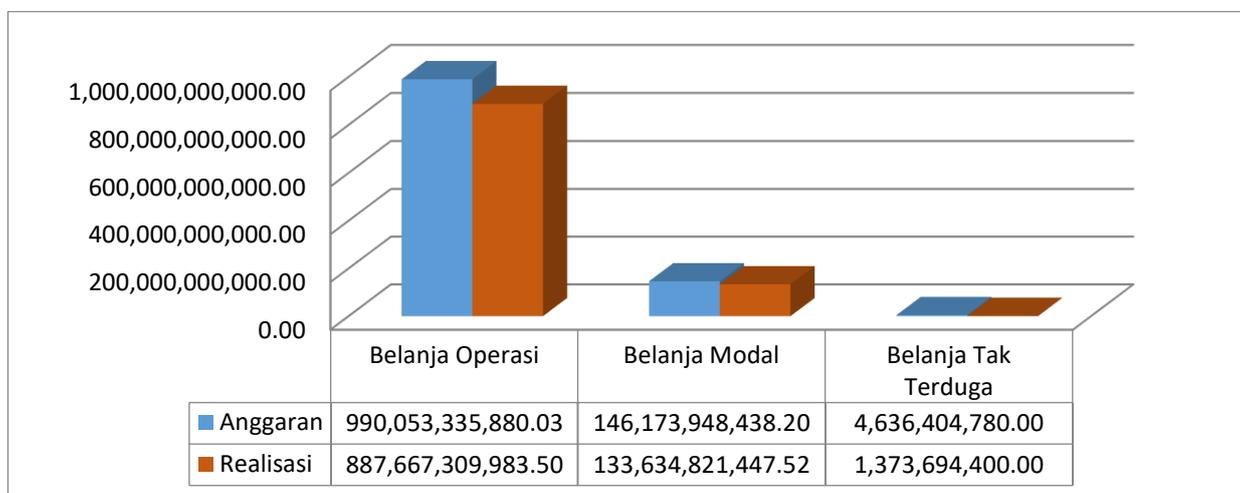
5. BELANJA

Belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.140.863.689.098,23 dengan realisasi sebesar Rp1.022.675.825.831,02 atau 89,64%. Realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp1.106.321.263.978,50.

Tabel V.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Operasi	990.053.335.880,03	887.667.309.983,50	89,66	916.655.251.633,79
2.	Belanja Modal	146.173.948.438,20	133.634.821.447,52	91,42	189.666.012.344,71
3.	Belanja Tak Terduga	4.636.404.780,00	1.373.694.400,00	29,63	0,00
	Jumlah	1.140.863.689.098,23	1.022.675.825.831,02	89,64	1.106.321.263.978,50

Gambar V.4 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020



5.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi untuk tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp990.053.335.880,03 dengan realisasi sebesar Rp887.667.309.983,50 atau 89,66% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp916.655.251.633,79. Dengan rincian:

5.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp468.637.709.510,01 dengan realisasi Rp420.696.684.957,94 atau 89,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp433.542.911.119,63, maka terjadi penurunan sebesar Rp12.846.226.161,69. Rincian realisasi tahun 2020 sebagai berikut:

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

Anggaran sebesar Rp310.704.611.910,01 dengan realisasi sebesar Rp275.516.496.019,00 atau 88,67%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	212.929.335.500,00	198.426.597.797,00	93,19	202.350.942.374,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	21.995.369.200,00	18.390.042.167,00	83,61	18.888.209.188,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.026.241.000,00	8.077.838.650,00	89,49	8.304.862.250,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.478.200.000,00	11.028.058.070,00	88,38	11.461.278.000,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.249.000.000,00	3.179.038.211,00	74,82	3.159.892.565,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.301.400.000,00	9.676.884.960,00	72,75	10.005.942.733,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.078.055.000,00	4.594.204.406,00	90,47	4.487.984.706,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	182.916.950,01	2.799.204,00	1,53	3.100.562,00
5.1.1.01.09	Iuran jaminan Kesehatan	17.553.074.300,00	11.302.922.313,00	64,39	5.707.017.620,00
5.1.1.01.10	Uang Paket	67.032.000,00	67.032.000,00	100,00	66.958.500,00
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	29.780.100,00	25.395.300,00	85,28	22.456.875,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	46.588.500,00	43.299.900,00	92,94	39.691.575,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	28.683.900,00	25.395.300,00	88,54	22.456.875,00
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	100,00	7.201.425,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	221.067.000,00	26.278.350,00	11,89	29.460.374,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3.456.000.000,00	2.595.600.000,00	75,10	2.693.750.000,00
5.1.1.01.17	Tunjangan Uang Duka Wafat/Tewas	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	5.355.000,00	0,00	0,00	298.935.000,00
5.1.1.01.19	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	184.800.000,00
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.088.728.000,00	408.227.903,00	37,50	414.654.364,00
5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian	2.332.788.000,00	1.229.535.388,00	52,71	1.242.526.819,00
5.1.1.01.25	Tunjangan Transportasi	6.412.941.360,00	6.207.890.000,00	96,80	5.117.000.000,00
	Jumlah	310.704.611.910,01	275.516.496.019,00	88,67	274.509.121.805,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Anggaran sebesar Rp147.418.400.500,00 dengan realisasi Rp135.291.994.918,00 atau 91,77%. dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.02.02.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	53.383.304.000,00	50.303.619.420,00	94,23	56.012.603.740,00
5.1.1.02.03.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	258.000.000,00	253.850.000,00	98,39	198.625.000,00
5.1.1.02.04.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	9.631.750.000,00	8.295.305.500,00	86,12	7.192.150.000,00
5.1.1.02.05.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	84.145.346.500,00	76.439.219.998,00	90,84	82.043.842.632,00
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	0,00	0,00	0,00	4.274.420.257,00
	Jumlah	147.418.400.500,00	135.291.994.918,00	91,77	149.721.641.629,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Anggaran sebesar Rp6.018.490.000,00 dengan realisasi Rp5.944.800.000,00 atau 98,78% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.03.01.	Belanja Tunjangan Komisi Intesif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00	4.410.000.000,00
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	505.990.000,00	505.800.000,00	99,96	515.760.000,00
5.1.1.03.03.	Tunjangan Reses	1.102.500.000,00	1.029.000.000,00	93,33	682.500.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	Pimpinan dan Anggota				
	Jumlah	6.018.490.000,00	5.944.800.000,00	98,78	5.608.260.000,00

- 5.1.1.04 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 Anggaran sebesar Rp208.855.624,00 dengan realisasi Rp208.855.624,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.1.04.05 Belanja Biaya Pemungutan PBB
 Anggaran sebesar Rp208.855.624,00 dengan realisasi Rp208.855.624,00 atau 100,00%
- 5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
 Anggaran sebesar Rp2.389.150.226,00 dengan realisasi Rp2.223.311.846,94 atau 93,06% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.1.05.06. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
 Anggaran sebesar Rp17.500.000,00 dengan realisasi Rp12.093.750,00 atau 69,11%.
- 5.1.1.05.07 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
 Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp26.718.750,00 atau 53,44%.
- 5.1.1.05.08 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
 Anggaran sebesar Rp3.500.000,00 dengan realisasi Rp2.742.870,94 atau 78,37%.
- 5.1.1.05.09 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame.
 Anggaran sebesar Rp36.750.000,00 dengan realisasi Rp36.487.500,00 atau 99,29%.
- 5.1.1.05.10 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
 Anggaran sebesar Rp1.579.000.000,00 dengan realisasi Rp1.526.800.000,00 atau 96,69%.
- 5.1.1.05.11 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
 Anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dengan realisasi Rp687.500,00 atau 27,50%.
- 5.1.1.05.12 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
 Anggaran sebesar Rp7.275.000,00 dengan realisasi Rp6.477.500,00 atau 89,04%.
- 5.1.1.05.13 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
 Anggaran sebesar Rp637.500,00 dengan realisasi Rp191.250,00 atau 30,00%.
- 5.1.1.05.14 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan realisasi Rp223.125.000,00 atau 89,25%.
- 5.1.1.05.15 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Anggaran sebesar Rp203.371.976,00 dengan realisasi Rp185.357.726,00 atau 91,14%.
- 5.1.1.05.16 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Anggaran sebesar Rp238.615.750,00 dengan realisasi Rp202.630.000,00 atau 84,92%.
- 5.1.1.06. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Anggaran sebesar Rp377.121.250,00 dengan realisasi Rp319.361.550,00 atau 84,68% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.1.06.33. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum
Anggaran sebesar Rp165.071.250,00 dengan realisasi Rp127.166.746,00 atau 77,04%.
- 5.1.1.06.34 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
Anggaran sebesar Rp136.646.000,00 dengan realisasi Rp117.601.404,00 atau 86,06%.
- 5.1.1.06.35 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
Anggaran sebesar Rp75.404.000,00 dengan realisasi Rp74.593.400,00 atau 98,92%.
- 5.1.1.07. Belanja Uang Lembur
Anggaran sebesar Rp1.521.080.000,00 dengan realisasi Rp1.191.865.000 atau 78,36% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.1.1.07.01. Belanja Uang Lembur PNS
Anggaran sebesar Rp718.287.500,00 dengan realisasi Rp596.967.500,00 atau 83,11%.
- 5.1.1.07.02. Belanja Uang Lembur Non PNS
Anggaran sebesar Rp802.792.500,00 dengan realisasi Rp594.897.500,00 atau 74,10%.

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp479.445.039.170,02 dengan realisasi Rp428.928.679.230,56 atau 89,46%. Dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp449.677.367.947,16 terjadi penurunan sebesar Rp20.748.688.716,60. Rincian belanja tahun 2020 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.600.876.936,22	18.519.008.645,08	94,48	9.834.965.314,80

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	13.630.163.189,00	13.504.622.624,00	99,08	13.369.885.730,10
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.327.974.694,00	25.609.397.644,29	84,44	30.534.380.595,85
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	21.409.703.246,00	18.924.611.673,09	88,39	5.511.062.663,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.771.850.910,00	6.692.818.571,00	86,12	7.437.538.348,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.203.062.287,00	5.619.375.432,90	90,59	6.540.986.714,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	851.310.000,00	722.179.000,00	84,83	2.038.202.750,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	322.400.000,00	205.100.000,00	63,62	385.435.000,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	727.180.000,00	436.320.000,00	60,00	1.773.268.500,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.962.368.300,00	14.493.239.567,00	85,44	17.485.587.104,50
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	433.213.000,00	429.589.700,00	99,16	597.613.500,00
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	742.863.000,00	724.614.839,00	97,54	898.744.662,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	458.700.000,00	448.098.000,00	97,69	1.727.738.250,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.798.627.942,00	59.802.143.475,00	89,53	87.686.218.517,33
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.327.072.275,00	5.879.057.676,00	92,92	37.770.328.035,76
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultasi	1.192.831.000,00	359.225.500,00	30,12	648.393.132,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	29.024.182.050,00	27.535.032.598,40	94,87	21.307.678.494,77
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	147.100.000,00	98,07	328.500.000,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.095.606.000,00	847.497.951,00	40,44	2.759.322.300,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	13.323.755.000,00	12.006.151.000,00	90,11	13.417.781.250,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	114.180.649.500,00	110.434.346.512,00	96,72	99.723.299.767,00
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy	840.160.000,00	641.010.234,00	76,30	2.254.859.984,40
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	5.910.776.000,00	5.885.033.500,00	99,56	4.371.225.000,00
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	28.960.860.096,80	23.584.652.329,00	81,44	24.422.000.167,65
5.1.2.31	Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD	7.707.285.221,00	7.060.753.452,00	91,61	7.455.621.357,00
5.1.2.33	Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BLUD	52.901.162.523,00	40.365.548.150,80	76,30	44.234.865.929,00
5.1.2.36	Belanja Bantuan Sosial Barang	27.190.106.000,00	24.819.186.156,00	91,28	1.427.824.880,00
5.1.2.40	Belanja Beasiswa	3.400.300.000,00	3.232.965.000,00	95,08	3.453.840.000,00
5.1.2.42	Belanja Barang/Jasa BOP	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
5.1.2.43	Belanja Barang/Jasa BOP Kesetaraan (DAK Non Fisik)	0,00	0,00	0,00	252.000.000,00
	Jumlah	479.445.039.170,02	428.928.679.230,56	89,46	449.677.367.947,16

5.1.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
 Anggaran sebesar Rp19.600.876.936,22 dengan
 realisasi Rp18.519.008.645,08 atau 94,48% dengan rincian
 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.187.760.333,22	4.980.362.009,08	96,00	4.935.871.243,00
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	686.988.565,00	659.948.416,00	96,06	631.516.492,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	144.662.000,00	109.164.200,00	75,46	115.267.800,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan	1.502.018.650,00	1.462.107.935,00	97,34	1.201.467.134,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	dan Bahan Pembersih				
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.254.568.250,00	806.465.717,00	64,28	1.010.464.764,00
5.1.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	5.220.000,00	58,00	0,00
5.1.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	0,00	0,00	1.984.000,00
5.1.2.01.09.	Belanja Oksigen (O2)	26.130.000,00	19.007.600,00	72,74	26.744.000,00
5.1.2.01.10.	Belanja Dekorasi/Spanduk	128.850.000,00	98.667.400,00	76,58	116.792.000,00
5.1.2.01.11.	Belanja Dokumentasi	20.050.000,00	20.050.000,00	100,00	12.644.000,00
5.1.2.01.13.	Belanja KIT Pelatihan/Perlengkapan Rapat,Sosialisasi,Bintekdan Kursus	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	45.900.000,00
5.1.2.01.16.	Belanja Sarana /Kelengkapan Satgat UCS	10.376.371.638,00	10.121.621.868,00	97,54	1.355.134.821,00
5.1.2.01.24.	Belanja Bahan Untuk Fogging	2.302.000,00	1.270.000,00	55,17	2.302.000,00
5.1.2.01.25.	Belanja Buku Cek	19.065.000,00	3.350.000,00	17,57	8.300.000,00
5.1.2.01.26.	Belanja Reagon Lab	128.010.500,00	127.576.000,00	99,66	176.860.060,80
5.1.2.01.27.	Belanja Tropy/Plakat	62.700.000,00	62.405.000,00	99,53	176.204.000,00
5.1.2.01.28.	Belanja Peralatan dan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi	0,00	0,00	0,00	9.513.000,00
5.1.2.01.29.	Belanja Bahan Komputer	8.000.000,00	5.637.500,00	70,47	8.000.000,00
5.1.2.01.30.	Belanja Apar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.31.	Belanja Alas Lantai	3.600.000,00	2.400.000,00	66,67	0,00
5.1.2.01.32.	Belanja Peralatan Linen	10.000.000,00	3.780.000,00	37,80	0,00
	Jumlah	19.600.876.936,22	18.519.008.645,08	94,48	9.834.965.314,80

5.1.2.02. Belanja Bahan/Material
Dianggarkan sebesar Rp13.630.163.189,00 dengan
realisasi Rp13.504.622.624,00 atau 99,08% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	155.669.000,00	154.810.195,00	99,45	424.547.350,00
5.1.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	171.000.000,00	170.280.000,00	99,58	359.197.500,00
5.1.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.788.699.789,00	10.716.935.711,00	99,33	6.110.920.029,10
5.1.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	488.319.000,00	476.169.300,00	97,51	864.532.085,00
5.1.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.386.000,00	92,40	7.579.300,00
5.1.2.02.08.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	135.180.000,00	131.540.370,00	97,31	107.206.044,00
5.1.2.02.11.	Belanja Bahan Material Pelatihan	595.691.900,00	579.794.170,00	97,33	881.854.424,00
5.1.2.02.14.	Belanja Alat Olahraga	15.105.000,00	14.870.000,00	98,44	92.693.000,00
5.1.2.02.17.	Belanja Alat Dapur dan Rumah Tangga	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00	3.400.000,00
5.1.2.02.21.	Belanja Bahan Pakaian/Sandang	49.971.000,00	49.971.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.24.	Belanja Bahan /Material Alat Kesehatan	850.428.000,00	848.930.878,00	99,82	4.256.163.138,00
5.1.2.02.26.	Belanja Bahan/Material Bercorak Kesenian	225.125.000,00	222.821.000,00	98,98	49.541.000,00
5.1.2.02.28.	Belanja Bahan Baku Pembuatan Kemasan Produk	12.500.000,00	3.750.000,00	30,00	24.618.960,00
5.1.2.02.30.	Belanja Produk Bahan Uji Coba	33.900.000,00	33.900.000,00	100,00	65.648.900,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.02.38.	Belanja Pakan Ternak	96.124.500,00	91.437.000,00	95,12	93.025.000,00
5.1.2.02.46.	Belanja Perlengkapan Pendataan	0,00	0,00	0,00	28.959.000,00
5.1.2.02.48	Belanja Bahan/Alat Penanggulangan Bencana	7.950.000,00	6.527.000,00	82,10	0,00
	Jumlah	13.630.163.189,00	13.504.622.624,00	99,08	13.369.885.730,10

5.1.2.03. Belanja Jasa Kantor
 Dianggarkan sebesar Rp30.327.974.694,00 dengan realisasi
 Rp25.609.397.644,29 atau 84,44% dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.03.01.	Belanja Telepon	893.050.000,00	613.496.533,00	68,70	588.131.774,00
5.1.2.03.02.	Belanja Air	1.750.860.000,00	1.399.740.929,00	79,95	1.319.265.054,00
5.1.2.03.03.	Belanja Listrik	8.371.153.500,00	7.449.563.101,00	88,99	6.803.398.880,00
5.1.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	486.272.000,00	412.555.000,00	84,84	447.274.000,00
5.1.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.416.429.534,00	2.893.177.401,00	84,68	1.750.452.895,00
5.1.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	22.750.000,00	6.809.100,00	29,93	19.470.600,00
5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	612.700.000,00	600.906.400,00	98,08	80.865.120,00
5.1.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	249.033.000,00	0,00	0,00	126.781.505,15
5.1.2.03.10.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	225.000.000,00	198.067.500,00	88,03	385.117.500,00
5.1.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.404.769.000,00	1.288.228.500,00	91,70	1.760.287.250,00
5.1.2.03.13.	Belanja Jasa Laboratorium	48.700.000,00	20.480.000,00	42,05	35.080.000,00
5.1.2.03.18.	Belanja Jasa Kebersihan	244.320.000,00	234.927.400,00	96,16	211.474.000,00
5.1.2.03.19.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.388.767.600,00	1.356.822.950,00	97,70	1.410.248.500,00
5.1.2.03.25.	Belanja Jasa Pendaftaran Member Citynet	1.000.000,00	937.000,00	93,70	250.000,00
5.1.2.03.28.	Belanja Iuran/Kontribusi Keanggotaan Apkasi	143.000.000,00	99.023.300,00	69,25	41.954.989,00
5.1.2.03.34.	Belanja Jasa Internet/Hosting SAAS	198.000.000,00	192.000.000,00	96,97	162.822.500,00
5.1.2.03.35.	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	1.436.538.000,00	1.222.719.905,00	85,12	1.343.015.250,00
5.1.2.03.36.	Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin	1.489.670.300,00	1.299.396.152,29	87,23	2.709.917.100,70
5.1.2.03.37.	Belanja Jasa Dekorasi	35.000.000,00	34.540.000,00	98,69	334.995.000,00
5.1.2.03.38.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.742.528.700,00	2.042.806.696,00	74,49	3.232.402.688,00
5.1.2.03.41.	Belanja Jasa Penghargaan	0,00	0,00	0,00	377.550.000,00
5.1.2.03.43.	Belanja Jasa Operasional Kantor	10.500.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.2.03.44.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.821.325.060,00	2.945.845.276,00	77,09	7.285.899.990,00
5.1.2.03.45.	Belanja Jasa Survey	0,00	0,00	0,00	18.564.000,00
5.1.2.03.47	Belanja Jasa Pemasangan Baru Jaringan Listrik	10.000.000,00	9.852.500,00	98,53	0,00
5.1.2.03.49.	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Retribusi	720.000,00	600.000,00	83,33	600.000,00
5.1.2.03.50.	Belanja Jasa Analisis Sample	55.888.000,00	47.907.000,00	85,72	52.762.000,00
5.1.2.03.52	Belanja Pemindahan/Pemasangan Utilitas PLN/PDAM	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.03.53.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.000.000,00	34.995.001,00	58,33	0,00
5.1.2.03.54.	Belanja Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.2.03.55.	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.03.56	Belanja Narasumber Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	1.116.000.000,00	1.110.000.000,00	99,46	0,00
	Jumlah	30.327.255.414,00	25.609.397.644,29	84,44	30.534.380.595,85

5.1.2.04. Belanja Premi Asuransi

Dianggarkan sebesar Rp21.409.703.246,00 dengan realisasi Rp18.924.611.673,09 atau 88,39% dengan rincian:

5.1.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Anggaran sebesar Rp12.782.048.345,00 dengan realisasi Rp10.717.344.760,00 atau 83,85%.

5.1.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
Dianggarkan sebesar Rp8.627.654.901,00 dengan realisasi Rp8.207.266.913,09 atau 95,13% yang merupakan belanja pemeliharaan kesehatan atas kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

5.1.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Anggaran sebesar Rp7.771.850.910,00 dengan realisasi Rp6.692.818.571,00 atau 86,12% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	905.661.000,00	706.237.180,00	77,98	704.440.962,00
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.877.877.810,00	1.758.311.413,00	93,63	1.909.782.985,00
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.409.394.500,00	3.902.157.678,00	88,50	4.538.994.401,00
5.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	623.800,00	51,98	737.000,00
5.1.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.794.500,00	7.441.400,00	37,59	13.455.500,00
5.1.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat	5.595.000,00	5.595.000,00	100,00	4.038.600,00
5.1.2.05.08.	Belanja Perbaikan Kendaraan Roda Enam	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33	0,00
5.1.2.05.09.	Belanja Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	522.328.100,00	283.852.100,00	54,34	266.088.900,00
	Jumlah	7.771.850.910,00	6.692.818.571,00	86,12	7.437.538.348,00

5.1.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

Anggaran sebesar Rp6.203.062.287,00 dengan realisasi Rp5.619.375.432,90,00 atau 90,59%. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.06.01. Belanja Cetak
Anggaran sebesar Rp4.624.884.741,00 dengan realisasi Rp4.143.787.082,90 atau 89,60%.

5.1.2.06.02 Belanja Penggandaan
Anggaran sebesar Rp1.578.177.546,00 dengan realisasi Rp1.475.588.350,00 atau 93,50%.

5.1.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Anggaran sebesar Rp851.310.000,00 dengan realisasi Rp722.179.000,00 atau 84,83% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan
realisasi Rp53.000.000,00 atau 88,33%.

5.1.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Anggaran sebesar Rp469.910.000,00 dengan
realisasi Rp431.429.000,00 atau 91,81%.

5.1.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Anggaran sebesar Rp321.400.000,00 dengan
realisasi Rp237.750.000,00 atau 73,97%.

5.1.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Anggaran sebesar Rp322.400.000,00 dengan realisasi
Rp205.100.000,00 atau 63,62%. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Anggaran sebesar Rp322.400.000,00 dengan
realisasi Rp205.100.000,00 atau 63,62%.

5.1.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Anggaran sebesar Rp727.180.000,00 dengan realisasi
Rp436.320.000,00 atau 60,00%. Dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	135.430.000,00	70.660.000,00	52,17	193.748.500,00
5.1.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	0,00	00,00	0,00
5.1.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	309.900.000,00	150.900.000,00	48,69	555.677.000,00
5.1.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	118.362.000,00
5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Peralatan Studio	251.050.000,00	184.660.000,00	73,56	508.350.000,00
5.1.2.10.19.	Belanja Sewa Panggung	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	326.500.000,00
5.1.2.10.22.	Belanja Sewa Peralatan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	13.756.000,00
5.1.2.10.24.	Belanja Sewa Perlengkapan Lainnya	800.000,00	300.000,00	37,50	31.175.000,00
5.1.2.10.26.	Belanja Sewa Kipas Angin	17.500.000,00	17.300.000,00	98,86	25.700.000,00
	Jumlah	727.180.000,00	436.320.000,00	60,00	1.773.268.500,00

5.1.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Anggaran sebesar Rp16.962.368.300,00 dengan realisasi sebesar
Rp14.493.239.567,00 atau 85,44%. Dengan rincian sebagai
berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	595.488.500,00	555.084.500,00	93,21	324.391.025,00
5.1.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.865.685.800,00	3.173.306.102,00	82,09	3.892.148.450,00
5.1.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.397.153.000,00	3.270.590.320,00	96,27	3.512.514.152,00
5.1.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	7.992.443.075,00	6.746.228.905,00	84,41	7.965.475.243,00
5.1.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.027.217.925,00	693.577.240,00	67,52	1.083.308.584,50
5.1.2.11.11.	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	84.380.000,00	54.452.500,00	64,53	707.749.650,00
	Jumlah	16.962.368.300,00	14.493.239.567,00	85,44	17.485.587.104,50

5.1.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Anggaran sebesar Rp433.213.000,00 dengan realisasi Rp429.589.700,00 atau 99,16%. Dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000,00	24.941.000,00	99,76	71.750.000,00
5.1.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	120.750.000,00	120.736.000,00	99,99	4.800.000,00
5.1.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.800.000,00	30.580.000,00	99,29	87.621.500,00
5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	214.745.000,00	211.593.000,00	98,53	138.122.250,00
5.1.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	41.918.000,00	41.739.700,00	99,57	230.928.500,00
5.1.2.12.07.	Belanja Pakaian Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	64.391.250,00
	Jumlah	433.213.000,00	429.589.700,00	99,16	597.613.500,00

5.1.2.13. Belanja Pakaian Kerja

Anggaran sebesar Rp742.863.000,00 dengan realisasi Rp724.614.839,00 atau 97,54%. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.13. 01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Anggaran sebesar Rp742.863.000,00 dengan realisasi Rp724.614.839,00 atau 97,54%.

5.1.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu

Anggaran sebesar Rp458.700.000,00 dengan realisasi Rp448.098.000,00 atau 97,69%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	129.500.000,00	120.439.000,00	93,00	164.241.200,00
5.1.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	179.175.000,00	179.175.000,00	100,00	164.690.000,00
5.1.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	119.400.000,00	117.884.000,00	98,73	959.245.850,00
5.1.2.14.06.	Belanja Pakaian Ibadah	21.125.000,00	21.125.000,00	100,00	16.550.000,00
5.1.2.14.07.	Belanja Pakaian Pelatihan	0,00	0,00	0,00	155.284.700,00
5.1.2.14.11.	Belanja Lambang/Lencana Jabatan	0,00	0,00	0,00	253.101.500,00
5.1.2.14.12.	Belanja Pakaian Pertunjukkan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.1.2.14.14.	Belanja Pakaian Nasional PKK	9.500.000,00	9.475.000,00	99,74	11.925.000,00
	Jumlah	458.700.000,00	448.098.000,00	97,69	1.727.738.250,00

5.1.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran sebesar Rp66.798.627.942,00 dengan realisasi Rp59.802.143.475,00 atau 89,53%, dengan rincian:

5.1.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Anggaran sebesar Rp11.416.888.575,00 dengan realisasi 9.930.869.550,00 atau 86,98%.

5.1.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Anggaran sebesar Rp55.381.739.367,00 dengan realisasi Rp49.871.273.925,00 atau 90,05%.

5.1.2.18. Belanja Pemeliharaan

Anggaran sebesar Rp6.327.072.275,00 dengan realisasi Rp5.879.057.676,00 atau 92,92%, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.352.000.000,00	1.293.541.490,00	95,68	1.182.409.900,00
5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750.695.000,00	731.186.270,00	97,40	481.385.170,76
5.1.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.698.377.275,00	3.624.555.120,00	98,00	36.065.177.200,00
5.1.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	496.000.000,00	229.774.796,00	46,33	11.677.765,00
5.1.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	30.000.000,00	0,00	0,00	29.678.000,00
	Jumlah	6.327.072.275,00	5.879.057.676,00	92,92	37.770.328.035,76

Realisasi Belanja Pemeliharaan senilai Rp5.879.057.676,00, diantaranya adalah Belanja Pemeliharaan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp51.822.000,00 yang merupakan belanja bahan komputer yang mana menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 merupakan persediaan. Atas realisasi ini, telah dilakukan koreksi atas penyajian Persediaan senilai Rp51.822.000,00 di Neraca per 31 Desember 2020.

5.1.2.19. Belanja Jasa Konsultasi

Anggaran sebesar Rp1.192.831.000,00 dengan realisasi Rp359.225.500,00 atau 30,12% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.19.02.	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan	1.012.831.000,00	328.222.000,00	32,41	624.503.882,00
5.1.2.19.03.	Belanja Jasa konsultasi Pengawasan	35.000.000,00	31.003.500,00	88,58	23.889.250,00
5.1.2.19.04.	Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Sistem Informasi Manajemen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.12.19.12	Belanja Penyusunan UKL dan UPL	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.192.831.000,00	359.225.500,00	30,12	648.393.132,00

5.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga

Anggaran sebesar Rp29.024.182.050,00 dengan realisasi Rp27.535.032.598,40 atau 94,87%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.20.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Anggaran sebesar Rp15.970.043.050,00 dengan realisasi Rp14.782.886.061,00 atau 92,57%. Tahun 2020 realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (2020) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (OPD 2019)	6.000.000,00	4.800.000,00	80,00	20.500.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.764.958.800,00	2.612.792.860,00	94,50	3.204.147.500,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00	8.987.000,00	25,68	0,00
4.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.020.417.600,00
6.	Dinas Sosial (2020) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(OPD 2019)	54.375.000,00	53.867.000,00	99,07	92.590.000,00
7.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	1.471.564.000,00	1.410.906.140,00	95,88	194.667.000,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.900.000,00	432.513.400,00	91,85	895.800.000,00
9.	Dinas Pangan dan Pertanian (2020) Dinas Pangan (OPD 2019) Dinas Pertanian (OPD 2019)	441.250.000,00	431.584.550,00	97,81	177.016.000,00 299.061.600,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	48.640.000,00	48.570.000,00	99,86	461.897.925,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	103.700.000,00	103.353.500,00	99,67	0,00
12.	DINPMP2KUKM	2.334.850.000,00	1.967.434.840,00	84,26	0,00
13.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (OPD 2019)	0,00	0,00	0,00	269.354.000,00
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.000.000,00	950.000,00	95,00	6.750.000,00
15.	Dinas Perikanan	1.812.755.250,00	1.543.838.400,00	85,17	1.195.410.900,00
16.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	0,00
17.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (OPD 2019)	0,00	0,00	0,00	15.975.000,00
18.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	140.100.000,00
19.	Kecamatan Sungailiat	3.833.050.000,00	3.669.476.621,00	95,73	8.000.000,00
20.	Kecamatan Belinyu	2.562.000.000,00	2.463.841.750,00	96,17	7.700.000,00
21.	Kecamatan Merawang	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
22.	Kecamatan Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
23.	Kecamatan Bakam	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00

No	Nama OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
24.	Kecamatan Riau Silip	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
	Jumlah	15.970.043.050,00	14.782.886.061,00	92,57	11.045.697.525,00

5.1.2.20.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Anggaran sebesar Rp13.054.139.000,00 dengan realisasi Rp12.752.146.537,40 atau 97,69%.

No	Nama OPD	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi 2020(Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (2020) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (OPD 2019)	1.219.894.000,00	1.205.586.249,00	98,83	2.049.923.462,50
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pertanian (OPD 2019)	1.144.900.000,00	1.127.695.300,00	98,50	1.361.328.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.507.125.000,00	9.362.930.988,40	98,48	0,00
5.	Sekretariat Daerah	671.770.000,00	552.535.200,00	82,25	171.514.000,00
6.	Kecamatan Sungailiat	1.144.900.000,00	1.127.695.300,00	98,50	4.117.505.097,00
7.	Kecamatan Belinyu	0,00	0,00	0,00	2.378.212.050,00
	Jumlah	13.054.139.000,00	12.752.146.537,40	97,69	10.080.282.609,50

5.1.2.22. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Anggaran sebesarRp150.000.000,00 dengan realisasi Rp147.100.000,00 atau 98,07% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.22.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	150.000.000,00	147.100.000,00	98,07	328.500.000,00

5.1.2.23. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Anggaran sebesar Rp2.095.606.000,00 dengan realisasi Rp847.497.951,00 atau 40,44%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.23.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Anggaran sebesar Rp313.125.000,00 dengan realisasi Rp197.124.251,00 atau 62,95%.

5.1.2.23.10. Belanja Kontribusi
Anggaran sebesar Rp1.782.481.000,00 dengan realisasi Rp650.373.700,00 atau 36,49%.

5.1.2.25. Belanja Honorarium PNS
Anggaran sebesar Rp13.323.755.000,00 dengan realisasi Rp12.006.151.000,00atau 90,11%. Dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.25.01.	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.769.655.000,00	9.797.309.000,00	90,97	11.505.896.500,00
5.1.2.25.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	205.250.000,00	193.250.000,00	94,15	0,00
5.1.2.25.04.	Belanja Honorarium PNS Lainnya	1.297.650.000,00	1.031.000.000,00	79,45	749.671.000,00
5.1.2.25.07.	Belanja Uang Saku	1.020.250.000,00	959.392.000,00	94,03	1.119.013.750,00
5.1.2.25.09.	Belanja Vakasi/Insentif	2.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00
5.1.2.25.14.	Belanja Honorarium Monev Online	28.350.000,00	25.200.000,00	88,89	26.600.000,00
	Jumlah	13.323.755.000,00	12.006.151.000,00	90,11	13.417.781.250,00

5.1.2.26. Honorarium Non PNS

Anggaran sebesar Rp114.180.649.500,00 dengan realisasi Rp110.434.346.512,00 atau 96,72%. Dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.2.26.02.	Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	92.794.796.500,00	90.818.941.025,00	97,87	94.863.875.500,00
5.1.2.26.03.	Belanja Honorarium Pegawai Non PNS Lainnya	4.525.715.000,00	3.649.567.487,00	80,64	2.791.579.267,00
5.1.2.26.05.	Belanja Uang Saku	836.538.000,00	783.288.000,00	93,63	1.462.405.000,00
5.1.2.26.09.	Belanja Vakasi/Insentif	1136.800.000,00	1.123.450.000,00	98,83	605.440.000,00
5.12.26.14	Belanja Pegawai Non PNS Dana BOS APBD II	14.886.800.000,00	14.059.100.000,00	94,44	0,00
	Jumlah	114.180.649.500,00	110.434.346.512,00	96,72	99.723.299.767,00

5.1.2.27. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Anggaran sebesar Rp840.160.000,00 dengan realisasi Rp641.010.234,00 atau 76,30%. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.27.02 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
 Anggaran sebesar Rp840.160.000,00 dengan realisasi Rp641.010.234,00 atau 76,30%.

No	Nama OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (2020) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (OPD 2019)	139.000.000,00	135.300.000,00	97,34	252.975.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	40.650.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55.000.000,00	49.000.000,00	89,09	85.650.000,00

6.	Dinas Pangan (OPD 2019)	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
8.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	597.800.000,00
9.	Dinas Pertanian (OPD 2019)	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
10.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (OPD 2019)	0,00	0,00	0,00	205.399.984,40
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD 2019)	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	447.750.000,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	24.600.000,00
13.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	393.510.000,00	215.210.234,00	54,69	0,00
14.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	231.500.000,00
15.	Kecamatan Sungailiat	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00	66.050.000,00
16.	Kecamatan Belinyu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	23.760.000,00
17.	Kecamatan Riau Silip	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	23.100.000,00
18.	Kecamatan Mendo Barat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	31.950.000,00
19.	Kecamatan Bakam	20.500.000,00	16.050.000,00	78,29	19.025.000,00
20.	Kecamatan Puding Besar	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	21.600.000,00
21.	Kecamatan Pemali	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	35.300.000,00
22.	Kecamatan Merawang	23.500.000,00	16.800.000,00	71,49	31.000.000,00
	Jumlah	840.160.000,00	641.010.234,00	76,30	2.254.859.984,40

5.1.2.28. Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS

Anggaran sebesar Rp5.910.776.000,00 dengan realisasi Rp5.885.033.500,00 atau 99,56%. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.28.01. Belanja Pegawai Dana BOS APBN

Anggaran sebesar Rp5.910.776.000,00 dengan realisasi Rp5.885.033.500,00 atau 99,56%.

5.1.2.29. Belanja Barang Dana BOS

Anggaran sebesar Rp28.960.860.096,80 dengan realisasi sebesar Rp23.584.652.329,00 atau 81,44%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.29.01. Belanja Barang Dana BOS

Anggaran sebesar Rp28.960.860.096,80 dengan realisasi Rp23.584.652.329,00 atau 81,44%.

5.1.2.31. Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD

Anggaran sebesar Rp7.707.285.221,00 dengan realisasi sebesar Rp7.060.753.452,00 atau 91,61%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.31.01. Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BLUD

Anggaran sebesar Rp7.707.285.221,00 dengan realisasi sebesar Rp7.060.753.452,00 atau 91,61%.

5.1.2.33. Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BLUD

Anggaran sebesar Rp52.901.162.523,00 dengan realisasi sebesar Rp40.365.548.150,80 atau 76,30%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.33.01. Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BLUD
Anggaran sebesar Rp52.901.162.523,00 dengan realisasi sebesar Rp40.365.548.150,80 atau 76,30%.

5.1.2.36. Belanja Bantuan Sosial Barang

Anggaran sebesar Rp27.190.106.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.819.186.156,00 atau 91,28% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.36.01. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga
Anggaran sebesar Rp27.190.106.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.819.186.156,00 atau 91,28%.

No	Nama OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	90.000.000,00	89.788.000,00	99,76	332.029.800,00
2.	Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPD 2019)	24.607.246.000,00	22.241.440.856,00	90,39	99.138.000,00
3.	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pertanian	2.219.500.000,00	2.215.705.000,00	99,83	275.965.000,00
4.	Sekretariat Daerah	73.920.000,00	73.251.200,00	99,10	293.392.000,00
5.	Dinas Kesehatan	199.440.000,00	199.001.100,00	99,78	427.300.080,00
	Jumlah	27.190.106.000,00	24.819.186.156,00	91,28	1.427.824.880,00

5.1.2.40. Belanja Beasiswa

Anggaran sebesar Rp3.400.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.232.965.000,00 atau 95,08% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.40.01. Belanja Beasiswa
Anggaran sebesar Rp3.400.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.232.965.000,00 atau 95,08%.

5.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.01. Belanja Subsidi

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%

dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.01.03. Belanja Subsidi Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00
atau0,00%.

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan %	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.4.01.03.	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp37.660.587.200,00 dengan realisasi Rp35.015.292.795,00 atau 92,98% (*Lampiran II.16*), dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Anggaran sebesar Rp34.135.716.000,00 dengan realisasi Rp31.766.771.869,00 atau 93,06%, dengan rincian:

5.1.5.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Anggaran sebesar Rp34.135.716.000,00 dengan realisasi Rp31.766.771.869,00 atau 93,06%.

5.1.5.06 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Anggaran sebesar Rp2.659.888.200,00 dengan realisasi Rp2.659.888.200,00 atau 100,00%, dengan rincian:

5.1.5.06.01. Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar
Anggaran sebesar Rp2.659.888.200,00 dengan realisasi Rp2.659.888.200,00 atau 100,00%.

5.1.5.07 Belanja Hibah Pariwisata
Anggaran sebesar Rp864.983.000,00 dengan realisasi Rp588.632.726,00 atau 68,05%, dengan rincian:

5.1.5.07.01 Belanja Hibah Pariwisata kepada Hotel/Penginapan/Wisma
Anggaran sebesar Rp421.323.290,00 dengan realisasi Rp293.161.167,00 atau 69,58%

5.1.5.07.02 Belanja Hibah Pariwisata Restoran
Anggaran sebesar Rp443.659.710,00 dengan realisasi Rp 295.471.559,00 atau 66,60%.

5.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.310.000.000,00 dengan realisasi Rp3.026.653.000,00 atau 70,22%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.6.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp4.310.000.000,00 dengan realisasi Rp3.026.653.000,00 atau 70,22% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.6.01.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp4.310.000.000,00 dengan realisasi Rp3.026.653.000,00 atau 70,22%.

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Kecelakaan Laut	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00	0,00
2.	Bantuan Biaya Pendamping Bagi Pasien Berobat Keluar Daerah	300.000.000,00	270.000.000,00	90,00	310.000.000,00
3.	Bantuan Santunan Kematian	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Veteran/Janda Veteran/Pejuang	102.500.000,00	94.300.000,00	92,00	101.200.000,00
5.	Bantuan Sosial Lainnya	300.000.000,00	147.353.000,00	49,12	195.960.900,00
6.	Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Fisik Bidang Perumahan Dan Pemukiman 2019)	1.120.000.000,00	1.032.500.000,00	92,19	1.522.500.000,00
7.	Rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sungailiat (DAK fisik di bidang Perumahan dan Pemukiman)	262.500.000,00	262.500.000,00	100,00	0,00
8.	Bantuan sosial penanganan dampak ekonomi (COVID 19)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.310.000.000,00	3.026.653.000,00	70,22	3.129.660.900,00

5.2 BELANJA MODAL

Anggaran Belanja Modal untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp146.173.948.438,20 dengan realisasi Rp133.634.821.447,52 atau 91,42%. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp189.666.012.344,71 terjadi penurunan sebesar Rp56.031.190.897,19 atau 29,54%. Salah satu penyebab terjadinya penurunan ini dikarenakan adanya pengurangan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangka sebesar Rp22.915.521.000,00 (38,37%). Pada tahun 2019 jumlah DID yang ditransfer sebesar Rp59.726.397.000,00 dengan realisasi Rp56.592.494.835,50 sedangkan pada tahun 2020 jumlah DID yang ditransfer sebesar Rp36.810.876.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.078.495.256,00.

Anggaran DAK tahun 2019 sebesar Rp172.534.413.000,00 dengan realisasi sebesar Rp163.138.662.324,00 sedangkan tahun 2020 anggaran DAK Rp168.632.274.697,00 dengan realisasi sebesar Rp160.368.395.926,00 yang mana untuk anggaran mengalami penurunan sebesar Rp3.902.138.303,00 (2,26%) dan realisasi juga mengalami penurunan sebesar Rp2.770.266.398,00 atau (1,70%).

Adapun rincian belanja modal tahun 2020 sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	445.000.000,00	144.421.000,00	32,45	1.375.062.500,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.602.765.713,20	54.209.532.248,00	92,50	46.469.698.481,18
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.404.672.925,00	60.097.868.448,99	93,31	53.887.849.397,90
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi	21.607.992.800,00	18.188.903.369,53	84,18	84.834.217.385,63

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	dan Jaringan				
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.113.517.000,00	994.096.381,00	89,28	2.946.685.082,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	152.499.498,00
	Jumlah	146.173.948.438,20	133.634.821.447,52	91,42	189.666.012.344,71

5.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran sebesar Rp445.000.000,00 dengan realisasi Rp144.421.000,00 atau 32,45% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.1.05.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	145.000.000,00	144.421.000,00	99,60	110.920.000,00
5.2.1.11.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	300.000.000,00	0,00	0,00	1.071.684.500,00
5.2.1.13.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	192.458.000,00
	Jumlah	445.000.000,00	144.421.000,00	32,45	1.375.062.500,00

Tahun 2020 realisasi belanja modal tanah berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD :

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	145.000.000,00	144.421.000,00	99,60	579.000,00
	Jumlah	445.000.000,00	144.421.000,00	32,45	300.579.000,00

5.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran sebesar Rp58.602.765.713,20 dengan realisasi Rp54.209.532.248,00 atau 92,50% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	434.500.000,00	434.500.000,00	100,00	1.937.355.000,00
5.2.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-Alat Bantu	950.410.000,00	832.569.074,00	87,60	6.983.000,00
5.2.2.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.602.663.000,00	9.257.185.200,00	96,40	3.848.588.150,00
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	37.360.000,00	36.816.000,00	98,54	0,00
5.2.2.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.09.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
5.2.2.10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bengkel	3.729.000,00	3.150.000,00	84,47	2.750.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	Tak Bermesin				
5.2.2.11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan AlatUkur	38.500.000,00	38.245.000,00	99,34	181.255.800,00
5.2.2.12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	305.300.000,00	4.800.000,00	1,57	139.040.000,00
5.2.2.13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	32.800.000,00	25.838.000,00	78,77	1.460.000,00
5.2.2.14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor	702.625.000,00	639.719.300,00	91,05	885.092.750,00
5.2.2.15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.171.812.917,00	5.731.599.106,00	79,92	7.169.047.821,00
5.2.2.16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer	2.057.584.200,00	1.707.733.880,00	83,00	4.125.372.164,00
5.2.2.17.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	904.110.000,00	849.593.350,00	93,97	864.861.575,00
5.2.2.18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AlatStudio	248.758.500,00	199.465.500,00	80,18	451.815.100,00
5.2.2.19.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Komunikasi	82.012.500,00	80.660.000,00	98,35	0,00
5.2.2.21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran	11.343.143.144,00	11.052.814.081,00	97,44	8.145.885.534,00
5.2.2.22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kesehatan	9.140.022.066,00	8.833.324.565,00	96,64	2.080.140.612,18
5.2.2.23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Unt-Unit Laboratorium	2.941.846.000,00	2.914.711.004,00	99,08	5.016.171.800,00
5.2.2.24.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	12.586.379.386,20	11.547.618.188,00	91,75	10.970.746.825,00
5.2.2.27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	534.050.000,00
5.2.2.29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	82.866.850,00
5.2.2.30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	10.895.500,00
5.2.2.35.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	19.210.000,00	19.190.000,00	99,90	4.000.000,00
	Jumlah	58.602.765.713,20	54.209.532.248,00	92,50	46.469.698.481,18

Tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD :

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	14.683.668.586,20	13.553.269.392,00	92,30	1.130.399.194,20
2.	Dinas Kesehatan	34.404.025.727,00	29.877.062.120,00	86,84	4.526.963.607,00
3.	BLUD Dinas Kesehatan	0,00	2.195.873.276	0,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	403.090.000,00	391.112.500,00	97,03	11.977.500,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	474.463.000,00	446.645.000,00	94,14	27.818.000,00

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
	dan Pertanahan				
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	239.650.000,00	238.150.000,00	99,37	1.500.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	315.492.500,00	300.073.600,00	95,11	15.418.900,00
8.	Dinas Sosial	33.600.000,00	32.747.000,00	97,46	853.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	285.436.000,00	250.796.000,00	87,86	36.640.000,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	453.600.000,00	415.917.500,00	91,69	37.682.500,00
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	139.200.000,00	139.200.000,00	100,00	0,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	453.800.000,00	453.325.000,00	99,90	475.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.400.000,00	71.700.000,00	97,68	1.700.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84.300.200,00	83.998.200,00	99,64	302.000,00
15.	Dinas Perhubungan	157.593.000,00	151.310.600,00	96,01	6.282.400,00
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	197.299.200,00	189.258.000,00	95,92	8.041.200,00
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	61.900.000,00	59.250.000,00	95,72	2.650.000,00
18.	Dinas Perikanan	1.900.000,00	1.885.000,00	99,21	15.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	419.620.000,00	117.020.000,00	27,89	302.600.000,00
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.300.000,00	28.800.000,00	63,58	16.500.000,00
21.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	348.209.000,00	275.813.000,00	79,21	72.396.000,00
22.	Inspektorat Daerah	111.500.000,00	109.650.000,00	98,34	1.850.000,00
23.	Kecamatan Sungailiat	270.800.000,00	251.597.000,00	92,91	19.203.000,00
24.	Kecamatan Belinyu	156.100.000,00	150.375.000,00	96,33	5.725.000,00
25.	Kecamatan Riau Silip	20.000.000,00	19.350.000,00	96,75	650.000,00
26.	Kecamatan Mendo Barat	56.668.500,00	56.568.500,00	99,82	100.000,00
27.	Kecamatan Bakam	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00	0,00
28.	Kecamatan Puding Besar	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00	0,00
29.	Sekretariat Daerah	2.491.832.000,00	2.316.935.280,00	92,98	174.896.720,00
30.	Sekretariat DPRD	2.200.218.000,00	2.011.750.280,00	91,43	188.467.720,00
	Jumlah	58.602.765.713,20	54.209.532.248,00	92,50	6.591.106.741,20

5.2.2.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

Anggaran sebesar Rp434.500.000,00 dengan realisasi Rp434.500.000,00 atau 100,00%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

5.2.2.01.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler

Anggaran sebesar Rp434.500.000,00 dengan realisasi Rp434.500.000,00 atau 100,00%.

5.2.2.03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-Alat Bantu

Anggaran sebesar Rp950.410.000,00 dengan realisasi Rp832.569.074,00 atau 87,60%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang direncanakan oleh OPD Dinas

Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Setda.

- 5.2.2.03.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan *Electric Generating Set*
Anggaran sebesar Rp929.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp817.516.974,00 atau 87,96%.
- 5.2.2.03.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Pompa
Anggaran sebesar Rp20.960.000,00 dengan realisasi Rp15.052.100,00 atau 71,81%.
- 5.2.2.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
Anggaran sebesarRp9.602.663.000,00 dengan realisasi Rp9.257.185.200,00 atau96,40% dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.2.2.04.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
Anggaran sebesar Rp2.288.363.000,00 dengan realisasi Rp2.103.827.200,00 atau 91,94%.
 - 5.2.2.04.03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Anggaran sebesar Rp372.500.000,00 dengan realisasi Rp358.000.000,00 atau 96,11%.
 - 5.2.2.04.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
Anggaran sebesar Rp6.375.840.000,00dengan realisasi Rp6.282.798.000,00atau 98,54%.
 - 5.2.2.04.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Beroda Dua
Anggaran sebesar Rp565.960.000,00dengan realisasi Rp512.560.000,00atau 90,56%.
- 5.2.2.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Anggaran sebesar Rp37.360.000,00 dengan realisasi Rp36.816.000,00 atau 98,54%, dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.2.2.05.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
Anggaran sebesarRp2.700.000,00 dengan realisasi Rp2.476.000,00 atau 91,70%.
 - 5.2.2.05.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
Anggaran sebesar Rp34.660.000,00 dengan realisasi Rp34.340.000,00 atau 99,08%.

- 5.2.2.10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
 Anggaran sebesar Rp3.729.000,00 dengan realisasi Rp3.150.000,00 atau 84,47%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.2.10.11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
 Anggaran sebesar Rp3.729.000,00 dengan realisasi Rp3.150.000,00 atau 84,47%.
- 5.2.2.11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-Alat Ukur
 Anggaran sebesar Rp38.500.000,00 dengan realisasi Rp38.245.000,00 atau 99,34%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Kec. Sungailiat, sedangkan tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kec. Puding Besar, Kec. Merawang, Sekretariat Daerah, Kec. Sungailiat, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.2.11.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Ukur Universal
 Anggaran sebesar Rp38.500.000,00 dengan realisasi Rp38.245.000,00 atau 99,34%.
- 5.2.2.12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan
 Anggaran sebesar Rp305.300.000,00 dengan realisasi Rp4.800.000,00 atau 1,57%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup (mesin pengolah sampah), dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.2.12.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman.
 Anggaran sebesar Rp5.300.000,00 dengan realisasi Rp4.800.000,00 atau 90,57%.
- 5.2.2.12.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pasca Panen
 Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.
- 5.2.2.12.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
 Anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.2.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan

Anggaran sebesar Rp32.800.000,00 dengan realisasi Rp25.838.000,00 atau 78,77%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Kec. Belinyu, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.13.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

Anggaran sebesar Rp32.800.000,00 dengan realisasi Rp25.838.000,00 atau 78,77%.

5.2.2.14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor

Anggaran sebesar Rp702.625.000,00 dengan realisasi Rp639.719.300,00 atau 91,05% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00	4.895.000,00	97,90	0,00
5.2.2.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat reproduksi (Pengandaan)	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	390.800.000,00	369.504.900,00	94,55	405.158.100,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	276.825.000,00	236.279.400,00	85,35	462.660.650,00
5.2.2.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pelindung Diri Laboratorium	0,00	0,00	0,00	5.474.000,00
5.2.2.14.10	Belanja Modal Pengadaan Drone	30.000.000,00	29.040.000,00	96,80	0,00
	Jumlah	702.625.000,00	639.719.300,00	91,05	885.092.750,00

5.2.2.15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp7.171.812.917,00 dengan realisasi Rp5.731.599.106,00 atau 79,92% dimana APBD sebesar Rp3.535.725.830,00 dan sebesar Rp2.195.873.276,00 merupakan BLUD Dinkes, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.15.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair	5.025.229.717,00	3.716.723.276,00	73,96	5.704.783.830,00
5.2.2.15.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	18.500.000,00	12.650.000,00	68,38	4.350.000,00
5.2.2.15.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pembersih	47.345.000,00	44.760.000,00	94,54	45.234.000,00
5.2.2.15.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin	815.239.000,00	775.815.600,00	95,16	584.274.200,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.15.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Dapur	406.940.200,00	377.067.500,00	92,66	148.692.350,00
5.2.2.15.06.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	829.309.000,00	778.134.230,00	93,83	594.036.841,00
5.2.2.15.07.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	29.250.000,00	26.448.500,00	90,42	87.676.600,00
	Jumlah	7.171.812.917,00	5.731.599.106,00	79,92	7.169.047.821,00

- 5.2.2.15.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair
 Anggaran sebesarRp5.025.229.717,00 dengan realisasi Rp3.716.723.276,00atau73,96% dengan rincian:
 1) BLUD sebesar Rp2.195.873.276,00
 2) APBD sebesar Rp1.520.850.000,00
- 5.2.2.15.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
 Anggaran sebesar Rp18.500.000,00 dengan realisasiRp12.650.00000 atau 68,38%.
- 5.2.2.15.03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pembersih
 Anggaran sebesarRp47.345.000,00 dengan realisasiRp44.760.000,00 atau 94,54%.
- 5.2.2.15.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin
 Anggaran sebesarRp815.239.000,00dengan realisasi Rp775.815.600,00 atau 95,16%.
- 5.2.2.15.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Dapur
 Anggaran sebesarRp406.940.200,00dengan realisasi Rp377.067.500,00 atau 92,66%.
- 5.2.2.15.06. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)
 Anggaransebesar Rp829.309.000,00 dengan realisasi Rp778.134.230,00 atau 93,83%.
- 5.2.2.15.07. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
 Anggaran sebesarRp29.250.000,00dengan realisasi Rp26.448.500,00 atau 90,42%.
- 5.2.2.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-PengadaanKomputer
 Anggaran sebesarRp2.057.584.200,00 dengan realisasi Rp1.707.733.880,00 atau83,00%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Kec. Sungailiat, Kec. Belinyu, Kec. Bakam, Kec. Puding Besar, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Kec. Riau Silip, Kec. Mendo Barat, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah, Dinas Pangan, Kec. Riau Silip, Kec. Belinyu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kec. Puding Besar, Inpektorat, Kec. Sungailiat, Kec. Pemali, Kec. Mendo Barat, Kec. Merawang, Sekretariat Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan sedangkan, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.16.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	0,00	0,00	105.360.000,00
5.2.2.16.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer	1.399.056.000,00	1.126.190.100,00	80,50	1.634.271.740,00
5.2.2.16.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	408.050.000,00	344.230.780,00	84,36	687.380.674,00
5.2.2.16.06.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Jaringan	138.248.200,00	133.503.000,00	96,57	1.698.359.750,00
5.2.2.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan CCTV	112.230.000,00	103.810.000,00	92,50	0,00
	Jumlah	2.057.584.200,00	1.707.733.880,00	83,00	4.125.372.164,00

5.2.2.17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Anggaran sebesar Rp904.110.000,00 dengan realisasi Rp849.593.350,00 atau 93,97%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Inspektorat Daerah, Kec. Sungailiat, Kec. Riau Silip, Kec. Mendo Barat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sedangkan Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinparpora, Kec.Sungailiat, Dinpan, RSUD, BP2RD, BPKAD, Kec.Belinyu, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dukcapil, Setda, Kec.Merawang, Dinakerperindag, Kec.Riau Silip, Kominfo, Setwan, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.17.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Kerja Pejabat	501.127.000,00	464.338.350,00	92,66	514.532.875,00
5.2.2.17.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Rapat Pejabat	14.500.000,00	13.700.000,00	94,48	18.155.000,00
5.2.2.17.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	249.383.000,00	236.533.000,00	94,85	284.753.700,00
5.2.2.17.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	139.100.000,00	135.022.000,00	97,07	47.420.000,00
	Jumlah	904.110.000,00	849.593.350,00	93,97	864.861.575,00

5.2.2.18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AlatStudio Anggaran sebesarRp248.758.500,00 dengan realisasi Rp199.465.500,00 atau 80,18%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kec. Sungailiat, Kec. Mendo Barat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, sedangkan tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Kominfo, BP2RD, BPKAD, Kec.Belinyu, Dinsospemdes, Kec.Sungailiat, Inpektorat, Kec.Merawang, Dukcapil, Setda, Dinkes, Dinakerperindag, Dinpmp2kukm dan Bkpsdmd, , dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.18.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual Anggaran sebesarRp248.758.500,00 dengan

realisasi Rp199.465.500,00 atau 80,18%.

5.2.2.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Komunikasi Anggaran sebesar Rp82.012.500,00 dengan realisasi Rp80.660.000,00 atau 98,35%, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.19.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Anggaran sebesar Rp65.860.000,00 dengan realisasi Rp64.510.000,00 atau 97,95%.

5.2.2.19.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB Anggaran sebesar Rp16.152.500,00 dengan realisasi Rp16.150.000,00 atau 99,98%.

5.2.2.21. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AlatKedokteran Anggaran sebesar Rp11.343.143.144,00dengan realisasi Rp11.052.814.081,00 atau 97,44%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan, sedangkantahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinkes, BPKAD, RSUD, dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.2.21.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.517.844.125,00	10.228.696.433,00	97,25	7.856.036.136,00
5.2.2.21.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	200.000.000,00	199.996.200,00	99,99	53.810.798,00
5.2.2.21.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	7.382.600,00
5.2.2.21.07.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Farmasi	120.000.000,00	119.939.858,00	99,95	228.656.000,00
5.2.2.21.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	505.299.019,00	504.181.590,00	99,78	0,00
Jumlah		11.343.143.144,00	11.052.814.081,00	97,44	8.145.885.534,00

5.2.2.22. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AlatKesehatan Anggaran sebesar Rp9.140.022.066,00 dengan realisasi Rp8.833.324.565,00atau96,64% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.22.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Anggaran sebesar Rp9.140.022.066,00 dengan realisasi Rp8.833.324.565,00atau96,64%.

5.2.2.23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Anggaran sebesar Rp2.941.846.000,00 dengan realisasi Rp2.914.711.004,00 atau 99,08%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan

sedangkan pada Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, DLH, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.23.63. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

Anggaran sebesar Rp2.941.846.000,00 dengan realisasi Rp2.914.711.004,00 atau 99,08%.

5.2.2.24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Anggaran sebesar Rp12.586.379.386,00 dengan realisasi Rp11.547.618.188,00 atau 91,75% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.24.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

Anggaran sebesar Rp12.586.379.386,00 dengan realisasi Rp11.547.618.188,00 merupakan APBD Rp1.798.471.670,00 dan BOS APBN Rp9.749.146.518,00 atau 91,75%.

5.2.2.35. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Anggaran sebesar Rp19.210.000,00 dengan realisasi Rp19.190.000,00 atau 99,90%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.35.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bantu Keamanan

Anggaran sebesar Rp1.410.000,00 dengan realisasi Rp1.410.000,00 atau 100,00%.

5.2.2.35.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Perlindungan

Anggaran sebesar Rp17.800.000,00 dengan realisasi Rp17.780.000,00 atau 99,89%.

5.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran sebesar Rp64.404.672.925,00 dengan realisasi Rp60.097.868.448,99 atau 93,31% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	63.728.592.925,00	59.616.749.066,99	93,55	44.165.028.917,90
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-	200.630.000,00	199.380.000,00	99,38	205.290.000,00

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
5.2.3.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	475.450.000,00	281.739.382,00	59,26	9.517.530.480,00
	Jumlah	64.404.672.925,00	60.097.868.448,99	93,31	53.887.849.397,90

Tahun 2020 realisasi belanja modal gedung dan bangunan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD:

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	12.923.669.290,00	12.586.199.368,00	97,39	337.469.922,00
2.	Dinas Kesehatan	45.660.900.800,00	42.082.553.562,99	92,16	3.578.347.237,01
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	50.000.000,00	49.045.000,00	98,09	955.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	2.311.980.000,00	2.288.233.566,00	98,97	23.746.434,00
6.	Dinas Pangan dan Pertanian	198.785.000,00	198.785.000,00	100,00	0,00
7.	Dinas Perhubungan	585.600.000,00	391.328.382,00	66,83	194.271.618,00
8.	Dinas Perikanan	324.752.250,00	304.487.000,00	93,76	20.265.250,00
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	339.850.585,00	336.023.000,00	98,87	3.827.585,00
10.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	190.000.000,00	189.175.000,00	99,57	825.000,00
11.	Kecamatan Sungailiat	68.000.000,00	66.800.800,00	98,24	1.199.200,00
12.	Kecamatan Belinyu	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
13.	Sekretariat Daerah	1.542.160.000,00	1.525.145.370,00	98,90	17.014.630,00
14.	Sekretariat DPRD	80.615.000,00	80.092.400,00	99,35	522.600,00
	Jumlah	64.404.672.925	60.097.868.448,99	93,31	4.306.804.476,01

5.2.3.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Anggaran sebesar Rp63.728.592.925,00 dengan realisasi Rp59.616.749.066,99 atau 93,55%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Kec. Sungailiat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kec. Sungailiat, dan Sekretariat Daerah sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinkes, Dinas Pendidikan, RSUD, Dinparpora, Dinpan, Dukcapil, DLH, Dinas Perumahan, Dinakerperindag, Kel.Sungailiat, DPUPRP dan Setda,, dengan rincian:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.3.01.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.192.117.558,00	1.176.652.910,00	98,70	2.829.339.512,82
5.2.3.01.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	221.734.000,00
5.2.3.01.08.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	250.000.000,00	248.550.299,00	99,42	199.525.051,00
5.2.3.01.09.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	170.000.000,00	169.600.000,00	99,76	0,00
5.2.3.01.10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan	9.594.862.500,00	9.480.992.700,00	98,81	16.129.734.772,58
5.2.3.01.11.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	402.295.000,00	200.587.000,00	49,86	15.243.913.363,00
5.2.3.01.13.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00
5.2.3.01.27.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	51.999.317.867,00	48.220.366.157,99	92,73	9.500.982.218,50
	Jumlah	63.728.592.925,00	59.616.749.066,99	93,55	44.165.028.917,90

5.2.3.02. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Anggaran sebesar Rp200.630.000,00 dengan realisasi Rp199.380.000,00 atau 99,38% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.3.02.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
Anggaran sebesar Rp200.630.000,00 dengan realisasi Rp199.380.000,00 atau 99,38%.

5.2.3.10. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

Anggaran sebesar Rp475.450.000,00 dengan realisasi Rp281.739.382,00 atau 59,26%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan pada Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD DPUPRP dan Dinsospemdes, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.3.10.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
Anggaran sebesar Rp425.450.000,00 dengan realisasi Rp232.355.382,00 atau 54,61%.

5.2.3.10.02. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp49.384.000,00 atau 98,77%.

5.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran sebesar Rp21.607.992.800,00 dengan realisasi Rp18.188.903.369,53 atau 84,18% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.4.01.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	12.498.437.000,00	12.315.085.400,00	98,53	59.149.698.689,25
5.2.4.02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.798.102.500,00	2.744.446.981,57	98,08	4.065.378.000,00
5.2.4.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	158.893.000,00
5.2.4.06.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.341.630.000,00	1.323.642.108,96	98,66	16.675.625.525,00
5.2.4.07.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	315.685.800,00	292.965.000,00	92,80	38.689.212,38
5.2.4.08.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	90.000.000,00	89.108.000,00	99,01	0,00
5.2.4.16.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	539.033.959,00
5.2.4.20.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	4.564.137.500,00	1.423.655.879,00	31,19	4.206.899.000,00
	Jumlah	21.607.992.800,00	18.188.903.369,53	84,18	84.834.217.385,63

Tahun 2020 realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD:

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	202.755.800,00	195.837.000,00	96,59	6.918.800,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.799.144.000,00	17.607.361.369,53	84,65	3.191.782.630,47
3.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	202.930.000,00	186.236.000,00	91,77	16.694.000,00
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	400.000.000,00	199.469.000,00	49,87	200.531.000,00
5.	Sekretariat Daerah	3.163.000,00	0,00	0,00	3.163.000,00
	Jumlah	21.607.992.800,00	18.188.903.369,53	84,18	3.419.089.430,47

5.2.4.01. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

Anggaran sebesar Rp12.498.437.000,00 dengan realisasi Rp12.315.085.400,00 atau 98,53%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan pada Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD DPUPRP, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.4.01.03. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kab/Kota
 Anggaran sebesar Rp12.498.437.000,00 dengan

realisasi Rp12.315.085.400,00 atau 98,53%.

- 5.2.4.02. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Anggaran sebesar Rp2.798.102.500,00 dengan realisasi Rp2.744.446.981,57 atau 98,08%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan pada Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD DPUPRP, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.4.02.09. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jembatan Penyeberangan Anggaran sebesar Rp2.798.102.500,00 dengan realisasi Rp2.744.446.981,57 atau 98,08%.
- 5.2.4.06. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Anggaran sebesar Rp1.341.630.000,00 dengan realisasi Rp1.323.642.108,96 atau 98,66%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD DPUPRP, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.4.06.04. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Pembuang Pengaman Sungai Anggaran sebesar Rp1.341.630.000,00 dengan realisasi Rp1.323.642.108,96 atau 98,66%.
- 5.2.4.07. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah Anggaran sebesar Rp315.685.800,00 dengan realisasi Rp292.965.000,00 atau 92,80%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD DP2KBP3A, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.4.07.02. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Anggaran sebesar Rp315.685.800,00 dengan realisasi Rp292.965.000,00 atau 92,80%.
- 5.2.4.08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dengan realisasi

Rp89.108.000,00 atau 99,01%, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.4.08.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

Anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dengan realisasi Rp89.108.000,00 atau 99,01%.

5.2.4.20. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Air Minum

Anggaran sebesar Rp4.564.137.500,00 dengan realisasi Rp1.423.655.879,00 atau 31,19% dengan rincian sebagai berikut:

5.2.4.20.01. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Pembawa

Anggaran sebesar Rp4.560.974.500,00 dengan realisasi Rp1.423.655.879,00 atau 31,21%.

5.2.4.20.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah

Anggaran sebesar Rp3.163.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran sebesar Rp1.113.517.000,00 dengan realisasi Rp994.096.381,00 atau 89,28% dengan rincian sebagai berikut:

Kode akun	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.2.5.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	130.805.000,00
5.2.5.02.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Terbitan	773.513.000,00	678.357.263,00	87,70	1.773.361.082,00
5.2.5.03.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	21.565.000,00
5.2.5.04.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	53.354.000,00	48.529.418,00	90,96	623.904.000,00
5.2.5.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	225.000.000,00	223.566.000,00	99,36	397.050.000,00
5.2.5.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Hewan	60.150.000,00	42.143.700,00	70,06	0,00
	Jumlah	1.113.517.000,00	994.096.381,00	89,28	2.946.685.082,00

Tahun 2020 realisasi belanja modal aset tetap lainnya berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD:

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.013.513.000,00	913.801.181,00	90,16	99.711.819,00
2.	Dinas Sosial	1.000.000,00	990.000,00	99,00	10.000,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.054.000,00	2.480.500,00	81,22	573.500,00
4.	Dinas Perikanan	60.150.000,00	42.143.700,00	70,06	18.006.300,00
5.	Kecamatan Sungailiat	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
6.	Sekretariat Daerah	24.500.000,00	23.885.000,00	97,49	615.000,00
7.	Sekretariat DPRD	10.800.000,00	10.296.000,00	95,33	504.000,00

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
	Jumlah	1.113.517.000,00	994.096.381,00	89,28	119.420.619,00

- 5.2.5.02. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Terbitan
 Anggaran sebesar Rp773.513.000,00 dengan realisasi Rp678.357.263,00 atau 87,70% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.5.02.01. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Terbitan Berkala
 Anggaran sebesar Rp773.513.000,00 dengan realisasi Rp678.357.263,00 atau 87,70%.
- 5.2.5.03. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
 Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dengan realisasi Rp1.500.000,00 atau 100,00%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Sekretariat Daerah sedangkan padatahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Kearsipan Perpustakaan, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.5.03.01. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
 Anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dengan realisasi Rp1.500.000,00 atau 100,00%.
- 5.2.5.04. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
 Anggaran sebesar Rp53.354.000,00 dengan realisasi Rp48.529.418,00 atau 90,96% dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.5.04.03. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
 Anggaran sebesar Rp53.354.000,00 dengan realisasi Rp48.529.418,00 atau 90,96%.
- 5.2.5.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
 Anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dengan realisasi Rp223.566.000,00 atau 99,36%. Tahun 2020 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sedangkan Tahun 2019 realisasi belanja berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.5.05.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Alat Olahraga Senam
 Anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi Rp24.950.000,00 atau 99,80%.
- 5.2.5.05.04. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
 Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp198.616.000,00 atau 99,31%.

- 5.2.5.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Hewan
Anggaran sebesar Rp60.150.000,00 dengan realisasi Rp42.143.700,00 atau 70,06%, dengan rincian sebagai berikut:
- 5.2.5.06.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Binatang Ternak
Anggaran sebesar Rp60.150.000,00 dengan realisasi Rp42.143.700,00 atau 70,06%.

5.3 BELANJA TAK TERDUGA

Anggaran sebesar Rp4.636.404.780,00 dengan realisasi Rp1.373.694.400,00 atau 29,63%, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1 Belanja Tak Terduga

Anggaran sebesar Rp4.636.404.780,00 dengan realisasi Rp1.373.694.400,00 atau 29,63%, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.01. Belanja Tak Terduga

Dianggarkan sebesar Rp4.636.404.780,00 dengan realisasi Rp1.373.694.400,00 atau 29,63%, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.01.01. Belanja Tak Terduga

Anggaran sebesar Rp4.636.404.780,00 dengan realisasi Rp1.373.694.400,00 atau 29,63%. Belanja tak terduga pada pemerintah Kabupaten Bangka berupa uang yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak *covid-19* berupa bahan-bahan kebutuhan pokok pada Dinas Sosial sebesar Rp1.365.491.000,00 serta adanya pengembalian dana kepada BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Bangka Belitung akibat salah transfer pada tahun 2019 sebesar Rp8.203.400,00.

6. TRANSFER

Anggaran Rp129.978.039.600,00 dengan realisasi Rp129.978.039.600 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Anggaran Rp5.950.254.200,00 dengan realisasi Rp5.950.254.200,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut: (*Lampiran II.34*)

6.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran sebesar Rp5.196.011.700,00 dengan realisasi Rp5.196.011.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

6.1.1.01. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa

Dianggarkan sebesar Rp5.196.011.700,00 dengan realisasi Rp5.196.011.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

6.1.1.01.03. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Anggaran sebesar Rp5.196.011.700,00 dengan realisasi Rp5.196.011.700,00 atau 100,00%.

6.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Anggaran sebesar Rp754.242.500,00 dengan realisasi Rp754.242.500,00 atau 100,00%

6.1.2.01. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa

Dianggarkan sebesar Rp754.242.500,00 dengan realisasi Rp754.242.500,00 atau 100,00% dengan rincian:

6.1.2.01.02 Transfer Bagi Hasil Retribusi pada Pemerintahan Desa

Anggaran sebesar Rp754.242.500,00 dengan realisasi Rp754.242.500,00 atau 100,00%.

6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Anggaran Rp124.027.785.400,00 dengan realisasi Rp124.027.785.400,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

6.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran sebesar Rp124.027.785.400,00 dengan realisasi Rp124.027.785.400,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

6.2.2.01. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggarkan sebesar Rp124.027.785.400,00 dengan realisasi Rp124.027.785.400,00 atau 100,00%

6.2.2.01.01. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran sebesar Rp124.027.785.400,00 dengan realisasi

Rp124.027.785.400,00 atau 100,00%. (Lampiran II.35)

7. PEMBIAYAAN

7.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Rp130.393.875.401,23 dengan realisasi Rp131.157.002.485,23 atau 100,59% dengan rincian sebagai berikut:

7.1.1. Penggunaan SiLPA

Anggaran sebesar Rp130.393.875.401,23 dengan realisasi Rp130.393.865.708,23 atau 100,00%

7.1.1.01. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Dianggarkan sebesar Rp130.393.875.401,23 dengan realisasi Rp130.393.865.708,23 atau 100,00%

7.1.1.01.01. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Anggaran sebesar Rp130.393.875.401,23 dengan realisasi Rp130.393.865.708,23 atau 100,00%.

7.1.6. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp763.136.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

7.1.6.04. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp763.136.777,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

7.1.6.04.01. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp763.136.777,00 yang merupakan pengembalian dari Kelompok Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR) yang pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Sawindo Kencana. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan dari KKSAR sebesar Rp509.942.937,00, maka terjadi kenaikan penerimaan kembali investasi non permanen dibandingkan tahun 2019 dari KKSAR dikarenakan di tahun 2020 angsuran tahap ke 5 mulai dibayarkan sebesar Rp240.769.488,00, dengan uraian: *(Lampiran II.4)*

No.	Tgl Kasda	Realisasi 2020 (Rp)	Tgl Kasda	Realisasi 2019 (Rp)
1	08-Mei-2020	120.585,00	18-Jan-2019	91.424.814,00
2	30-Des-2020	522.246.704,00	22-Feb-2019	44.476.259,00
3	30-Des-2020	240.769.488,00	20-Mar-2019	25.401.108,00
4			18-Apr-2019	12.694.088,00
5			31-Mei-2019	7.935.073,00
6			24-Jun-2019	6.257.984,00
7			29-Jul-2019	11.464.057,00
8			06-Des-2019	880.650,00
9			31-Des-2019	30.699.057,00
10			31-Des-2019	278.709.847,00
	Jumlah	763.136.777,00		509.942.937,00

7.2 Pengeluaran Pembiayaan

Untuk tahun 2020 anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp507.984.000,00 dengan realisasi Rp507.984.000,00 atau 100,00%.

7.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

7.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp500.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyertaan Modal pada BUMD

Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp500.000.000,00 atau 100,00% yang merupakan penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Perusahaan Umum Daerah Agro Lestari Mandiri (*Lampiran II.18*)

7.2.7. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Anggaran sebesar Rp7.984.000,00 dengan realisasi Rp7.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

7.2.7.01. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Anggaran sebesar Rp7.984.000,00 dengan realisasi Rp7.984.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

7.2.7.01.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Anggaran sebesar Rp7.984.000,00 dengan realisasi Rp7.984.000,00 atau 100,00% yang merupakan pembayaran hutang Kecamatan Sungailiat kepada pihak ketiga.

7.3 Pembiayaan Netto

Merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan	Rp131.157.002.485,23
Pengeluaran Pembiayaan (Rp507.984.000,00)	
Pembiayaan Netto	Rp130.649.018.485,23

7.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun

Anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp114.642.548.458,61. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yang terdiri dari:

▪ Kas daerah di bank	Rp78.544.430.786,49
▪ Kas di BLUD Dinkes (bank)	Rp29.743.379.729,12
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Dinkes	Rp18.529.500,00
▪ Kas di BOS APBN SD & SLTP (<i>Lampiran II.7</i>)	Rp6.336.208.443,00
▪ Tunai	Rp277.109.368,00
▪ Bank	Rp6.059.099.075,00

7.5 Informasi Tambahan

a. Pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020, terdapat sisa DAK pada rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Fisik (DAK Reguler) yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan	12.270.291.072,00	12.251.419.672,00	99,85	18.871.400,00
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	30.365.690.520,00	27.390.793.678,00	90,20	2.974.896.842,00
3	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman- Cadangan	1.357.215.000,00	1.353.615.000,00	99,73	3.600.000,00
4	DAK Fisik Bidang Jalan-Cadangan	10.206.949.000,00	10.190.257.000,00	99,84	16.692.000,00
Jumlah		54.200.145.592,00	51.186.085.350,00	94,44	3.014.060.242,00
Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Fisik (DAK Penugasan) yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DAK Penugasan Kesehatan	22.809.209.985,00	22.796.954.985,00	99,95	12.255.000,00
2	DAK Penugasan Sanitasi	1.213.414.000,00	1.208.017.300,00	99,56	5.396.700,00
3	DAK Penugasan Pertanian	336.045.000,00	336.045.000,00	100,00	0,00
4	DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan	670.484.896,00	667.470.900,00	99,55	3.013.996,00
5	DAK Penugasan Pariwisata - Cadangan	361.899.000,00	361.899.000,00	100,00	0,00
6	DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan-Cadangan	302.897.000,00	302.897.000,00	100,00	0,00
7	DAK Penugasan Air Minum- Cadangan	1.546.985.379,00	1.521.324.939,00	98,34	25.660.440,00
Jumlah		27.240.935.260,00	27.194.609.124,00	99,83	46.326.136,00

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik Yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020						
No	Bidang	Sisa Dana di RKUD Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Dana yang Ditransfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana
1	DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan (BOK)	1.239.493.348,00	11.544.165.652,00	11.275.719.648,00	88,20	1.507.939.352,00
2	DAK Non Fisik Biaya Operasional Kesehatan (BOK Tambahan)	-	5.942.099.801,00	5.942.067.631,00	100,00	32.170,00
3	DAK Non Fisik Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	867.496.725,00	1.509.087.275,00	2.337.036.770,00	98,34	39.547.230,00
4	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas UKM	-	417.358.000,00	394.458.700,00	94,51	22.899.300,00
5	DAK Non Fisik Adminduk	26.239.154,00	1.088.052.846,00	1.067.576.972,00	95,81	46.715.028,00
6	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	149.056.000,00	127.935.000,00	213.307.200,00	77,01	63.683.800,00
7	DAK Non Fisik Biaya Operasional PAUD	595.200.000,00	4.597.800.000,00	4.699.200.000,00	90,49	493.800.000,00
8	DAK Non Fisik Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan	37.637.500,00	1.329.762.500,00	1.299.400.000,00	95,03	68.000.000,00
9	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	791.318.060,00	51.733.304.000,00	49.316.835.420,00	93,89	3.207.786.640,00
10	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	355.500.000,00	637.750.000,00	984.487.500,00	99,12	8.762.500,00
Jumlah		4.016.940.787,00	78.927.315.074,00	77.530.089.841,00	93,42	5.459.166.020,00

Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Bantuan Keuangan untuk Pemerintah yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DABA Dinas Lingkungan Hidup	199.925.000,00	198.146.500,00	99,11	1.778.500,00
2	DABA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.308.000.000,00	4.282.600.000,00	99,41	25.400.000,00
3	DABA Sekretariat Daerah	336.000.000,00	336.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		4.843.925.000,00	4.816.746.500,00	99,44	27.178.500,00

Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Insentif Daerah yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DID	36.810.876.000,00	35.078.495.256,00	95,29	1.732.380.744,00
Jumlah		36.810.876.000,00	35.078.495.256,00	95,29	1.732.380.744,00

Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Insentif Daerah Tambahan yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang di Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	DID Tambahan	13.446.531.000,00	12.627.615.050,00	93,91	818.915.950,00
Jumlah		13.446.531.000,00	12.627.615.050,00	93,91	818.915.950,00

Rekapitulasi Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Pemerintah yang Dirinci Menurut Bidang Lingkup Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020					
No	Bidang	Jumlah Dana yang Transfer (Rp)	Realisasi Dana (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
A	KECAMATAN BELINYU	2.562.000.000,00	2.463.841.750,00	96,17	98.158.250,00
1	Kelurahan Kuto Panji	366.000.000,00	359.349.000,00	98,18	6.651.000,00
2	Kelurahan Bukit Ketok	366.000.000,00	350.129.500,00	95,66	15.870.500,00
3	Kelurahan Air Jukung	366.000.000,00	353.222.000,00	96,51	12.778.000,00
4	Kelurahan Air Asem	366.000.000,00	351.926.000,00	96,15	14.074.000,00
5	Kelurahan Belinyu	366.000.000,00	351.872.500,00	96,14	14.127.500,00
6	Kelurahan Remodong Indah	366.000.000,00	348.023.250,00	95,09	17.976.750,00
7	Kelurahan Mantung	366.000.000,00	349.319.500,00	95,44	16.680.500,00
B	KECAMATAN SUNGAILIAT	4.392.000.000,00	4.187.487.421,00	95,34	204.512.579,00
1	Kelurahan Sungailiat	366.000.000,00	349.580.000,00	95,51	16.420.000,00
2	Kelurahan Parit Padang	366.000.000,00	347.423.000,00	94,92	18.577.000,00
3	Kelurahan Srimenanti	366.000.000,00	359.344.300,00	98,18	6.655.700,00
4	Kelurahan Sinar Baru	366.000.000,00	356.998.000,00	97,54	9.002.000,00
5	Kelurahan Kenanga	366.000.000,00	362.204.000,00	98,96	3.796.000,00
6	Kelurahan Kuday	366.000.000,00	330.071.865,00	90,18	35.928.135,00
7	Kelurahan Bukit Betung	366.000.000,00	351.245.000,00	95,97	14.755.000,00
8	Kelurahan Sinar Jaya Jelutung	366.000.000,00	341.501.000,00	93,31	24.499.000,00
9	Kelurahan Lubuk Kelik	366.000.000,00	359.775.860,00	98,30	6.224.140,00
10	Kelurahan Matras	366.000.000,00	342.001.275,00	93,44	23.998.725,00
11	Kelurahan Surya Timur	366.000.000,00	330.784.221,00	90,38	35.215.779,00
12	Kelurahan Jelitik	366.000.000,00	356.558.900,00	97,42	9.441.100,00
Jumlah		6.954.000.000,00	6.651.329.171,00	95,65	302.670.829,00

- b. Sisa Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2020 pada rekening umum daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**PERHITUNGAN PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD
TAHUN 2020
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BERSUMBER DARI APBN MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH
(dalam rupiah)**

No	Keterangan	Realisasi
1	Sisa DTP Guru yang ada di Kas Daerah Th 2019	355.500.000,00
2	Rincian Penerimaan DTP Guru Tahun 2020	637.750.000,00
	- Triwulan I	169.650.000,00
	- Triwulan II	141.375.000,00
	- Triwulan III	141.375.000,00
	- Triwulan IV	113.100.000,00
	- Tambahan Kekurangan	72.250.000,00
3	Jumlah DTP Th 2020 (1+2)	993.250.000,00
4	Pembayaran DTP Tahun 2020 (Berdasarkan SP2D):	989.000.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan I	198.000.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan II	266.250.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan III	264.500.000,00
	- Pembayaran DTP Triwulan IV	260.250.000,00
5	Sisa Dana (3-4)	4.250.000,00
6	Pengembalian di Triwulan I + II+III	4.512.500,00
7	Sisa DTP Guru seluruh yang ada di Kas Daerah Kab. Bangka (5+6)	8.762.500,00

**PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2020
KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BERSUMBER DARI APBN MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH
(dalam rupiah)**

No	Keterangan	Realisasi
1	Sisa Dana Tunjangan Profesi yang ada di Kas daerah Th.2019	791.318.060,00
2	Rincian Penerimaan Dana TPG Th.2020 :	51.733.304.000,00
	- Triwulan I	15.519.991.000,00
	- Triwulan II	12.933.326.000,00
	- Triwulan III	12.933.326.000,00
	- Triwulan IV	10.346.661.000,00
3	Jumlah Dana TPG Th 2020 (1+2)	52.524.622.060,00
4	Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Tahun 2020 (Berdasarkan SP2D) :	49.316.835.420,00
	a. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN I:	13.755.983.720,00
	- Tahap I	13.697.851.460,00
	- Tahap II	58.132.260,00
	b. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN II:	13.551.753.000,00
	- Tahap I	13.551.753.000,00
	c. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN III:	13.304.225.300,00
	- Tahap I	12.680.782.400,00
	- Tahap II	614.682.600,00
	- Tahap III	8.760.300,00
	d. Rincian Pembayaran Tunjangan Profesi TRIWULAN IV	8.704.873.400,00
5	Jumlah Pembayaran Dana TPG	49.316.835.420,00
6	Sisa Dana Tunjangan Profesi seluruh yang ada di Kas Daerah Kab Bangka (3-5)	3.207.786.640,00

c. Laporan Penggunaan APBD untuk Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka

LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2020

A. PENANGANAN KESEHATAN

No.	OPD	Prioritas/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.750.000,00	163.921.000,00	45,31
2.	Dinas Kesehatan	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.092.755.039,00	7.092.376.455,00	99,99
		b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	100,00
		c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	97.941.811,00	97.941.811,00	100,00
		d. Program Sumber Daya Kesehatan	17.625.453.150,00	17.052.787.803,00	96,75
		e. Program Upaya Kesehatan Perorangan	6.384.499.801,00	6.384.071.489,09	99,99
		f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
3.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	347.800.000,00	329.396.250,00	94,71
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	6.045.360.000,00	5.653.447.975,00	93,52
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	235.140.000,00	156.243.000,00	66,45
6.	Sekretariat Daerah	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.000.000,00	35.957.500,00	99,88
		b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.400.000,00	93.800.000,00	98,32
7.	Kecamatan Sungailiat	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.Sungailiat	50.000.000,00	45.499.250,00	91,00
		b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (DAU)	3.881.550.000,00	3.684.088.621,00	94,91

No.	OPD	Prioritas/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
8.	Kecamatan Belinyu	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Belinyu	50.000.000,00	49.914.000,00	99,83
		b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2.562.000.000,00	2.463.841.750,00	96,17
9	Kecamatan Mendo Barat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	49.648.500,00	99,30
10.	Kecamatan Pemali	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	45.119.000,00	90,24
11.	Kecamatan Puding Besar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	49.937.500,00	99,88
12.	Kecamatan Bakam	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	49.982.340,00	99,96
13.	Kecamatan Riau Silip	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	49.510.500,00	99,02
14.	Kecamatan Merawang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000,00	48.619.200,00	97,24
		Jumlah	50.325.649.801,00	48.756.103.944,09	96,88

**LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA
UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2020**

B. JARING PENGAMAN SOSIAL

No.	OPD	Prioritas/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
1.	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	22.735.000.000,00	20.317.826.856,00	89,37
		Jumlah	22.735.000.000,00	20.317.826.856,00	89,37

**LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA
UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2020**

C. PENANGANAN DAMPAK EKONOMI (ANGGARAN UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA)

No.	OPD	Prioritas/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
1.	PPKD	a. Belanja Hibah Pariwisata kepada Hotel/Penginapan/Wisma	421.323.290,00	293.161.167,00	69,58
		b. Belanja Hibah Pariwisata kepada Restoran	443.659.710,00	295.471.559,00	66,60
		c. Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	0,00	0,00
		d. Belanja Tak Terduga	4.636.404.780,00	1.365.491.000	29,45
		Jumlah	6.501.387.780,00	1.954.123.726,00	30,06

**LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGKA
UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2020**

D. PEMULIHAN EKONOMI

No.	OPD	Prioritas/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
1.	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.930.631.000,00	1.903.147.704,00	98,58
2.	Dinas Perikanan	Program Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Peningkatan Tangkap	1.104.360.000,00	881.345.000,00	79,81
3.	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri c. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	167.560.000,00 1.204.270.000,00 2.963.785.000,00 362.315.000,00	165.265.200,00 1.185.067.000,00 2.862.224.506,00 353.968.700,00	98,63 98,41 96,57 97,70
4.	Dinas Pangan dan Pertanian	a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	656.400.000,00 395.500.000,00 2.035.640.000,00	643.107.605,00 385.991.328,00 2.032.455.000,00	97,97 97,60 99,84
5.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.802.000.000,00	2.381.705.840,00	85,00
6.	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Pengembangan Lingkungan Sehat, Obat dan Perbekalan Sehat dan Program Sumber Daya Kesehatan	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Program Pengembangan Pariwisata (Revitalisasi Sarana Prasarana Kebersihan, Keindahan dan Keamanan) b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	190.885.935,00 179.821.065,00	173.593.000,00 176.214.600,00	90,94 97,99
		Jumlah	13.996.688.000,00	13.147.605.483,00	93,93

d. Laporan Keuangan Donasi Covid 19 Kabupaten Bangka sampai bulan Desember Tahun 2020

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)	No	Uraian	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Donasi PT GPL	29/04/2020	20.000.000,00	1	Biaya Administrasi	29/04/2020	3.000,00
2	Donasi BB Diesel	30/04/2020	5.000.000,00	2	Pembelian Kantong Plastik 2.000 buah	05/05/2020	1.300.000,00
3	Donasi Bangka Sukses Sejahtera	04/05/2020	100.000.000,00	3	Pembelian 2.000 paket sembako	01/05/2020	170.750.000,00
4	Donasi PT Palmas Asri Jakarta	06/05/2020	100.000.100,00	4	Pembelian 2 terpal 6x8	11/05/2020	370.000,00
5	Donasi Covid 19	11/05/2020	40.000.000,00	5	Pembelian 20 paket sembako	20/05/2020	2.732.000,00
6	Donasi PT Sumber Utami Nabati	20/05/2020	7.500.000,00	6	Pajak	21/05/2020	8.952,00
7	Donasi PT Alam Lestari	20/05/2020	7.500.000,00	7	Bunga Administrasi Tutup	21/06/2020	7.500,00
8	Bunga Bank	21/05/2020	44.757,00	8	Pajak	21/06/2020	16.337,00

9	Donasi Covid 19	27/05/2020	9.997.100,00	9	Bunga Administrasi Tutup	21/06/2020	7.500,00
10	Bunga Bank	21/06/2020	81.682,00	10	Pajak	21/07/2020	17.392,00
11	Bunga Bank	21/06/2020	86.958,00	11	Bunga Administrasi Tutup	21/07/2020	7.500,00
12	Donasi Tambak Udang	09/07/2020	23.350.000,00	12	Pajak	21/08/2020	26.989,00
13	Donasi Covid 19 ASN Pemkab Bangka	22/07/2020	38.000.000,00	13	Bunga Administrasi Tutup	21/08/2020	7.500,00
14	Donasi PT PAL	03/08/2020	20.000.000,00	14	Pajak	21/09/2020	28.390,00
15	Bunga Bank	21/08/2020	134.944,00	15	Bunga Administrasi Tutup	21/09/2020	7.500,00
16	Bunga Bank	21/09/2020	141.949,00	16	Pajak	21/10/2020	27.492,00
17	Bunga Bank	21/10/2020	137.460,00	17	Bunga Administrasi Tutup	21/10/2020	7.500,00
18	Setor dari Waloyo	18/11/2020	10.000,00	18	Pembelian Paket 45 Sembako	02/11/2020	2.497.000,00
				19	Pembelian Paket 8 Sembako	03/11/2020	891.000,00
				20	Pembelian Paket 46 Sembako	09/11/2020	2.553.000,00
				21	Pembelian Paket 2.000 Sembako	16/11/2020	126.000.000,00
Jumlah			371.984.950,00	Jumlah			307.266.552,00
			SALDO				64.718.398,00

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Anggaran Penggunaan SILPA pada Penerimaan Pembiayaan yaitu sebesar Rp130.393.875.401,23.

2. Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp130.393.865.708,23.

3. SILPA Tahun Berjalan

SILPA tahun berjalan diperoleh dari SILPA tahun 2020 pada LRA yaitu sebesar Rp114.642.548.458,61.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp(9.693,00)

Merupakan koreksi atas pendapatan jasa giro dana BOS APBN tahun 2019 yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp9.693,00.

5. Lain-Lain

- a. Koreksi Pendapatan sebesar Rp0,00.
- b. Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00.
- c. Koreksi Saldo Awal Rp0,00.
- d. Koreksi BLUD Rp0,00.

6. Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 sebesar Rp114.642.548.458,61 yang terdiri dari:

▪ Kas daerah di bank	Rp78.544.430.786,49
▪ Kas di BLUD Dinkes (bank)	Rp29.743.379.729,12
▪ Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Dinkes	Rp18.529.500,00
▪ Kas di BOS APBN SD & SLTP(Lampiran II.7)	Rp6.336.208.443,00
▪ Tunai	Rp277.109.368,00
▪ Bank	Rp6.059.099.075,00

C. NERACA

1. ASET

Total aset Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.979.665.906.022,23 yang terdiri dari:

1.1. ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp214.781.514.197,75 yang terdiri dari:

1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp114.733.625.231,53 yang terdiri dari:

1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp78.538.878.786,49 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020(Rp)	Per 31 Desember 2019(Rp)
1.	Rekening Giro Bank Sumsel		
	a. Rek. No. 145-3000-304	78.538.878.786,49	115.796.127.897,23
	b. Rek. No. 145-3000-004	0,00	0,00
2.	Rekening Penampungan PBB di Bank Sumsel Babel		
	a. Rek. No. 145-18-66666		0,00
	Jumlah	78.538.878.786,49	115.796.127.897,23

Saldo rekening giro per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.633.411.248,41 sedangkan saldo kas di kas daerah pada neraca sebesar Rp78.538.878.786,49. Selisih antara saldo di rekening giro dengan kas di kas daerah tersebut sebesar Rp94.532.461,92. Hal ini disebabkan karena utang kepada pihak ketiga yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 belum dibayarkan. Namun uang tersebut sudah masuk ke kas daerah, sehingga dianggap bukan merupakan bagian dari SILPA Pemerintah Kabupaten Bangka dan diakui sebagai Kas Lainnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rp16.250.000,00 merupakan pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015, namun sampai dengan tahun 2018, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya.
- 2) SKRDLB DPUP sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata, tbk yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016.
- 3) Setoran utang SKPP atas nama H.K.A Cholil Rp5.552.000 yang seharusnya ditransfer ke Kasda Provinsi Bangka Belitung namun setelah dilakukan penelusuran ternyata setoran utang tersebut masuk ke Kasda Kabupaten Bangka (*Lampiran II.30*)

1.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.529.500,00 terdiri dari :

Jumlah kas di bendahara penerimaan BLUD Dinkes per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.529.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	PKM Penagan	86.500,00	0,00
2.	PKM Puding Besar	0,00	0,00
3.	PKM Riau Silip	40.000,00	0,00
4.	PKM Bakam	40.000,00	789.000,00
5.	PKM Pemali	25.000,00	0,00
6.	PKM Batu Rusa	360.500,00	0,00
7.	PKM Belinyu	247.500,00	0,00
8.	PKM Sungailiat	1.747.000,00	0,00
9.	PKM Gunung Muda	0,00	0,00
10.	PKM Kenanga	197.500,00	0,00
11.	PKM Sinar Baru	60.500,00	0,00
12.	PKM Petaling	85.500,00	0,00
13.	RSUD DR. Eko Maulana Ali	471.000,00	0,00
14.	RSUD Depati Bahrin	14.094.000,00	16.589.000,00
15.	RSUD Sjafrie Rachman	1.074.500,00	0,00
	Jumlah	18.529.500,00	17.378.000,00

Atas saldo kas tersebut telah dilakukan pengesahan oleh BUD sehingga diakui sebagai Kas di BLUD Dinkes.

1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.603,00 merupakan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan pada RSUD Sjafrie Rachman sebesar Rp3.668,00, Bend Peng Pembantu V Dinkes sebesar Rp1.006,00 dan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp55.929,00.(Lampiran II.27)

1.1.1.3. Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.743.379.729,12 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.676.759.482,92 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Puskesmas Kenanga	131.581.420,00	50.381.581,00
2.	Puskesmas Belinyu	133.189.502,00	272.451.825,00
3.	Puskesmas Gunung Muda	128.703.889,00	155.419.542,00
4.	Puskesmas Sungailiat	289.721.438,00	116.129.263,00
5.	Puskesmas Baturusa	67.138.495,00	40.092.324,00
6.	Puskesmas Pemali	445.241.274,00	65.945.021,50
7.	Puskesmas Bakam	117.184.903,50	802.197.602,00
8.	Puskesmas Riau Silip	322.450.512,00	248.289.523,00
9.	Puskesmas Puding Besar	187.869.947,00	405.668.143,00
10.	Puskesmas Petaling	5.154.800,00	229.442.021,00
11.	Puskesmas Sinar Baru	50.501.641,00	24.363.399,00

No.	Unit Kerja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
12.	Puskesmas Penagan	207.726.169,30	319.457.127,10
13.	RSUD Eko Maulana	112.418.292,00	357.752.724,00
14.	RSUD Depati Bahrin	27.521.614.494,32	8.589.169.387,32
15	RSUD Sjafrie Rachman	22.882.952,00	0,00
	Jumlah	29.743.379.729,12	11.676.759.482,92

1.1.1.4. Kas di Bendahara Pengeluaran BOS APBN

Saldo kas yang bersumber dari APBN sebesar Rp6.336.244.443,00 merupakan saldo kas tunai sebesar Rp277.109.368,00 di bank sebesar Rp6.059.099.075,00 yaitu sebagai berikut: (Lampiran II.7)

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)		31 Desember 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
1.	Sekolah Dasar	208.639.948,00	3.002.912.302,00	332.129.566,00	1.274.379.937,00
2.	SLTP	68.469.420,00	3.056.222.773,00	88.617.053,00	1.297.463.927,00
3.	Jumlah	277.109.368,00	6.059.135.075,00	420.746.619,00	2.571.843.864,00

Adapun rincian saldo tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sekolah	Saldo 2020 (Rp)		Saldo 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
	Kec. Sungailiat				
1	SDN 1 Sungailiat	0,00	13.307.265,00	428.592,00	3.182.752,00
2	SDN 2 Sungailiat	0,00	8.921.252,00	4.016.231,00	0,00
3	SDN 3 Sungailiat	0,00	19.372.522,00	1.146.089,00	0,00
4	SDN 4 Sungailiat	0,00	25.620.568,00	426.304,00	3.884,00
5	SDN 5 Sungailiat	0,00	16.658.370,00	0,00	95.420,00
6	SDN 6 Sungailiat	0,00	33.795.875,00	4.596.460,00	5.062.623
7	SDN 7 Sungailiat	0,00	4.084.772,00	32.772,00	800.000,00
8	SDN 8 Sungailiat	0,00	47.448.857,00	110.507,00	99.070,00
9	SDN 9 Sungailiat	0,00	25.975.603,00	5.533.500,00	9.666.603,00
10	SDN 10 Sungailiat	0,00	66.697.431,00	1.120.568,00	6.560.000,00
11	SDN 11 Sungailiat	0,00	4.140.483,00	2.343.283,00	0,00
12	SDN 12 Sungailiat	0,00	22.538.274,00	1.053.888,00	148.121,00
13	SDN 13 Sungailiat	5.904.372,00	11.180.659,00	1.122.572,00	150.659,00
14	SDN 14 Sungailiat	0,00	2.612.016,00	235.315,00	640.000,00
15	SDN 15 Sungailiat	0,00	32.194.801,00	2.779.734,00	10.000,00
16	SDN 16 Sungailiat	0,00	8.231.869,00	1.248.140,00	58.109,00
17	SDN 17 Sungailiat	0,00	2.156.785,00	73.885,00	1.280.000,00
18	SDN 18 Sungailiat	0,00	211.621,00	63.521,00	0,00
19	SDN 19 Sungailiat	0,00	21.656.685,00	857.378,00	7.469.726,00
20	SDN 20 Sungailiat	0,00	17.344.951,00	1.214.112,00	0,00
21	SDN 21 Sungailiat	0,00	2.460.997,00	0,00	6.455.897,00
22	SDN 22 Sungailiat	0,00	3.510.508,00	819.144,00	264,00
23	SDN 23 Sungailiat	0,00	21.670.025,00	2.105.701,00	0,00
24	SDN 24 Sungailiat	0,00	30.220.000,00	24,00	0,00
25	SDN 25 Sungailiat	0,00	26.630.227,00	1.984.667,00	464.504,00
26	SDN 26 Sungailiat	0,00	6.282.609,00	94.490,00	1.280.000,00
27	SDN 27 Sungailiat	0,00	8.689.792,00	856.892,00	160.000,00

No	Sekolah	Saldo 2020 (Rp)		Saldo 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
28	SDN 28 Sungailiat	0,00	10.292.393,00	2.864.080,00	298.013,00
29	SDN 29 Sungailiat	0,00	43.150.056,00	7.920.006,00	5.800.000,00
30	SDN 30 Sungailiat	0,00	756.000,00	1.070.000,00	8.000.000,00
31	SDN 31 Sungailiat	0,00	1.149.933,00	89.370,00	3.200.000,00
32	SDN 32 Sungailiat	0,00	44.551.045,00	7.103.146,00	2.966.122,00
	Kec. Pemali				
1	SDN 1 Pemali	0,00	33.401.258,00	3.623,00	12.268.672,00
2	SDN 2 Pemali	677.499,00	40.640.000,00	164.599,00	640.000,00
3	SDN 3 Pemali	504.000,00	17.100.000,00	2.056.650,00	221.150,00
4	SDN 4 Pemali	1.900.600,00	14.530.000,00	1.239.531,00	1.440.000,00
5	SDN 5 Pemali	0,00	23.495.978,00	154.678,00	9.280.000,00
6	SDN 6 Pemali	1.966.212,00	13.095.270,00	796.712,00	207.570,00
7	SDN 7 Pemali	0,00	44.266.940,00	1.679.620,00	21.200.000,00
8	SDN 8 Pemali	0,00	5.709.807,00	0,00	499.807,00
9	SDN 9 Pemali	0,00	44.689.258,00	388.758,00	0,00
10	SDN 10 Pemali	530.671,00	29.040.724,00	93.824,00	3.190.724,00
11	SDN 11 Pemali	0,00	12.900.812,00	2.446.712,00	0,00
12	SDN 12 Pemali	1.722.742,00	5.276.000,00	7.742,00	52.456.000,00
13	SDN 13 Pemali	0,00	10.972.071,00	49.618,00	2.880.000,00
14	SDN 14 Pemali	0,00	16.359.974,00	2.736.820,00	33.254,00
15	SDN 15 Pemali	0,00	29.626.060,00	389.460,00	11.200.000,00
	Kec. Mendo Barat				
1	SDN 1 Mendo Barat	194.696,00	1.620.000,00	194.696,00	0,00
2	SDN 2 Mendo Barat	2.816.000,00	1.854.000,00	800.000,00	54.960.000,00
3	SDN 3 Mendo Barat	3.740.860,00	0,00	2.142.851,00	0,00
4	SDN 4 Mendo Barat	480.360,00	1.013.679,00	480.360,00	64.013.679,00
5	SDN 5 Mendo Barat	441,00	3.510.000,00	441,00	0,00
6	SDN 6 Mendo Barat	1.890.000,00	0,00	244.656,00	28.495,00
7	SDN 7 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
8	SDN 8 Mendo Barat	5.250.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9	SDN 9 Mendo Barat	806.816,00	11.773.913,00	45.916,00	7.453.913,00
10	SDN 10 Mendo Barat	5.210.386,00	0,00	90.386,00	5.120.000,00
11	SDN 11 Mendo Barat	4.070.000,00	0,00	200.000,00	3.808,00
12	SDN 12 Mendo Barat	1.327.012,00	0,00	78.7012,00	0,00
13	SDN 13 Mendo Barat	0,00	13.920.000,00	1.760.000,00	0,00
14	SDN 14 Mendo Barat	159.238,00	89.762,00	0,00	4.089.762,00
15	SDN 15 Mendo Barat	125.000,00	10.000.000,00	4.331.235,00	0,00
16	SDN 16 Mendo Barat	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SDN 17 Mendo Barat	0,00	3.150.000,00	3.000.490,00	0,00
18	SDN 18 Mendo Barat	0,00	3.240.000,00	0,00	139.000.000,00
19	SDN 19 Mendo Barat	1.775.000,00	250.000,00	800.000,00	1.600.000,00
20	SDN 20 Mendo Barat	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00
21	SDN 21 Mendo Barat	24.000,00	26.000,00	3.776,00	5.120.000,00
22	SDN 22 Mendo Barat	16.320.000,00	0,00	176.424,00	0,00
23	SDN 23 Mendo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SDN 24 Mendo Barat	604.000,00	12.870.000,00	1.553.853,00	0,00
25	SDN 25 Mendo Barat	425.000,00	0,00	0,00	0,00
26	SDN 26 Mendo Barat	0,00	9.420.594,00	0,00	1.660.594,00
27	SDN 27 Mendo Barat	374.597,00	0,00	103.797,00	0,00
28	SDN 28 Mendo Barat	143,00	2.700.000,00	44.018,00	49.000,00
29	SDN 29 Mendo Barat	3.275.544,00	13.000.000,00	3.073.406,00	0,00

No	Sekolah	Saldo 2020 (Rp)		Saldo 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
30	SDN 30 Mendo Barat	236.066,00	0,00	27.6416,00	0,00
31	SDN 31 Mendo Barat	1.725.000,00	0,00	273.637,00	0,00
32	SDN 32 Mendo Barat	504.029,00	14,00	3.025.029,00	14,00
33	SDN 33 Mendo Barat	1.258.503,00	13.400.000,00	259.171,00	640.000,00
	Kec. Riau Silip				
1	SDN 1 Riau Silip	1.779.480,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	SDN 2 Riau Silip	1.128.474,00	6.000.000,00	27.765,00	0,00
3	SDN 3 Riau Silip	1.006.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	SDN 4 Riau Silip	540.000,00	0,00	0,00	0,00
5	SDN 5 Riau Silip	44.500.452,00	14.550.000,00	8.247.352,00	6.240.000,00
6	SDN 6 Riau Silip	0,00	27.115.100,00	0,00	0,00
7	SDN 7 Riau Silip	5.213.400,00	5.030.000,00	2.740.543,00	1.600.000,00
8	SDN 8 Riau Silip	1.201.335,00	33.493,00	1.437.535,00	33.493,00
9	SDN 9 Riau Silip	673.230,00	6.850.000,00	0,00	1.920.000,00
10	SDN 10 Riau Silip	1.862.000,00	0,00	4.490.000,00	0,00
11	SDN 11 Riau Silip	0,00	18.470.000,00	2.240.000,00	1.280.000,00
12	SDN 12 Riau Silip	2.841.200,00	4.405.000,00	1.920.000,00	51.200.000,00
13	SDN 13 Riau Silip	1.899.865,00	10.790.000,00	325.000,00	68.400.000,00
14	SDN 14 Riau Silip	367.300,00	76.586.000,00	0,00	45.920.000,00
15	SDN 15 Riau Silip	1.846.000,00	14.278.646,00	0,00	480.000,00
16	SDN 16 Riau Silip	1.935.859,00	89.070.000,00	2.888.859,00	64.000.000,00
17	SDN 17 Riau Silip	13.896.200,00	67.960.000,00	960.000,00	320.000,00
18	SDN 18 Riau Silip	583.430,00	15.910.000,00	501.015,00	0,00
	Kec. Puding Besar				
1	SDN 1 Puding Besar	0,00	7.411.000,00	2.112.651,00	1.600.000,00
2	SDN 2 Puding Besar	7.023.193,00	24.630.000,00	5.611.321,00	0,00
3	SDN 3 Puding Besar	0,00	0,00	2.679.991,00	0,00
4	SDN 4 Puding Besar	0,00	13.456.415,00	0,00	0,00
5	SDN 5 Puding Besar	501.601,00	2.680.000,00	3.996.601,00	60.000.000,00
6	SDN 6 Puding Besar	0,00	22.669.398,00	998,00	0,00
7	SDN 7 Puding Besar	410.547,00	0,00	0,00	413.092,00
8	SDN 8 Puding Besar	349.467,00	292.533,00	0,00	13.652.533,00
9	SDN 9 Puding Besar	0,00	7.571.718,00	0,00	217.658,00
10	SDN 10 Puding Besar	0,00	23.881.700,00	942.154,00	1.755.846,00
	Kec. Belinyu				
1	SDN 1 Belinyu	0,00	73.508.119,00	1.194.260,00	0,00
2	SDN 2 Belinyu	0,00	104.723.659,00	7.183.184,00	1.920.000,00
3	SDN 3 Belinyu	0,00	21.653.460,00	1.119.950,00	0,00
4	SDN 4 Belinyu	3.064.670,00	22.955.000,00	3.446.560,00	0,00
5	SDN 5 Belinyu	0,00	16.627.900,00	2.712.000,00	2.240.000,00
6	SDN 6 Belinyu	0,00	60.409.497,00	7.263.832,00	0,00
7	SDN 7 Belinyu	0,00	29.587.191,00	5.085.500,00	640.000,00
8	SDN 8 Belinyu	46.278,00	6.800.000,00	34.531,00	3.520.000,00
9	SDN 9 Belinyu	0,00	15.653.481,00	1.739.600,00	0,00
10	SDN 10 Belinyu	0,00	27.912.575,00	6.193.500,00	0,00
11	SDN 11 Belinyu	0,00	16.397.836,00	4.925.000,00	0,00
12	SDN 12 Belinyu	0,00	40.095.085,00	6.055.000,00	0,00
13	SDN 13 Belinyu	0,00	29.958.950,00	424.000,00	0,00
14	SDN 14 Belinyu	3.971.500,00	12.309.400,00	0,00	0,00

No	Sekolah	Saldo 2020 (Rp)		Saldo 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
15	SDN 15 Belinyu	0,00	32.369.950,00	1.826.000,00	2.720.000,00
16	SDN 16 Belinyu	0,00	8.043.100,00	2.865.680,00	0,00
17	SDN 17 Belinyu	0,00	10.541.642,00	1.500.000,00	3.520.000,00
18	SDN 18 Belinyu	3.919,00	19.810.000,00	160.000,00	640.000,00
19	SDN 19 Belinyu	0,00	12.645.000,00	2.560.000,00	58.000.000,00
20	SDN 20 Belinyu	0,00	4.466.751,00	0,00	49.120.000,00
21	SDN 21 Belinyu	0,00	10.430.000,00	5.174.100,00	3.820.000,00
22	SDN 22 Belinyu	0,00	46.235.833,00	0,00	0,00
23	SDN 23 Belinyu	0,00	37.581.493,00	0,00	10.000.000,00
24	SDN 24 Belinyu	0,00	6.332.620,00	1.516.100,00	960.000,00
25	SDN 25 Belinyu	236.064,00	10.980.000,00	8.162.000,00	0,00
26	SDN 26 Belinyu	0,00	47.980.896,00	0,00	3.360.000,00
27	SDN 27 Belinyu	3.543,00	65.685.997,00	8.558.400,00	1.404.497,00
	Kec. Bakam				
1	SDN 1 Bakam	1.145.345,00	20.849.322,00	7.913.795,00	2.789.322,00
2	SDN 2 Bakam	0,00	58.652.327,00	6.384.779,00	0,00
3	SDN 3 Bakam	4.281.182,00	21.366.013,00	95.534,00	68.616.013,00
4	SDN 4 Bakam	24.251.478,00	20.236.905,00	8.380.438,00	6.905,00
5	SDN 5 Bakam	0,00	41.843.618,00	6.176.730,00	1.092.602,00
6	SDN 6 Bakam	98,00	4.782.363,00	315.698,00	3.272.363,00
7	SDN 7 Bakam	0,00	45.410.000,00	2.806.150,00	2.440.000,00
8	SDN 8 Bakam	0,00	6.183.995,00	1.646.755,00	65.280.000,00
9	SDN 9 Bakam	0,00	52.797.850,00	1.702.850,00	1.050.000,00
10	SDN 10 Bakam	1.979.931,00	40.082.122,00	4.095.931,00	2.122,00
11	SDN 11 Bakam	7.155,00	14.290.000,00	0,00	0,00
	Kec. Merawang				
1	SDN 1 Merawang	0,00	46.217.144,00	3.501.454,00	11.877.270,00
2	SDN 2 Merawang	0,00	20.925.738,00	6.991.586,00	4.528.180,00
3	SDN 3 Merawang	0,00	19.250.923,00	640.000,00	3.520.000,00
4	SDN 4 Merawang	0,00	6.222.842,00	8.743.172,00	160.000,00
5	SDN 5 Merawang	0,00	39.321.164,00	2.560.624,00	20.960.000,00
6	SDN 6 Merawang	10.769.452,00	5.310.091,00	5.999.909,00	320.091,00
7	SDN 7 Merawang	0,00	10.135.009,00	0,00	1.600.000,00
8	SDN 8 Merawang	0,00	9.738.000,00	3.969.500,00	0,00
9	SDN 9 Merawang	0,00	13.270.105,00	4.193.106,00	0,00
10	SDN 10 Merawang	0,00	2.464.833,00	5.946.035,00	0,00
11	SDN 11 Merawang	0,00	163.224,00	1.631.248,00	960.000,00
12	SDN 12 Merawang	0,00	19.546.035,00	1.495.000,00	60.800.000,00
13	SDN 13 Merawang	0,00	15.569.000,00	5.971.272,00	87.428,00
14	SDN 14 Merawang	0,00	35.608.421,00	9.615.352,00	15.840.000,00
15	SDN 15 Merawang	0,00	43.489.364,00	3.852.738,00	5.680.000,00
16	SDN 16 Merawang	0,00	4.825.947,00	0,00	2.300.000,00
17	SDN 17 Merawang	0,00	49.705.386,00	9.469.942,00	13.352.313,00
18	SDN 18 Merawang	0,00	29.710.000,00	7.482.384,00	1.920.000,00
19	SDN 19 Merawang	0,00	17.100.446,00	141.000,00	0,00
20	SDN 20 Merawang	0,00	5.051.319,00	77.801,00	54.880.000,00
	Jumlah SD	208.639.948,00	3.002.912.302,00	332.129.566,00	1.274.379.937,00
	TINGKAT SLTP				
1	SMPN 1 Sungailiat	0,00	433.192.138,00	24.030,00	98.425.264,00
2	SMPN 2 Sungailiat	1.356.854,00	255.183.497,00	730.894,00	36.533.497,00

No	Sekolah	Saldo 2020 (Rp)		Saldo 2019 (Rp)	
		Tunai	Bank	Tunai	Bank
3	SMPN 3 Sungailiat	0,00	288.909.894,00	1.699.256,00	0,00
4	SMPN 4 Sungailiat	0,00	67.895.064,00	3.803.164,00	15.619.083,00
5	SMPN 5 Sungailiat	13.346.805,00	210.644.768,00	180.326,00	39.549.768,00
6	SMPN 6 Sungailiat	0,00	18.067.127,00	0,00	1.607.127,00
7	SMPN 1 Belinyu	0,00	40.178.759,00	18.759,00	7.200.000,00
8	SMPN 2 Belinyu	0,00	203.073.090,00	5.805.583,00	359.668.615,00
9	SMPN 3 Belinyu	0,00	80.023.816,00	3.841.155,00	800.000,00
10	SMPN 4 Belinyu	0,00	33.305.600,00	6.718.546,00	1.000.454,00
11	SMPN 5 Belinyu	33.095,00	31.725.235,00	1.555.254,00	164.298.076,00
12	SMPN 1 Merawang	12.454.675,00	60.707.477,00	4.136.514,00	39.697.477,00
13	SMPN 2 Merawang	53.400,00	65.230.028,00	1.870.492,00	10.379.536,00
14	SMPN 3 Merawang	0,00	19.412.000,00	3.067.013,00	152.987,00
15	SMPN 1 Mendo Barat	0,00	109.270.554,00	4.560.790,00	29.642.764,00
16	SMPN 2 Mendo Barat	1.896.415,00	98.614.014,00	5.344.785,00	39.811.514,00
17	SMPN 3 Mendo Barat	0,00	50.174.789,00	8.523.786,00	48.823.928,00
18	SMPN 4 Mendo Barat	0,00	12.527.111,00	0,00	0,00
19	SMPN 5 Mendo Barat	24.794.190,00	14.379.159,00	0,00	0,00
20	SMPN 1 Bakam	1.224.870,00	78.649.566,00	303.750,00	23.029.566,00
21	SMPN 2 Bakam	974.445,00	56.840.000,00	2.000.026,00	8.400.000,00
22	SMPN 3 Bakam	7.743.798,00	133.220.590,00	26.748,00	145.230.590,00
23	SMPN 1 Pemali	616.511,00	75.743.295,00	1.636.087,00	22.023.295,00
24	SMPN 2 Pemali	30.870,00	44.940.000,00	4.325.000,00	0,00
25	SMPN 3 Pemali	936.590,00	74.380.000,00	8.940.039,00	30.010.000,00
26	SMPN 1 Puding Besar	0,00	82.101.077,00	1.346.040,00	16.041.979,00
27	SMPN 2 Puding Besar	162.600,00	88.859.725,00	3.200.000,00	142.318.407,00
28	SMPN 3 Puding Besar	0,00	41.208.000,00	4.009.000,00	0,00
29	SMPN 1 Riau Silip	0,00	138.467.300,00	3.960.000,00	200.000,00
30	SMPN 2 Riau Silip	2.769.750,00	52.740.000,00	6.400.000,00	200.000,00
31	SMPN 3 Riau Silip	74.552,00	61.330.000,00	458.388,00	12.200.000,00
32	SMPN 4 Riau Silip	0,00	35.229.100,00	131.628,00	4.600.000,00
	Jumlah SMP	68.469.420,00	3.056.222.773,00	88.617.053,00	1.297.463.927,00

1.1.1.10. Kas Lainnya

Jumlah kas lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.987.294,92 namun pada tahun 2020 sebesar Rp96.532.169,92, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp16.250.000,00 merupakan pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015, namun sampai dengan tahun 2020, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya.
- SKRDLB DPUP sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata Tbk, yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016.
- Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp6.833,00 merupakan saldo bank pada rekening SMPN 1 Belinyu sebesar Rp4.861,00 dan SMPN 2 Sungailiat sebesar Rp1.972,00.
- Rp5.552.000,00 merupakan setoran utang SKPP atas nama H.K.A Cholil yang seharusnya ditransfer ke Kasda Provinsi Bangka Belitung namun setelah dilakukan penelusuran ternyata setoran utang tersebut masuk ke Kasda Kabupaten Bangka (*Lampiran II.30*).

- Kas pada Bendahara Pengeluaran JKN sebesar Rp1.590.167,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
Bend. Dana Kapitasi PKM Sungailiat	0,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Sinar Baru	2.682,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Kenanga	169.212,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Pemali	0,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Bakam	80.056,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Belinyu	242.178,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Gunung Muda	33.696,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Riau Silip	0,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Batu Rusa	68.586,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Puding Besar	333.261,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Petaling	572.701,00
Bend. Dana Kapitasi PKM Penagan	87.795,00
Jumlah	1.590.167,00

- Saldo pada rekening hibah sekolah sebesar Rp402.708,00 yang terdiri dari:

Nama Sekolah	Nama Bank	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
SDN 08 Sungailiat	SumselBabel	21.000,00
SDN 02 Sungailiat	SumselBabel	92.500,00
SDN 09 Pemali	SumselBabel	48.000,00
SDN 14 Pemali	BRI	2.208,00
SDN 08 Bakam	SumselBabel	0,00
SDN 01 Mendo Barat	SumselBabel	48.000,00
SMPN 01 Sungailiat	SumselBabel	0,00
SMPN 03 Sungailiat	SumselBabel	96.000,00
SMPN 04 Riau Silip	SumselBabel	95.000,00
SMPN 05 Mendo Barat	BRI	0,00
SDN 09 Mendo Barat	BNI	0,00
	Jumlah	402.708,00

1.1.3. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp162.684.107.710,38 sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp94.608.767.910,44 yang terdiri dari:

Kode Rekening	Jenis Piutang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	13.245.648.258,72	10.953.120.531,07
1.1.3.2	Piutang Retribusi daerah	4.118.704.630,59	4.210.043.785,60
1.1.3.4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	10.220.272.614,93	16.054.927.618,29
1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	41.533.866.177,00	111.260.380.605,00
1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi Bangka Belitung)	25.625.186.929,20	20.205.635.170,42
1.1.3.8	Piutang Pendapatan Lainnya	5.300,00	0,00
	Jumlah	94.608.767.910,44	162.684.107.710,38

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1.1.3.1. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.245.648.258,72 yang merupakan piutang pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah. Rincian Piutang pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	315.622.976,65	369.041.736,00
2.	Pajak Restoran	162.502.292,20	143.771.656,85
3.	Pajak Hiburan	29.910.150,05	29.910.150,05
4.	Pajak Reklame	300.559.179,00	310.653.512,00
5.	Pajak Parkir	0,00	0,00
6.	Pajak Air Tanah	39.186.676,56	31.609.693,56
7.	Pajak Sarang Burung Walet	171.575.000,00	171.575.000,00
8.	Pajak Penerangan Jalan	301,46	16.826.878,81
9.	Pajak Mineral Bkn Logam dan Batuan	9.951.102,80	628.762.732,80
10.	Pajak PBB-P2	12.216.340.580,00	9.250.969.171,00
	Jumlah	13.245.648.258,72	10.953.120.531,07

- Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2019 sebesar Rp369.041.736,00 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp53.418.759,35 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp315.622.976,65, adapun yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh Parai Beach Hotel sebesar Rp259.787.976,65, Istana Pool Villa sebesar Rp41.290.000,00 Hotel Teluk Uber sebesar Rp12.145.000,00 dan Pantai Rambak sebesar Rp2.400.000,00.

Rekapitulasi Piutang Pajak Hotel yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Hotel (Rp)
1.	< 1 Tahun	0,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	283.090.626,00
4.	> 5 Tahun	32.532.350,65
	Jumlah	315.622.976,65

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.771.656,85 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp22.478.664,65 selama tahun 2020 ada penambahan piutang sebesar Rp41.209.300,00, jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp162.502.292,20, adapun

yang terdiri dari tunggakan yang dimiliki oleh Parai Beach Hotel sebesar Rp87.859.242,20, Toko Ayin Rp17.466.400,00, CV Central Niaga Cipta Rp10.721.900,00, RM Putri Denai Rp10.167.500,00, CV Annisa Barokah Rp9.053.500,00, Lamongan Shokib Rp3.800.000,00, Rumah Makan Toha Makmur Rp3.200.000,00, Koperasi Jasa Wanita Mandiri Rp2.398.000,00, Hotel Teluk Uber Rp1.795.000,00 yang memiliki nilai material dan Rp16.040.750,00 piutang milik pihak lain yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Restoranyang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Restoran (Rp)
1.	< 1 Tahun	41.209.300,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	100.523.432,00
4.	> 5 Tahun	20.769.560,20
	Jumlah	162.502.292,20

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Tunggakan Pajak Hiburan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.910.150,05tidak dilakukan pembayaran selama tahun 2020 selama tahun 2020 tidak ada penambahan piutang jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.910.150,05 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh Hotel Teluk Uber sebesar Rp11.198.750,00 , Pantai Rambak.Azli Rp3.731.350,05 ,Kansas Bilyard Rp2.280.000,05 CV. Graha King Rp2.800.000,00, Orange Gym Rp1.800.000,00, Pijat Refleksi Bersih Sehat Rp1.650.000,00 yang memiliki nilai material dan piutang milik pihak lain sebesar Rp6.450.050,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Hiburanyang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Hiburan (Rp)
1.	< 1 Tahun	0,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	25.135.150,05
4.	> 5 Tahun	4.775.000,00
	Jumlah	29.910.150,05

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Piutang Pajak ReklamePer 31 Desember 2019 sebesar Rp310.653.512,00telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp66.781.812,00selama tahun 2019 ada penambahan piutang sebesar Rp56.687.479,00 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.559.179,00 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh PT.Coca Cola Indonesia Rp16.202.667,00,PT.Asia Surya Perkasa Rp50.761.375,00 , PT.Djarum Rp19.681.120,00,Parai Beach Resort

Rp21.010.469,00,PT.Sharp Cab.Babel Rp11.730.000,00, Citra Bangka Advertising Rp11.500.000,00, PT Awfa Smart Media Rp17.538.000,00 yang memiliki nilai material dan piutang yang dimiliki pihak lain sebesar Rp152.135.548,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Reklame yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Reklame (Rp)
1.	< 1 Tahun	67.554.979,00
2.	1 - 2 Tahun	72.689.250,00
3.	2 - 5 Tahun	90.514.001,00
4.	> 5 Tahun	69.800.949,00
	Jumlah	300.559.179,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.
- Saldo Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.609.693,56 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp9.311.268,00 selama tahun 2020 ada penambahan piutang sebesar Rp16.888.251,00, jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 adalah Rp39.186.676,56 yang terdiri dari Piutang yang dimiliki oleh PT. Gunung Pelawan Lestari Rp8.650.800,00, PT. Charoen Pokpand Rp2.176.350,00, Hotel Teluk Uber Rp2.025.524,00, Tanjung Pesona Hotel Rp1.258.125,00 yang memiliki nilai material dan piutang yang dimiliki pihak lain sebesar Rp25.075.877,36 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Air Tanah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Air Tanah (Rp)
1.	< 1 Tahun	19.650.942,00
2.	1 - 2 Tahun	12.369.164,46
3.	2 - 5 Tahun	3.524.498,00
4.	> 5 Tahun	3.642.072,10
	Jumlah	39.186.676,56

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.575.000,00 selama tahun 2020 tidak ada pembayaran, dan tidak ada penambahan piutang selama tahun 2020 sehingga jumlah tunggakan per 31 Desember 2020 adalah Rp171.575.000,00 yang terdiri dari piutang yang dimiliki oleh AHO/THIN HO Rp18.250.000,00, Djonto Rp15.000.000,00, Santoso Djauhari Rp10.000.000,00, Sihendra Rp8.000.000,00, Handoko Rp8.000.000,00, Sian Sugito Rp6.500.000,00 yang memiliki nilai material dan piutang pihak lain sebesar Rp105.825.000,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Sarang Burung Walet yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
1.	< 1 Tahun	0,00
2.	1 - 2 Tahun	0,00
3.	2 - 5 Tahun	17.575.000,00
4.	> 5 Tahun	154.000.000,00
	Jumlah	171.575.000,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2019 Rp16.826.878,81 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp16.826.614,21, selama tahun 2020 ada penambahan piutang sebesar Rp36,86 jadi sisa Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp301,46 yang dimiliki oleh PT. Tata Hampan Eka Persada sebesar Rp209,09, PT. Gunung Pelawan Lestari sebesar Rp23,57, PT Gunung Maras Lestari Rp53,21 dan PT Gemilang Cahaya Mentari Rp15,59.

Rekapitulasi Piutang Pajak Penerangan Jalan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Penerangan Jalan (Rp)
1.	< 1 Tahun	40,39
2.	1 - 2 Tahun	36,13
3.	2 - 5 Tahun	224,94
4.	> 5 Tahun	0,00
	Jumlah	301,46

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp628.762.732,80 telah dilakukan pembayaran selama tahun 2020 sebesar Rp620.391.000,00 selama tahun 2020 ada penambahan piutang sebesar Rp1.579.370,00 jadi sisa piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.951.102,80 yang terdiri dari piutang CV. Aurora Khadafi Rp7.576.884,80, CV Erfaezya Rp1.579.370,00 yang memiliki nilai material dan sisanya piutang milik pihak lain sebesar Rp794.848,00 yang dipandang tidak material.

Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)
1.	< 1 Tahun	1.759.370,00
2.	1 - 2 Tahun	564.848,00
3.	2 - 5 Tahun	50.000,00
4.	> 5 Tahun	7.576.884,80

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)
	Jumlah	9.951.102,80

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.23)

- Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.216.340.580,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal (Rp)	SPT PBB yang Terbit Selama 2020 (Rp)	Realisasi Penerimaan 2020 (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2020 (Rp)
9.250.969.171,00	9.106.571.693,00	6.470.856.071,00	12.216.340.580,00

Untuk Mutasi Piutang Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN N/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
9.250.969.171,00	1.225.595.156,00	9.106.571.693,00	6.470.856.071,00	141.734.429,00	12.216.340.580,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.24)

1.1.3.2. Piutang Retribusi

Merupakan Piutang Retribusi yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan sebesar Rp3.983.788.630,59 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
05	Ret Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	365.011.900,00	367.511.900,00
06	Ret Pelayanan Pasar	67.178.000,00	67.178.000,00
14	Ret Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.197.357.452,59	2.455.997.479,60
15	Ret Pemakaian Kekayaan daerah	309.846.378,00	235.471.506,00
16	Ret. Pasar Grosir	475.444.000,00	508.434.000,00
19	Ret. Tempat Khusus Parkir	554.011.500,00	560.511.500,00
28	Ret. Izin Gangguan	14.939.400,00	14.939.400,00
	Jumlah	3.983.788.630,59	4.210.043.785,60

Untuk Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN <2020	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
4.210.043.785,60	(126.782.687,01)	8.118.632.788,00	7.970.111.916,00	247.993.340,00	0,00	3.983.788.630,59

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.24)

Untuk Tabel Piutang Retribusi yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada Lampiran LKPD Pemkab.Bangka Tahun 2020.

1.1.3.4. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.220.272.614,93 yang terdiri dari :

- Piutang BLUD Dinkes sebesar Rp2.480.556.591,00.

No.	Unit Kerja	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Puskesmas Kenanga	1.190.000,00	5.745.000,00
2.	Puskesmas Belinyu	49.647.140,00	87.285.960,00
3.	Puskesmas Gunung Muda	2.100.000,00	5.100.000,00
4.	Puskesmas Sungailiat	26.695.000,00	16.695.000,00
5.	Puskesmas Baturusa	7.500.000,00	5.580.000,00
6.	Puskesmas Pemali	11.850.000,00	0,00
7.	Puskesmas Bakam	17.417.160,00	0,00
8.	Puskesmas Riau Silip	15.061.088,00	50.617.160,00
9.	Puskesmas Puding Besar	41.664.800,00	100.887.840,00
10.	Puskesmas Petaling	4.668.000,00	9.687.900,00
11.	Puskesmas Sinar Baru	0,00	8.400.000,00
12.	Puskesmas Penagan	0,00	50.078.970,00
13.	RSUD Eko Maulana	45.641.100,00	102.820.600,00
14.	RSUD Sjafrie Rachman	0,00	0,00
15.	RSUD Depati Bahrin	2.257.122.303,00	12.338.294.525,00
	Jumlah	2.480.556.591,00	12.781.192.955,00

- Piutang OPD lingkup Pemkab. Bangka sebesar Rp7.739.716.023,93 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.1.3.04.06	Piutang Denda Pajak	5.026.148.904,37	572.510.722,73
1.1.3.04.07	Piutang Denda Retribusi	141.709.842,43	141.709.842,43
1.1.3.04.09	Piutang dari Pengembalian	16.498.000,00	25.925.700,00
1.1.3.04.13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	156.612.877,13	119.546.998,13
1.1.3.04.15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	74.800.000,00	74.800.000,00
1.1.3.04.16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	2.323.946.400,00	2.339.241.400,00
	Jumlah	7.739.716.023,93	3.273.734.663,29

Untuk Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Lingkup OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/ REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
3.273.734.663,29	(2.925.700)	62.329.194.912,75	57.860.282.552,11	0,00	7.739.721.323,93

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.24)

Untuk Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Lingkup BLUD dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
1.	BLUD DINKES	12.781.192.955,00	0,00	71.368.028.956,00	79.864.663.184,00	1.804.002.136,00	2.480.556.591,00

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
	Jumlah	12.781.192.955,00	0,00	71.368.028.956,00	79.864.663.184,00	1.804.002.136,00	2.480.556.591,00

Untuk Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Lingkup BLUD Dinkesyang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Kurang dari 1 Tahun (Rp)	1 s.d 2 tahun (Rp)	2 s.d 5 Tahun (Rp)	Lebih (>) 5 Tahun (Rp)	KET.
1.	Puskesmas Kenanga	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Puskesmas Belinyu	49.647.140,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Puskesmas Gunung Muda	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Puskesmas Sungailiat	26.695.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Puskesmas Baturusa	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Puskesmas Pemali	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Puskesmas Bakam	17.417.160,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Puskesmas Riau Silip	15.061.088,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Puskesmas Puding Besar	41.664.800,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Puskesmas Petaling	4.668.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Puskesmas Sinar Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Puskesmas Penagan	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	RSUD Eko Maulana	45.641.100,00	0,00	0,00	0,00	
14.	RSUD Sjafrie Racman	0,00				
15.	RSUD Depati Bahrin	2.257.122.303,00				
	J U M L A H	2.480.556.591,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.3.4.06. Piutang Denda Pajak
Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.026.148.904,37 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2020	Jumlah (Rp) 2019
1.	Denda Pajak Hotel	228.595.728,67	228.151.313,79
2.	Denda Pajak Restoran	114.756.784,16	113.280.610,08
3.	Denda Pajak Hiburan	47.548.106,42	46.548.106,42
4.	Denda Pajak Mineral Bukan Logam	157.760.504,55	138.513.654,55
5.	Denda Pajak Air Tanah	2.374.341,57	2.516.095,71
6.	Denda Pajak Sarang Burung Walet	2.170.500,00	2.170.500,00
7.	Denda Pajak Reklame	38.688.850,51	39.990.797,51
8.	Denda Pajak Penerangan Jalan	112.973,49	268.934,67
9.	Denda Pajak Parkir	1.070.710,00	1.070.710,00
10.	Denda Pajak PBB-P2	4.433.070.405,00	0,00
	Jumlah	5.026.148.904,37	572.510.722,73

Piutang Denda Pajak Hotel yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Hotel (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	472.134,88
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	228.123.593,79

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Hotel (Rp)
	Jumlah	228.595.728,67

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Restoran yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Restoran (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	1.187.814,08
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	288.360,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	113.280.610,08
	Jumlah	114.756.784,16

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Hiburan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Hiburan (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	47.548.106,42
	Jumlah	47.548.106,42

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	157.760.504,55
	Jumlah	157.760.504,55

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Air Tanah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Air Tanah (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	10.233,90
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	16.390,45
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	2.347.717,22
	Jumlah	2.374.341,57

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	2.170.500,00
Jumlah		2.170.500,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Reklame yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Reklame (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	38.688.850,51
Jumlah		38.688.850,51

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	112.973,49
Jumlah		112.973,49

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak Parkir yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Parkir (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	1.070.710,00
Jumlah		1.070.710,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

Piutang Denda Pajak PBB-P2 yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Umur Piutang Denda Pajak	Nilai Piutang Denda Pajak Parkir (Rp)
1.	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	153.647.063,00
2.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama	0,00
3.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua	0,00
4.	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga	4.279.423.342,00
Jumlah		4.433.070.405,00

(rincian terlampir pada Lampiran LKPD nomor II.25)

1.1.3.4.07. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.709.842,43 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp) 2020	Jumlah (Rp) 2019
1.	Denda Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jln Umum	3.485.780,00	3.485.780,00
2.	Denda Ret. Tempat Parkir Khusus	227.400,00	227.400,00
3.	Denda Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	128.605.834,43	128.605.834,43
4.	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.670.000,00	8.670.000,00
5.	Denda Retribusi Izin Gangguan	720.828,00	720.828,00
	Jumlah	141.709.842,43	141.709.842,43

Piutang Denda Retribusi yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	Uraian	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	Setelah jatuh tempo s.d 3 bulan sejak jatuh tempo (Rp)	Umur piutang lebih 3 bulan s.d 12 bulan sejak jatuh tempo (Rp)	Umur piutang lebih 12 bulan sejak jatuh tempo (Rp)	KET.
1.	Denda Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jln Umum	0,00	0,00	0,00	3.485.780,00	
2.	Denda Ret. Tempat Parkir Khusus	0,00	0,00	0,00	227.400,00	
3.	Denda Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	128.605.834,43	
4.	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	
5.	Denda Retribusi Izi Gangguan	0,00	0,00	0,00	720.828,00	
	J U M L A H	0,00	0,00	0,00	141.709.842,43	

1.1.3.4.09. Piutang dari Pengembalian

Piutang dari Pengembalian per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.498.000,00 yang merupakan piutang gaji PNS, atas nama Hasmarita, S.Pd.SD (guru SDN 15 Riau Silip) sebesar Rp1.000.000,00 atas nama Herlina (UPT Pendidikan Riau Silip) sebesar Rp9.000.000,00, atas nama Maina Suziana (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga) sebesar Rp498.000,00, atas nama Nuraini br Sembiring (Guru SDN 15 Sungailiat) Rp6.000.000,00

Untuk Mutasi Piutang dari Pengembalian dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	HASMARITA, S.Pd.SD (Dinas Pend.&Budaya)	7.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00
2.	HERLINA (Dinas Pend.&Budaya)	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00
3	Maina Suziana (Dinas Pend.Kepemudaan dan OR)	0,00	0,00	7.604.600,00	7.106.600,00	498.000,00
4	Nuraini br Sembiring	0,00	0,00	9.789.600,00	3.789.600,00	6.000.000,00

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	(Dinas Pend. Kepemudaan dan OR)					
	Jumlah	22.000.000,00	0,00	17.394.200,00	22.896.200,00	16.498.000,00

Piutang dari Pengembalian yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	HASMARITA, S.Pd.SD (Dinas Pend.&Budaya)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2..	HERLINA (Dinas Pend.&Budaya)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3..	Maina Suziana (Dinas Pend.Kepemudaan dan OR)	498.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nuraini br Sembiring (Dinas Pend. Kepemudaan dan OR)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH		16.498.000,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.3.4.13. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp156.612.877,13 yang merupakan piutang atas kontribusi kemitraan dengan pihak ketiga yang dikelola oleh Bidang Aset BPPKAD dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PIUTANG / NAMA DEBITUR	NAMA WAJIB RETRIBUSI	LOKASI	NOMOR SKR /KONTRAK	TANGGAL SKR /KONTRAK			SALDO AKHIR PIUTANG KONTRIBUSI 31/12/20 (Rp)
					MULAI	BERAKHIR	LAMA SEWA	
1.	PT. EL JOHN	JOHNNIE SUGIARTO	Kawasan Wisata Air Panas Pemali	119.556/407/II/2002 005/ELJOHN/SPK/XI/2002	30/11/2002	30/11/2032	30 tahun	50.844.000,80
2.	CV KARYA LESTARI (Kolong Resto dan Ruko (BOT))	RUDIYANTO THOMAS	Penataan Kolong Resto dan Ruko	640/019/VIX/2005	12/06/2006	12/06/2031	25 tahun	2.250.000,00
3.	PD. CIPTA PRATAMA (Ruko Permata Indah)	ROSFINA TUTILANI	Pembangunan Ruko dan Hotel (BOT)	640/018/IX/2005	12/02/2007	12/02/2032	25 tahun	6.000.000,00
4.	PT RAMBANG JAYA SEMESTA	SJAHRUL G BASUMI	Objek Wisata Pantai Teluk Uber	028/4/DPPKAD/2012 018/RSJ/01/2012	12/01/2012	12/01/2037	25 tahun	8.276.043,00
5.	PT. PULOMAS SENTOSA	DENNIS	Kawasan Industri Jelitik	593.1/2200/II/2016	01/12/2016	01/12/2021	5 tahun	14.160.000,00
6.	PT PULOMAS SENTOSA			593.1/0990/II/2016	20/05/2016	20/05/2021	5 tahun	24.950.000,00
7.	PT PANCA MEGA PERSADA	FONG FRANNKY	Kawasan Industri Jelitik	590/23/11/2010 dan 04/PMP002/2016 593.1./1228/II/2015	01/02/2010	01/02/2030	30 tahun	7.479.600,00
8.	PT. MINERAL BANGKA SEJATI	BENNY VERSIKA	Kawasan Industri Jelitik	593.1/0062/II/2015	12/01/2015	12/01/2020	5 Tahun	27.027.433,33
9.	PT. ZHONG HUA INDONESIA	CHANDRA SATYA	Kawasan Industri Jelitik	593.1/0692/II/2016	25/04/2016	25/04/2021	5 Tahun	15.625.800,00
JUMLAH								156.612.877,13

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	PT. EL JOHN	0,00	2.773.300,00	11.555.500,00	0,00	
2.	CV KARYA LESTARI (Kolong Resto dan Ruko (BOT))	11.250,00	0,00	0,00	0,00	
3.	PD. CIPTA PRATAMA (Ruko Permata Indah)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	PT RAMBANG JAYA SEMESTA	0,00	0,00	9.138.021,50	0,00	
5.	PT. PULOMAS SENTOSA	0,00	708.000,00	3.540.000,00	0,00	
6.	PT. PULOMAS SENTOSA	0,00	0,00	6.237.500,00	12.475.000,00	
7.	PT PANCA MEGA PERSADA	0,00	0,00	3.739.800,00	0,00	
8.	PT. MINERAL BANGKA SEJATI	0,00	0,00	0,00	27.027.433,33	
9.	PT. ZHONG HUA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	15.625.800,00	
JUMLAH		41.250,00	3.481.300,00	34.210.821,90	55.128.233,33	

1.1.3.4.15. Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan

Piutang Denda Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 masih sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp74.800.000,00, hal ini dikarenakan saudara debitur (Gontina Sihombing) sampai pada saat ini belum membayar walaupun sudah ditagih.

Piutang Denda Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (kendaraan dinas) yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal 1 jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Sdr. GONTINA SIHOMBING	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00	
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	74.800.000,00	

1.1.3.4.16. Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2020 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka (BPRS Bangka) tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena adanya pembayaran oleh para debitur. Adapun rincian piutang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahun Penyaluran Dana Bergulir	Per 31 Des 2020 (Rp)	Angsuran (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
2005	78.748.000,00	0,00	78.748.000,00
2006	178.510.800,00	1.700.000,00	180.210.800,00
2007 Gelombang I	233.909.500,00	0,00	233.909.500,00

Tahun Penyaluran Dana Bergulir	Per 31 Des 2020 (Rp)	Angsuran (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
2007 Gelombang II	73.687.500,00	664.000,00	74.351.500,00
Non Kolektif	245.486.000,00	100.000,00	245.586.000,00
2008	463.111.000,00	6.531.000,00	469.642.000,00
2009	626.312.100,00	2.900.000,00	629.212.100,00
2010	424.181.500,00	3.400.000,00	427.581.500,00
Jumlah	2.323.946.400,00	15.295.000,00	2.339.241.400,00

Terdapat selisih saldo akhir pinjaman sebesar Rp2.634.000,00 antara pihak PT BPR Syariah Bangka yang mengakui sebesar Rp2.321.312.400,00 dengan Pemerintah Kabupaten Bangka sebesar Rp2.323.946.400,00. Hal ini disebabkan adanya revisi data pada tahun 2013 atas margin atau bunga yang diperoleh, sedangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka hanya mengakui nilai pokok pinjaman saja. (*Lampiran II.6*)

Pada tahun 2019 dibentuklah tim yang bertugas melakukan monitoring dan mendata koperasi dan usaha mikro kecil (KUKM) untuk memastikan pengembalian pinjaman yang telah disalurkan, membuat kajian perpanjangan kerjasama dengan BPRS Bangka Belitung, melakukan koordinasi dengan BPRS Bangka Belitung dalam rangka penagihan pinjaman dana terhadap pihak terkait. Berdasarkan SK Bupati Bangka No. 188.45/91/BPKAD/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Piutang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUKM) di Kabupaten Bangka.

Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Debitur UMKM dan Koperasi	0,00	0,00	0,00	2.323.946.400,00	
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	2.323.946.400,00	

1.1.3.5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp111.260.380.605,00 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp41.533.866.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.1.3.5.01. Piutang Bagi Hasil Pajak

Piutang Bagi Hasil Pajak merupakan piutang yang berasal dari pemerintah pusat dengan saldo awal

sesuai PMK 20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020 sebesar Rp48.545.020.193,00 terjadi koreksi terhadap saldo awal, sehingga saldo awal bertambah sebesar Rp4.399.835.237,00, saldo awal bagi hasil Pajak setelah koreksi sebesar Rp52.944.855.430,00. Penambahan pada tahun 2020 dari pemerintah pusat sebesar Rp20.409.598.000,00. Penyerapan anggaran selama tahun 2020 sebesar Rp46.960.833.204,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2020 piutang bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp21.993.784.989,00.

Untuk Mutasi Piutang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)	Keterangan
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan (PPKD)	49.355.163.091,00	(2.995.472.159,00)	13.152.925.000,00	39.136.557.358,00	0,00	20.376.058.574,00	Berdasarkan PMK 20 Tahun 2020 dan PMK 113 Tahun 2020
2.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 (PPKD)	3.589.692.339,00	(1.404.363.078,00)	7.256.673.000,00	7.824.275.846,00	0,00	1.617.726.415,00	Berdasarkan PMK 20 Tahun 2020 dan PMK 113 Tahun 2020
	Jumlah	52.944.855.430,00	(4.399.835.237,00)	20.409.598.000,00	46.960.833.204,00	0,00	21.993.784.989,00	

1.1.3.5.02. Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2020 sebesar Rp58.315.525.175,00 yang merupakan piutang dari pemerintah pusat yang terdiri dari:

Untuk Mutasi Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	Keterangan
1.	Bagi hasil dari Iuran Tetap	1.846.405.124,00	(1.846.405.124,00)	5.122.919.000,00	3.526.307.200,00	1.596.611.800,00	Berdasarkan PMK No.20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020
2.	Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	29.755.043,00	75.847.957,00	31.877.000,00	19.024.150,00	118.455.850,00	Berdasarkan PMK No.20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020
3.	Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi	55.378.060.354,00	(45.489.828.940,00)	57.585.931.000,00	50.550.458.026,00	16.923.704.388,00	Berdasarkan PMK No.20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020
4.	Bagi hasil dari Iuran Pungutan Perusahaan Perikanan	397.114.489,00	(164.137.050,00)	1.418.361.000,00	788.276.289,00	863.062.150,00	Berdasarkan PMK No.20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020
5.	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak bumi	664.190.165,00	(259.840.415,00)	538.363.000,00	904.465.750,00	38.247.000,00	Berdasarkan PMK No.20 tahun 2020 dan PMK 113 tahun 2020
	Jumlah	58.315.525.175,00	(47.684.363.572,00)	64.697.451.000,00	55.788.531.415,00	19.540.081.188,00	

1.1.3.7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi Bangka Belitung) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	PBBKB	10.006.359.805,61	10.526.957.670,75
2.	Pajak Air Permukaan	239.469.395,54	474.462.330,34
3.	PKB	4.453.909.466,61	4.738.375.993,79
4.	BBNKB	6.358.158.511,36	3.049.255.610,54
5.	Pajak Rokok	4.567.289.750,08	1.416.583.565,00
	Jumlah	25.625.186.929,20	20.205.635.170,42

Piutang ini merupakan piutang transfer Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Over Target Triwulan I s.d. IV tahun 2019 dan Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2020 yang akan dibayar pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/109/BAKUDA/2021 sedangkan untuk pajak rokok sesuai SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/145/BAKUDA/2020 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota . (Lampiran II.9)

Untuk Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKD)	10.526.957.670,75	0,00	24.776.694.999,57	25.297.292.864,71	0,00	10.006.359.805,61	Berdasarkan SK.Gubernur Kepulauan Babel No.188.4/109/BAKUDA/2021 tanggal 01 Maret 2021
2.	Pajak Air Permukaan (PPKD)	474.462.330,34	0,00	846.965.646,08	1.121.519.797,67	0,00	239.469.395,54	Berdasarkan SK.Gubernur Kepulauan Babel No.188.4/109/BAKUDA/2021 tanggal 01 Maret 2021
3.	Pajak Kendaraan Bermotor (PPKD)	4.738.375.993,79	0,00	13.462.909.937,23	13.747.376.464,41	0,00	4.453.909.466,61	Berdasarkan SK.Gubernur Kepulauan Babel No.188.4/109/BAKUDA/2021 tanggal 01 Maret 2021
4.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PPKD)	3.049.255.610,54	0,00	9.991.753.605,97	6.682.850.705,15	0,00	6.358.158.511,36	Berdasarkan SK.Gubernur Kepulauan Babel No.188.4/109/BAKUDA/2021 tanggal 01 Maret 2021
5.	Pajak Rokok (PPKD)	1.416.583.565,00	3.092.674.262,00	12.777.258.042,08	12.719.226.119,00	0,00	4.567.289.750,08	Berdasarkan SK.Gubernur Kepulauan Babel No.188.4/145/BAKUDA/2020 tanggal 28 Desember 2020
	Jumlah	20.205.635.170,42	3.092.674.262,00	61.855.582.230,93	59.568.265.950,94	0,00	25.625.186.929,20	

1.1.3.8. Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp5.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Piutang Pendapatan Lainnya	5.300,00	0,00
	Jumlah	5.300,00	0,00

Piutang ini merupakan piutang pendapatan cukai tembakau tahun 2020.

1.1.4. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp576.843.611,96 sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp568.443.611,96, dengan rincian sebagai berikut:

1.1.4.02. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp448.159.111,96 yang terdiri dari:

1.1.4.02.05. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp448.159.111,96 yang merupakan bagian yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka atas angsuran pemberian pinjaman kepada kelompok peternak ayam Kecamatan Mendobarat, dan pada Tahun 2020 terdapat pelunasan sebesar Rp8.400.000,00. (Lampiran II.5)

Untuk Mutasi Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
1. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang (PPKD)	456.559.111,96	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	448.159.111,96
TOTAL	456.559.111,96	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	448.159.111,96

Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan umur nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Debitur Kelompok Peternak Ayam	0,00	0,00	0,00	448.159.111,96	
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	448.159.111,96	

1.1.4.03. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.278.000,00 yang terdiri dari:

1.1.4.03.02. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas per 31 Desember 2020 Rp8.278.000,00. Pada tahun 2020 tidak terdapat pelunasan angsuran, sehingga jumlah piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran tetap Rp8.278.000,00.

Untuk Mutasi Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/ REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN(Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas (PPKD)	8.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278.000,00
TOTAL	8.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278.000,00

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (kendaraan dinas) yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Sdr.SUHERMAN	0,00	0,00	0,00	8.278.000,00	
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	8.278.000,00	

1.1.4.04. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.006.500,00 yang terdiri dari:

1.1.4.04.02. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara per 31 Desember 2020 masih sama dengan TA. 2019 yaitu sebesar Rp112.006.500,00 terdiri atas nama Sdr. ZK sebesar Rp92.000.000,00, CV CITATAH sebesar Rp10.619.000,00 dan Sdr. YMS sebesar Rp9.387.500,00.

Untuk Mutasi Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKLAS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANGAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
1. Alm. ZK, SH (Sekretaris Perindag) (PPKD)	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00
2. CV.CTT (Kelebihan Pembayaran pembangunan Gedung Perpustakaan) (PPKD)	10.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619.000,00

Uraian	SALDO AWAL 01/01/2020 (Rp)	KOREKSI SALDO AWAL/REKL AS (Rp)	PENAMBAHAN SELAMA TH.2020 (Rp)	PENGURANG AN SELAMA TH.2020 (Rp)	PEMBATALAN/ BA PENUTUPAN (Rp)	SALDO AKHIR 31/12/20 (Rp)
3. Sdr.YMS (kehilangan 1 unit motor dinas) (PPKD)	9.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387.500,00
TOTAL	112.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.006.500,00

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Pertama (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Kedua (Rp)	1 Bulan Sejak Surat Tagihan Ketiga (Rp)	KETERANGAN
1.	Alm. ZK, SH (Sekretaris Perindag) (PPKD)	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
2.	CV.CTT (Kelebihan Pembayaran pembangunan Gedung Perpustakaan) (PPKD)	0,00	0,00	0,00	10.619.000,00	
3.	CV.CTT (Kelebihan Pembayaran pembangunan Gedung Perpustakaan) (PPKD)	0,00	0,00	0,00	9.387.500,00	
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	112.006.500,00	

1.1.5. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang diperlukan untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan terhadap piutang. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Informasi lengkap tentang penyisihan piutang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Lampiran IX "Akuntansi Piutang" dan perhitungan piutang serta perhitungan penyisihannya terdapat dalam Lampiran I.6 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp(14.548.449.054,53) sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp(17.638.055.593,71) dengan rincian sebagai berikut:

1.1.5.1. Penyisihan Piutang Pendapatan

Besarnya penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2019 adalah Rp(14.649.307.256,14) sedangkan tahun 2020 sebesar Rp(17.069.611.981,75) dengan rincian sebagai berikut:

1.1.5.01.01. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2019 Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(4.486.763.002,37) dan 2020 sebesar Rp(5.755.318.500,38) dengan rincian:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	(174.077.663,65)	(164.379.323,00)
2.	Pajak Restoran	(71.237.322,70)	(65.192.806,85)

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
3.	Pajak Hiburan	(17.342.575,05)	(12.517.075,03)
4.	Pajak Reklame	(122.664.649,40)	(90.165.463,83)
5.	Pajak Penerangan Jalan	(116,28)	(84.155,76)
6.	Pajak Air Tanah	(6.739.492,25)	(4.348.188,12)
7.	Pajak Sarang Burung Walet	(162.787.500,00)	(154.818.750,00)
8.	Pajak Mineral Bkn Logam dan Batuan	(7.667.166,45)	(6.972.782,20)
9.	Pajak PBB-P2	(5.192.802.014,60)	(3.988.284.457,58)
	Jumlah	(5.755.318.500,38)	(4.486.763.002,37)

Adapun Mutasi Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan <2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Pajak Hotel	(164.379.323,00)	0,00	(63.117.100,00)	0,00	(53.418.759,35)	0,00	(174.077.663,65)
2.	Pajak Restoran	(65.192.806,85)	0,00	(20.451.204,50)	0,00	(14.406.688,65)	0,00	(71.237.322,70)
3.	Pajak Hiburan	(12.517.075,03)	0,00	(4.825.500,02)	0,00	0,00	0,00	(17.342.575,05)
4.	Pajak Reklame	(90.165.463,83)	0,00	(47.629.935,52)	0,00	(15.130.749,95)	0,00	(122.664.649,40)
5.	Pajak Penerangan Jalan	(84.155,76)	0,00	(93,59)	0,00	(84.133,07)	0,00	(116,28)
6.	Pajak Air Tanah	(4.348.188,12)	0,00	(2.872.477,00)	0,00	(481.172,87)	0,00	(6.739.492,25)
7.	Pajak Sarang Burung Walet	(154.818.750,00)	0,00	(7.968.750,00)	0,00	0,00	0,00	(162.787.500,00)
8.	Pajak Mineral Bkn Logam dan Batuan	(6.972.782,20)	0,00	(3.796.339,25)	0,00	(3.101.955,00)	0,00	(7.667.166,45)
9.	Pajak PBB-P2	(3.988.284.457,58)	1.204.517.557,03	(88.182.159,10)	(1.780.176,03)	(50.644.080,00)	(35.757.903,08)	(5.192.802.014,60)
	Jumlah	(4.486.763.002,37)	1.204.517.557,03	(238.843.558,98)	(1.780.176,03)	(137.267.538,89)	(35.757.903,08)	(5.755.318.500,38)

1.1.5.01.02. Penyisihan Piutang Retribusi

Per 31 Desember 2019 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(3.721.952.114,45) dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.795.123.917,59) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Ret. Pelayanan Pasar	(67.178.000,00)	(67.178.000,00)
2.	Ret. Pengendalian Menara Komunikasi	(2.197.357.452,59)	(2.224.330.945,45)
3.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	(272.658.942,00)	(216.873.106,00)
4.	Ret. Tempat Khusus Parkir	(554.011.500,50)	(560.511.500,50)
5.	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	(291.998.392,50)	(294.498.392,50)
6.	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	(396.980.230,00)	(343.620.770,00)
7.	Ret. Izin Gangguan	(14.939.400,00)	(14.939.400,00)
	Jumlah	(3.795.123.917,59)	(3.721.952.114,45)

Adapun Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan <2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Ret. Pelayanan Pasar	(67.178.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.178.000,00)
2.	Ret. Pengendalian	(2.224.330.945,45)	37.683.997,97	(20.141.868,77)	0,00	(9.431.363,66)	0,00	(2.197.357.452,59)

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan <2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
	Menara Komunikasi							
3.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	(216.873.106,00)	0,00	(55.907.260,16)	(121.424,16)	0,00	0,00	(272.658.942,00)
4.	Ret. Tempat Parkir Khusus	(560.511.500,50)	0,00	0,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	(554.011.500,50)
5.	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	(294.498.392,50)	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	(291.998.392,50)
6.	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	(343.620.770,00)	(37.844.000,00)	(37.592.280,00)	0,00	(22.076.820,00)	0,00	(396.980.230,00)
7.	Ret. Izin Gangguan	(14.939.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.939.400,00)
	Jumlah	(3.721.952.114,45)	(160.002,03)	(113.641.408,93)	(121.424,16)	(40.508.183,66)	0,00	(3.795.123.917,59)

1.1.5.01.04. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Per 31 Desember 2019, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(6.440.592.139,32) dan tahun 2020 sebesar Rp(7.519.169.563,78) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak	(4.871.358.903,47)	(571.705.808,35)
2.	Piutang dari Retribusi	(141.709.842,43)	(141.709.842,43)
3.	Piutang dari Pengembalian	(82.490,00)	(129.628,50)
4.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(92.861.605,22)	(66.690.170,74)
5.	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	(2.323.946.400,00)	(2.339.241.400,00)
6.	Piutang Denda Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(74.800.000,00)	(74.800.000,00)
7.	Piutang BLUD	(14.410.322,66)	(3.246.315.289,30)
	Jumlah	(7.519.169.563,78)	(6.440.592.139,32)

Adapun Mutasi Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan <2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Piutang Denda Pajak	(571.705.808,35)	0,00	(4.302.265.019,63)	(2.611.924,51)	0,00	0,00	(4.871.358.903,47)
2.	Piutang dari Retribusi	(141.709.842,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(141.709.842,43)
3.	Piutang dari Pengembalian	(129.628,50)	14.628,50	(473.058,15)	(440.568,15)	(65.000,00)	0,00	(82.490,00)
4.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(66.690.170,74)	0,00	(44.262.867,29)	(437.550,41)	(17.653.882,40)	0,00	(92.861.605,22)
5.	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	(2.339.241.400,00)	0,00	0,00	(15.295.000,00)	0,00	0,00	(2.323.946.400,00)
6.	Piutang Denda Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(74.800.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.800.000,00)
7.	Piutang BLUD	(3.246.315.289,30)	0,00	(12.402.782,96)	0,00	(3.244.307.749,60)	0,00	(14.410.322,66)
	Jumlah	(6.440.592.139,32)	(14.628,50)	(4.359.403.728,03)	(18.785.043,07)	(3.262.026.632,00)	0,00	(7.519.169.563,78)

Mengacu pada Buletin Teknik Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, menyatakan Piutang Transfer tidak dapat dilakukan penyisihan.

1.1.5.2. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp(576.843.611,96) dan tahun 2020 sebesar Rp(568.443.611,96) yang terdiri dari:

1.1.5.2.2. Per 31 Desember 2020, Piutang Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya sebesar Rp(448.159.111,96).

Adapun Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut :

Untuk Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya sebesar Rp(448.159.111,96) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan < 2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	(456.559.111,96)	0,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	0,00	(448.159.111,96)

1.1.5.2.3. Per 31 Desember 2020, Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp(8.278.000,00).

Adapun Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut :

Untuk Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp(8.278.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan < 2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(8.278.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.278.000,00)

1.1.5.2.4. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Per 31 Desember 2020 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp(112.006.500,00). Selama 2020 tidak ada angsuran sehingga piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp(112.006.500,00) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr. ZK Rp(92.000.000,00)
- b. Sdr. YMS Rp(9.387.500,00)
- c. CV. Citatah Rp(10.619.000,00)

Untuk Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Per 31 Desember 2020 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp(112.006.500,00). Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi /Reklas	Penambahan sd 31 Des 2020	Pengurangan sd 31 Des 2020	Pengurangan < 2020	Pembatalan/BA Penutupan	Saldo Akhir
1.	Sdr ZK	(92.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.000.000,00)
2.	Sdr YMS	(10.619.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.619.000,00)
3.	CV. Citatah	(9.387.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.387.500,00)
	Jumlah	(112.006.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.006.500,00)

Untuk Tabel Penyisihan Piutang,persentase penyisihan,nilai penyisihan yang diklasifikasikan berdasarkan umurnya dapat dilihat pada Lampiran LKPD Pemkab.Bangka Tahun 2020.

1.1.6. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

1.1.7. Persediaan

Total persediaan tahun 2019 sebesar Rp18.939.217.472,16 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp22.508.733.037,53 dengan rincian:

1.1.7.1. Persediaan Bahan

Persediaan Bahan untuk tahun 2020 sebesar Rp310.765.383,80 yang terdiri dari:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.780.000,00	1.007.000,00
2.	Bahan Kimia	217.566.118,80	299.594.791,50
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	6.911.550,00	257.500,00
4.	Isi Tabung Gas	35.806.500,00	1.373.000,00
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	3.432.800,00
6.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.823.250,00	54.212.875,00
7.	Bahan Lainnya	877.965,00	703.890,00
	Jumlah	310.765.383,80	360.581.856,50

1.1.7.2. Persediaan Suku Cadang

Persediaan Suku Cadang untuk tahun 2020 sebesar Rp716.191.164,33 yang terdiri dari:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	24.750.000,00
2.	Suku Cadang Alat Kedokteran	678.591.964,33	13.018.203,10
3.	Suku Cadang Alat Laboratorium	7.216.000,00	0,00
4.	Suku Cadang Alat Bengkel	30.383.200,00	0,00
	Jumlah	716.191.164,33	37.768.203,10

1.1.7.3. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Persediaan barang lainnya untuk tahun 2020 sebesar Rp2.556.840.182,99 yang terdiri dari:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Alat Tulis Kantor	917.851.168,69	682.316.768,19

2.	Kertas dan Cover	215.858.207,00	121.139.466,00
3.	Bahan Cetak	130.000,00	130.000,00
4.	Benda Pos	8.647.850,00	3.027.000,00
5.	Persediaan Dokumen/Adm Tender	0,00	15.504.000,00
6.	Bahan Komputer	537.889.112,00	356.110.132,00
7.	Perabot Kantor	491.690.340,40	378.760.029,00
8.	Alat Listrik	220.619.528,90	261.383.958,00
9.	Perlengkapan Dinas	90.093.100,00	1.785.000,00
10.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	33.997.576,00	24.585.000,00
11.	Suvenir/Cenderamata	21.135.000,00	6.600.000,00
12.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.928.300,00	730.419.450,00
	Jumlah	2.556.840.182,99	2.581.760.803,19

1.1.7.4. Persediaan Obat-Obatan

Persediaan obat-obatan tahun 2020 sebesar

Rp17.606.521.607,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Obat	7.048.384.928,25	5.985.456.655,83
2.	Obat-Obatan Lainnya	10.558.136.679,37	3.807.558.141,41
	Jumlah	17.606.521.607,62	9.793.014.797,23

1.1.7.5. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan tahun 2020 sebesar

Rp932.944.074,79 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	932.944.074,79	3.821.311.846,50
2.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	932.944.074,79	3.821.311.846,50

1.1.7.6. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga tahun 2020 sebesar Rp222.821.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	222.821.000,00	0,00
	Jumlah	222.821.000,00	0,00

1.1.7.7. Natura dan Pakan

Persediaan natura dan pakan tahun 2020 sebesar Rp26.303.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Pakan	17.304.870,00	12.169.938,00
2.	Natura dan Pakan Lainnya	8.999.100,00	4.999.500,00
	Jumlah	26.303.970,00	17.169.438,00

1.1.7.21 Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan bahan pakai habis tahun 2020 sebesar Rp136.345.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019
1.	Persediaan Bahan Obat-Obatan	136.345.654,00	0,00
	Jumlah	136.345.654,00	0,00

Adapun rincian persediaan OPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran II.26. Sedangkan rincian nilai persediaan BLUD Dinas

Kesehatan sebesar Rp2.076.355.296,07 per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2020	2019
1.	Bahan	26.895.000,00	2.574.000,00
2.	Suku Cadang	0,00	0,00
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	58.744.675,00	44.643.730,00
4.	Obat-Obatan	1.990.715.621,07	2.280.392.797,64
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00
6.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00
7.	Natura dan Pakan	0,00	0,00
8.	Persediaan Penelitian	0,00	0,00
9.	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00
10.	Komponen	0,00	0,00
11.	Pipa	0,00	0,00
12.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00
	Jumlah	2.076.355.296,07	2.327.610.527,64

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Total investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp73.239.407.597,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.988.098.356,00 yang terdiri dari:

1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1.2.1.06. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.338.283.215,00 yang merupakan pemberian pinjaman kepada kelompok petani sawit. Pinjaman petani sawit tahap I sebesar Rp1.423.359.625,00 telah lunas pada tahun 2014, untuk tahun 2020 tidak ada penyaluran pinjaman.

Selama tahun 2020 telah diangsur sebesar Rp559.530.359,00 yaitu tahap II sebesar Rp120.585,00 tahap III sebesar Rp0,00 tahap IV sebesar Rp522.246.704,00 dan tahap V sebesar Rp240.769.488,00 sehingga sisa pinjaman:

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Pinjaman Peternak Ayam	0,00	0,00
2.	Pinjaman Petani Sawit Tahap V	3.828.543.012,00	4.069.312.500,00
3.	Pinjaman Petani Sawit Tahap IV	5.472.793.449,00	5.995.040.153,00
4.	Pinjaman Petani Sawit Tahap III	5.568.548.414,00	5.568.548.414,00
5.	Pinjaman Petani Sawit Tahap II	2.468.398.340,00	2.468.518.925,00
6.	Pinjaman Petani Sawit Tahap I	0,00	0,00
	Jumlah	17.338.283.215,00	18.101.419.992,00

Rincian pembayaran tahap II, IV dan tahap V selama tahun 2020:

TAHAP II			TAHAP IV			TAHAP V		
No.	Tanggal	Jumlah	No.	Tanggal	Jumlah	No.	Tanggal	Jumlah
1	08/05/2020	120.585,00	1	30/12/2020	522.246.704,00	1	30/12/2020	240.769.488,00
	Jumlah	120.585,00		Jumlah	522.246.704,00		Jumlah	240.769.488,00

1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Total investasi jangka panjang permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.649.815.141,00 yang terdiri dari:

1.2.2.01. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.649.815.141,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.	Bank Sumsel Cab. Sungailiat	34.215.000.000,00	34.215.000.000,00
2.	Bank Syariah Bangka	7.750.000.000,00	7.759.500.000,00
3.	PD.Bangka Global Mandiri	250.000.000,00	250.000.000,00
4.	PDAM Tirta Bangka	10.613.987.793,00	10.413.487.605,00
5.	Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6.	Perumda Agro Lestari Mandiri	320.827.348,00	0,00
	Jumlah	55.649.815.141,00	55.137.987.605,00

Jumlah Pernyataan Modal Pemerintah Daerah merupakan akumulasi pernyataan modal dari tahun 1982 yang baru di tata usaha pada Tahun 2005 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan rincian pada sebagai berikut:

Daftar Investasi Permanen (Penyertaan Modal) Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020

dalam rupiah

PT.	Nama Perusahaan/ Lembaga	Tahun Pertama Investasi	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	PT. Bank Sumsel Cab. Sungailiat	1982	34.215.000.000,00	0,00	0,00	34.215.000.000,00
2.	PT. Bank Syariah Bangka	2002	7.759.500.000,00	0,00	9.500.000,00	7.750.000.000,00
3.	PT. Bangka Global Mandiri	2003	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
4.	PDAM Tirta Bangka	2004	10.413.487.605,00	200.500.188,00	0,00	10.613.987.793,00
5.	Jamkrida	2014	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
6.	Perumda Agro Lestari Mandiri	2020	0,00	500.000.000,00	179.172.652,00	320.827.348,00
	Jumlah		55.137.987.605,00	700.500.188,00	188.672.562,00	55.649.815.141,00

- 1) Nilai Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.215.000.000,00. Persentase kepemilikan sebesar 2,48 % (berdasarkan surat dari PT. Bank Sumsel Babel No. 71/DIR/III/B/2021 tanggal 07 Januari 2021).
- 2) Nilai Penyertaan Modal pada PT Bank Syariah Bangka per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.750.000.000,00 atau setara 775.000 lembar saham. Persentase kepemilikan sebesar 16,29% (berdasarkan surat dari BPRS Bangka No. 011/BSB/Dir/I/2021 tanggal 07 Januari 2020).
- 3) Nilai penyertaan modal pada PD BGM per 31 Desember 2020 sebesar Rp250.000.000,00. Tidak adanya penambahan pada tahun 2020 dikarenakan penghentian kegiatan PD BGM

(berdasarkan surat Bupati Bangka Nomor 539/0359/VI/2016 tanggal 22 Februari 2016).

Penundaan pembahasan raperda pembubaran PD BGM oleh DPRD Kabupaten Bangka pada semester 2 Tahun 2017 masih belum ada kejelasan sampai tahun anggaran 2020 berakhir.

- 4) Nilai penyertaan modal pada PDAM Tirta Bangka per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.613.987.793,00. Dalam Neraca PDAM Tirta Bangka setelah audit oleh KAP Djoko, Sidik dan Indra, jumlah ekuitas pada neraca sebesar Rp10.613.987.793,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp200.500.188,00 dari tahun sebelumnya.

Selaku perusahaan daerah, persentase kepemilikan Pemerintah Kab. Bangka atas PDAM Tirta Bangka sebesar 100%, sehingga metode pencatatan penyertaan modal adalah metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:(*Lampiran II.8*)

Total ekuitas PDAM	Rp13.737.852.466,00
Akumulasi kerugian PDAM (Rp3.346.558.034,00)	
Laba tahun berjalanRp222.693.361,00	
Jumlah Ekuitas	Rp10.613.987.793,00
Persentase kepemilikan	<u>100%</u>
Nilai pernyataan modal PDAM	Rp10.613.987.793,00

- 5) Nilai Penyertaan Modal pada PT Jamkrida sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan porsi kepemilikan sebesar 7,14% (berdasarkan surat dari JAMKRIDA Babel No. 029/2.2/JKB/I/2021 tanggal 22 Januari 2021) yang mana penyertaan pertama kali dilakukan pada tahun 2014.

- 6) Nilai Penyertaan Modal pada Perumda Agro Lestari Mandiri per 31 Desember 2020 sebesar Rp320.827.348,00. Modal dasar berdasarkan SK Perda No. 12 Tahun 2019. Dalam Neraca Perumda Agro Lestari Mandiri setelah audit oleh KAP Widiyanto dan Sumbogo jumlah ekuitas pada neraca sebesar Rp320.827.348,00.Selaku perusahaan daerah, persentase kepemilikan Pemerintah Kab. Bangka atas Perumda Agro Lestari Mandiri sebesar 100%, sehingga metode pencatatan penyertaan modal adalah metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:(*Lampiran II.8*)

Total ekuitas PERUMDA	Rp500.000.000,00
Akumulasi kerugian PERUMDA Rp0,00	
Laba/Rugi tahun berjalan	(Rp179.172.652,00)
Jumlah Ekuitas	Rp320.827.348,00
Persentase kepemilikan	<u>100%</u>
Nilai pernyataan modal PERUMDA	Rp320.827.348,00

1.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat

atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terdiri dari aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria antara lain berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipergunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) terhadap aset sampai dengan periode 31 Desember 2009 yang dilakukan oleh KJPP. Rizki Djunaedy dan Rekan. Penilaian kembali tersebut dilakukan karena sebagian aset pada neraca TA 2009 belum memiliki nilai, sedangkan nilai yang telah ada diragukan keandalannya karena ketidaklengkapan dokumen pendukung. Hasil penilaian kembali tersebut dijadikan dasar pencatatan nilai awal aset tetap per 1 Januari 2010.

Khusus untuk nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 telah dilakukan penyesuaian kode barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.156.003.031.729,86 dan Rp3.000.065.729.049,92 dengan rincian:

NO.	JENIS ASET	PER 31 DESEMBER 2019		PER 31 DESEMBER 2020 PERMENDAGRI 108/2016
		PERMENDAGRI 17/2007	PERMENDAGRI 108/2016	
1.	TANAH	252.901.121.909,93	252.901.121.909,93	252.179.216.223,17
2.	PERALATAN DAN MESIN	328.713.999.757,89	335.109.249.828,13	371.429.444.565,97
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	854.633.880.395,47	849.939.863.395,47	899.219.415.094,77
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.514.007.680.374,22	1.514.007.680.374,22	1.569.582.823.142,87
5.	ASET TETAP LAINNYA	46.705.660.972,41	45.004.427.902,17	48.859.776.206,09
6.	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	3.103.385.640,00	3.103.385.640,00	14.732.356.497,00

NO.	JENIS ASET	PER 31 DESEMBER 2019		PER 31 DESEMBER 2020 PERMENDAGRI 108/2016
		PERMENDAGRI 17/2007	PERMENDAGRI 108/2016	
	TOTAL ASET TETAP	3.000.065.729.049,92	3.000.065.729.049,92	3.156.003.031.729,86

Kode Barang aset tetap yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian tersebut terdiri dari :

NO.	JENIS ASET	BERTAMBAH	BERKURANG	KETERANGAN
1.	PERALATAN DAN MESIN	4.694.017.000,00	-	Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2.	PERALATAN DAN MESIN	1.701.233.070,24	-	Koreksi Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	4.694.017.000,00	Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin
4.	ASET TETAP LAINNYA	-	1.701.233.070,24	Koreksi Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap yang tersaji per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.156.003.031.729,86. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp155.937.302.679,95 atau 5,20 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp3.000.065.729.049,92. Perubahan nilai aset tetap tersebut dikarenakan terjadinya mutasi barang akibat penambahan dan pengurangan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.

Perlu dijelaskan pula dalam aplikasi SIMDA BMD masih terdapat Aset Tetap yang telah dikapitalisasi ke aset induknya namun masih tercatat dalam aplikasi sebanyak 257 unit. Penghapusan aset yang telah dikapitalisasi tersebut pada SIMDA BMD tidak dapat dilakukan karena akan turut menghapus sejarah mutasi aset.

Ringkasan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1.3.1. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap tanah dikelompokkan ke dalam aset intrakomptabel berdasarkan nilai perolehannya tanpa ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka per 1 Januari 2020 sebanyak 1.109 bidang tanah. Terdapat penambahan dan pemecahan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka selama TA

2020 sebanyak 7 bidang tanah sehingga tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1.116 bidang tanah.

Tanah yang sudah memiliki sertifikat per 1 Januari 2020 sebanyak 286 bidang tanah. Sertifikat yang berada pada brankas Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 262 exemplar. Hal ini dikarenakan terdapat 1 sertifikat tanah yang pada inventaris Pemerintah Kabupaten Bangka terpecah menjadi beberapa bidang. Selama TA 2020, terdapat penambahan baik pemecahan dan sertifikat tanah baru sebanyak 27 bidang tanah. Sehingga tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 yang telah tersertifikasi sebanyak 313 bidang tanah. Sedangkan jumlah fisik sertifikat yang berada pada brankas Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 286.

Dalam hal tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bangka tapi belum memiliki sertifikat sebanyak 803 bidang tanah, yang terdiri dari :

1. Tanah yang dikuasai / dipergunakan Pemerintah Kabupaten Bangka yang sudah memiliki dokumen SKHUAT sebanyak 503 bidang tanah.
2. Tanah yang dikuasai/ dipergunakan Pemerintah Kabupaten Bangka yang belum memiliki dokumen sebanyak 300 bidang tanah, dari 300 bidang tanah tersebut sebanyak 164 bidang tanah merupakan tanah dibawah jalan dan sebanyak 136 bidang merupakan tanah bangunan.

Saldo aset tetap tanah pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp252.179.216.223,17. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp721.905.686,76 atau 0,28% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp252.901.121.909,93. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI ASET TETAP TANAH
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
252.901.121.909,93	13.198.623.178,93	13.920.528.865,69	252.179.216.223,17

Ringkasan mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET TETAPTANAH
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BELANJA MODAL	144.421.000,00
2.	PERALIHAN ANTAR OPD	11.718.795.318,05
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	11.069.423.644,00
	b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020	649.371.674,05
3.	REKLASIFIKASI	886.256.609,88
	a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	67.116.609,88
	b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Lain-lain Lainnya (Pinjam Pakai)	819.140.000,00
4.	KEKURANGAN PENCATATAN	445.650.251,00
5.	HIBAH	3.500.000,00

TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	13.198.623.178,93
--	--------------------------

Penambahan nilai aset tetap tanah sebesar Rp13.198.623.178,93 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Belanja Modal**
Belanja Modal Aset Tetap Tanah TA 2020 sebesar Rp144.421.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. **Peralihan antar OPD**
Penambahan akibat Peralihan aset tetap tanah antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.718.795.318,05 antara lain :
 - a. Peralihan masuk antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp11.069.423.644,00.
 - b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020 sebesar Rp649.371.674,05.
3. **Reklasifikasi**
Reklasifikasi tambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp886.256.609,88 terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi Aset Lainnya/Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Aset Tetap Tanah sebesar Rp67.116.609,88 yang telah habis masa perpanjangannya.
 - b. Reklasifikasi Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Lain-lain Lainnya (Tanah Pinjam Pakai) pada Aset Tetap Tanah sebesar Rp819.140.000,00.
4. **Koreksi Pencatatan**
Penambahan nilai aset tetap tanah dikarenakan kekurangan pencatatan aset tetap tanah pada Daftar Barang Milik Daerah Pemkab. Bangka per 31 Desember 2019 sebesar Rp445.650.251,00.
5. **Hibah**
Hibah dari masyarakat TA 2020 atas nama Tri Rachmawati, S.Pi. sebesar Rp3.500.000,00.

**MUTASI KURANG ASET TETAP TANAH
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN ANTAR OPD	12.441.525.644,00
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	11.069.423.644,00
	b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020	1.372.102.000,00
2.	HIBAH KELUAR	697.672.000,00
3.	REKLASIFIKASI	781.331.221,69
	a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan	144.421.000,00
	b. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah pada Aset Lainnya/Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	432.622.221,69
	c. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Tanah Pinjam Pakai	204.288.000,00

TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020	13.920.528.865,69
--	--------------------------

Pengurangan nilai aset tetap tanah sebesar Rp13.920.528.865,69 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan aset tetap tanah antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.441.525.644,00 antara lain :

- a. Peralihan keluar antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp11.069.423.644,00.
- b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020 sebesar Rp1.372.102.000,00.

2. Hibah

Pengurangan aset tetap tanah karena dihibahkan pada tahun 2020 sebesar Rp697.672.000,00 antara lain :

- a. Hibah Keluar Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka berupa sebagian Tanah Kosong Bumi Perkemahan Pramuka (Tambang 23) sebesar Rp18.760.000,00.
- b. Hibah Keluar Ke Lembaga Perasyarakatan Sungailiat berupa Tanah Kosong Samping Bangunan RRI Pemancar Kimak sebesar Rp420.000.000,00.
- c. Hibah kepada Mesjid RSS berupa Tanah masjid RSS Pemda Kab Bangka sebesar Rp258.912.000,00.

3. Reklasifikasi

Reklasifikasi kurang nilai aset tetap tanah sebesar Rp781.331.221,69 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Tanah pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.421.000,00.
- b. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah pada Aset Lainnya/Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp432.622.221,69.
- c. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Tanah Pinjam Pakai sebesar Rp204.288.000,00.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH PERALIHAN ANTAR OPD

Terdapat perbedaan nilai masuk dan keluar aset tetap tanah berupa peralihan antar OPD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Masuk	Keluar	Selisih
1.	Peralihan aset tetap tanah antar OPD :	11.718.795.318,05	12.441.525.644,00	722.730.325,95
	a. Peralihan aset tetap tanah akibat inventarisasi perubahan OPD	11.069.423.644,00	11.069.423.644,00	0,00
	b. Peralihan aset tetap tanah antar OPD TA 2020	649.371.674,05	1.372.102.000,00	722.730.325,95

Selisih tersebut terjadi dikarenakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalihkan tanah bangunan perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman yang merupakan objek perjanjian kerjasama dengan PT. Dreamland Property kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan langsung dikapitalisasi pada aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp820.164.000,00. Dari nilai tersebut, aset yang telah diklasifikasi ke dalam aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga pada DINPARBUDAYA, dialihkan kembali sebesar Rp97.433.674,05 kepada Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas Pariwisata Sungailiat. Pada Dinas Kesehatan bertambah pada aset tetap tanah.

1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sampai dengan tahun 2015 berupa pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin mulai tahun 2016 dibagi kedalam :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk alat berat yang sama dengan dan/atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Saldo aset tetap peralatan dan mesin pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.429.444.565,97. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp42.715.444.808,11 atau 13% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp328.713.999.757,89. Adapun penyesuaian nilai aset tetap peralatan dan mesin yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

- a. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.694.017.000,00
- b. Koreksi Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.701.233.070,24

Sehingga saldo aset tetap peralatan dan mesin pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp371.429.444.565,97 mengalami peningkatan sebesar Rp36.320.194.737,87 atau 10,84% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar

Rp335.109.249.828,13.Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
335.109.249.828,13	136.240.206.147,61	99.920.011.409,74	371.429.444.565,97

Ringkasan mutasi aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BELANJA MODAL :	50.779.935.043,00
	a. Belanja Modal APBD	42.616.318.396,00
	b. Belanja Modal BOS APBN	6.278.533.333,00
	c. Belanja Modal BLUD	1.885.083.314,00
2.	PERALIHAN	81.982.118.692,61
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	80.642.554.392,61
	b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020	1.339.564.300,00
3.	HIBAH	1.330.091.600,00
4.	KOREKSI	103.075.200,00
	a. Koreksi tambah Pencatatan BOS APBN 2019 akibat koreksi klasifikasi barang	70.093.600,00
	b. Koreksi tambah Pencatatan BOS APBN 2019 akibat kurang catat nilai perolehan	3.431.600,00
	c. Koreksi Kapitalisasi Ke Nilai Induk	29.550.000,00
5.	KEKURANGAN PENCATATAN	28.775.000,00
6.	REKLASIFIKASI	2.016.210.612,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.197.162.612,00
	b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.862.000,00
	c. Reklasifikasi dari Aset Lancar/Persediaan (Belanja Persediaan menjadi inventaris)	8.546.000,00

d. Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai	576.640.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	136.240.206.147,61

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp136.240.206.147,61 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.779.935.043,00 terdiri dari :

- a. Realisasi belanja modal APBD peralatan dan mesin TA 2020 sebesar Rp42.616.318.396,00.
- b. Belanja Modal BOS APBN TA 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp6.278.533.333,00.
- c. Belanja BLUD aset tetap peralatan dan mesin TA 2020 sebesar Rp1.885.083.314,00.

2. Peralihan antar OPD

Penambahan akibat Peralihan aset tetap peralatan dan mesin antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp81.982.118.692,61 antara lain :

- a. Peralihan masuk antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp80.642.554.392,61.
- b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020 sebesar Rp1.339.564.300,00.

3. Hibah

Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk TA 2020 sebesar Rp1.330.091.600,00 terdiri dari :

- a. Hibah dari Bank Sumsel Babel Tahun 2020 kepada Pengguna Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp119.750.000,00.
- b. Hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pengelola Barang TA 2020 sebesar Rp553.307.150,00.
- c. Hibah dari Bank Mandiri kepada RSUD Depati Bahrin TA 2020 sebesar Rp1.350.000,00.
- d. Hibah dari PT. Tirta Medika Jaya kepada RSUD Depati Bahrin TA 2020 sebesar Rp146.700.000,00.
- e. Hibah dari PT. Timah Tbk kepada RSUD Depati Bahrin TA 2020 sebesar Rp1.399.652,00.
- f. Hibah dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp48.921.798,00.

- g. Hibah dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2020 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp361.940.000,00.
 - h. Hibah dari PT. Mitra Stania Prima kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp14.850.000,00.
 - i. Hibah Masuk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri TA 2020 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp81.873.000,00.
4. Koreksi
- Penambahan dikarenakan koreksi sebesar Rp. 103.075.200,00 terdiri dari :
- a. Koreksi tambah Pencatatan BOS APBN 2019 akibat koreksi klasifikasi barang sebesar Rp70.093.600,00.
 - b. Koreksi tambah Pencatatan BOS APBN 2019 akibat kurang catat nilai perolehan sebesar Rp3.431.600,00.
 - c. Koreksi kapitalisasi ke nilai induk dikarenakan merupakan pekerjaan perbaikan kendaraan sehingga dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp29.550.000,00.
5. Kekurangan Pencatatan berupa hadiah dari Provinsi Kep. Babel sebesar Rp28.775.000,00.
6. Reklasifikasi
- Reklasifikasi tambah TA 2020 sebesar Rp2.016.210.612,00 terdiri dari :
- a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.197.162.612,00.
 - b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp233.862.000,00.
 - c. Reklasifikasi Aset Lancar/Persediaan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Belanja Persediaan menjadi inventaris) sebesar Rp8.546.000,00.
 - d. Reklasifikasi Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp576.640.000,00.

MUTASI KURANG ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN ANTAR OPD	81.982.118.692,40
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	80.642.554.392,40
	b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020	1.339.564.300,00
2	KOREKSI	673.097.029,00
	a. Koreksi Belanja Modal APBD TA. 2020	351.805.942,00
	b. Koreksi kurang Belanja Modal BOS APBN 2020 ke belanja Brg & Jasa (Pemeliharaan)	42.679.999,00
	c. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 akibat koreksi klasifikasi barang	70.093.600,00
	d. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 akibat kurang catat nilai perolehan	3.431.600,00

NO.	URAIAN	JUMLAH
	e. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
	f. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 ke Aset Tetap Lainnya	31.616.600,00
	g. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 ke Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	16.525.000,00
	h. Koreksi kurang Pencatatan BOS APBN 2019 ke Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi & Jaringan	1.098.400,00
	i. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 akibat bayar hutang belanja TA. 2019	2.400.000,00
	j. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	105.495.888,00
	k. Koreksi Kapitalisasi Ke Nilai Induk	29.550.000,00
	l. Koreksi Klasifikasi ke Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	8.400.000,00
3	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	4.085.514.017,29
4	REKLASIFIKASI	2.643.786.471,00
	a. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	775.683.648,00
	b. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud	77.001.800,00
	c. Reklasifikasi ke Aset Lancar/ Persediaan (Belanja Modal APBD 2020 dan BOS APBN 2020)	386.182.998,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal BLUD TA. 2020 ke Aset Non Kapitalisasi peralatan dan Mesin	132.646.025,00
	e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai	1.167.767.000,00
	f. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat	104.505.000,00
5	HIBAH	111.000.000,00
6	JURNAL KOREKSI	10.424.495.199,97
	a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat	10.405.652.578,60
	b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Tidak Diketahui	18.842.621,37
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		99.920.011.409,74

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp99.920.011.409,74 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan aset tetap peralatan dan mesin antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp81.982.118.692,49 antara lain :

- a. Peralihan keluar antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp80.642.554.392,40.
- b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020 sebesar Rp1.339.564.300,00.

2. Koreksi

Koreksi kurang TA 2020 sebesar Rp673.097.029,00 terdiri dari :

- a. Koreksi Belanja Modal APBD TA. 2020 Peralatan dan Mesin sebesar Rp351.805.942,00.
- b. Koreksi kurang Belanja Modal BOS APBN 2020 ke belanja Brg & Jasa (Pemeliharaan) sebesar Rp42.679.999,00.
- c. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 akibat koreksi klasifikasi barang Rp70.093.600,00.
- d. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 akibat kurang catat nilai perolehan sebesar Rp3.431.600,00.
- e. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00.
- f. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp31.616.600,00.
- g. Koreksi Kurang Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.525.000,00.
- h. Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Non Kapitalisasi Jalan, Irigasi & Jaringan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.098.400,00.
- i. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 akibat bayar hutang belanja TA. 2019 sebesar Rp2.400.000,00.
- j. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp105.495.888,00.
- k. Koreksi kapitalisasi ke nilai induk dikarenakan merupakan pekerjaan perbaikan kendaraan sehingga dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp29.550.000,00.
- l. Koreksi Klasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.400.000,00.

3. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp4.085.514.017,29 Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.4/5844/BPPKAD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/6373/BPPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan BMD pada Dinas Kesehatan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020, dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5045/BPPKAD/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Bangunan Rumah Dinas Guru SDN 11 Mendo Barat dari daftar barang pengguna barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Akibat Kebakaran Tahun 2020.

4. Reklasifikasi

Reklasifikasi kurang TA 2020 sebesar Rp2.643.786.471,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp775.683.648,00.
- b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud sebesar Rp77.001.800,00.

- c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lancar/ Persediaan (Belanja Modal APBD 2020 dan BOS APBN 2020) sebesar Rp386.182.998,00.
 - d. Reklasifikasi Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi peralatan dan Mesin sebesar Rp132.646.025,00.
 - e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai sebesar Rp1.167.767.000,00.
 - f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar Rp104.505.000,00.
5. Hibah
Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin karena dihibahkan sebesar Rp111.000.000,00 terdiri dari :
- a. Hibah Keluar ke Lembaga Masjid Nurul Hikmah Kabupaten Bangka sebesar Rp103.500.000,00.
 - b. Hibah Keluar ke Polres Kab. Bangka sebesar Rp5.000.000,00.
 - c. Hibah Keluar ke Pasar Betuah RSS sebesar Rp2.500.000,00.
6. Jurnal Koreksi
Pengurangan karena terdapat jurnal Koreksi BPK sebesar Rp10.424.495.199,97 terdiri dari :
- a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar Rp10.405.652.578,60.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Tidak Diketahui sebesar Rp18.842.621,37,00.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH BELANJA MODAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASET TETAP DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2020 :

BELANJA MODAL	LRA	CALK/NERACA	SELISIH
APBD	42.264.512.454,00	42.616.318.396,00	(351.805.942,00)
BLUD	2.195.873.276,00	1.885.083.314,00	310.789.962,00
BOS APBN	9.749.146.518,00	6.278.533.333,00	3.470.613.185,00
TOTAL	54.209.532.248,00	50.779.935.043,00	3.429.597.205,00

URAIAN	JUMLAH	
BELANJA MODAL LRA (NETTO)		54.209.532.248,00
SELISIH KURANG		351.805.942,00
Koreksi Belanja Modal APBD TA. 2020 Peralatan dan Mesin	351.805.942,00	
SELISIH LEBIH		(3.781.403.147,00)
Belanja BLUD DINKES terdiri dari :		(310.789.962,00)
Belanja BLUD Dinkes Ta 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	186.157.962,00	
Belanja BLUD Dinkes Ta 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.632.000,00	
Belanja BOS APBN DINDIKPORA terdiri dari :		(3.470.613.185,00)

URAIAN	JUMLAH	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	21.160.250,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan	24.000.000,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Lainnya	2.930.014.666,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	461.958.469,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan	19.852.000,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Non Kapitalisasi Jalan, Irigasi & Jaringan	11.647.800,00	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	
BELANJA MODAL BERDASARKAN FISIK BARANG PADA CALK		50.779.935.043,00

Terdapat selisih belanja modal peralatan dan mesin pada LRA dengan CaLK sebesar Rp3.429.597.205,00 terdiri dari :

- a. Penambahan nilai Belanja Modal APBD Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada CaLK yang menggunakan nilai kotor sebelum koreksi belanja modal TA 2020 yaitu koreksi pengembalian pada Dinas Kesehatan dan Dinkominfo sebesar Rp351.805.942,00.
- b. Pengurangan Belanja BLUD DINKES TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp186.157.962,00.
- c. Pengurangan Belanja BLUD DINKES TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp124.632.000,00.
- d. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp21.160.250,00.
- e. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp24.000.000,00.
- f. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap lainnya sebesar Rp2.930.014.666,00.
- g. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin sebesar Rp461.958.469,00.
- h. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan sebesar Rp19.852.000,00.

- i. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.647.800,00.
- j. Pengurangan Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel aset tetap lainnya sebesar Rp1.980.000,00.

1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sampai dengan tahun 2015 berupa pengeluaran untuk satuan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mulai tahun 2016, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran gedung dan bangunan yang sama dengan dan/atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Saldo aset tetap gedung dan bangunan pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp899.219.415.094,77. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp44.585.534.699,27 atau 5,22% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp854.633.880.395,47. Adapun penyesuaian nilai aset tetap gedung dan bangunan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang berupa koreksi kurang aset tetap gedung dan bangunan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.694.017.000,00. Sehingga saldo aset tetap gedung dan bangunan pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp899.219.415.094,74 mengalami peningkatan sebesar Rp49.279.551.699,27 atau 5,80 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp849.939.863.395,47. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama TA 2020.

MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
849.939.863.395,47	169.251.946.544,48	119.972.394.845,21	899.219.415.094,77

Ringkasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

MUTASI TAMBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BELANJA MODAL :	60.305.186.660,99
	a. Belanja Modal APBD	60.097.868.448,99
	b. Belanja Modal BOS APBN	21.160.250,00
	c. Belanja Modal BLUD	186.157.962,00
2.	PERALIHAN	104.963.115.410,61
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	102.367.291.473,95
	b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020	2.595.823.936,66
3.	HIBAH	3.444.545.832,00
4.	KOREKSI	115.495.888,00
	a. Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
	b. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	105.495.888,00
5.	REKLASIFIKASI	423.602.752,88
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Tanah	144.421.000,00
	b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya/Gedung dan Bangunan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Habis Masa)	24.174.000,00
	c. Reklasifikasi dari Aset Non Kapitalisasi Bangunan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.277.009,88
	d. Reklasifikasi dari Aset Kontruksi Dalam Pekerjaan	247.730.743,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		169.251.946.544,48

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp169.251.946.544,48 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.305.186.660,99 terdiri dari :

- a. Realisasi belanja modal APBD gedung dan bangunan TA 2020 sebesar Rp60.097.868.448,99.
- b. Belanja Modal BOS APBN TA 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp21.160.250,00.
- c. Belanja BLUD DINKES aset tetap gedung dan bangunan TA 2020 sebesar Rp186.157.962,00.

2. Peralihan antar OPD

Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp104.963.115.410,61 antara lain :

- a. Peralihan masuk antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp102.367.291.473,95.
- b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020 sebesar Rp2.595.823.936,66.

3. Hibah

Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk TA 2020 sebesar Rp3.444.545.832,00 terdiri dari :

- a. Hibah dari Bank Sumsel Babel Tahun 2020 kepada Pengguna Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp78.950.000,00.
- b. Hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pengelola Barang TA 2020 sebesar Rp391.633.000,00.
- c. Hibah Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.665.275.422,44.
- d. Hibah dari PT. Mitra Stania kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp30.000.000,00.
- e. Hibah masuk dari Komite Sekolah sebesar Rp46.925.000,00.
- f. Hibah dari PT. Tirta Medika Jaya kepada RSUD Depati Bahrin TA 2020 sebesar Rp1.231.762.409,58.

4. Koreksi

Penambahan dikarenakan koreksi sebesar Rp115.495.888,00 terdiri dari :

- a. Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.000.000,00.
- b. Koreksi Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp105.495.888,00.

5. Reklasifikasi

Reklasifikasi tambah TA 2020 sebesar Rp423.602.752,88 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi belanja modal aset tetap tanah pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp144.421.000,00.
- b. Reklasifikasi aset lainnya/gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketiga pada aset tetap (habis masa) Rp24.174.000,00.
- c. Reklasifikasi aset non kapitalisasi bangunan kemitraan dengan pihak ketiga pada aset tetap bangunan sebesar Rp7.277.009,88.
- d. Reklasifikasi aset kontruksi dalam pekerjaan pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp247.730.743,00.

MUTASI KURANG ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN ANTAR OPD	104.963.115.410,82
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	102.367.291.474,16
	b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020	2.595.823.936,66
2	KOREKSI	115.344.000,00

	a. Koreksi Kurang Belanja Modal APBD 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Belanja Brg & Jasa (Pemeliharaan)	70.000.000,00
	b. Koreksi Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan ke Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	45.344.000,00
3	PENGHAPUSAN TA 2020	1.084.657.640,39
	a. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020	550.543.765,00
	b. Penghapusan akibat Penjualan TA. 2020	534.113.875,39
4	REKLASIFIKASI	13.809.277.794,00
	a. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	12.820.282,00
	b. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.197.162.612,00
	c. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan	11.876.701.600,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Tetap Renovasi	227.497.900,00
	e. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Tetap Lainnya	149.095.400,00
	f. Reklasifikasi Belanja Modal APBD ke Aset Lainnya/Aset Lain-lain/ Bangunan Pinjam Pakai	346.000.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		119.972.394.845,21

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp119.972.394.845,21 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp104.963.115.410,82 antara lain :

- a. Peralihan keluar antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp102.367.291.474,16.
- b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020 sebesar Rp2.595.823.936,66.

2. Koreksi

Koreksi kurang TA 2020 sebesar Rp115.344.000,00 terdiri dari :

- a. Koreksi Kurang Belanja Modal APBD 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Belanja barang & jasa (Pemeliharaan) sebesar Rp70.000.000,00.
- b. Koreksi Belanja Modal BLUD Gedung Bangunan ke Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.344.000,00.

3. Penghapusan TA 2020 sebesar Rp1.084.657.640,39 terdiri dari :

- a. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020 sebesar Rp550.543.765,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5750/BPPKAD/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Kecamatan Puding Besar berupa Bangunan Tempat Parkir Motor Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/4348/BPPKAD/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Bangunan di

Kawasan Taman Hiburan Rakyat Sungailiat Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/4390/BPPKAD/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Bangunan Taman Bermain di Kawasan Pantai Matras Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/4549/BPPKAD/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berupa Bangunan Pertokoan Loka Tirta Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5045/BPPKAD/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Bangunan Rumah Dinas Guru SDN 11 Mendo Barat dari daftar barang pengguna barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Akibat Kebakaran Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/6338/BPPKAD/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berupa Bangunan Rumah Dinas Guru SDN 4 Bakam Tahun 2020, dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5577/BPPKAD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penghapusan Bangunan Puskesmas Pembantu Kemuja dari daftar barang Dinas Kesehatan Tahun 2020, dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5575/BPPKAD/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penghapusan Bangunan Puskesmas Tempat Parkir dan Gorong-gorong pada Puskesmas Gunung Muda dari daftar barang Dinas Kesehatan Tahun 2020, dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/6373/BPPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan BMD pada Dinas Kesehatan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020

- b. Penghapusan akibat Penjualan TA. 2020 sebesar Rp534.113.875,39 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/852/BPPKAD/2020 tanggal 44001 tentang Penghapusan Bangunan RSUD Depati Bahrin dari daftar barang Inventaris Dinas Kesehatan Sehubungan Tindak Lanjut Penjualan Melalui Mekanisme Lelang Tahun 2020

4. Reklasifikasi

Reklasifikasi kurang TA 2020 sebesar Rp13.809.277.794,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.820.282,00.
- b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.197.162.612,00.
- c. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.876.701.600,00.
- d. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Renovasi sebesar Rp227.497.900,00.
- e. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp149.095.400,00.
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Bangunan Pinjam Pakai sebesar Rp346.000.000,00.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH BELANJA MODAL ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASET TETAP DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2020 :

BELANJA MODAL	LRA	CALK& NERACA	SELISIH
APBD	60.097.868.448,99	60.097.868.448,99	0,00
BLUD	0,00	186.157.962,00	186.157.962,00
BOS APBN	0,00	21.160.250,00	21.160.250,00
TOTAL	60.097.868.448,99	60.305.186.660,99	207.318.212,00

URAIAN	JUMLAH	
BELANJA MODAL LRA (NETTO)		60.097.868.448,99
SELISIH KURANG		207.318.212,00
Belanja BLUD DINKES terdiri dari :		186.157.962,00
Belanja BLUD Dinkes TA 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	186.157.962,00	
Belanja BOS APBN DINDIKPORA terdiri dari :		21.160.250,00
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	21.160.250,00	
BELANJA MODAL BERDASARKAN FISIK BARANG PADA CALK		60.305.186.660,99

Terdapat selisih belanja modal gedung dan bangunan pada LRA dengan CaLK sebesar Rp207.318.212,00 terdiri dari :

- a. Penambahan dari Belanja BLUD DINKES TA 2020 pada LRA tergolong ke dalam belanja aset tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp186.157.962,00.
- b. Penambahan dari Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 tergolong ke dalam belanja aset tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp21.160.250,00.

1.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemda dan dalam kondisi siap dipakai.

Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sampai dengan tahun 2015 berupa pengeluaran untuk satuan jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mulai tahun 2016, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan dan/atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.569.582.823.142,87. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp55.575.142.768,55 atau 3,67% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.514.007.680.374,22.

MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
1.514.007.680.374,22	73.222.389.403,65	17.647.246.635,00	1.569.582.823.142,87

Ringkasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

MUTASI TAMBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BELANJA MODAL :	18.357.530.369,53
	a. Belanja Modal APBD	18.208.898.369,53
	b. Belanja Modal BOS APBN	24.000.000,00
	c. Belanja Modal BLUD	124.632.000,00
2.	PERALIHAN	16.835.147.435,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	16.760.377.435,00
	b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020	74.770.000,00
3.	HIBAH	37.518.075.599,12
4.	KOREKSI	511.636.000,00
	a. Koreksi akibat pengurangan ganda TA. 2019	511.636.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		73.222.389.403,65

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp73.222.389.403,65 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.357.530.369,53 terdiri dari :

- a. Realisasi belanja modal APBD jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 sebesar Rp18.208.898.369,53.
- b. Belanja Modal BOS APBN TA 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp24.000.000,00.
- c. Belanja BLUD aset tetap jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 sebesar Rp124.632.000,00.

2. Peralihan antar OPD

Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.835.147.435,00 antara lain :

- a. Peralihan masuk antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp16.760.377.435,00.
- b. Peralihan masuk antar OPD TA 2020 sebesar Rp74.770.000,00.

3. Hibah

Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk TA 2020 sebesar Rp37.518.075.599,12 terdiri dari :

- a. Hibah dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pengelola Barang TA 2020 sebesar Rp1.146.020.040,00.
- b. Hibah Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp47.853.696,12.
- c. Hibah dari Hibah Masuk dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pengelola sebesar Rp36.324.201.863,00.

4. Koreksi

Penambahan dikarenakan koreksi akibat pengurangan ganda TA. 2019 sebesar Rp511.636.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**MUTASI KURANG ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN ANTAR OPD	16.835.147.435,00
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	16.760.377.435,00
	b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020	74.770.000,00
2.	KOREKSI	19.995.000,00
	a. Koreksi Kurang Belanja Modal APBD 2020	19.995.000,00
3.	PENGHAPUSAN TA 2020	355.891.600,00
	a. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020	355.891.600,00
4.	REKLASIFIKASI	436.212.600,00
	a. Reklasifikasi ke Aset Lancar (Persediaan)	436.212.600,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		17.647.246.635,00

Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp17.647.246.635,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.835.147.435,00 antara lain :

- a. Peralihan keluar antar OPD akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp16.760.377.435,00.
- b. Peralihan keluar antar OPD TA 2020 sebesar Rp74.770.000,00.

2. Koreksi

Koreksi kurang TA 2020 sebesar Rp19.995.000,00 berupa koreksi kurang belanja modal APBD aset tetap jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 dikarenakan koreksi pengembalian belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020 sebesar Rp355.891.600,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/4345/BPPKAD/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Perikanan Berupa Bangunan Tambat Labuh di Kawasan Nelayan I dan Nelayan II Sungailiat Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5844/BPPKAD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020.

4. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada aset lancar/persediaan dikarenakan berupa pekerjaan normalisasi pada DPUPR sebesar Rp436.212.600,00.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH BELANJA MODAL ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASET TETAP DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2020 :

BELANJA MODAL	LRA	CALK	SELISIH
APBD	18.188.903.369,53	18.208.898.369,53	19.995.000,00
BLUD	0,00	124.632.000,00	124.632.000,00
BOS APBN	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
TOTAL	18.188.903.369,53	18.357.530.369,53	168.627.000,00

URAIAN	JUMLAH	
BELANJA MODAL LRA (NETTO)		18.188.903.369,53
SELISIH KURANG		168.627.000,00
Belanja BLUD DINKES terdiri dari :		124.632.000,00
Belanja BLUD Dinkes Ta 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.632.000,00	
Belanja BOS APBN DINDIKPORA terdiri dari :		24.000.000,00

URAIAN	JUMLAH	
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.000.000,00	
Koreksi kurang belanja modal APBD		19.995.000,00
BELANJA MODAL BERDASARKAN FISIK BARANG PADA CALK		60.305.186.660,99

Terdapat selisih belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada LRA dengan CaLK sebesar Rp168.627.000,00 terdiri dari :

- Penambahan dari Belanja BLUD DINKES TA 2020 pada LRA tergolong ke dalam belanja aset tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp124.632.000,00.
- Penambahan dari Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 tergolong ke dalam belanja aset tetap peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp24.000.000,00.
- Penambahan dari Belanja Modal APBD TA 2020 dikarenakan pada CaLK menggunakan belanja bruto sebelum pengembalian sebesar Rp19.995.000,00.

1.3.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku perpustakaan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Saldo aset tetap lainnya pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.859.776.206,09. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.154.115.233,76 atau 4,61 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp46.705.660.972,41. Adapun penyesuaian nilai aset tetap lainnya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berupa koreksi aset tetap lainnya pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.701.233.070,24. Sehingga saldo aset tetap lainnya pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.859.776.206,09 mengalami peningkatan sebesar Rp3.855.348.304,00 atau 8,57% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp45.004.427.902,17. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

MUTASI ASET TETAP LAINNYA (Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1	MUTASI	SALDO AKHIR 31
--------------	--------	----------------

JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	TAMBAH	KURANG	DESEMBER 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
45.004.427.902,17	4.347.388.747,00	492.040.443,00	48.859.776.206,09

Ringkasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	BELANJA MODAL :	3.924.111.047,00
	a. Belanja Modal APBD	994.096.381,00
	b. Belanja Modal BOS APBN	2.930.014.666,00
2	PERALIHAN	15.067.800,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	15.067.800,00
3	KOREKSI	31.616.600,00
	a. Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31.616.600,00
4	REKLASIFIKASI	376.593.300,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan	376.593.300,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		4.347.388.747,00

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp4.347.388.747,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.357.530.369,53 terdiri dari :

- a. Realisasi belanja modal APBD aset tetap lainnya TA 2020 sebesar Rp994.096.381,00.
- b. Belanja Modal BOS APBN TA 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.930.014.666,00.

2. Peralihan antar OPD

Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah akibat inventarisasi perubahan OPD pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.067.800,00.

3. Koreksi

Penambahan dikarenakan Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Lainnya dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.616.600,00.

4. Reklasifikasi

Reklasifikasi tambah TA 2020 sebesar Rp376.593.300,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Renovasi Rp227.497.900,00.
- b. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan pada Aset Tetap Lainnya Rp149.095.400,00.

MUTASI KURANG ASET TETAP LAINNYA
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN ANTAR OPD	15.067.800,00
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	15.067.800,00
2.	REKLASIFIKASI	272.095.418,00
	a. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	233.862.000,00
	b. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	3.970.500,00
	c. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	7.680.000,00
	d. Reklasifikasi ke Aset Lancar (Persediaan)	26.582.918,00
3.	PENGHAPUSAN TA 2020	204.877.225,00
	a. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020	204.877.225,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		492.040.443,00

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp492.040.443,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD
Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah akibat inventarisasi perubahan OPD pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.067.800,00.
2. Reklasifikasi
 - a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp233.862.000,00.
 - b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.970.500,00.
 - c. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.680.000,00.
 - d. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya pada Aset Lancar (Persediaan) sebesar Rp26.582.918,00.

3. Penghapusan akibat Pemusnahan TA 2020 sebesar Rp204.877.225,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/5844/BPPKAD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/6373/BPPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan BMD pada Dinas Kesehatan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ASET TETAP DENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2020 :

BELANJA MODAL	LRA	CALK & NERACA	SELISIH
APBD	994.096.381,00	994.096.381,00	0,00
BOS APBN	0,00	2.930.014.666,00	2.930.014.666,00
TOTAL	994.096.381,00	3.924.111.047,00	2.930.014.666,00

URAIAN	JUMLAH
BELANJA MODAL LRA (NETTO)	994.096.381,00
SELISIH KURANG	2.930.014.666,00
Belanja BOS APBN DINDIKPORA terdiri dari :	2.930.014.666,00
Belanja Modal BOS APBN 2020 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.930.014.666,00
BELANJA MODAL BERDASARKAN FISIK BARANG PADA CALK	3.924.111.047,00

Terdapat selisih belanja modal aset tetap lainnya pada LRA dengan CaLK sebesar Rp2.930.014.666,00 terdiri dari :

- a. Penambahan dari Belanja Modal BOS APBN DINDIKPORA TA 2020 pada LRA dicatat sebagai belanja modal peralatan dan mesin, namun fisik barang tergolong ke dalam aset tetap lainnya sebesar Rp2.930.014.666,00.

1.3.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.732.356.497,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.628.970.857,00

atau 374,72% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp3.103.385.640,00. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

MUTASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
3.103.385.640,00	11.975.453.100,00	346.482.243,00	14.732.356.497,00

Ringkasan mutasi konstruksi dalam pengerjaan :

MUTASI TAMBAH ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	98.751.500,00
	a. Peralihan antar OPD akibat inventarisasi	98.751.500,00
2	REKLASIFIKASI	11.876.701.600,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan	11.876.701.600,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		11.975.453.100,00

Penambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan TA 2020 sebesar Rp. 11.975.453.100,00 terdiri dari :

1. Peralihan antar OPD akibat perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp98.751.500,00.
2. Reklasifikasi Belanja Modal APBD TA. 2020 Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.876.701.600,00.

MUTASI KURANG ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	98.751.500,00
	a. Peralihan antar OPD akibat inventarisasi	98.751.500,00
2	REKLASIFIKASI	247.730.743,00
	a. Reklasifikasi ke Aset tetap gedung dan Bangunan	247.730.743,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		346.482.243,00

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp346.482.243,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD akibat perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp98.751.500,00.

2. Reklasifikasi Aset Kontruksi Dalam Pekerjaan pada Aset tetap gedung dan Bangunan sebesar Rp247.730.743,00.

1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN

1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
231.677.553.304,48	273.056.569.898,39	243.296.048.752,53	261.438.074.450,34

Ringkasan mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin :

MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Tambah	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	34.407.366.043,53
	b. Koreksi Akumulasi Penyusutan	51.989.737.731,18
	c. Peralihan / Mutasi Masuk antar OPD	118.348.182.312,27
	d. Reklas / Perpindahan Akun	675.342.866,00
	e. Reklas kode rekening 64 ke 108	67.635.940.945,41
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020		273.056.569.898,39

Ringkasan mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin :

MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Kurang	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	125.001,00
	b. Koreksi Akumulasi Penyusutan	24.598.863.540,69
	c. Peralihan / Mutasi Masuk antar OPD	168.561.740.462,49
	d. Penghapusan Akumulasi Penyusutan	5.254.001.342,26
	e. Reklas kode rekening 64 ke 108	44.881.318.406,09
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020		243.296.048.752,53

1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
236.324.925.451,38	273.583.833.231,97	256.929.979.738,15	252.978.778.945,20

Ringkasan mutasi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan :

MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Tambah	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	18.970.046.623,00
	b. Peralihan / Mutasi Masuk antar OPD	53.534.098.897,20
	c. Koreksi Akumulasi Penyusutan	123.977.719.678,20
	d. Reklas / Perpindahan Akun	550.101.934,57
	e. Reklas kode rekening 64 ke 108	76.551.866.099,00
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020		273.583.833.231,97

Ringkasan mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan :

**MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Kurang	
	a. Koreksi Akumulasi Penyusutan	48.300.370.560,70
	b. Peralihan / Mutasi Keluar antar OPD	178.037.889.879,90
	c. Penghapusan Akumulasi Penyusutan	359.354.115,00
	d. Reklas kode rekening 64 ke 108	29.782.559.211,55
	e. Reklas/Perpindahan Akun	449.805.971,00
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020		256.929.979.738,15

1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
881.647.312.226,06	1.005.213.095.287,58	882.368.635.549,06	1.004.491.771.964,58

Pada tahun 2019 terdapat nilai koreksi aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu koreksi dari belanja pemeliharaan ke aset yang menyebabkan perubahan pada nilai aset tanpa disertai dengan akumulasi penyusutan pada laporan keuangan.

Ringkasan mutasi tambah akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan :

**MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Tambah	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	98.919.110.575,51
	b. Peralihan / Mutasi Masuk antar OPD	868.848.653.313,06
	c. Koreksi Akumulasi Penyusutan	26.786.982.996,01
	d. Reklas/Perpindahan Akun	92.977.500,00
	d. Reklas kode rekening 64 ke 108	10.565.370.903,00
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020		1.005.213.095.287,58

Ringkasan mutasi kurang akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan :

**MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Kurang	
	a. Peralihan / Mutasi Keluar antar OPD	870.511.881.526,06
	b. Koreksi Akumulasi Penyusutan	1.955.663.067,00
	c. Penghapusan Akumulasi Penyusutan	65.175.626,00
	d. Reklas kode rekening 64 ke 108	9.835.915.330
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020	882.368.635.549,06

1.5 ASET LAINNYA

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. *Aset lainnya pada Calk dan Neraca Aset disajikan secara bruto sebelum di kurangi nilai penyusutan dan amortisasi.*

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	Goodwill Lisensi dan <i>Franchise</i> Hak Cipta (<i>Copyright</i>) Hak Paten Piranti Lunak (<i>Software</i>) Komputer Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset lain-lain	Aset Rusak Berat/Usang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Aset Lain-lain Lainnya

Saldo awal aset lainnya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	20.632.110.876,79	0,00	0,00	20.632.110.876,79
A Tanah	12.452.773.014,91	0,00	0,00	12.452.773.014,91
B Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
C Gedung dan Bangunan	8.140.645.061,88	0,00	0,00	8.140.645.061,88
D Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.192.800,00	0,00	0,00	16.192.800,00
2 ASET TAK BERWUJUD	1.312.973.998,00	0,00	0,00	1.312.973.998,00
3 ASET LAIN LAIN	23.402.788.219,68	211.174.550,00	211.174.550,00	23.402.788.219,68
A. ASET PINJAM PAKAI	6.159.005.332,89	0,00	0,00	6.159.005.332,89
- Tanah	1.130.396.460,39	0,00	0,00	1.130.396.460,39
- Peralatan dan Mesin	3.691.985.260,00	0,00	0,00	3.691.985.260,00
- Gedung dan Bangunan	1.336.623.612,50	0,00	0,00	1.336.623.612,50
B. ASET IDLE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ASET RUSAK BERAT	14.578.478.480,56	172.750.400,00	172.750.400,00	14.578.478.480,56
- Peralatan dan Mesin	9.066.329.885,83	172.750.400,00	0,00	9.239.080.285,83
- Gedung dan Bangunan	2.440.337.689,95	0,00	172.750.400,00	2.267.587.289,95
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.071.810.904,78	0,00	0,00	3.071.810.904,78
- Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	0,00

URAIAN		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH
D.	TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	1.619.123.167,74	38.424.150,00	38.424.150,00	1.619.123.167,74
	- Peralatan dan Mesin	1.570.724.017,74	38.424.150,00	0,00	1.609.148.167,74
	- Peralatan dan Mesin Hilang/Bencana	9.975.000,00	0,00	0,00	9.975.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	38.424.150,00	0,00	38.424.150,00	0,00
E.	BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
	- Gedung dan Bangunan	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
	TOTAL ASET LAINNYA	45.347.873.094,47	211.174.550,00	211.174.550,00	45.347.873.094,47

Penjelasan Pos Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

URAIAN		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
			TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>		<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1	TAGIHAN JANGKA PANJANG	1.383.167.250,00	244.320.000,00	0,00	1.627.487.250,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.383.167.250,00	244.320.000,00	0,00	1.627.487.250,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	20.632.110.876,79	2.431.735.854,30	1.845.079.559,26	21.218.767.171,83
	A Tanah	12.452.773.014,91	1.256.476.221,69	168.240.283,93	13.541.008.952,67
	B Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	C Gedung dan Bangunan	8.140.645.061,88	1.175.259.632,61	1.676.839.275,33	7.639.065.419,16
	D Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.192.800,00	0,00	0,00	16.192.800,00
3	ASET TAK BERWUJUD	1.312.973.998,00	610.189.800,00	533.188.000,00	1.389.975.798,00
4	ASET LAIN LAIN	23.402.788.219,68	8.858.620.204,35	9.664.773.469,09	33.021.130.154,91
	A. ASET PINJAM PAKAI	6.159.005.332,89	1.718.055.000,00	1.395.780.000,00	6.481.280.332,89
	- Tanah	1.130.396.460,39	204.288.000,00	819.140.000,00	515.544.460,39
	- Peralatan dan Mesin	3.691.985.260,00	1.167.767.000,00	576.640.000,00	4.283.112.260,00
	- Gedung dan Bangunan	1.336.623.612,50	346.000.000,00	0,00	1.682.623.612,50
	B. ASET IDLE	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>I</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ASET RUSAK BERAT	14.578.478.480,56	7.097.660.636,35	7.250.506.968,55	24.831.284.726,96
- Peralatan dan Mesin	9.239.080.285,83	7.045.082.636,35	7.197.928.968,55	19.491.886.532,23
- Gedung dan Bangunan	2.267.587.289,95	52.578.000,00	52.578.000,00	2.267.587.289,95
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.071.810.904,78	0,00	0,00	3.071.810.904,78
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
D. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	1.619.123.167,74	42.904.568,00	1.018.486.500,54	662.383.856,57
- Peralatan dan Mesin	1.609.148.167,74	42.904.568,00	1.018.486.500,54	652.408.856,57
- Peralatan dan Mesin Hilang/Bencana	9.975.000,00	0,00	0,00	9.975.000,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
E. BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
- Gedung dan Bangunan	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
TOTAL ASET LAINNYA	46.731.040.344,47	12.144.865.858,65	12.043.041.028,35	57.257.360.374,74

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah antara lain :

1. Koreksi aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat pada aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp172.750.400,00.
2. Koreksi nilai Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp38.424.150,00.

Nilai aset lainnya pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.257.360.374,74. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.909.487.280,27 atau 26,26% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp45.347.873.094,47. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

Ringkasan aset lainnya Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1.5.1 TAGIHAN JANGKA PANJANG

1.5.1.2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.383.167.250,00, dengan rincian sebagai berikut: (*Lampiran II.19*)

- Atas nama Selpiana Prihartini sebesar Rp1.151.500.000,00 (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang I B No.10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp).
- Atas nama Andika Bani Prabowo, S.Pd sebesar Rp231.667.250,00. (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pgp).

Selama tahun 2020, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp244.320.000,00 dibandingkan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Atas nama Rosmawaty sebesar Rp189.320.000,00 (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang I B No.16/Pid.Sus-TPK/2019/PN).
- Atas nama Riky Ramdhani S.Pd sebesar Rp55.000.000,00 (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang I B No.17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp).

Jadi jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.627.487.250,00.

1.5.2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa :

- a. Sewa
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

c. Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

d. Bangun Serah Guna

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.218.767.171,83. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp586.656.295,04 atau 2,84% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp20.632.110.876,79. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

Rincian nilai aset lainnya/kemitraan dengan pihak ketiga adalah :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	20.632.110.876,79	2.431.735.854,30	1.845.079.559,26	21.218.767.171,83
A Tanah	12.452.773.014,91	1.256.476.221,69	168.240.283,93	13.541.008.952,67
B Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
C Gedung dan Bangunan	8.140.645.061,88	1.175.259.632,61	1.676.839.275,33	7.639.065.419,16
D Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.192.800,00	0,00	0,00	16.192.800,00

Ringkasan mutasi aset lainnya:

1. Mutasi tanah kemitraan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK
KETIGA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	823.854.000,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	3.690.000,00
	b. Peralihan antar OPD	820.164.000,00
2	REKLASIFIKASI :	432.622.221,69
	a. REKLAS DARI ASET TETAP TANAH	432.622.221,69
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		1.256.476.221,69

Penambahan nilai aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp. 1.256.476.221,69, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralihan
 - Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp3.690.000,00.
 - Peralihan masuk antar OPD sebesar Rp820.164.000,00.
- b. Reklasifikasi

Reklasifikasi aset tetap tanah pada aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp432.622.221,69.

**MUTASI KURANG ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK
KETIGA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	101.123.674,05
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	3.690.000,00
	b. Peralihan antar OPD	97.433.674,05
2	REKLASIFIKASI :	67.116.609,88
	a. REKLAS KE ASET TETAP TANAH	67.116.609,88
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		168.240.283,93

Pengurangan nilai aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp168.240.283,93, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralihan
 - Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp3.690.000,00.
 - Peralihan masuk antar OPD sebesar Rp97.433.674,05.
- b. Reklasifikasi
 - Reklasifikasi Aset Lainnya/Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Aset Tetap Tanah sebesar Rp67.116.609,88.

TAMBAHAN PENJELASAN SELISIH PERALIHAN ANTAR OPD

Sama seperti aset tetap tanah dikarenakan perbedaan klasifikasi aset saja, sehingga terdapat perbedaan nilai masuk dan keluar aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga berupa peralihan antar OPD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Masuk	Keluar	Selisih
1.	Peralihan aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga antar OPD :	823.854.000,00	101.123.674,05	722.730.325,95
a.	Peralihan aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga akibat inventarisasi perubahan OPD	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
b.	Peralihan aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga antar OPD TA 2020	820.164.000,00	97.433.674,05	722.730.325,95

Selisih tersebut terjadi dikarenakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalihkan tanah bangunan perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman yang merupakan objek perjanjian kerjasama dengan PT. Dreamland Property kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan langsung dikapitalisasi pada aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp820.164.000,00. Dari nilai tersebut, aset yang telah diklasifikasi ke dalam aset lainnya/tanah kemitraan dengan pihak ketiga pada DINPARBUDAYA, dialihkan kembali sebesar Rp. 97.433.674,05 kepada Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas Pariwisata Sungailiat. Pada Dinas Kesehatan bertambah pada aset tetap tanah.

2. Mutasi Peralatan dan Mesin Kemitraan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset lainnya/Peralatan dan Mesin kemitraan dengan pihak ketiga sehingga saldo aset lainnya/peralatan dan mesin kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.500.000,00.

3. Mutasi Gedung dan Bangunan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA/GEDUNG DAN BANGUNAN KEMITRAAN
DENGAN PIHAK KETIGA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	1.175.259.632,61
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	1.175.259.632,61
	TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	1.175.259.632,61

Penambahan nilai aset lainnya/gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketiga dikarenakan peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp1.175.259.632,61.

**MUTASI KURANG ASET LAINNYA/GEDUNG DAN BANGUNAN KEMITRAAN
DENGAN PIHAK KETIGA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	1.175.259.632,61
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	1.175.259.632,61
2	REKLASIFIKASI :	24.174.000,00
	a. REKLAS KE ASET TETAP TANAH	24.174.000,00
3	PENGHAPUSAN	477.405.642,72
	a. Penghapusan akibat pemusnahan	477.405.642,72
	TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	1.676.839.275,33

Pengurangan nilai aset lainnya/gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp1.676.839.275,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Peralihan

Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp1.175.259.632,61.

b. Reklasifikasi

Reklasifikasi Aset Lainnya/gedung dan bangunan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Aset Tetap gedung dan bangunan karena telah habis masa sebesar Rp24.174.000,00.

c. Penghapusan

Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang akan dilakukan pembangunan Puskesmas Pariwisata Sungailiat yang berada pada kawasan pemanfaatan oleh PT. Dreamland Property sebesar Rp477.405.642,72 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.4/4348/BPPKAD/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Bangunan di Kawasan Taman Hiburan Rakyat Sungailiat Tahun 2020.

4. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kemitraan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset lainnya/jalan, irigasi dan jaringan kemitraan dengan pihak ketiga sehingga saldo aset lainnya/jalan, irigasi dan jaringan kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.192.800,00.

1.5.2.5. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1.710.550.770,00	1.717.867.662,00	1.853.103.219,00	1.575.315.213,00

Ringkasan mutasi tambah akumulasi kemitraan pihak ketiga :

MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN PIHAK KETIGA (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Mutasi Tambah	
	a. Peralihan/Mutasi Masuk antar OPD	1.667.225.136,00
	b. Reklas Kode Rekening 64 ke 108	9.508.440,00
	c. Koreksi Akumulasi Penyusutan	41.134.086,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020	1.717.867.662,00

Ringkasan mutasi kurang akumulasi kemitraan pihak ketiga :

MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN PIHAK KETIGA (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Mutasi Tambah	
	a. Peralihan/Mutasi Masuk antar OPD	1.656.763.324,00
	b. Reklas Kode Rekening 64 ke 108	50.642.526,00
	c. Penghapusan Akumulasi Penyusutan	145.697.369,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020	1.853.103.219,00

1.5.3 ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika :

- Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Saldo aset lainnya/ aset tak berwujud pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.389.975.798,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.001.800 atau

5,86% dari saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.312.973.998,00. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA/ASET TAK BERWUJUD
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN	533.188.000,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	533.188.000,00
2.	REKLASIFIKASI	77.001.800,00
	a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud	77.001.800,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		610.189.800,00

Penambahan nilai aset lainnya/aset tak berwujud sebesar Rp610.189.800,00 terdiri dari :

- Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp533.188.000,00.
- Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud TA 2020 sebesar Rp77.001.800,00.

**MUTASI KURANG ASET LAINNYA/ASET TAK BERWUJUD
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	533.188.000,00
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	533.188.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		533.188.000,00

Pengurangan nilai aset lainnya/aset tak berwujud sebesar Rp533.188.000,00 dikarenakan Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp1.175.259.632,61

1.5.3.6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
639.428.235,00	1.339.559.880,00	1.098.830.052,00	880.158.063,00

Ringkasan mutasi tambah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud :

MUTASI TAMBAH AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Tambah	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	238.049.144,00
	b. Peralihan/Mutasi Masuk antar OPD	621.722.903,00
	c. Reklas kode rekening 64 ke 108	479.787.833,00
	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI SELAMA TA. 2020	1.339.559.880,00

Ringkasan mutasi kurang akumulasi amortisasi aset tidak berwujud :

MUTASI KURANG AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Kurang	
	a. Koreksi Akumulasi Penyusutan	1.999.983,00
	b. Peralihan/Mutasi Keluar antar OPD	617.042.236,00
	c. Reklas kode rekening 64 ke 108	486.468.483,00
	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI SELAMA TA. 2020	1.098.830.052,00

1.5.4. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2019 terdiri dari :

1. Aset Pinjam Pakai
2. Aset Idle (Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah)
3. Aset Rusak Berat
4. Aset yang tidak Diketahui Keberadaannya/Hilang/Bencana
5. Barang yang akan di hibahkan kepada pemerintah desa.

Saldo awal aset lainnya/aset lain-lain yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1 ASET LAIN LAIN	23.402.788.219,68	211.174.550,00	211.174.550,00	23.402.788.219,68

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>I</i>	2	3	4	5 = 2+3-4
A. ASET PINJAM PAKAI	6.159.005.332,89	0,00	0,00	6.159.005.332,89
- Tanah	1.130.396.460,39	0,00	0,00	1.130.396.460,39
- Peralatan dan Mesin	3.691.985.260,00	0,00	0,00	3.691.985.260,00
- Gedung dan Bangunan	1.336.623.612,50	0,00	0,00	1.336.623.612,50
B. ASET IDLE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ASET RUSAK BERAT	14.578.478.480,56	172.750.400,00	172.750.400,00	14.578.478.480,56
- Peralatan dan Mesin	9.066.329.885,83	172.750.400,00	0,00	9.239.080.285,83
- Gedung dan Bangunan	2.440.337.689,95	0,00	172.750.400,00	2.267.587.289,95
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.071.810.904,78	0,00	0,00	3.071.810.904,78
- Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
D. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	1.619.123.167,74	38.424.150,00	38.424.150,00	1.619.123.167,74
- Peralatan dan Mesin	1.570.724.017,74	38.424.150,00	0,00	1.609.148.167,74
- Peralatan dan Mesin Hilang/Bencana	9.975.000,00	0,00	0,00	9.975.000,00
- Aset Tetap Lainnya	38.424.150,00	0,00	38.424.150,00	0,00
E. BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
- Gedung dan Bangunan	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49

Penjelasan Pos Aset Lainnya/aset lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>I</i>	5 = 2+3-4	3	4	5 = 2+3-4
1 ASET LAIN LAIN	23.402.788.219,68	8.858.620.204,35	9.664.773.469,09	33.021.130.154,91
A. ASET PINJAM PAKAI	6.159.005.332,89	1.718.055.000,00	1.395.780.000,00	6.481.280.332,89
- Tanah	1.130.396.460,39	204.288.000,00	819.140.000,00	515.544.460,39

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>I</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
- Peralatan dan Mesin	3.691.985.260,00	1.167.767.000,00	576.640.000,00	4.283.112.260,00
- Gedung dan Bangunan	1.336.623.612,50	346.000.000,00	0,00	1.682.623.612,50
B. ASET IDLE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ASET RUSAK BERAT	14.578.478.480,56	7.097.660.636,35	7.250.506.968,55	24.831.284.726,96
- Peralatan dan Mesin	9.239.080.285,83	7.045.082.636,35	7.197.928.968,55	9.086.233.953,63
- Gedung dan Bangunan	2.267.587.289,95	52.578.000,00	52.578.000,00	2.267.587.289,95
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.071.810.904,78	0,00	0,00	3.071.810.904,78
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
D. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	1.619.123.167,74	42.904.568,00	1.018.486.500,54	662.383.856,57
- Peralatan dan Mesin	1.609.148.167,74	42.904.568,00	1.018.486.500,54	652.408.856,57
- Peralatan dan Mesin Hilang/Bencana	9.975.000,00	0,00	0,00	9.975.000,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
E. BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49
- Gedung dan Bangunan	1.046.181.238,49	0,00	0,00	1.046.181.238,49

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah antara lain :

1. Koreksi aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat pada aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp172.750.400,00.
2. Koreksi nilai Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp38.424.150,00.

Nilai aset lainnya/aset lain-lain pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.021.130.154,91. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.618.341.935,23 atau 41,1% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp23.402.788.219,68. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

1. Mutasi aset lain-lain/tanah pinjam pakai

ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - ASET PINJAM PAKAI TANAH
(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
1.130.396.460,39	204.288.000,00	819.140.000,00	515.544.460,39

Saldo akhir aset lainnya/aset lain-lain/tanah pinjam pakai per 31 Desember 2019 sebesar Rp515.544.460,39 dengan rincian sebagai berikut:

MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN – TANAH ASET PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	REKLASIFIKASI	204.288.000,00
	a. REKLAS KE ASET TETAP TANAH	204.288.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		204.288.000,00

Penambahan aset lainnya/aset lain-lain/tanah pinjam pakai sebesar Rp204.288.000,00 dikarenakan reklasifikasi aset tetap tanah pada aset lainnya/aset lain-lain/ tanah pinjam pakai berupa perjanjian baru.

MUTASI KURANG ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN – TANAH ASET PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	REKLASIFIKASI	819.140.000,00
	a. REKLAS KE ASET TETAP TANAH	819.140.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		819.140.000,00

Pengurangan aset lainnya/aset lain-lain/tanah pinjam pakai sebesar Rp204.288.000,00 dikarenakan Reklasifikasi Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Lain-lain Lainnya (Pinjam Pakai) pada Aset Tetap Tanah dikarenakan telah habis masa perpanjangannya.

2. Mutasi aset lain/lain/peralatan dan mesin pinjam pakai

ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - PERALATAN DAN MESIN PINJAM PAKAI

(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
3.691.985.260,00	1.167.767.000,00	576.640.000,00	4.283.112.260,00

Saldo akhir aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin pinjam pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.283.112.260,00 dengan rincian sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - PERALATAN DAN MESIN
PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	REKLASIFIKASI	1.167.767.000,00
	a. REKLAS DARI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	1.167.767.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		1.167.767.000,00

Penambahan nilai aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin pinjam pakai dikarenakan adanya perjanjian baru sehingga terjadi reklasifikasi tambah aset lain lain pinjam pakai dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.167.767.000,00.

**MUTASI KURANG ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - PERALATAN DAN MESIN
PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLASIFIKASI	576.640.000,00
	a. REKLAS KE ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	576.640.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		576.640.000,00

Pengurangan nilai aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin pinjam pakai sebesar Rp576.640.000,00 dikarenakan terjadi reklasifikasi kurang aset lain lain pinjam pakai pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp576.640.000,00 dikarenakan telah habis masa perpanjangannya

sebesar Rp46.000.000,00 dan terdapat pengembalian objek pinjam pakai sebelum masa perjanjian berakhir sebesar Rp530.640.000,00.

3. Mutasi aset lain-lain/bangunan pinjam pakai

**MUTASI ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - GEDUNG DAN BANGUNAN
PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
1.336.623.612,50	346.000.000,00	0,00	1.682.623.612,50

Saldo akhir Aset lainnya/aset lain lain/ gedung dan bangunan pinjam pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.682.623.612,50 dengan rincian sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - GEDUNG DAN BANGUNAN
PINJAM PAKAI
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLASIFIKASI	346.000.000,00
	a. REKLAS DARI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	346.000.000,00
	TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020	346.000.000,00

Aset lainnya/aset lain lain/ gedung dan bangunan pinjam pakai bertambah dikarenakan adanya perjanjian baru sehingga terjadi reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp346.000.000,00.

4. Mutasi aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat

Saldo awal aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
I. ASET RUSAK BERAT				
- Peralatan dan Mesin	9.066.329.885,83	172.750.400,00	0,00	9.239.080.285,83

**MUTASI ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - PERALATAN DAN MESIN ASET
RUSAK BERAT
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
ASET RUSAK BERAT				
Peralatan dan Mesin	9.239.080.285,83	7.045.082.636,35	7.197.928.968,55	19.491.886.532,23

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah berupa koreksi aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat pada aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp172.750.400,00.

Saldo akhir nilai Aset Lainnya/aset lain lain/ peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp19.491.886.532,23 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN DAN
MESIN RUSAK BERAT
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	5.964.995.703,81
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	5.772.995.703,81
	b. Peralihan antar OPD	192.000.000,00
2	REKLASIFIKASI :	1.080.086.932,54
	a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya	975.581.932,54
	b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	104.505.000,00
3	JURNAL KOREKSI	10.405.652.578,60
	a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.405.652.578,60
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		17.450.735.214,95

Penambahan nilai aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp17.450.735.214,95 terdiri dari :

- a. Peralihan sebesar Rp5.964.995.703,81 terdiri dari :
- peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp5.772.995.703,81.
 - Peralihan antar OPD TA 2020 sebesar Rp192.000.000,00

- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp1.080.086.932,54 terdiri dari :
- Reklasifikasi Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin rusak berat Rp975.581.932,54 dikarenakan setelah dilakukan penelusuran, BMD tersebut ditemukan kembali dalam keadaan rusak berat
 - Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat Rp104.505.000,00 berupa BMD yang berubah kondisi menjadi rusak berat akibat pemakaian.
- c. Jurnal Koreksi
Terdapat jurnal koreksi BPK sebesar Rp. 10.405.652.578,60 berupa reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin Rusak Berat.

**MUTASI KURANG ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN DAN MESIN
RUSAK BERAT
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	5.964.995.703,81
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	5.772.995.703,81
	b. Peralihan antar OPD	192.000.000,00
3	PENGHAPUSAN	1.232.933.264,74
	a. Penghapusan akibat pemusnahan	1.232.933.264,74
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		7.197.928.968,55

Pengurangan nilai aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp7.197.928.968,55 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peralihan
- Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp5.772.995.703,81.
 - Peralihan antar OPD TA 2020 sebesar Rp192.000.000,00.
- b. Penghapusan
Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp1.232.933.264,74.

5. Mutasi aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat

Saldo awal aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
I. ASET RUSAK BERAT				
- Gedung dan Bangunan	2.440.337.689,95	0,00	172.750.400,00	2.267.587.289,95

**MUTASI ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN – GEDUNG DAN BANGUNAN ASET
RUSAK BERAT
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
ASET RUSAK BERAT				
Gedung dan Bangunan	2.267.587.289,95	52.578.000,00	52.578.000,00	2.267.587.289,95

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berupa koreksi aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan rusak berat pada aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp172.750.400,00.

Saldo akhir nilai Aset Lainnya/aset lain lain/gedung dan bangunan rusak berat sebesar Rp2.267.587.289,95 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH DAN KURANG ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - GEDUNG
DAN BANGUNAN RUSAK BERAT
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN ANTAR OPD	52.578.000,00
a.	Peralihan akibat perubahan OPD	52.578.000,00

TOTAL MUTASI TAMBAH DAN KURANG SELAMA TA. 2020	52.578.000,00
---	----------------------

Mutasi yang terjadi dikarenakan adanya peralihan antar OPD akibat perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp52.578.000,00.

6. Mutasi Aset Lainnya/aset lain lain – Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat

Nilai aset lainnya/aset lain-lain/jalan, irigasi dan jaringan rusak berat tidak mengalami perubahan selama TA 2020 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.071.810.904,78.

7. Mutasi aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya

Saldo awal aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA				
- Peralatan dan Mesin	1.570.724.017,74	38.424.150,00	0,00	1.609.148.167,74

MUTASI ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN - PERALATAN DAN MESIN ASET TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	MUTASI TA 2020		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>5 = 2+3-4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA				
- Peralatan dan Mesin	1.609.148.167,74	61.747.189,37	1.018.486.500,54	652.408.856,57

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berupa Koreksi nilai Aset

Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp38.424.150,00.

Saldo akhir nilai Aset Lainnya/aset lain lain/ peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp652.408.856,57 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

MUTASI TAMBAH ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	42.904.568,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	42.904.568,00
2	JURNAL KOREKSI	18.842.621,37
	a. Reklasifikasi dari aset tetap	18.842.621,37
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		61.747.189,37

Penambahan nilai aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp61.747.189,37 dikarenakan peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp42.904.568,00 dan terdapat jurnal koreksi BPK berupa reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp18.842.621,37.

MUTASI KURANG ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN	42.904.568,00
	a. Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD	42.904.568,00
2	REKLASIFIKASI	975.581.932,54
	a. Reklasifikasi Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin rusak berat	975.581.932,54
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		1.018.486.500,54

Pengurangan nilai aset lainnya/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.018.486.500,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Peralihan

Peralihan keluar akibat inventarisasi perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020 sebesar Rp42.904.568,00.

b. Reklasifikasi

Reklasifikasi Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/ Aset Lain-lain/ Peralatan dan Mesin rusak berat sebesar Rp975.581.932,54.

8. Aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya akibat bencana

Saldo akhir aset lainnya/aset lain lain peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaan dikarenakan bencana sebesar Rp9.975.000,00, selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau pengurangan.

9. Aset Lainnya/Aset Lain-Lain/ Aset Tetap Lainnya Tidak Diketahui Keberadaannya

Saldo awal aset lainnya/aset lain-lain/peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA				
- Aset Tetap Lainnya	38.424.150,00	0,00	38.424.150,00	0,00

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berupa Koreksi nilai Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya pada Aset Lainnya/Aset Lain-lain/Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp38.424.150,00.

Selain itu, tidak terjadi perubahan selama TA 2020 sehingga tidak terdapat saldo akhir aset lainnya/aset lain lain – aset tetap lainnya yang tidak diketahui keberadaannya per 31 Desember 2020.

10. Mutasi aset lain-lain/gedung dan bangunan yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Desa

Saldo akhir aset lainnya/aset lain-lain/gedung dan bangunan yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.046.181.238,49, selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan atau

pengurangan hanya terjadi perpindahan OPD akibat perubahan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2020.

1.5.4.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
8.079.638.847,53	5.034.542.637,53	13.114.181.485,06	0,00

Ringkasan mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lain-lain :

MUTASI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Tambah	
	a. Beban Penyusutan Semester 1 dan Semester 2	0,00
	b. Reklas / Perpindahan Akun	0,00
	c. Koreksi Akumulasi Penyusutan	100.624.748,00
	d. Peralihan/Mutasi Masuk antar OPD	4.933.917.889,53
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020	5.034.542.637,53

Ringkasan mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain :

MUTASI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN (Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Mutasi Kurang	
	a. Penghapusan Akumulasi Penyusutan	2.704.140.632,00
	b. Reklas kode rekening 64 ke 108	5.335.417.065,41
	c. Peralihan / Mutasi Keluar antar OPD	5.054.623.787,65
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN SELAMA TA. 2020	13.114.181.485,06

ASET EKSTRAKOMPTABEL

Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Aset ekstrakomptabel merupakan aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Sedangkan kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai serta semua pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi serta renovasi/overhaul.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sampai dengan tahun 2015 meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olahraga, alat berat, konstruksi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku perpustakaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2016 meliputi :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Pengeluaran untuk alat berat, konstruksi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan dan/atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Pengeluaran aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku perpustakaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Saldo awal aset ekstrakomptabel yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1 PERALATAN DAN MESIN	26.415.019.456,21	1.639.691.773,34	0,00	28.054.711.229,55
A PERALATAN DAN MESIN	25.893.691.989,54	1.623.639.463,34	0,00	27.517.331.452,88
A PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	63.945.172,17	2.548.800,00	0,00	66.493.972,17
A PERALATAN DAN MESIN YG TDK DIKET.KEBERADAANNYA	457.382.294,50	13.503.510,00	0,00	470.885.804,50
2 GEDUNG DAN BANGUNAN	1.671.867.423,86	0,00	1.288.246.117,59	383.621.306,27
A GEDUNG DAN BANGUNAN	1.663.858.773,98	0,00	1.288.246.117,59	375.612.656,39
C KEMITRAAN PIHAK KETIGA	7768409,88	0,00	0,00	7.768.409,88
B. GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	240.240,00	0,00	0,00	240.240,00

URAIAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SEBELUM PENYESUAIAN	PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016		SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN
		TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	21.760.609.849,98	40.844.629,00	0,00	21.801.454.478,98
A JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	21.760.609.849,98	40.844.629,00	0,00	21.801.454.478,98
4 ASET TETAP LAINNYA	809.807.240,08	0,00	392.290.284,75	417.516.955,33
A ASET TETAP LAINNYA	793.754.930,08	0,00	376.237.974,75	417.516.955,33
C TIDAK DIKET. KEBERADAANNYA	13.503.510,00	0,00	13.503.510,00	0,00
B RUSAK BERAT	2.548.800,00	0,00	2.548.800,00	0,00
TOTAL ASET EKTRAKOMPTABLE	50.657.303.970,13	1.680.536.402,34	1.680.536.402,34	50.657.303.970,13

Terdapat penyesuaian jenis aset yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah berupa :

- a. Koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin sebesar Rp376.237.974,75.
- b. Koreksi Aset Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.247.401.488,59.
- c. Koreksi Aset Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan pada Aset Non Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp40.844.629,00.
- d. Koreksi Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya Rusak Berat pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar Rp2.548.800,00.
- e. Koreksi Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp13.503.510,00.

Nilai aset ekstrakomptabel yang tersaji per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.084.839.389,87. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp427.535.419,74 atau 0,84% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp50.657.303.970,13. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI TA 2020	SALDO AKHIR
--------	------------	----------------	-------------

		1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN	TAMBAH	KURANG	PER 31 DESEMBER 2020
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2+3-4</i>
1	PERALATAN DAN MESIN	28.054.711.229,55	3.572.410.732,58	3.187.101.708,40	28.440.020.253,73
	A PERALATAN DAN MESIN	27.517.331.452,88	3.122.717.348,08	2.253.744.569,11	28.386.304.231,85
	B PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	66.493.972,17	448.047.554,50	483.789.304,79	30.752.221,88
	C PERALATAN DAN MESIN YG TDK DIKET.KEBERADAANNYA	470.885.804,50	1.645.830,00	449.567.834,50	22.963.800,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	383.621.306,27	62.824.480,33	36.244.284,77	410.201.501,83
	A GEDUNG DAN BANGUNAN	375.612.656,39	62.824.480,33	28.967.274,89	409.469.861,83
	B KEMITRAAN PIHAK KETIGA	7768409,88	0	7277009,88	491.400,00
	C GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	240.240,00	0,00	0,00	240.240,00
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	21.801.454.478,98	5.412.702.950,00	5.398.856.750,00	21.815.300.678,98
	A JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	21.801.454.478,98	5.412.702.950,00	5.398.856.750,00	21.815.300.678,98
4	ASET TETAP LAINNYA	417.516.955,33	9.660.000,00	7.860.000,00	419.316.955,33
	A ASET TETAP LAINNYA	417.516.955,33	9.660.000,00	7.860.000,00	419.316.955,33
	B TIDAK DIKET. KEBERADAANNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	C RUSAK BERAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ASET EKTRAKOMPTABLE	50.657.303.970,13	9.057.598.162,91	8.630.062.743,17	51.084.839.389,87

Ringkasan aset ekstrakomptabel Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

A. PERALATAN DAN MESIN EKTRAKOMPTABEL

Saldo peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.386.304.231,85. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.492.612.242,31 atau 9,63 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp25.893.691.989,54. Adapun penyesuaian nilai peralatan dan mesin ekstrakomptabel yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

- a. koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin sebesar Rp376.237.974,75.
- b. Koreksi Aset Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.247.401.488,59.

Sehingga saldo peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.386.304.231,85 mengalami peningkatan sebesar Rp868.972.778,97 atau 3,16 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp27.517.331.452,88. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
27.517.331.452,88	3.122.717.348,08	2.253.744.569,11	28.386.304.231,85

Ringkasan mutasi peralatan dan mesin ekstrakomptabel adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	BELANJA MODAL BOS APBN	461.958.469,00
2	PERALIHAN	1.578.696.546,08
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	1.578.696.546,08
3	HIBAH	99.493.160,00
4	KOREKSI	70.269.000,00
	a. Koreksi Klasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	8.400.000,00
	b. Koreksi dari Belanja Modal BLUD Gedung Bangunan	45.344.000,00
	c. Koreksi Tambah dari Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	16.525.000,00
6	REKLASIFIKASI	912.300.173,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.970.500,00
	b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	775.683.648,00
	c. Reklasifikasi dari Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	132.646.025,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		3.122.717.348,08

Penambahan nilai peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp3.122.717.348,08 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal BOS APBN
Belanja modal BOS APBN TA 2020 yang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel dikarenakan memiliki harga satuan dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp461.958.469,00.
2. Peralihan antar OPD
Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp1.578.696.546,08.
3. Hibah
Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk TA 2020 sebesar Rp99.493.160,00 terdiri dari :
 - a. Hibah dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp98.643.160,00.
 - b. Hibah dari PT. Mitra Stania Prima kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp150.000,00.
 - c. Hibah dari PT. Tirta Medika Jaya kepada RSUD Depati Bahrin TA 2020 sebesar Rp700.000,00.
4. Koreksi
Penambahan dikarenakan koreksi sebesar Rp70.269.000,00 terdiri dari :
 - a. Koreksi Klasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.400.000,00.
 - b. Koreksi Belanja Modal BLUD Gedung Bangunan ke Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.344.000,00.
 - c. Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.525.000,00.
5. Reklasifikasi
Reklasifikasi tambah TA 2020 sebesar Rp912.300.173,00 terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.970.500,00.
 - b. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp775.683.648,00.
 - c. Reklasifikasi Belanja Modal BLUD TA. 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Aset Non Kapitalisasi peralatan dan Mesin sebesar Rp132.646.025,00.

**MUTASI KURANG PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
-----	--------	--------

1	PERALIHAN ANTAR OPD	1.578.696.546,08
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	1.578.696.546,08
2	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	613.914.868,03
4	REKLASIFIKASI	61.133.155,00
	a. Reklasifikasi ke Aset Lancar/ Persediaan	61.133.155,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		2.253.744.569,11

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp2.253.744.569,11 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD
Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp1.578.696.546,08.
2. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp613.914.868,03.
3. Reklasifikasi
Reklasifikasi kurang TA 2020 Reklasifikasi Kurang ke persediaan sebesar Rp61.133.155,00.

B. ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT

Saldo aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.752.221,88. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.192.950,29 atau 51,9 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp63.945.172,17. Adapun penyesuaian nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dikarenakan koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya rusak berat pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp2.548.800,00.

Sehingga saldo aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.752.221,88 mengalami penurunan sebesar Rp35.741.750,29 atau 53,75 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp66.493.972,17. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

MUTASI ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT (Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
66.493.972,17	448.047.554,50	483.789.304,79	30.752.221,88

Ringkasan mutasi BMD ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat adalah sebagai berikut:

**MUTASI TAMBAH ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK
BERAT
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN	125.550,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	125.550,00
2.	REKLASIFIKASI	447.922.004,50
	a. Reklasifikasi dari Aset Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya	447.922.004,50
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		448.047.554,50

Penambahan nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp448.047.554,50 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD
Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp125.550,00.
2. Reklasifikasi
Reklasifikasi tambah TA 2020 berupa reklasifikasi aset non kapitalisasi peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp447.922.004,50.

**MUTASI KURANG ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK
BERAT
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN ANTAR OPD	125.550,00
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	125.550,00
2.	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	483.663.754,79
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		483.789.304,79

Pengurangan nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp483.789.304,79 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD
Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp125.550,00.
2. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp483.663.754,79.

**C. ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAANNYA**

Saldo aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.963.800,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp434.418.494,50 atau 94,98 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp457.382.294,50. Adapun penyesuaian nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dikarenakan koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya tidak diketahui keberadaannya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp13.503.510,00.

Sehingga saldo aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.963.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp447.922.004,50 atau 95,12 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp470.885.804,50. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
470.885.804,50	1.645.830,00	449.567.834,50	22.963.800,00

Ringkasan mutasi aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN	1.645.830,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	1.645.830,00

TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	1.645.830,00
--	---------------------

Penambahan nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.645.830,00 dikarenakan Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp1.645.830,00.

**MUTASI KURANG ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAANNYA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	PERALIHAN ANTAR OPD	1.645.830,00
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	1.645.830,00
2.	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	447.922.004,50
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		449.567.834,50

Pengurangan nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp449.567.834,50 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD
Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp1.645.830,00.
2. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp447.922.004,50.

D. GEDUNG DAN BANGUNAN EKSTRAKOMPTABEL

Saldo gedung dan bangunan ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp409.469.861,83. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.254.388.912,15 atau 75,39% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp1.663.858.773,98. Adapun penyesuaian nilai gedung dan bangunan ekstrakomptabel yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

- a. Koreksi aset non kapitalisasi gedung dan bangunan pada aset non kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp40.844.629,00.
- b. koreksi aset non kapitalisasi gedung dan bangunan pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin sebesar Rp1.247.401.488,59.

Sehingga saldo gedung dan bangunan ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp409.469.861,83 mengalami penurunan sebesar Rp33.857.205,44 atau 9,01 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp375.612.656,39. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
375.612.656,39	62.824.480,33	28.967.274,89	409.469.861,83

Ringkasan mutasi gedung dan bangunan ekstrakomptabel adalah sebagai berikut :

MUTASI TAMBAH GEDUNG DAN BANGUNAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	BELANJA MODAL BOS APBN	19.852.000,00
2	PERALIHAN	27.717.274,89
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	27.717.274,89
3	HIBAH	2.434.923,44
4	REKLASIFIKASI	12.820.282,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	12.820.282,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		62.824.480,33

Penambahan nilai gedung dan bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp62.824.480,33 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal BOS APBN
Belanja modal BOS APBN TA 2020 yang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel dikarenakan memiliki harga satuan dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp19.852.000,00.
2. Peralihan antar OPD

Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp27.717.274,89.

3. Hibah

Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.434.923,44.

4. Reklasifikasi

Reklasifikasi tambah TA 2020 dikarenakan terjadi reklasifikasi belanja modal aset tetap gedung dan bangunan pada aset non kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp12.820.282,00.

**MUTASI KURANG GEDUNG DAN BANGUNAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN ANTAR OPD	27.717.274,89
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	27.717.274,89
2	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	1.250.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		28.967.274,89

Pengurangan nilai gedung dan bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp28.967.274,89 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp27.717.274,89.

2. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp1.250.000,00.

**E. ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN KEMITRAAN
DENGAN PIHAK KETIGA**

Saldo aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp491.400,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.277.009,88 atau 93,67% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebesar Rp7.768.409,88. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN KEMITRAAN
DENGAN PIHAK KETIGA
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
7.768.409,88	0,00	7.277.009,88	491.400,00

Ringkasan mutasi aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

**MUTASI KURANGASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	REKLASIFIKASI	7.277.009,88
	a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Bangunan	7.277.009,88
	TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020	7.277.009,88

Pengurangan nilai aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan kemitraan dengan pihak ketigasebesar Rp7.277.009,88 dikarenakan terjadi reklasifikasi aset non kapitalisasi bangunan kemitraan dengan pihak ketiga pada aset tetap bangunan dikarenakan telah habis masa.

F. ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT

Saldo aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan rusak berat pada neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp240.240,00. Nilai ini tidak mengalami perubahan selama TA 2020.

G. JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN EKSTRAKOMPTABEL

Saldo jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.815.300.678,98. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp54.690.829,00 atau 0,25 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp21.760.609.849,98. Adapun penyesuaian nilai jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dikarenakan koreksi aset non kapitalisasi gedung dan bangunan pada aset non kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp40.844.629,00.

Sehingga jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.815.300.678,98 mengalami peningkatan sebesar Rp13.846.200,00 atau 0,06 % dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp21.801.454.478,98. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

**MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	

SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (1+2-3)</i>
21.801.454.478,98	5.412.702.950,00	5.398.856.750,00	21.815.300.678,98

Ringkasan mutasi jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel adalah sebagai berikut :

**MUTASI TAMBAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	BELANJA MODAL BOS APBN	11.647.800,00
2	PERALIHAN	5.397.456.750,00
	a. Peralihan masuk akibat inventarisasi perubahan OPD	5.387.779.000,00
	b. Peralihan antar OPD	9.677.750,00
3	HIBAH	2.500.000,00
4	KOREKSI	1.098.400,00
	a. Koreksi Tambah dari Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.098.400,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		5.412.702.950,00

Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp5.412.702.950,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal BOS APBN
Belanja modal BOS APBN TA 2020 yang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel dikarenakan memiliki harga satuan dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp11.647.800,00.
2. Peralihan antar OPD
Peralihan antar OPD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.397.456.750,00 terdiri dari :
 - a. Penambahan akibat Peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp5.387.779.000,00.
 - b. Peralihan antar OPD TA 2020 sebesar Rp9.677.750,00.
3. Hibah
Penambahan dikarenakan pendapatan hibah masuk dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019 kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.500.000,00.
4. Koreksi
Koreksi Tambah Pencatatan BOS APBN 2019 Aset Non Kapitalisasi Jalan, Irigasi & Jaringan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.098.400,00.

MUTASI KURANG JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PERALIHAN ANTAR OPD	5.397.456.750,00
	a. Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD	5.387.779.000,00
	b. Peralihan antar OPD TA 2020	9.677.750,00
2	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	1.400.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		5.398.856.750,00

Pengurangan nilai jalan, irigasi dan jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp5.398.856.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peralihan antar OPD

Pengurangan akibat peralihan antar Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.397.456.750,00 terdiri dari:

- Peralihan akibat inventarisasi perubahan OPD sebesar Rp5.387.779.000,00.
- Peralihan antar OPD TA 2020 sebesar Rp9.677.750,00

2. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp1.400.000,00.

H. ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL

Saldo aset tetap lainnya ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp419.316.955,33. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp374.437.974,75 atau 47,17% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 sebelum penyesuaian sebesar Rp793.754.930,08. Adapun penyesuaian nilai aset tetap lainnya ekstrakomptabel yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dikarenakan koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin sebesar Rp376.237.974,75.

Sehingga aset tetap lainnya ekstrakomptabel pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp419.316.955,33 mengalami penurunan sebesar Rp1.800.000,00 atau 0,43% dari nilai saldo awal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian sebesar Rp417.516.955,33. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

MUTASI ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

SALDO AWAL 1 JANUARI 2020 SETELAH PENYESUAIAN PERMENDAGRI 108	MUTASI		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
	TAMBAH	KURANG	

TAHUN 2016			
1	2	3	4 = (1+2-3)
417.516.955,33	9.660.000,00	7.860.000,00	419.316.955,33

Ringkasan mutasi aset tetap lainnya ekstrakomptabel adalah sebagai berikut :

MUTASI TAMBAH ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BELANJA MODAL BOS APBN	1.980.000,00
2.	REKLASIFIKASI	7.680.000,00
	a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.680.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH SELAMA TA. 2020		9.660.000,00

Penambahan nilai tetap lainnya ekstrakomptabel sebesar Rp9.660.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Modal BOS APBN
Belanja modal BOS APBN TA 2020 yang tergolong ke dalam aset ekstrakomptabel dikarenakan memiliki harga satuan dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp1.980.000,00.
2. Reklasifikasi
Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.680.000,00.

MUTASI KURANG ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	REKLASIFIKASI	7.680.000,00
	a. Reklasifikasi ke Aset Lancar (Persediaan)	7.680.000,00
2.	PENGHAPUSAN AKIBAT PEMUSNAHAN TA 2020	180.000,00
TOTAL MUTASI KURANG SELAMA TA. 2020		7.860.000,00

Pengurangan nilai aset tetap lainnya ekstrakomptabel sebesar Rp7.860.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penghapusan akibat pemusnahan TA 2020 sebesar Rp180.000,00.
2. Reklasifikasi Aset Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya pada Aset Lancar (Persediaan) sebesar Rp7.860.000,00.

A. ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

Saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp13.503.510,00. Terjadi penyesuaian nilai aset tetap lainnya ekstrakomptabel tidak diketahui keberadaannya yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah berupa koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya tidak diketahui keberadaannya pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp13.503.510,00.

Nilai tersebut tidak mengalami perubahan lagi sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo akhir.

B. ASET TETAP LAINNYA EKSTRAKOMPTABEL RUSAK BERAT

Saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp2.548.800,00. Terjadi penyesuaian nilai aset tetap lainnya ekstrakomptabelrusak berat yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah berupa koreksi aset non kapitalisasi aset tetap lainnya rusak berat pada aset non kapitalisasi peralatan dan mesin rusak berat sebesar Rp2.548.800,00.

Nilai tersebut tidak mengalami perubahan lagi sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo akhir.

2. KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.057.032.665,34.

2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2020 sebesar Rp26.057.032.665,34 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp22.162.329.142,88.

2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2.1.1.7 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

Utang PFK tahun 2019 sebesar Rp88.980.461,92. Jumlah utang PFK tahun 2020 tidak mengalami perubahan masih sebesar Rp88.980.461,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. PPKD sebesar Rp88.980.461,92 yang terdiri dari:

1. Rp16.250.000,00 merupakan pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015, namun sampai dengan tahun 2018, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya.
2. SKRDLB Hubkominfo sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata, Tbk yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016.

2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2019 pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.661.492.718,96 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp4.618.208.926,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Setda	Rp12.647.231,00
b. PPKD	Rp463.068.486,38
c. PPKD (Kerja sama Pemanfaatan)	Rp4.140.903.209,25
d. Disnaker Perindag	Rp1.590.000,00
Jumlah	Rp4.618.208.926,63

Penjelasan terkait rincian pendapatan diterima dimuka terdapat pada Lampiran II.3.

2.1.5. Utang Beban

Utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.067.754.976,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp8.357.397.819,79, dengan rincian sebagai berikut:

2.1.5.1 Utang Beban Pegawai

Utang beban pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 utang beban pegawai sebesar Rp17.068.000,00 yang diakui pada OPD Sekretariat Daerah.

2.1.5.2. Utang Beban Barang dan Jasa

Merupakan utang atas biaya listrik, telepon, air, internet, surat kabar, tv kabel, dll kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.067.754.976,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp8.300.768.603,00. Rincian utang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- BLUD Dinkes sebesar Rp5.447.423.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	PUSKESMAS	JUMLAH UTANG BEBAN
1.	Puskesmas Kenanga	4.804.900,00
2.	Puskesmas Belinyu	250.125.590,00
3.	Puskesmas Gunung Muda	2.483.500,00
4.	Puskesmas Sungailiat	51.195.260,00
5.	Puskesmas Baturusa	0,00
6.	Puskesmas Pemali	4.069.500,00
7.	Puskesmas Bakam	35.695.700,00
8.	Puskesmas Riau Silip	0,00
9.	Puskesmas Puding Besar	1.326.200,00
10.	Puskesmas Petaling	3.248.640,00
11.	Puskesmas Sinar Baru	1.914.400,00
12.	Puskesmas Penagan	65.443.834,00
13.	RSUD DR.Eko Maulana ali	17.518.500,00
14.	RSUD Depati Bahrin	5.000.893.234,00
15.	RS Sjafrie Rachman	8.704.300,00
	JUMLAH	5.447.423.558,00

OPD dalam lingkup Pemda sebesar Rp2.853.345.045,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	OPD	2020	2019
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	9.046.618,00	11.724.138,00
2.	Dinas Kesehatan	2.453.046.814,00	850.691.683,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.621.074,00	10.336.252,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan	1.720.725,00	1.968.528,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.370.538,00	2.407.158,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.599.378,00	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.580,00	179.840,00
8.	Dinas Sosial	3.001.457,00	3.908.183,00
9.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	42.631.295,00	39.125.222,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.161.168,00	2.077.492,00
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	5.696.365,00	5.192.618,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	2.296.785,00	1.899.157,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.692.796,00	11.492.199,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.018.380,00	1.206.362,00
15.	Dinas Perhubungan	108.958.862,00	124.812.913,00
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.132.218,00	7.507.411,00
17.	Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Perizinan Teadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	5.787.840,00	6.211.639,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.815.521,00	4.014.118,00
19.	Dinas Perikanan	5.899.426,00	6.218.078,00
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.258.260,00	1.546.905,00
21.	Inspektorat Daerah	1.655.000,00	1.709.666,00

No.	OPD	2020	2019
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.068.378,00	8.235.024,00
23.	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.995.979,00	23.057.084,00
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.243.411,00	5.850.501,00
25.	Sekretariat Daerah	90.210.018,00	110.455.511,00
26.	Sekretariat DPRD	29.315.493,00	20.193.714,00
27.	Kecamatan Sungailiat	9.480.065,00	10.219.978,00
28.	Kecamatan Belinyu	4.036.677,00	4.274.590,00
29.	Kecamatan Merawang	2.150.057,00	2.804.328,00
30.	Kecamatan Mendo Barat	510.825,00	490.318,00
31.	Kecamatan Pemali	698.042,00	645.077,00
32.	Kecamatan Bakam	121.000,00	117.000,00
33.	Kecamatan Riau Silip	387.500,00	411.500,00
34.	Kecamatan Puding Besar	631.500,00	828.445,00
	Jumlah	2.853.345.045,00	1.281.812.632,00

Utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.453.046.814,00 termasuk utang jasa insentif perawat *covid-19* sebesar Rp2.071.139.631,00 yang mana untuk pembayarannya akan menggunakan dana realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Lampiran II.13)*

Sedangkan untuk rincian utang biaya listrik, telpon, air, internet, tv kabel, dll kepada pihak ketiga terlampir (*Lampiran II.1*).

2.1.5.7 Utang Beban Transfer

Utang beban transfer per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 utang beban transfer sebesar Rp39.561.216,79. Berdasarkan SK Gubernur Nomor:188.44/204/BAKUDA/2020 tanggal 30 Maret 2020 pagu anggaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp607.496.250,54 sedangkan jumlah realisasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun 2020 sebesar Rp647.057.467,33, sehingga menimbulkan lebih transfer.

2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2019 sebesar Rp4.344.100.986,00 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp12.992.445.457,00 yang terdiri dari:

2.1.6.02.01 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.033.002.454,00 berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2020. (*Lampiran II.17*)

2.1.6.04.01. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.344.098.595,00 sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.959.346.400,00 pada Dinas Kesehatan

yang merupakan utang atas pekerjaan pembangunan gedung IBS Terpadu di RSUD Depati Bahrin (sesuai dengan Surat Tagihan Pihak Ketiga) (*Lampiran II.14*)

1.1.6.07.01. Utang Titipan

Utang Titipan per 31 Desember 2020 sebesar Rp96.603,00 yang terdiri dari:

- Jasa giro pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan pada RSUD Sjafrie Rachman yaitu Rp3.668,00.
- Jasa giro pada Bendahara Peng. Pembantu V Dinkes sebesar Rp1.006,00.
- Jasa giro pada Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp55.929,00.
- Kas di Bendahara BOS APBN SDN 17 Merawang sebesar Rp36.000,00.

3. EKUITAS

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih aset dan kewajiban pemerintah daerah. Jumlah ekuitas tahun 2020 sebesar Rp1.953.608.873.356,90 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp2.035.251.322.027,61.

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8. Pendapatan - LO

Total Pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp1.179.368.790.966,96 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp1.346.861.712.375,18. Adapun rincian pendapatan LO tahun 2020 adalah sebagai berikut :

8.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp151.698.370.689,08 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah-LO selama tahun 2020 sebesar Rp61.786.249.450,92 dengan rincian :

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pajak Hotel	331.520.140,00	1.048.725.190,00
2.	Pajak Restoran	1.947.584.131,00	2.969.256.273,00
3.	Pajak Hiburan	62.416.150,00	194.820.875,00
4.	Pajak Reklame	1.201.277.452,82	1.194.726.270,44
5.	Pajak Penerangan Jalan	34.088.724.571,74	32.257.398.830,46
6.	Pajak Parkir	51.877.400,00	59.694.800,00
7.	Pajak Air Tanah	229.314.522,00	226.849.677,42
8.	Pajak Sarang Burung Walet	18.279.000,00	18.300.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.473.003.994,36	6.922.987.803,03
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.964.837.264,00	8.408.854.142,00
11.	Pajak BPHTB	8.417.414.825,00	7.796.585.447,00
	Jumlah	61.786.249.450,92	61.098.199.308,35

- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Hotel (LO) sebesar Rp53.418.759,35 merupakan pembayaran piutang pajak hotel senilai Rp53.418.759,35.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Restoran (LO) sebesar Rp18.730.635,35 merupakan realisasi tahun 2020 sebesar Rp22.478.664,65. Jumlah realisasi yang belum dibayar untuk tahun 2020 sebesar Rp42.461.800,00. Pembatalan SKP karena *double* pencatatan pada terdiri dari 3 nominal angka yaitu Rp72.500,00 (SKP Nomor 20.04.5919) Rp90.000,00 (SKP Nomor 20.09.0171) dan senilai Rp1.090.000,00 (SKP Nomor 20.12.4229).
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Reklame (LO) sebesar Rp36.574.299,82 yang merupakan selisih antara jurnal pendapatan diterima di muka (Jurnal Nomor: 037/JPE/PPKD/2020 dan 064/JPE/PPKD/2020 sebesar Rp466.633.486,38 dan jurnal nomor 063/JPE/PPKD/2020 sebesar Rp509.737.119,20) ditambah dengan nilai pajak yang belum dibayar sebesar Rp6.529.333,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Penerangan Jalan (LO) sebesar 16.826.577,35 dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp16.826.614,21 dan pembayaran piutang tahun 2020 Rp36,86.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Air Tanah (LO) sebesar Rp7.576.983,00 dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp9.311.268,00 dan pembayaran piutang tahun 2020 sebesar Rp16.888.251,00.

- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LO) sebesar Rp618.811.630,00 dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp620.391.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun 2020 sebesar Rp1.579.370,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (LO) sebesar Rp1.739.776.253,00 dikarenakan adanya jumlah SKP yang terbit Rp8.964.837.264,00 dengan realisasi sebesar Rp7.225.061.011,00 serta adanya jurnal penyesuaian pendapatan No 004/Reklas/PPKD/2020 sebesar Rp189.799.423,00, jurnal penyesuaian pendapatan No 005/Reklas/PPKD/2020 sebesar Rp65.214.178,00 dan jurnal penyesuaian No 074/JPE/PPKD/2020 sebesar Rp141.734.429,00. Realisasi yang belum dibayar sebesar Rp74.374.872,00.

8.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp8.204.001.145,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	97.501.377,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	543.285.000,00	532.550.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	574.000.000,00	640.500.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.214.737.000,00	1.362.934.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	208.830.000,00	231.635.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	32.700.000,00	29.400.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.700.000,00	0,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	,00	634.501.403,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	621.361.045,50	1.140.856.029,50
10.	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	1.404.460.000,00	1.534.612.000,00
11.	Retribusi Terminal	3.438.000,00	8.562.000,00
12.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	783.755.000,00	1.243.138.800,00
13.	Retribusi Rumah Potong Hewan	78.592.000,00	90.028.000,00
14.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	392.156.000,00	322.350.000,00
15.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	92.623.000,00	82.611.000,00
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.034.106.100,00	1.797.503.299,00
17.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	55.000.000,00	120.000.000,00
18.	Retribusi Izin Trayek	1.200.000,00	2.175.000,00
19.	Retribusi Izin Perikanan	60.934.000,00	32.716.000,00
20.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	92.124.000,00	64.921.200,00
	Jumlah	8.204.001.145,50	9.968.495.108,50

- Terdapat selisih pendapatan LO dengan Pendapatan LRA pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.500.000,00 yang merupakan pembayaran tahun sebelumnya.
- Terdapat selisih pendapatan LO dengan Pendapatan LRA pada Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi pada Dinas PUPR sebesar Rp94.013.340,00 yang merupakan pembayaran piutang tahun 2019 oleh PT Protelindo.
- Terdapat selisih pendapatan LO dengan Pendapatan LRA pada Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinakerperindag sebesar Rp6.500.000,00 merupakan pembayaran tahun sebelumnya.

- Terdapat selisih pendapatan LO dengan Pendapatan LRA pada Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan pada Dinakerperindag sebesar Rp69.750.000,00 merupakan pembayaran tahun sebelumnya.
- Terdapat selisih pendapatan LO dengan Pendapatan LRA pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp158.659.229,50 akibat jurnal pendapatan diterima dimuka dan realisasi yang belum dibayar sebesar Rp74.374.872,00.

8.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2020 sebesar Rp4.806.743.535,90 yang terdiri dari:

8.1.3.01.01 Bagian Laba Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD sebesar Rp4.806.743.535,90.

8.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO tahun 2020 sebesar Rp76.901.376.556,76 dimana sebesar Rp59.193.312.397,00 merupakan pendapatan yang berasal dari BLUD-DINKES sedangkan sebesar Rp13.655.894.951,43 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	8.845.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	802.604.439,00	731.233.178,00
3.	Pendapatan Bunga	8.709.543.625,18	10.857.929.841,77
4.	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	326.811.797,06	130.420.440,31
5.	Pendapatan Denda Pajak	4.818.607.662,75	105.811.036,06
6.	Pendapatan Denda Retribusi	18.900.740,00	59.243.247,00
7.	Pendapatan dari pengembalian	786.303.483,51	1.052.560.028,00
8.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.204.011.652,01	590.495.671,83
9.	Pendapatan BLUD	59.193.312.397,00	53.200.626.840,67
10.	Pendapatan Lainnya	1.041.280.760,25	120.181.508,46
	Jumlah	76.901.376.556,76	66.857.346.792,10

- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain –lain PAD yang sah (LO) untuk Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp6.097.100,00 sedangkan di LO tidak ada, nilai selisih tersebut merupakan jurnal penyesuaian mutasi atas penjualan aset dari Dinkes dan BLUD dengan nomor Jurnal 068/JPE/PPKD/2020.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain –lain PAD yang sah (LO) untuk Pendapatan Denda Pajak (LO) sebesar Rp4.453.638.181,64 jumlah denda yang belum dibayar tahun ini sebesar Rp.4.456.501.203,96 dikurangi jumlah pajak yang dibayar tahun sebelumnya sebesar Rp2.863.022,32.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain –lain PAD yang sah (LO) untuk Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp6.502.000,00 yang merupakan Jurnal Penyesuaian TASPEN atas pendapatan yang belum dibayar dengan nomor Jurnal 071/JPE/PPKD/2020.

- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain –lain PAD yang sah (LO) untuk Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp1.051.687.318,99 yang merupakan selisih atas penambahan dan pengurangan dengan rincian penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.176.421.311,75 dikurangi dengan pendapatan diterima dimuka Rp1.087.668.113,76 dan pendapatan yang belum dibayar tahun ini sebesar Rp37.065.879,00 yang terdiri dari nomor jurnal 061/JPE/PPKD/2020 dan 062/JPE/PPKD/2020.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain-lain PAD yang sah (LO) untuk Pendapatan BLUD sebesar Rp8.496.634.228,00 yang merupakan selisih atas penambahan dan pengurangan dengan rincian penambahan piutang BLUD sebesar Rp3.678.082.331,00 dikurangi dengan Pembatalan Piutang BLUD sebesar Rp13.978.718.695,00 dengan nomor jurnal 008/JPE/BLUD-DINKES/2020 dan 021/JPE/BLUD-DINKES/2020.
- Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Lain –lain PAD yang sah (LO) untuk Pendapatan Lainnya sebesar Rp23.689.700,00 yang merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan dengan rincian bertambah sebesar Rp15.295.000,00 dan Rp8.400.000,00 dan rincian pengurangan sebesar Rp5.300,00 dengan nomor jurnal 052/JPE/PPKD/2020, 057/JPE/PPKD/2020, 058/JPE/PPKD/2020).

8.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO tahun 2020 sebesar Rp922.059.955.156,93 dengan rincian sebagai berikut :

8.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2020 sebesar Rp743.612.707.926,00 dengan rincian sebagai berikut :

8.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp20.409.598.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan	13.152.925.000,00	59.482.623.991,00
2.	Bagi Hasil PPh Psl 25/29 dan Psl 21	7.256.673.000,00	8.117.207.739,00
	Jumlah	20.409.598.000,00	67.599.831.730,00

- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan sebesar Rp25.983.632.358,00, merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya sebesar Rp32.206.186.158,00 dan terdapat penambahan piutang untuk tahun 2020 sebesar Rp6.222.553.800,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Pasal 25/29 dan Pasal 21 sebesar Rp567.602.846,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya

sebesar Rp3.516.647.846,00 dan terdapat penambahan piutang untuk tahun 2020 sebesar Rp2.949.045.000,00.

8.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO sebesar Rp64.697.451.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	31.877.000,00	34.245.070,00
2.	Bagi Hasil Iuran Tetap (Land-Rent)	5.122.919.000,00	2.624.372.222,00
3.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	57.585.931.000,00	106.985.192.708,00
4.	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	987.270.289,00
5.	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	538.363.000,00	664.190.165,00
	Jumlah	64.697.451.000,00	111.295.270.454,00

- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar Rp12.852.850,00 yang merupakan realisasi yang belum dibayar pada tahun 2020. Total realisasi yang harus dibayar Rp31.877.000,00 sedangkan realisasi yang dibayar tahun 2020 Rp19.024.150,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Iuran Tetap sebesar Rp1.596.611.800,00 merupakan jumlah realisasi yang belum dibayar di tahun 2020. Total realisasi yang harus dibayar sebesar Rp5.122.919.000,00, sedangkan realisasi yang dibayar pada tahun 2020 sebesar Rp3.526.307.200,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp7.035.472.974,00 merupakan jumlah realisasi tahun 2020 sebesar Rp42.668.725.500,00 dan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.881.732.526,00 dan terdapat kekurangan bayar untuk tahun 2020 sebesar Rp14.917.205.500,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp630.084.711,00 merupakan realisasi tahun 2020 sebesar Rp784.599.000,00 dan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.677.289,00 dan terdapat kurang bayar untuk tahun 2020 sebesar Rp633.762.000,00.
- Terdapat selisih antara Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp366.102.750,00 merupakan realisasi tahun 2020 sebesar Rp500.116.000,00 dan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp404.349.750,00 dan terdapat kurang bayar untuk tahun 2020 sebesar Rp38.247.000,00.

8.2.1.3. Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp498.137.263.000,00.

8.2.1.4. Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp160.368.395.926,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	DAK Perumahan & Kawasan Pemukiman	1.357.215.000,00	1.598.625.000,00
2.	DAK Kesehatan	48.603.211.555,00	18.627.978.761,00
3.	DAK Kelautan dan Perikanan	973.381.896,00	1.227.533.450,00
4.	DAK Perdagangan	0,00	1.050.550.000,00
5.	DAK Pertanian	336.045.000,00	1.083.259.800,00
6.	DAK Pendidikan	13.600.053.572,00	36.306.824.776,00
7.	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	17.486.265.453,00	12.488.372.739,00
8.	DAK BOP PAUD	4.597.800.000,00	5.580.600.000,00
9.	DAK Tunjangan Profesi Guru	51.733.304.000,00	51.715.420.080,00
10.	DAK Tambahan Penghasilan Guru	637.750.000,00	424.135.000,00
11.	DAK BO Keluarga Berencana	1.176.812.000,00	1.062.201.484,00
12.	DAK Perumahan, Air Minum & Sanitasi	1.243.306.879,00	2.270.440.000,00
13.	DAK Pariwisata	5.061.522.950,00	521.736.000,00
14.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	,00	608.613.000,00
15.	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.088.052.846,00	1.074.123.927,00
16.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	10.206.949.000,00	18.830.230.357,00
17.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	303.678.500,00	1.523.861.000,00
18.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	2.210.599.000,00
19.	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi	1.213.414.000,00	4.933.557.950,00
20.	DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	0,00
21.	DAK Bidang Keluarga Berencana	332.275.275,00	0,00
	Jumlah	160.368.395.926,00	163.138.662.324,00

8.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp111.747.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

8.2.2.1. Dana Penyesuaian Lainnya-LO sebesar Rp111.747.740.000,00.

Dana penyesuaian lainnya-LO yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2020 yang terdiri dari:

- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50.257.407.000,00.
- Dana Desa sebesar Rp61.490.333.000,00.

8.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Propinsi Kep. Babel yaitu sebesar Rp61.855.582.230,93.

8.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2020 sebesar Rp61.855.582.230,93 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.462.909.937,23	13.841.781.445,14
2.	Bagi Hasil dari BBNKB	9.991.753.605,97	10.854.967.679,35
3.	Bagi Hasil PBBKB	24.776.694.999,57	29.842.938.184,50
4.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	846.965.646,08	1.054.829.780,60
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	12.777.258.042,08	11.265.215.352,28
	Jumlah	61.855.582.230,93	66.859.732.441,87

Terdapat selisih antara Pendapatan (LO) dengan Pendapatan (LRA) pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada PPKD sebesar Rp2.287.316.279,99 yang merupakan jurnal penyesuaian penambahan piutang bagi hasil pajak provinsi karena SK yang baru diterima (Jurnal:027b/JPE/PPKD/2020, 027c/JPE/PPKD/2020,027d/JPE/PPKD/2020,027e/JPE/PPKD/2020,027f/JPE/PPKD/2020) dan jurnal atas kelebihan setor pajak air permukaan (048a/JPE/PPKD/2020).

8.2.4. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan-LO tahun 2020 sebesar Rp4.843.925.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

8.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp4.843.925.000,00 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berupa uang yang disalurkan kepada OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/366/BAKUDA/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/30/BAKUDA/2020 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

8.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp105.610.465.120,95 dengan rincian sebagai berikut:

8.3.1. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp63.048.005.120,95 dengan rincian sebagai berikut:

8.3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp43.011.081.778,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Sosial sebesar Rp217.728.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	217.728.700,00
	TOTAL	217.728.700,00

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp189.419.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN ATK	107.546.500,00
2.	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	81.873.000,00
	TOTAL	189.419.500,00

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp940.135.148,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	UANG	940.135.148,00
	TOTAL	940.135.148,00

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.227.569.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	509.504.958,00
2	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	1.667.710.345,88
3	ASET TETAP JALAN, IRIGASI, JARINGAN	50.353.696,12
	TOTAL	2.227.569.000,00

5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp38.415.162.053,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	553.307.150,00
2	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	391.633.000,00
3	ASET TETAP JALAN, IRIGASI, JARINGAN	37.470.221.903,00
	TOTAL	38.415.162.053,00

6. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.021.067.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN ATK	25.708.120,00
2	PERSEDIAAN OBAT-OBATAN	423.958.500,00
3	PERSEDIAAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	571.400.757,00
	TOTAL	1.021.067.377,00

- 8.3.1.2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp15.270.216.313,21, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp593.530.937,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN BAHAN OBAT-OBATAN	593.530.937,00
	TOTAL	593.530.937,00

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.467.452.761,21 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN BAHAN OBAT-OBATAN	1.042.580,00
2	PERSEDIAAN OBAT-OBATAN	14.458.360.181,21
3	PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.050.000,00
	TOTAL	14.467.452.761,21

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp209.232.615,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	209.232.615,00
	TOTAL	209.232.615,00

- 8.3.1.3.01. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO sebesar Rp1.964.112.351,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp198.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP GEDUNG & BANGUNAN	78.950.000,00
2	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	119.750.000,00
	TOTAL	198.700.000,00

2. Dinas Sosial sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	2.500.000,00
	TOTAL	2.500.000,00

3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	5.000.000,00
	TOTAL	5.000.000,00

4. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.757.912.351,84, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP GEDUNG & BANGUNAN	1.231.762.409,58
2	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	149.449.652,00
3	PERSEDIAAN OBAT-OBATAN	376.700.290,26
	TOTAL	1.757.912.351,84

8.3.1.4. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp2.802.594.677,90, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan sebesar Rp3.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP TANAH	3.500.000,00
	TOTAL	3.500.000,00

2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp91.925.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET TETAP GEDUNG&BANGUNAN	76.925.000,00
2	ASET TETAP PERALATAN & MESIN	15.000.000,00
	TOTAL	91.925.000,00

3. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.707.169.677,90 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PERSEDIAAN OBAT-OBATAN	2.707.169.677,90
	TOTAL	2.707.169.677,90

8.3.3. Pendapatan Lainnya – LO

8.3.3.1.01 Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00

8.3.4. Hibah Dana BOS – LO

8.3.4.1.01 Hibah Dana BOS-LO yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp42.562.460.000,00.

9. BEBAN

Beban-LO tahun 2020 sebesar Rp1.188.284.951.339,19 dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Beban Operasi

Beban Operasi-LO tahun 2019 sebesar Rp1.094.753.092.529,16 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.058.306.911.739,19 dengan rincian sebagai berikut:

9.1.1. Beban Pegawai-LO

Beban pegawai tahun 2020 sebesar Rp420.713.752.957,94 yang terdiri:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban gaji dan tunjangan	275.516.496.019,00	274.509.121.805,00
2.	Beban tambahan penghasilan PNS	135.309.062.918,00	149.721.641.629,00
3.	Beban penerimaan lainnya pimpinan & anggota DPRD serta KDH	5.944.800.000,00	5.608.260.000,00
4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	208.855.624,00	0,00
4.	Insentif pemungutan pajak daerah	2.223.311.846,94	2.167.599.920,63
5.	Insentif pemungutan retribusi daerah	319.361.550,00	388.846.515,00
6.	Uang lembur	1.191.865.000,00	1.147.441.250,00
	Jumlah	420.713.752.957,94	433.542.911.119,63

9.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2019 sebesar Rp457.221.521.199,59 sedangkan tahun 2020Rp440.088.823.399,17 dengan rincian sebagai berikut:

9.1.2. Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2020 sebesar Rp142.373.994.770,79 dengan rincian sebagai berikut :

9.1.2.1. Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis tahun 2020 sebesar Rp42.390.436.571,83dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban Persediaan ATK	4.630.472.395,18	5.105.684.822,52
2.	Beban Persediaan Dokumen/Adm Tender	0,00	210.000,00
3.	Beban Persediaan Alat Listrik	970.378.835,00	675.639.724,00
4.	Beban Persediaan Peranko, Materai	126.711.200,00	133.909.800,00
5.	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan	1.519.157.245,60	1.184.344.044,00
6.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak	971.151.578,00	1.010.207.264,00
7.	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	27.269.066,00	31.836.500,00
8.	Beban Persediaan Pengisian isi tabung gas	4.093.000,00	529.798.491,00
9.	Beban Persediaan Fogging	12.407.409,00	149.817.747,00
10.	Beban Persediaan Cenderamata	37.925.000,00	53.985.000,00
11.	Beban Persediaan Pengisian Tabung Oksigen	450.811.262,80	49.435.979,00
12.	Beban Persediaan Spanduk	106.844.450,00	177.763.350,00
13.	Beban Persediaan Dokumentasi	20.050.000,00	12.644.000,00
14.	Beban Persediaan Buku Cek	4.450.000,00	10.700.000,00
15.	Beban Persediaan Reageon Lab	264.224.068,50	112.675.992,30
16.	Beban Persediaan Bahan/alkes	16.567.040.397,09	6.166.886.868,28
17.	Beban Persediaan Tropy/plakat	64.126.920,00	182.099.000,00
18.	Beban Persediaan Cetak	883.726.317,19	19.341.800,00
19.	Beban Persediaan Alat Habis Pakai Lapangan	0,00	0,00
20.	Beban Persediaan Peralatan dan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi	33.820.000,00	0,00
21.	Beban Persediaan Bahan Komputer	5.637.500,00	0,00
22.	Beban Persediaan Alat Olahraga Lainnya	0,00	10.313.000,00
23.	Beban Persediaan BOS APBN	0,00	12.299.467.040,00
24.	Beban Persediaan Obat-Obatan	15.642.369.927,47	3.521.842.655,24
25.	Beban Persediaan Alas Lantai	2.400.000,00	0,00
26.	Beban Persediaan Peralatan Linen	32.020.000,00	0,00
27.	Beban Persediaan Umbul-Umbul	13.350.000,00	0,00
	Jumlah	42.390.436.571,83	31.438.603.077,34

9.1.2.2. Beban Persediaan Bahan/Material

Tahun 2020 sebesar Rp10.794.823.648,64 dengan rincian:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban Persediaan Bahan baku bangunan	314.420.508,00	649.297.389,37
2.	Beban Persediaan Bahan/bibit tanaman	170.280.000,00	364.347.500,00
3.	Beban Persediaan Bahan bibit ternak	7.389.625,00	21.266.625,00
4.	Beban Persediaan Bahan obat-obatan	6.210.616.754,48	12.629.940.012,44
5.	Beban Persediaan Bahan kimia	589.616.690,00	962.218.660,05
6.	Beban Persediaan Bahan makanan pokok	122.405.838,00	100.273.106,00
7.	Beban Persediaan Bahan sampel	1.386.000,00	7.579.300,00
8.	Beban Persediaan bahan perlengkapan olahraga	14.870.000,00	100.093.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
9.	Beban Persediaan bahan bantuan kegiatan	198.287.050,00	316.468.089,00
10.	Beban Persediaan bahan pakan	91.437.000,00	93.025.000,00
11.	Beban Persediaan Bahan Penelitian	0,00	28.959.000,00
12.	Beban Persediaan bahan pelatihan	350.923.920,00	609.680.624,00
13.	Beban Persediaan bahan & alkes	1.816.273.441,66	3.989.947.440,87
14.	Beban Persediaan bahan pameran	0,00	49.541.000,00
15.	Beban Persediaan bahan/alat taman	6.543.000,00	3.824.000,00
16.	Beban Persediaan Bahan Praktek	33.900.000,00	65.648.900,00
17.	Beban Alat-Alat Olahraga	24.585.000,00	
18.	Belanja Kemasan	3.750.000,00	24.618.960,00
19.	Beban Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	730.687.821,50	0,00
20.	Beban Persediaan Bahan Pakaian	49.971.000,00	0,00
21.	Beban Bahan Penanggulangan Bencana	6.527.000,00	0,00
22.	Beban Persediaan papan nama	0,00	61.000.000,00
23.	Beban Persediaan makanan tambahan	0,00	661.467.471,45
24.	Beban Persediaan Bahan Komputer	28.568.000,00	69.194.996,00
25.	Beban Persediaan Alat Laboratorium	0,00	13.866.600,00
26.	Beban Persediaan Alat Lainnya	22.385.000,00	82.746.800,00
	Jumlah	10.794.823.648,64	20.905.004.474,18

9.1.2.6. Beban Cetak dan Penggandaan

Beban cetak dan penggandaan tahun 2020 sebesar Rp5.958.436.160,61 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban cetak	4.413.998.335,61	4.955.075.492,81
2.	Beban penggandaan	1.544.437.825,00	1.807.563.348,00
	Jumlah	5.958.436.160,61	6.762.638.840,81

9.1.2.11. Beban Makanan dan Minuman

Beban makanan dan minuman tahun 2020 sebesar Rp14.950.246.684,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)
1.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	555.084.500,00
2.	Beban makanan dan minuman rapat	3.182.971.102,00
3.	Beban makanan dan minuman tamu	3.285.256.320,00
4.	Beban makanan dan minuman pelatihan	6.746.228.905,00
5.	Beban makanan dan minuman kegiatan	157.176.000,00
6.	Beban makan dan minum lembur	54.452.500,00
7.	Beban makan dan minum pasien	969.077.357,00
	Jumlah	14.950.246.684,00

9.1.2.20. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat tahun 2020 sebesar Rp30.770.271.495,61 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban brg yang akan diserahkan kpd masyarakat	15.549.520.905,00	13.886.097.166,00
2.	Beban brg yang akan diserahkan kpd pihak ke-3	15.220.750.590,61	10.088.266.609,50
3.	Beban brg yang akan diserahkan kpd pemerintah Desa	0,00	181.698.360,27
	Jumlah	30.770.271.495,61	24.156.062.135,77

9.12.21 Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2020 sebesar Rp119.193.525,00.

9.1.2.35. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp24.826.786.156,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban bantuan sosial barang yang akandiserahkan kepada pihak ketiga	24.826.786.156,00	1.427.824.880,00
	Jumlah	24.826.786.156,00	1.427.824.880,00

9.1.2.39 Beban Persediaan Dana BOS APBN

Beban persediaan Dana BOS APBN tahun 2020 sebesar Rp12.563.800.529,00.

9.1.2. Beban Jasa

Beban jasa tahun 2020 sebesar Rp281.938.164.730,38 dengan rincian sebagai berikut :

9.1.2.12. Beban Pakaian Dinas dan Atribut

Beban pakaian dinas dan atribut tahun 2020 sebesar Rp433.339.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban pakaian dinas KDH & WKDH	24.941.000,00	71.750.000,00
2.	Beban pakaian sipil harian	120.736.000,00	4.800.000,00
3.	Beban pakaian sipil lengkap (PSL)	30.580.000,00	87.621.500,00
4.	Beban pakaian dinas harian	215.343.000,00	197.822.250,00
5.	Beban pakaian dinas upacara	41.739.700,00	230.928.500,00
6.	Beban pakaian resmi	0,00	64.391.250,00
	Jumlah	433.339.700,00	657.313.500,00

9.1.2.13. Beban Pakaian Kerja sebesar Rp733.424.839,00.

9.1.2.14. Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu tahun 2020sebesar Rp611.103.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban pakaian adat daerah	120.439.000,00	164.241.200,00
2.	Beban pakaian batik tradisional	288.668.850,00	307.960.000,00
3.	Beban pakaian olahraga	171.395.300,00	1.031.157.875,00

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.	Beban pakaian ibadah	21.125.000,00	16.550.000,00
5.	Beban pakaian pelatihan	0,00	155.284.700,00
6.	Beban lambang/lencana jabatan	0,00	253.101.500,00
7.	Beban pakaian pertunjukan	0,00	2.700.000,00
8.	Beban pakaian nasional PKK	9.475.000,00	11.925.000,00
	Jumlah	611.103.150,00	1.942.920.275,00

9.1.2.3. Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor tahun 2020 sebesar Rp56.169.499.472,29 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban jasa telepon	638.557.855,00	604.133.365,00
2.	Beban jasa air	1.391.187.694,00	1.303.240.267,00
3.	Beban jasa listrik	7.468.887.957,00	6.800.946.447,00
4.	Beban jasa surat kabar/majalah	417.805.000,00	454.499.000,00
5.	Beban jasa kawat/faksimili	3.003.500.900,00	2.004.870.221,00
6.	Beban jasa paket/pengiriman	11.225.600,00	24.797.600,00
7.	Beban jasa sertifikasi	600.906.400,00	80.865.120,00
8.	Beban jasa transaksi keuangan	431.300,00	126.781.505,15
9.	Beban jasa adm pungutan pajak penerangan JU	198.067.500,00	385.117.500,00
10.	Beban jasa service peralatan & perleng ktr	1.320.575.355,00	1.428.495.982,00
11.	Beban jasa pemeliharaan rutin	1.448.846.847,29	3.175.079.300,70
12.	Beban jasa dekorasi	48.040.000,00	337.655.000,00
13.	Beban jasa dokumentasi	0,00	39.612.600,00
14.	Beban jasa transportasi & akomodasi	2.042.806.696,00	3.259.206.088,00
15.	Beban jasa pendaftaran	937.000,00	250.000,00
16.	Beban jasa iuran	99.023.300,00	41.954.989,00
17.	Beban jasa konsultasi dan evaluasi	12.200.000,00	6.000.000,00
	Beban jasa adm perpajakan	191.100,00	0,00
18.	Beban jasa penghargaan	0,00	377.550.000,00
19.	Beban jasa operasional kantor	52.085.700,00	80.158.680,00
20.	Beban jasa pihak ketiga	6.307.687.844,00	9.162.870.554,00
21.	Beban jasa publikasi/media cetak	1.296.628.500,00	1.729.297.250,00
22.	Beban jasa pelayanan kesehatan	20.310.488.666,00	26.784.117.665,00
23.	Beban jasa pemasangan baru jaringan listrik	11.787.050,00	2.398.837,00
24.	Beban jasa analisa lab	20.480.000,00	36.580.000,00
25.	Beban jasa analisis sample	72.599.000,00	57.367.000,00
26.	Beban jasa pengangkutan sampah	259.811.600,00	240.141.800,00
27.	Beban jasa adm. pemungutan retribusi	600.000,00	600.000,00
28.	Beban pajak bumi bangunan	34.995.001,00	0,00
29.	Beban pemindahan/pemasangan utilitas-PLN/PDAM	33.645.175,00	0,00
30.	Beban jasa survei	0,00	18.564.000,00
31.	Beban jasa internet/hoosting SAAS	192.000.000,00	162.822.500,00
31.	Beban Jasa Kantor BOS APBN	7.668.100.432,00	10.962.651.093,65
32.	Beban penerbitan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	0,00
33.	Beban Jasa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00
34.	Beban Narasumber Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	1.121.400.000,00	0,00
	Jumlah	56.169.499.472,29	69.697.624.364,50

9.1.2.4. Beban Premi Asuransi

Beban premi asuransi kesehatan tahun 2020 sebesar

Rp21.225.083.079,09 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban jasa premi asuransi kesehatan	10.946.676.535,00	5.489.788.000,00
2.	Beban jasa premi pelayanan kesehatan	10.278.406.544,09	1.021.019.118,00
	Jumlah	21.225.083.079,09	6.510.807.118,00

9.1.2.7. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir tahun 2020

sebesar Rp731.729.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban sewa rumah jabatan/rmh dinas	62.550.000,00	29.700.000,00
2.	Beban sewa gedung/kantor/tempat	431.429.000,00	1.765.634.250,00
3.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	237.750.000,00	244.068.500,00
	Jumlah	731.729.000,00	2.039.402.750,00

9.1.2.8. Beban Sewa Sarana Mobilitas

Beban sewa sarana mobilitas tahun 2020 sebesar

Rp205.100.000,00.

9.1.2.10. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor tahun 2020

sebesar Rp787.750.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban sewa meja kursi	70.660.000,00	193.748.500,00
2.	Beban sewa tenda	150.900.000,00	555.677.000,00
3.	Beban sewa pakaian adat/tradisional	0,00	118.362.000,00
4.	Beban sewa sound system	93.660.000,00	306.550.000,00
5.	Beban sewa peralatan pelatihan	,00	13.756.000,00
6.	Beban sewa organ tunggal	91.000.000,00	201.800.000,00
7.	Beban sewa perlengkapan	351.730.500,00	405.515.000,00
8.	Beban sewa panggung	12.500.000,00	326.500.000,00
9.	Beban sewa belanja sewa kipas angin	17.300.000,00	25.700.000,00
	Jumlah	787.750.500,00	2.147.608.500,00

9.1.2.19. Beban Jasa Konsultasi

Beban jasa konsultasiperencanaan tahun 2020 sebesar

Rp359.225.500,00

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban jasa konsultasi perencanaan	328.222.000,00	624.503.882,00
2.	Beban jasa konsultasi pengawasan	31.003.500,00	23.889.250,00
	Jumlah	359.225.500,00	648.393.132,00

9.1.2.22. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban beasiswa pendidikan PNS tahun 2020 sebesar

Rp147.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban beasiswa tugas belajar S1	0,00	0,00
2.	Beban beasiswa tugas belajar S2	147.100.000,00	328.500.000,00
3.	Beban beasiswa tugas belajar S3	0,00	0,00
	Jumlah	147.100.000,00	328.500.000,00

9.1.2.23. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Tahun 2020 sebesar Rp879.739.201,00 dengan rincian :

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	197.124.251,00	1.258.255.200,00
2.	Beban registrasi	0,00	25.000.000,00
3.	Beban kontribusi	682.614.950,00	1.513.439.900,00
	Jumlah	879.739.201,00	2.796.695.100,00

9.1.2.25. Honorarium PNS

Honorarium PNS tahun 2020 sebesar Rp12.017.884.762,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.809.042.762,00	11.515.896.500,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	193.250.000,00	0,00
2.	Insentif atas Kegiatan	,00	16.600.000,00
3.	Honorarium Tim Koordinasi dan Pengawasan	1.031.000.000,00	749.671.000,00
4.	Honorarium Monev Online	25.200.000,00	26.600.000,00
5.	Beban Uang Saku	959.392.000,00	1.119.013.750,00
	Jumlah	12.017.884.762,00	13.427.781.250,00

9.1.2.26. Honorarium Non PNS

Honorariumnon PNS tahun 2020 sebesar Rp110.434.346.512,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap	90.818.941.025,00	100.338.075.500,00
2.	Honorarium berdasarkan beban kerja	3.649.567.487,00	3.936.727.767,00
3.	Insentif atas kegiatan	1.123.450.000,00	605.440.000,00
4.	Beban uang saku	783.288.000,00	1.462.405.000,00
5.	Beban Pegawai Non PNS Dana BOS APBD II	14.059.100.000,00	0,00
	Jumlah	110.434.346.512,00	106.342.648.267,00

9.1.2.27. Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ke-3/Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada pihak ke-3/masyarakat tahun 2020 sebesar Rp641.010.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Uang untuk diberikan kepada pihak masy	45.150.000,00	34.500.000,00
2.	Beban uang untuk diberikan kepada pihak ke-3/masyarakat	595.860.234,00	2.224.514.984,40
	Jumlah	641.010.234,00	2.259.014.984,40

9.1.2.28. Beban Pengelolaan Dana BOS

Beban pengelolaan dana BOS tahun 2020 sebesar Rp5.885.033.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban pegawai dana bos APBD	0,00	0,00
2.	Beban pegawai dana bos APBD II	0,00	0,00
3.	Beban pegawai dana bos APBN	5.885.033.500,00	4.371.225.000,00
	Jumlah	5.885.033.500,00	4.371.225.000,00

9.1.2.30. Honorarium pengelolaan dana BLUD
Rp7.060.753.452,00.

9.1.2.33. Beban Belanja Beasiswa
Beban belanja beasiswa tahun 2020 sebesar
Rp3.232.965.000,00.

9.1.2.37. Beban barang/jasa BOP PAUD/TK
Beban barang/jasa BOP PAUD/TK tahun 2020sebesar
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban barang/jasa BOP PAUD/TK	0,00	28.200.000,00
	Jumlah	0,00	28.200.000,00

9.1.2.38. Beban barang/jasa BOP Kesetaraan/DAK Non Fisik
Beban barang/jasa BOP Kesetaraan/DAK Non Fisik tahun
2020sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban barang/jasa Kesetaraan/DAK Non Fisik	0,00	252.000.000,00
	Jumlah	0,00	252.000.000,00

9.1.2 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp15.776.663.898,00
dengan rincian sebagai berikut :

9.1.2.5. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
Beban perawatan kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar
Rp6.896.607.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban jasa service	716.610.138,00	721.036.762,00
2.	Beban penggantian suku cadang	1.785.317.304,00	1.947.803.985,00
3.	Beban bahan bakar migas dan pelumas	4.063.110.246,00	4.642.572.690,00
4.	Beban jasa KIR	623.800,00	737.000,00
5.	Beban pajak tanda nomor kendaraan	7.441.400,00	13.455.500,00
6.	Beban Pajak kendaraan bermotor	289.309.400,00	266.088.900,00
7.	Beban Perbaikan Kendaraan Roda Enam	28.600.000,00	0,00
8.	Beban pajak kendaraan alat berat	5.595.000,00	4.038.600,00
	Jumlah	6.896.607.288,00	7.595.733.437,00

9.1.2.18. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar
Rp8.880.056.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	1.308.546.595,00	1.182.409.900,00
2.	Beban pemeliharaan Gedung & Bangunan	835.170.270,00	521.385.170,76
3.	Beban pemeliharaan JII	3.636.433.038,00	36.096.777.450,00
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.	Beban pemeliharaan kesehatan	262.031.669,00	83.089.765,00
6.	Beban pemeliharaan alat-alat laboratorium	0,00	29.678.000,00
7.	Beban pemeliharaan BOS APBN	2.837.875.038,00	878.399.130,00
	Jumlah	8.880.056.610,00	38.791.739.415,76

9.1.2 Beban Perjalanan Dinas

9.1.2.15. Beban Perjalanan Dinastahun 2020 sebesar Rp60.383.076.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	10.112.189.550,00	12.045.229.000,00
2.	Beban perjalanan dinas luar daerah	49.928.922.279,00	76.393.388.871,33
3.	Beban perjalanan dinas BOS APBN	341.965.000,00	391.645.450,00
	Jumlah	60.383.076.829,00	88.830.263.321,33

9.1.3. Beban Bunga

Beban bunga-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00.

9.1.4. Beban Subsidi

Beban subsidi-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00.

9.1.5. Beban Hibah

Beban hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp35.724.706.779,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban hibah barang kepada pemerintah	18.760.000,00	47.229.552,00
2.	Beban hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.366.985,00	0,00
3.	Beban hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	56.889.160,00
	Beban hibah kepada Kelompok Masyarakat	427.374.999,00	0,00
4.	Beban hibah kpd organisasi kemasyarakatan	32.025.683.869,00	30.305.311.667,00
5.	Beban hibah kpd badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	0,00	39.778.013,00
6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.659.888.200,00	0,00
7.	Beban Hibah Pariwisata	588.632.726,00	0,00
	Jumlah	35.724.706.779,00	30.449.208.392,00

Adapun rincian Beban Hibah barang kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
1.	Hibah barang kepada pemerintah	18.760.000,00
	A. BPPKAD	
	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka	18.760.000,00
	TOTAL	18.760.000,00

Adapun rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
1.	Hibah barang kepada pemerintahdaerah lainnya	4.366.985,00
	A. DP2KBP3A	
	- RS Medika Stania	2.683.020,20
	- RSUD DR .(H.C) Ir Soekarno	1.683.964,80
	TOTAL	4.366.985,00

Adapun rincian Beban Hibah atau Jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
1.	Hibah atau Jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat	427.374.999,00
	A. BPBD	7.374.999,00
	-Polres Kab. Bangka	5.000.000,00
	(Penyusutan)	(83.334,00)
	Nilai Bersih	4.916.666,00
	-Pasar Betuah RSS	2.500.000,00
	(Penyusutan)	(41.667,00)
	Nilai Bersih	2.458.333,00
	B. BPPKAD	420.000.000,00
	-Lembaga Pemasarakatan Sungailiat	420.000.000,00
	TOTAL	427.374.999,00

Adapun rincian Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
	Hibah kepada Organisasi Masyarakat	32.025.683.869,00
	A. PPKD	31.766.771.869,00
1.	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Perkumpulan (APBD 2020)	8.946.099.936,00
	PMI	1.698.751.000,00
	KONI	2.075.000.000,00
	LAIN LAIN	5.172.348.936,00
2.	Pendidikan 2020	8.906.100.000,00
	Insentif GTT / PTT Tingkat SMP dan M.Ts (APBD)	1.061.700.000,00
	Insentif GTT / PTT Tingkat SD/MIN/MIS (APBD)	764.700.000,00
	Insentif Guru TK / RA, Guru PAUD, Guru TKA / TPQ, Guru Madrasah Diniyah (APBD)	7.079.700.000,00
3..	Hibah kepada Rumah Ibadah/Kelompok Masyarakat	2.513.100.000,00
	SURAU AL MUSLIMIN SURYA TIMUR	25.000.000,00
	MASJID AL HUSNA SUNGAILIAT	100.000.000,00
	LAIN-LAIN	2.388.100.000,00
4..	Bantuan kepada Partai Politik:	951.155.433,00
	PARTAI PAN	51.094.206,00
	PARTAI PDI	170.460.531,00
	LAIN-LAIN	729.600.696,00
5.	DABA (Dana Bantuan Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2020) :	4.451.716.500,00
	Bantuan TPS3R KSM Srimenanti Berjaya	84.505.000,00
	Bantuan TPS3R KSM Makmur Mandiri	84.611.500,00
	Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TK,RA,BA,PAUD Non Formal) Non PNS	1.553.200.000,00
	Tambahan Penghasilan Ustadz/Ustadzah	2.729.400.000,00

No.	Uraian	Tahun 2020
6.	DAK NON FISIK 2020 :	5.998.600.000,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.699.200.000,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.299.400.000,00
	B. SEKRETARIAT DAERAH	258.912.000,00
7.	Masjid RSS	258.912.000,00
	TOTAL	32.025.683.869,00

Adapun rincian Beban hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
1	Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.659.888.200,00
	BOS Tingkat SD dan MI	652.753.200,00
	BOS Tingkat SMP dan M.Ts	2.007.135.000,00
	TOTAL	2.659.888.200,00

Adapun rincian Beban hibah Pariwisata adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020
1	Hibah Pariwisata	588.632.726,00
	Hotel/Penginapan/Wisma	293.161.167,00
	Restoran	295.471.559,00
	TOTAL	588.632.726,00

9.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial-LO tahun 2020 sebesar Rp3.026.653.000,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
9.1.6.01.	Beban bantuan sosial kpd organisasi sosial kemasyarakatan	3.026.653.000,00	3.129.660.900,00
	Jumlah	3.026.653.000,00	3.129.660.900,00

9.1.6.01. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp3.026.653.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kecelakaan Laut	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00
2	Bantuan Biaya pendamping Bagi Pasien Berobat Keluar Daerah	300.000.000,00	270.000.000,00	90,00
3	Bantuan Santunan Kematian	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
4	Jasa Penghargaan Kepada Veteran/Janda	102.500.000,00	94.300.000,00	92,00
5	Bantuan Sosial Lainnya	300.000.000,00	147.353.000,00	49,12
6	Rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Rebo (DAK fisik bidang Perumahan dan Pemukiman 2019)	1.120.000.000,00	1.032.500.000,00	92,19

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Sungailiat (DAK fisik bidang Perumahan dan Pemukiman 2019)	262.500.000,00	262.500.000,00	100,00
8	Bantuan Sosial Penanganan Dampak Ekonomi (Covid-19)	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.310.000.000,00	3.026.653.000,00	70,22

9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 sebesar Rp152.534.506.351,04 yang terdiri dari:

- BLUD- Dinas Kesehatan sebesar Rp1.971.171.190,67.
- OPD Lingkup Kabupaten Bangka sebesar Rp150.563.335.160,37.

Adapun rincian di atas adalah sebagai berikut :

9.1.7.1. Beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp34.407.366.043,53 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	1.722.682.841,00	1.563.925.884,00
2.	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	280.183.723,00	636.638.592,00
3.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.591.675.076,00	3.996.808.674,00
4.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.076.667,00	943.750,00
5.	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	19.270.000,00	19.270.000,00
6.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	6.872.665,00	299.666,00
7.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.370.000,00	1.161.667,00
8.	Beban Penyusutan Alat Ukur	165.527.726,00	90.873.300,00
9.	Beban Penyusutan AlatPengolahan Pertanian	136.019.760,00	109.957.510,00
10.	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	0,00	713.250,00
11.	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.080.342.783,48	2.037.870.768,80
12.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	4.009.643.241,93	5.765.767.257,38
13.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	5.773.415.349,00	4.854.648.574,63
14.	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	237.602.905,00	249.713.899,00
15.	Beban Penyusutan Alat Studio	233.004.969,00	375.951.951,00
16.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	48.082.806,00	60.074.165,00
17.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	18.378.142,00	194.487.233,00
18.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	13.276.118.746,12	6.851.804.119,00
19.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	2.220.000,00	310.776.799,00
20.	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	298.340.567,00	1.614.984.425,00
21.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.461.362.057,00	1.206.599.822,00
22.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	281.164,00	2.962.706,00
23.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	5.109.523,00
24.	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8.606.598,00	44.977.427,00
25.	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	7.042.220,00
26.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	18.277.547,00	21.234.254,00
27.	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10.442.999,00	10.442.999,00
28.	Beban Penyusutan Senjata Api	200.000,00	200.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
29.	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api	72.044.144,00	
30.	Beban penyusutan alat keamanan dan perlindungan	6.445.000,00	45.531.280,00
31.	Beban penyusutan alat keamanan dan perlindungan	44.756.755,00	
32.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	868.136.644,00	0,00
33.	Beban Penyusutan Alat Olahraga	1.985.168,00	0,00
	Jumlah	34.407.366.043,53	30.080.771.715,81

9.1.7.2. Beban Penyusutan gedung & bangunan sebesar Rp18.969.980.588,00 dengan rincian:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.372.381.599,00	15.490.291.248,00
2.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.487.430.788,00	1.454.945.655,00
3.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	32.664.086,00	32.664.086,00
4.	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	0,00	20.941.410,00
5.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	28.882.207,00	38.960.323,00
6.	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	639.940,00
7.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	0,00	10.366.716,00
8.	Beban Penyusutan Candi	42.677.130,00	0,00
9.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.944.778,00	5.964.198,00
10.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-rambu	0,00	76.537.454,00
	Jumlah	18.969.980.588,00	17.131.311.030,00

9.1.7.3. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp98.919.110.575,51 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020(Rp)	Realisasi 2019(Rp)
1.	Beban Penyusutan Jalan	77.416.660.419,51	81.211.419.754,22
2.	Beban Penyusutan Jembatan	1.204.865.922,00	1.124.122.459,00
3.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.390.881.228,00	2.540.157.276,00
	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	51.545.492,00	
4.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	874.993.295,00	1.585.582.569,00
5.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	56.699.162,00	23.528.358,00
6.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	200.545.770,00	98.186.012,00
7.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	36.483.135,00	35.526.282,00
8.	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	111.709.282,00
9.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.368.247.372,00	1.394.595.601,00
10.	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	137.892.892,00	178.007.428,00
11.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	9.551.582.336,00	1.567.637.319,00
12.	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	8.916.014,00	44.972.668,00
13.	Beban Penyusutan Instalasi Gas	3.050.000,00	0,00
14.	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	35.108.062,00	143.960.117,00
15.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	4.972.541.473,00	2.035.579.323,00
16.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	585.385.803,00	1.208.316.341,00
17.	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	23.712.200,00	23.712.200,00
	Jumlah	98.919.110.575,51	93.327.012.989,22

9.1.7.4. Beban amortisasi aset tidak berwujud lainnya tahun 2020 sebesar Rp238.049.144,00.

9.1.7.5. Beban penyusutan aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp0,00.

9.1.8. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp4.670.739.149,60 yaitu:

- Beban Penyisihan Piutang BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp12.402.782,96.
- Beban Penyisihan Piutang APBD sebesar Rp4.658.336.366,64.

Dengan rincian sebagai berikut:

9.1.8.1. Beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp4.670.739.149,60 dengan rincian:

- a. Beban penyisihan piutang pajak Rp201.305.479,87.
- b. Beban penyisihan piutang retribusi Rp113.519.984,77.
- c. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4.355.913.684,96 yang terdiri dari:
 - APBD sebesar Rp4.343.510.902,00.
 - BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp12.402.782,96.

9.1.9. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain-LO tahun 2020 sebesar Rp1.547.730.102,44 yang terdiri dari:

- a. Beban Lain-lain APBD sebesar Rp1.415.084.077,44.
- b. BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp132.646.025,00.

Beban lain-lain-LO terjadi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset non kapital pada OPD-OPD di Kabupaten Bangkaka karena adanya perubahan dari Permendagri 64 tahun 2013 ke Permendagri 108 tahun 2016.

Rincian bertambah pada akun beban lain-lain senilai Rp1.547.730.102,44 adalah sebagai berikut :

1. Beban lain-lain aset tetap peralatan mesin sebesar Rp1.370.504.647,00.
2. Beban lain-lain aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp127.732.155,44.
3. Beban lain-lain aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp14.147.800,00.
4. Beban lain-lain aset tetap lainnya sebesar Rp4.845.500,00.
5. Beban lain-lain aset tetap meubelair sebesar Rp30.500.000,00.

9.2. Beban Transfer

Beban Transfer-LO tahun 2020 sebesar Rp129.978.039.600,00 terdiri dari:

9.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

9.2.1.1.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.196.011.700,00.

9.2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

9.2.2.1.3. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp754.242.500,00

9.2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9.2.4.1.1. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp124.027.785.400,00.

Surplus dari Operasi tahun 2019 sebesar Rp115.850.538.513,22 sedangkan Defisit dari Operasi tahun 2020 sebesar Rp8.916.160.372,23.

Kegiatan Non Operasional

8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan aset non lancar-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00.

9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar-LO tahun 2020 sebesar Rp158.174.672,95.

9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp2.892.214.236,23 yang merupakan penghapusan aset tetap dan aset lain-lain yang masih mempunyai nilai buku per 31 Desember 2020.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp295.070.779,58 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp3.050.388.909,18.

Surplus sebelum Pos Luar Biasa tahun 2019 sebesar Rp115.555.467.733,64 sedangkan Defisit sebelum Pos Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp11.966.549.281,41.

Pos Luar Biasa

8.5 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp0,00.

9.4Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp1.373.694.400,00, merupakan beban yang berasal dari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak *covid-19* berupa bahan-bahan kebutuhan pokok pada Dinas Sosial sebesar Rp1.365.491.000,00 serta adanya pengembalian dana kepada BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bangka Belitung akibat salah transfer pada tahun 2019 sebesar Rp8.203.400,00.

Surplus/Defisit-LO

Surplus tahun 2019 sebesar Rp115.555.467.733,64 sedangkan Defisit-LO tahun 2020 Rp13.340.243.681,41.

Info Tambahan :

1. Penjelasan selisih Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO:

URAIAN		SELISIH
BELANJA JASA	BEBAN JASA	31 DESEMBER 2020
1	2	3 = (1-2)
226.373.833.235,38	221.555.087.901,38	4.818.745.334,00

Selisih antara beban jasa dengan belanja jasasebesar Rp4.818.745.334,00 dengan rincian:

a. Selisih beban jasa pada Dinas Perhubungan Rp4.660.289,00 sebagai berikut:

-Selisih saldo hutang awal dan akhir	15.854.051,00
-Reklas dari peralatan ke Honorarium PPTK	<u>(11.193.762,00)</u>
	4.660.289,00

b. Selisih beban jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.602.195.631,00 sebagai berikut:

- Selisih saldo hutang awal dan akhir	468.944.000,00
- Hutang tenaga medis covid-19	<u>(2.071.139.631,00)</u>
	(1.602.195.631,00)

Sedangkan sebesar Rp6.416.280.676,00 merupakan kenaikan/ penurunan utang barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN	2.677.520,00
2.	BLUD DINAS KESEHATAN	6.401.852.009,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	175.178,00
4.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	247.803,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.620,00
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(1.599.378,00)
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	94.260,00
8.	DINAS SOSIAL	906.726,00
9.	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(3.506.073,00)
10.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(83.676,00)
11.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	(503.747,00)
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(397.628,00)
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	799.403,00
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	187.982,00
15.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(624.807,00)
16.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	423.799,00
17.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	(711.355,00)
18.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(801.403,00)
19.	DINAS PERIKANAN	318.652,00
20.	INSPEKTORAT DAERAH	54.666,00
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.166.646,00
22.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(938.895,00)
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	607.090,00
24.	SEKRETARIAT DAERAH	20.245.493,00
25.	SEKRETARIAT DEWAN	(9.121.779,00)
26.	KECAMATAN SUNGAILIAT	739.913,00
27.	KECAMATAN BELINYU	237.913,00
28.	KECAMATAN MERAWANG	654.271,00
29.	KECAMATAN MENDO BARAT	(20.507,00)
30.	KECAMATAN PEMALI	(52.965,00)

NO.	URAIAN	JUMLAH
31.	KECAMATAN BAKAM	(4.000,00)
32.	KECAMATAN RIAU SILIP	24.000,00
33.	KECAMATAN PUDING BESAR	196.945,00
TOTAL		6.416.280.676,00

2. Penjelasan selisih Belanja Persediaan-LRA dengan Beban Persediaan-LO

URAIAN		SELISIH
BELANJA PERSEDIAAN	BEBAN PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2020
1	2	3 = (1-2)
126.534.827.790,18	145.156.925.770,79	(18.622.097.980,61)

Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan sebesar (Rp18.622.097.980,61) dengan rincian :

- a. BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp683.011.545,43 sebagai berikut:
 - Selisih saldo hutang obat awal dan akhir 859.582.777,00
 - Persediaan awal dan akhir (176.571.231,57)
 - 683.011.545,43**
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar (Rp59.994.000,00) merupakan pemakaian hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Dinas Kesehatan sebesar (Rp16.641.198.737,64) sebagai berikut:
 - Hutang pekerjaan bangunan yang akan diserahkan pihak ketiga ke Dinkes (2.959.346.400,00)
 - Selisih saldo hutang awal dan akhir (13.681.852.337,64)
 - (16.641.198.737,64)**

Sedangkan nilai sebesar (Rp2.603.916.788,40) merupakan kenaikan/ penurunan utang barang & jasa dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN	194.153.401,00
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(2.777.591.300,00)
3.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	(2.542.000,00)
4.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(2.466.690,00)
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	525.639.451,50
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(511.800,00)
6.	DINAS SOSIAL	(219.205.500,00)
7.	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	253.773.000,00
8.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	(42.820.781,00)
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(154.487.760,00)
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(209.378.278,00)
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	(221.815.620,00)
13.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(3.584.575,00)

NO.	URAIAN	JUMLAH
14.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	(4.663.500,00)
15.	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	608.000,00
16.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(500.000,00)
17.	DINAS PERIKANAN	6.523.812,00
18.	INSPEKTORAT DAERAH	(3.944.100,00)
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.811.849,00
20.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	168.940.600,00
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	(1.243.650,00)
22.	SEKRETARIAT DAERAH	(112.507.880,00)
23.	SEKRETARIAT DEWAN	(9.906.182,90)
24.	KECAMATAN SUNGAILIAT	(7.034.675,00)
25.	KECAMATAN BELINYU	-
26.	KECAMATAN MERAWANG	7.145.790,00
27.	KECAMATAN MENDO BARAT	1.289.900,00
28.	KECAMATAN PEMALI	(1.578.300,00)
29.	KECAMATAN BAKAM	7.632.000,00
30.	KECAMATAN RIAU SILIP	-
31.	KECAMATAN PUDING BESAR	(652.000,00)
	TOTAL	(2.603.916.788,40)

3. Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN		SELISIH
BELANJA PEMELIHARAAN	BEBAN PEMELIHARAAN	31 DESEMBER 2020
1	2	3 = (1-2)
15.636.941.376,00	15.776.663.898,00	(139.722.522,00)

Selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar (Rp139.722.522,00) yang terdiri dari:

- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp137.382.917,00) merupakan nilai reklasifikasi dari aset.
- Dinas Kesehatan sebesar (Rp159.500,00) merupakan nilai selisih utang awal dan akhir.
- Dinas Perhubungan sebesar (Rp39.524.105,00) merupakan nilai reklasifikasi dari aset ke beban.
- BPPKAD sebesar Rp37.344.000,00 merupakan nilai reklasifikasi ke persediaan.

E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas daerah dan kas BLUD dimana saldo akhir kas di BUD, kas di BLUD baik BLUD RSUD maupun BLUD Dinkes. Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp127.383.906.918,23

Mengacu pada PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU Paragraf 119, menyatakan Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; Paragraf 120, Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLU yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Gambaran secara singkat tentang Laporan Arus Kas Konsolidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka:

Penjelasan Laporan Arus Kas

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I.	Aktivitas Operasi	
	Total Arus Kas Masuk	1.096.055.387.014,91
	Total Arus Kas Keluar	991.156.377.151,01
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	104.899.009.863,90
II.	Aktivitas Investasi	
	Total Arus Kas Masuk	6.097.100,00
	Total Arus Kas Keluar	124.261.908.143,52
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124.255.811.043,52)
III.	Arus Kas Aktivitas Pendanaan	
	Total Arus Kas Masuk	763.136.777,00
	Total Arus Kas Keluar	507.984.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	255.152.777,00
IV.	Arus Kas Aktivitas Non Transitoris	
	Total Arus Kas Masuk	69.216.917.132,00
	Total Arus Kas Keluar	69.216.917.132,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Transitoris	0,00
V.	Kenaikan (Penurunan) kas (I+II+III+IV)	(19.101.648.402,62)
VI.	Saldo Awal Kas di BUD	127.383.906.918,23
VII.	Saldo Kas Akhir di BUD (V+VI)	108.282.258.515,61
VIII.	Kas di Bendahara Penerimaan	18.529.500,00
IX.	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.603,00
X.	Setara Kas	0,00
XI.	Kas Lainnya	96.532.169,92
XII.	Kas di Rekening BOS APBN	6.336.208.443,00
XIII.	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS Lainnya	36.000,00
XIV.	Saldo Akhir Kas (Konsolidasi) (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	114.733.625.231,53

Penjelasan tambahan:

1. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(0,00) merupakan:
 - a. Penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp69.216.917.132,00 terdiri dari:
 - 1) Penerimaan perhitungan fihak ketiga APBD sebesar Rp66.473.365.566,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	31.387.738.713,00
a.	Penerimaan IWP	16.937.140.580,00
b.	Penerimaan Taspen	5.741.795,00
c.	Penerimaan Askes/BPJS	8.144.635.994,00
d.	Penerimaan PPh 21	4.421.278.889,00
e.	Penerimaan Taperum	232.163.162,00
f.	Penerimaan JKK	406.671.813,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
g.	Penerimaan JKM	1.220.015.783,00
h.	Penerimaan Lain-lain	20.090.697,00
2.	Belanja Langsung	34.679.495.684,00
a.	PPh 21	15.870.619.507,00
b.	PPh 22	1.266.220.383,00
c.	PPh 23	271.065.611,00
d.	PPh Final Ps. 4 Ayat (2)	1.680.658.048,00
e.	PPn Pusat	15.590.932.135,00
3.	Ganti Uang (GU)	406.131.169,00
a.	PPh 21	27.125.716,00
b.	PPh 22	54.466.052,00
c.	PPh 23	47.876.391,00
d.	PPn Pusat	276.663.010,00
	Jumlah	66.473.365.566,00

- 2) Penerimaan perhitungan fihak ketiga BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp2.743.551.566,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	PPh 21	1.358.903.896,00
b.	PPh 22	119.842.151,00
c.	PPh 23	56.337.388,00
d.	PPh Final Ps. 4 Ayat (2)	51.618.738,00
e.	PPn	1.156.849.393,00
	Jumlah	2.743.551.566,00

- b. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp69.216.917.132,00, terdiri dari:
1) Pengeluaran perhitungan fihak ketiga APBD sebesar Rp66.473.365.566,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	31.387.738.713,00
a.	Penerimaan IWP	16.937.140.580,00
b.	Penerimaan Taspen	5.741.795,00
c.	Penerimaan Askes/BPJS	8.144.635.994,00
d.	Penerimaan PPh 21	4.421.278.889,00
e.	Penerimaan Taperum	232.163.162,00
f.	Penerimaan JKK	406.671.813,00
g.	Penerimaan JKM	1.220.015.783,00
h.	Penerimaan Lain-lain	20.090.697,00
2.	Belanja Langsung	34.679.495.684,00
a.	PPh 21	15.870.619.507,00
b.	PPh 22	1.266.220.383,00
c.	PPh 23	271.065.611,00
d.	PPh Final Ps. 4 Ayat (2)	1.680.658.048,00
e.	PPn Pusat	15.590.932.135,00
3.	Ganti Uang (GU)	406.131.169,00
a.	PPh 21	27.125.716,00
b.	PPh 22	54.466.052,00
c.	PPh 23	47.876.391,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
d.	PPn Pusat	276.663.010,00
	Jumlah	66.473.365.566,00

2) Pengeluaran perhitungan fihak ketiga BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp2.743.551.566,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	PPh 21	1.358.903.896,00
b.	PPh 22	119.842.151,00
c.	PPh 23	56.337.388,00
d.	PPh Final Ps. 4 Ayat (2)	51.618.738,00
e.	PPn	1.156.849.393,00
	Jumlah	2.743.551.566,00

2. Kas di rekening BOS APBN sebesar Rp6.336.208.443,00.
3. Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi-LAK Rp991.156.377.151,01 dengan Belanja Operasi Rp887.667.309.983,50, Belanja Tak terduga Rp1.373.694.400,00 dan Belanja Transfer pada LRA Rp129.978.039.600,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. APBN Rp29.469.685.829,00
 - b. Koreksi pegawai Rp(172.678.487,00)
 - c. Koreksi barang & jasa Rp(780.587.945,51)
 - d. Koreksi hibah Rp(603.129.564,00)
 - e. Koreksi Bantuan Sosial Rp(4.600.000,00)
 - f. Koreksi Belanja Tak Terduga Rp(46.023.000,00)
4. Selisih Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi-LAK sebesar Rp124.261.908.143,52 dengan Belanja Modal-LRA sebesar Rp133.634.821.447,52 adalah Rp9.372.913.304,00 dikarenakan dalam LAK murni mencatat transaksi APBD dan BLUD sedangkan LRA merupakan konsolidasi APBD, BLUD dan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. APBN Rp9.749.146.518,00
 - b. Koreksi Peralatan dan Mesin Rp(351.805.942,00)
 - c. Koreksi Gedung dan Bangunan Rp(4.432.272,00)
 - d. Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan Rp(19.995.000,00)
5. Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas sebesar Rp91.076.772,92 merupakan Saldo Kas Lainnya dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. Rp16.250.000,00 merupakan pendapatan yang diterima di rekening kas daerah tahun 2015, namun sampai dengan tahun 2020, belum diketahui sumber/penyetor dan tujuannya.
 - b. SKRDLB DPUP sebesar Rp72.730.461,92 merupakan lebih bayar dari PT XL Axiata Tbk, yang masuk ke kas daerah tanggal 11 November 2016.
 - c. Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp6.833,00 merupakan saldo bank pada rekening SMPN 1 Belinyu sebesar Rp4.861,00 dan SMPN 2 Sungailiat sebesar Rp1.972,00.
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan pada RSUD Sjafrie Rachman yaitu Jasa Giro sebesar Rp3.668,00, Bend Peng Pembantu V Dinkes sebesar Rp1.006,00 dan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp55.929,00.
 - e. Kas di Bendahara BOS APBN SDN 17 Merawang sebesar Rp36.000,00.

- f. Saldo di rekening hibah sekolah sebesar Rp402.708,00.
- g. Saldo di kas di Bendahara Pengeluaran JKN sebesar Rp1.590.167,00.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubungan antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun berjalan. Laporan Perubahan Ekuitas ini Perubahan Ekuitas Konsolidasi antara APBD dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Dinas Kesehatan yang menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal tahun 2020 yang merupakan ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp2.035.251.322.027,61.
2. Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 adalah sebesar **(Rp13.340.243.681,41)**.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2020 merupakan penyesuaian terhadap ekuitas dan piutang sertakoreksi atas kesalahan pencatatan ekuitas BLUD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp50.164.813,61.

Terdiri dari :

- Koreksi atas kesalahan pencatatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik sebesar (Rp30.029.821,00).
- Koreksi atas kurang catat saldo awal pada Dinas Kesehatan yang berasal dari DP2KBP3A sebesar Rp80.194.634,61.

- b. Koreksi ekuitas lainnya (Rp8.234.605.984,01).

Terdiri dari :

- Koreksi atas pencatatan hasil keputusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang atas Alm Riky Ramdhani (Rp55.000.000,00) dan Rosmawaty (Rp189.320.000,00) di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- Koreksi atas pengurangan penyisihan piutang bagian lancar (ternak ayam) per 31 Desember 2020 sebesar (Rp8.400.000,00) pada PPKD.
- Koreksi atas kelebihan bayar dana bagi hasil pusat sebesar Rp5.696.887.859,00 pada PPKD.
- Koreksi kurang atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPRS Bangka Belitung, dikarenakan perbedaan pengakuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan PD BPRS untuk nilai Penyertaan Modal sebesar (Rp9.500.000,00)
- Koreksi atas Beban Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang sudah diserahkan pada tahun 2019 namun baru dibebankan pada tahun 2020 sebesar (Rp2.782.931.000,00).
- Koreksi atas kurang saji Kas Lainnya yang merupakan saldo di rekening hibah sekolah sebesar Rp402.708,00.
- Koreksi atas kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran JKN yang merupakan saldo di rekening JKN sebesar Rp1.590.167,00.

c. Koreksi aset (mutasi masuk & keluar) sebesar Rp211.729.000,74.

Terdiri dari:

- Koreksi aset masuk dan keluar Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp2.516.629.940,00).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Pangan dan Pertanian sebesar (Rp143.352.482,83).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp124.632.717,05.
- Koreksi aset masuk dan keluar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp846.925.801,20.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Kesehatan sebesar Rp1.231.111.289,04.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Sosial sebesar (Rp3.791.856.432,08).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.389.085.323,41.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar (Rp1.409.289.384,66).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar (Rp1.084.825.350).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Perhubungan sebesar Rp28.792.036.112,67.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp28.246.683.963,87).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar (Rp2.423.719.935,99).
- Koreksi aset masuk dan keluar Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp87.662.800,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp100.222.709,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp194.740.000,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Belinyu sebesar Rp4.123.500,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.374.500,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp189.256.200,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Puding Besar sebesar Rp4.123.500,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Riau Silip sebesar Rp3.975.000,00.
- Koreksi aset masuk dan keluar Sekretariat Daerah sebesar Rp1.883.070.004,66.
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Perikanan sebesar (Rp3.120.000,00).
- Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp2.374.500,00.

- Koreksi aset masuk dan keluar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp1.500.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Bakam sebesar Rp4.123.500,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Inspektorat Daerah sebesar Rp1.500.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp1.500.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Pemali sebesar Rp3.975.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Merawang sebesar Rp3.975.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Sekretariat DPRD sebesar Rp949.320.533,14,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Mendo Barat sebesar Rp4.123.500,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.500.000,00.
 - Koreksi aset masuk dan keluar Kecamatan Sungailiat sebesar Rp3.975.000,00.
- d. Koreksi akumulasi penyusutan aset (mutasi masuk & keluar) sebesar Rp2.658.355.512,50.

Terdiri dari :

- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.548.336.802,00.
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp206.399.557,00).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp6.699.126.258,36.
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp499.005.933,00.
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Sosial sebesar (Rp1.960.797.365,33).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp6.271.276.649,86).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp604.184.601,00).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.866.399.718,16.
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp236.497.668,00).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp532.550.471,00
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.003.120.736,33.
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp376.870,00).
- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar Rp150.536.196,00.

- Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp641.362.225,00).
 - Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp3.497.396.984,16).
 - Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp51.729.778,00.
 - Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp179.860.366,00).
 - Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Dinas Perikanan sebesar Rp4.620.000,00.
 - Koreksi akumulasi penyusutan aset pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar (Rp98.918.094,00).
- e. Koreksi penyesuaian piutang sebesar (Rp49.699.639.914,01).
- Terdiri dari:
- Koreksi atas pencatatan saldo awal piutang pasar grosir pada Disnakerperindag karena kurang pencatatan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 2018 dan 2019 per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.844.000,00.
 - Koreksi atas pencatatan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan berupa pembatalan piutang sebesar (Rp1.804.002.136,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DPUPR sebesar (Rp164.626.687,01).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada PPKD sebesar Rp1.288.152.798,00.
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan pada PPKD sebesar Rp75.847.957,00.
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal pajak rokok pada PPKD sebesar Rp3.092.674.262,00.
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal piutang Taspen pada PPKD sebesar (Rp2.925.700,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan pada PPKD sebesar (Rp2.995.472.159,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari PPh pasal 25&29 dan PPh pasal 21 pada PPKD sebesar (Rp1.404.363.078,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*land-rent*) pada PPKD sebesar (Rp1.846.405.124,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*royalti*) pada PPKD sebesar (Rp45.489.828.940,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan pada PPKD sebesar (Rp164.137.050,00).
 - Koreksi atas pencatatan saldo awal Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak bumi pada PPKD sebesar (Rp259.840.415,00).
 - Koreksi atas saldo awal piutang Pendapatan PBB-P2 sebesar (Rp62.557.642,00).

f. Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp2.250.434.423,99.

Terdiri dari :

- Koreksi atas pencatatan saldo awal penyisihan retribusi Pasar grosir pada Disnakerperindag sebesar (Rp37.844.000,00).
- Koreksi atas penyisihan piutang retribusi Tempat Khusus Parkir pada Disnakerperindag sebesar Rp6.500.000,00.
- Koreksi atas penyisihan piutang retribusi Pasar Grosir pada Disnakerperindag Rp22.076.820,00.
- Koreksi atas penyisihan piutang retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.500.000,00.
- Koreksi atas penyisihan piutang BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp3.244.307.749,60.
- Koreksi atas pencatatan saldo awal penyisihan piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DPUPR sebesar Rp37.683.997,97.
- Koreksi atas penyisihan piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DPUPR sebesar Rp9.431.363,66.
- Koreksi atas pencatatan saldo awal penyisihan piutang PBB-P2 pada PPKD sebesar (Rp1.204.517.557,03).
- Koreksi atas pencatatan saldo awal penyisihan Taspen pada PPKD sebesar Rp14.628,50.
- Koreksi atas penyisihan piutang PBB-P2 pada PPKD sebesar Rp50.644.080,00
- Koreksi atas penyisihan piutang Pajak Daerah pada PPKD sebesar Rp86.623.458,89.
- Koreksi atas penyisihan piutang Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD sebesar Rp17.718.882,40.
- Koreksi atas penyisihan piutang pinjaman kepada UMKM dan Koperasi yang jatuh tempo pada PPKD sebesar Rp15.295.000,00.

g. Koreksi penyesuaian nilai investasi sebesar Rp21.327.536,00.

Terdiri dari :

- Koreksi pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Tirta Bangka yang menggunakan metode ekuitas pada PPKD sebesar Rp200.500.188,00.
- Koreksi pencatatan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD Agro Lestari Mandiri yang menggunakan metode ekuitas pada PPKD sebesar (Rp179.172.652,00).

h. Koreksi penyesuaian nilai aset Rp537.396.659,97.

Terdiri dari :

- Koreksi pencatatan reklas aset non kapitalisasi bangunan (Kemitraan Pihak Ketiga) ke aset gedung bangunan pada SETDA sebesar Rp7.277.009,88.
- Koreksi pencatatan peralatan mesin bertambah akibat kekurangan pencatatan pada tahun 2018 pada SETDA sebesar Rp28.775.000,00.
- Koreksi pencatatan peralihan OPD ke BPPKAD dari BP2RD sebesar Rp8.096.000,00.

- Koreksi pencatatan penambahan aset tetap tanah karena kekurangan pencatatan pada BPPKAD sebesar Rp445.650.251,00.
 - Koreksi pencatatan penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, Jaringan, koreksi akibat pengurangan ganda TA 2019 pada DPUPR sebesar Rp511.636.000,00.
 - Koreksi pencatatan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, Jaringan, koreksi kurang pencatatan 2020 pada DPUPR sebesar (Rp436.212.600,00).
 - Koreksi pencatatan peralihan OPD ke Dinparperten dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp27.824.999,70).
 - Koreksi pencatatan tambah penyesuaian nilai aset Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp0,01.
 - Koreksi pencatatan kurang penyesuaian nilai aset Peralatan dan Mesin kendaraan bermotor penumpang pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp0,02).
 - Koreksi pencatatan penyesuaian nilai aset tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp1,13).
 - Koreksi pencatatan pembulatan desimal pada BPPKAD sebesar (Rp0,01).
 - Koreksi pencatatan pembulatan desimal pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp0,06).
- i. Koreksi penyesuaian akumulasi aset sebesar (Rp16.097.357.345,09).

Terdiri dari :

- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp37.799.552,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.736.954.405,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.373.062.736,91
- Koreksi akumulasi aset pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp54.662.800,00).
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp23.971.797.969,01).
- Koreksi akumulasi aset pada Kecamatan Sungailiat sebesar Rp24.944.168,00
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.907.000,00.
- Koreksi akumulasi aset pada BLUD Dinas Kesehatan sebesar (Rp9.418.041,00).
- Koreksi akumulasi aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp1.430.574.933,00).
- Koreksi akumulasi aset pada Kecamatan Mendo Barat sebesar (Rp270.832,00).
- Koreksi akumulasi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.635.775.011,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.850.000,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp618.217.124,00).
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Sosial sebesar Rp31.137.333,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Sekretariat DPRD sebesar Rp25.675.000,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Kecamatan Riau Silip sebesar Rp100.624.748,00.

- Koreksi akumulasi aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.854.400,00.
- Koreksi akumulasi aset pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp0,01.

j. Koreksi Dana BOS sebesar (Rp9.693,00).

k. Koreksi persediaan (mutasi masuk & keluar) sebesar Rp0,00.

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp1.953.608.873.356,90.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa informasi yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang merupakan informasi non keuangan yang terjadi di Kabupaten Bangka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terlampir Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.
2. Terlampir Laporan Keuangan PDAM Tirta Bangka (audited) oleh KAP Djoko, Sidik dan Indradengan opini **Wajar**.
3. Terlampir Laporan KeuanganPerumda Agro Lestari Mandiri(audited) oleh KAP Widiyanto dan Sumbogo dengan opini **Wajar**.
4. Terlampir Laporan Keuangan Konsol BLUD (SAP) Dinas Kesehatan (audited) oleh KAP Wartono dan Rekan, dengan opini **Wajar**.

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Hibah Masuk TA 2020

RINCIAN HIBAH MASUK TANAH TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
DINAS PERIKANAN	3.500.000,00	Hibah dari Masyarakat atas nama Tri Rachmawati, S.Pi.	593.83/566/PH/19.01.05/2014 tanggal 11 Juli 2014	ASET TETAP
JUMLAH	3.500.000,00			

RINCIAN HIBAH MASUK PERALATAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
PENGELOLA BMD	553.307.150,00	Hibah Masuk dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BAST BMN Pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Kab. Bangka Prov. Kep. Babel Nomor Pihak Kesatu : 2029/95/SBG/2020 dan Nomor Pihak Kedua : 032/4625/BPPKAD/2020 tanggal 9 Oktober 2020	Aset Tetap
DINDUKPENCAPIL	81.873.000,00	Hibah Masuk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	BAST Hibah Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Neeri kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor : 028/24586/SES dan Nomor : 500/1798/DINDUKPENCAPIL/2018 tanggal 20 Desember 2018	Aset Tetap
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	119.750.000,00	HIBAH DARI BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2020	Berita Acara Serah Terima CSR Bank Sumsel Babel Th 2019 Nomor : 001/SLT/4/BAST/2020 tanggal 30 April 2020	Aset Tetap

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
SDN 5 Cit Riau Silip	14.850.000,00	Hibah masuk dari PT. MITRA STANNIA PRIMA	BAST Hibah Barang Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri TA 2020 Nomor : 01/VIII/BAST/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Aset Tetap
SDN 5 Cit Riau Silip	150.000,00	Hibah masuk dari PT. MITRA STANNIA PRIMA	BAST Hibah Barang Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri TA 2020 Nomor : 01/VIII/BAST/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Aset Non Kapitalisasi
SMPN 2 Mendo Barat	90.485.000,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2020	BAST BMN Hasil Pengadaan di Pusat Bantuan Peralatan TIK SMP Tahun 2020 antara Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 032/2977/Dindikpora/I/2020 tanggal 31 Desember 2020	Aset tetap
SMPN 3 Pemali	90.485.000,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2020	BAST BMN Hasil Pengadaan di Pusat Bantuan Peralatan TIK SMP Tahun 2020 antara Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 032/2977/Dindikpora/I/2020 tanggal 31 Desember 2020	Aset tetap

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
SMPN 4 Mendo Barat	90.485.000,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2020	BAST BMN Hasil Pengadaan di Pusat Bantuan Peralatan TIK SMP Tahun 2020 antara Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 032/2977/Dindikpora/I/2020 tanggal 31 Desember 2020	Aset tetap
SMPN 5 Mendo Barat	48.921.798,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset tetap
SMPN 5 Mendo Barat	98.643.160,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset Non Kapitalisasi
SMPN 5 Mendo Barat	90.485.000,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2020	BAST BMN Hasil Pengadaan di Pusat Bantuan Peralatan TIK SMP Tahun 2020 antara Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 032/2977/Dindikpora/I/2020 tanggal 31 Desember 2020	Aset tetap

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
RSUD DEPATI BAHRIN	1.350.000,00	Hibah Masuk dari Bank Mandiri	BAST No. BSJ.R02.Br.Sgt/210/2020 tanggal 14 Mei 2020	Aset Tetap
RSUD DEPATI BAHRIN	146.700.000,00	Hibah masuk dari PT. TIRTA MEDIKA JAYA	BAST Renovasi Ruang Hemodialisa RSUD Depati Bahrin Nomor : 001/BAST-DBR/III/2020 dan nomor : 445/1078/RSUD-DB/2020 tanggal 2 Maret 2020	Aset Tetap
RSUD DEPATI BAHRIN	700.000,00	Hibah masuk dari PT. TIRTA MEDIKA JAYA	BAST Renovasi Ruang Hemodialisa RSUD Depati Bahrin Nomor : 001/BAST-DBR/III/2020 dan nomor : 445/1078/RSUD-DB/2020 tanggal 2 Maret 2020	Aset Non Kapitalisasi
RSUD DEPATI BAHRIN	1.399.652,00	Hibah Masuk dari Pihak PT TIMAH	BAST Barang Nomor : 415/024/covid-19/RSUD-DB/2020 tanggal 18 April 2020	Aset Tetap
JUMLAH	1.429.584.760,00			

RINCIAN HIBAH MASUK GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
Pengelola	391.633.000,00	Hibah Masuk dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BAST BMN Pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Kab. Bangka Prov. Kep. Babel Nomor Pihak Kesatu : 2029/95/SBG/2020 dan Nomor Pihak Kedua : 032/4625/BPPKAD/2020 tanggal 9 Oktober 2020	Aset Tetap
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	78.950.000,00	HIBAH DARI BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2020	Berita Acara Serah Terima CSR Bank Sumsel Babel Th 2019 Nomor : 001/SLT/4/BAST/2020 tanggal 30 April 2020	Aset Tetap

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
SDN 10 Riau Silip	15.000.000,00	Hibah masuk dari PT. MITRA STANNIA PRIMA	BAST Hibah Barang Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri TA 2020 Nomor : 01/VIII/BAST/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Aset Tetap
SDN 27 Sungailiat	15.000.000,00	Hibah masuk dari PT. MITRA STANNIA PRIMA	BAST Hibah Barang Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri TA 2020 Nomor : 01/VIII/BAST/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Aset Tetap
SDN 27 Sungailiat	46.925.000,00	Hibah masuk dari KOMITE SEKOLAH	01/Komite/2020 tanggal 28 Februari 2020	Aset Tetap
SMPN 5 Mendo Barat	1.665.275.422,44	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset tetap
SMPN 5 Mendo Barat	2.434.923,44	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset Non Kapitalisasi
RSUD DEPATI BAHRI	1.231.762.409,58	Hibah masuk dari PT. TIRTA MEDIKA JAYA	BAST Renovasi Ruang Hemodialisa RSUD Depati Bahrin Nomor : 001/BAST-DBR/III/2020 dan nomor : 445/1078/RSUD-DB/2020 tanggal 2 Maret 2020	Aset Tetap
JUMLAH	3.446.980.755,46			

RINCIAN HIBAH MASUK JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DITERIMA DARI	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
Pengelola	36.324.201.863,00	Hibah Masuk dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR	BAST BMN antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemkab. Bangka No. 248.1/BA/DC/2020 & No. 032/3392/BPPKAD/2020 tanggal 3 Agustus 2020	Aset Tetap
Pengelola	1.146.020.040,00	Hibah Masuk dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BAST BMN Pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Kab. Bangka Prov. Kep. Babel Nomor Pihak Kesatu : 2029/95/SBG/2020 dan Nomor Pihak Kedua : 032/4625/BPPKAD/2020 tanggal 9 Oktober 2020	Aset Tetap
SMPN 5 Mendo Barat	47.853.696,12	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset tetap
SMPN 5 Mendo Barat	2.500.000,00	Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia TA 2019	BAST Nomor : 425.11/001-BAST/P2USB-SMPN5/MB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	Aset Non Kapitalisasi
JUMLAH	37.520.575.599,12			

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Hibah Keluar TA 2020

RINCIAN HIBAH KELUAR TANAH TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DIHIBAHKAN KEPADA	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
Pengelola	18.760.000,00	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka	BAST Nomor : BA/4516/BPPKAD/2020 tanggal 30 September 2020	ASET TETAP
Pengelola	420.000.000,00	Lembaga Perasyarakatan Sungailiat	BAST Nomor : BA/028/4234/BPPKAD/2020 Tanggal 11 September 2020	ASET TETAP
Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	258.912.000,00	Yayasan Baitul Muhajirin Sungailiat (Masjid RSS)	BAST Nomor : BA/6257/BPPKAD/2020 tanggal 21 Desember 2020	ASET TETAP
JUMLAH	697.672.000,00			

RINCIAN HIBAH KELUAR PERALATAN DAN MESIN TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	NILAI	DIHIBAHKAN KEPADA	NO/TGL. SURAT HIBAH	KETERANGAN
Pengelola	103.500.000,00	Lembaga Masjid Nurul Hikmah Kabupaten Bangka	BAST Nomor : BA/028/6391/BPPKAD/2020 tanggal 20 Oktober 2020	ASET TETAP
BPBD	5.000.000,00	Polres Kab. Bangka	BAST Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Kelengkapan Nomor : 01/BAST/BPBD/2020 tanggal 1 April dan 7 April 2020.	ASET TETAP
BPBD	2.500.000,00	Pasar Betuah RSS	BAST Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Kelengkapan Nomor : 12/BAST/BPBD/2020 tanggal 2 April 2020	ASET TETAP
JUMLAH	111.000.000,00			

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Perjanjian Baru Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RINCIAN MUTASI TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA (PERJANJIAN BARU) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA 2020

NO	MITRA	OBJEK YANG DIKELOLA/ PERUNTUKAN	ALAMAT OBJEK	LUAS	NOMOR PERJANJIAN	MASA	TANGGAL		NILAI ASET (Rp.)	SPESIFIKASI BARANG	KET.
							MULAI	BERAKHIR			
1	Windayani	Tempat Usaha Kantin	Bangunan Garasi/Gudang Kantor Setda Jalan A. Yani Jalur II Kel. Bukit Betung (Lingk. Kantor Bupati Bangka)	30 m ²	593.1/008/X/2019 Tanggal 15-7-2019	1 Tahun	15-Jul-19	14-Jul-20	1.915.002,60	Tanah Bagian Umum Setda Bangka	Penambahan nilai kemitraan (Perjanjian baru)
2	Djaikem	Tempat Usaha Kantin	Bangunan Gedung Kantin Dharma Wanita Jl. A. Yani Jalur II Kel. Bukit Betung (Lingk. Kantor Bupati Bangka)	84 m ²	593.1/010/X/2019 Tanggal 25-7-2019	1 Tahun	25-Jul-19	24-Jul-20	5.362.007,28	Tanah Bagian Umum Setda Bangka	Penambahan nilai kemitraan (Perjanjian baru)
3	PT. MITRA STANIA PRIMA	Kegiatan bisnis berupa industri dalam bentuk usaha pengolahan dan permurnian mineral serta pembangunan sarana penunjang lainnya	Kawasan Industri Jelitik Kel. Jetikik Sungailiat	40000 m ²	593.1/79/BPPKAD/2020 & 018/MSP/DIRUT/I/2020 tgl 7-2-2020	2 Tahun	7-Feb-20	6-Feb-22	315.093.867,55	Tanah Pengelola BMD	Penambahan nilai kemitraan (Perjanjian baru)

NO	NAMA	OBJEK YANG DIKELOLA/ PERUNTUKAN	ALAMAT OBJEK	LUAS	NOMOR PERJANJIAN	MASA	TANGGAL		NILAI ASET (Rp.)	SPESIFIKASI BARANG	KET.
							MULAI	BERAKHIR			
4	PT. AEGA PRIMA	Kegiatan pembangunan smelter	Kawasan Industri Jelitik Kel. Jetikik Sungailiat	13996 m ²	593.1/3722/BPPKAD/2020 & 003/AEGA PRIMA/DIRUT/VII/2020 tgl 13-7-2020	3 Tahun	13-Jul-20	13-Jul-23	110.251.344,26	Tanah Pengelola BMD	Penambahan nilai kemitraan (Perjanjian baru)
TOTAL									432.622.221,69		

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian Habis Masa Perjanjian Tanah Kemitraan dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RINCIAN MUTASI TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA (PERJANJIAN HABIS MASA) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA 2020

NO	MITRA	OBJEK YANG DIKELOLA/ PERUNTUKAN	ALAMAT OBJEK	LUAS	NOMOR PERJANJIAN	MASA	TANGGAL		NILAI ASET (Rp.)	SPESIFIKASI BARANG	KET.
							MULAI	BERAKHIR			
1	Yohana	Usaha Warung Kelontong/Makanan (Warung You-you)	Jalan A. Yani (Jalur II) Sungailiat (Sebelah Taman Inspirasi)	115 m ²	593.1/01/X/2018 tgl 04-01-2018	2 Tahun	4-Jan-18	3-Dec-20	7.360.000,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
2	Ardiana	Tempat Usaha Toko Sembako	Jln. Pepaya (Belakang Kantor DPRD Kab. Bangka)	326 m ²	593.1/005/X/2019 Tanggal 12-6-2019	1 Tahun	12-Jun-19	11-Jun-20	15.647.729,88	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
3	Oktra Yuningsih	Tempat Usaha Rumah Makan	Jalan Pepaya (Belakang Kantor DPRD Kab. Bangka)	263,14 m ²	593.1/07/X/2019 Tanggal 24-6-2019	1 Tahun	24-Jun-19	23-Jun-20	12.630.720,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
4	Hasan	Tempat Usaha Warung Makanan Ringan	Jalan Pepaya (Belakang Kantor DPRD Kab. Bangka)	181,42 m ²	593.1/06/X/2019 Tanggal 19-6-2019	1 Tahun	19-Jun-19	18-Jun-20	8.708.160,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
NO	MITRA	OBJEK YANG	ALAMAT	LUAS	NOMOR	MASA	TANGGAL		NILAI ASET	SPESIFIKASI	KET.

		DIKELOLA/ PERUNTUKAN	OBJEK		PERJANJIAN		MULAI	BERAKHIR	(Rp.)	BARANG	
5	Dwi Putra Zuliduma	Tempat Usaha Laundry dan Kantin	Jalan Pepaya (Belakang Kantor DPRD Kab. Bangka)	191,1 m ²	593.1/012/X/2019 Tanggal 14-8-2019	1 Tahun	14-Aug-19	13-Aug-20	9.172.800,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
6	Windayani	Tempat Usaha Kantin	Garasi/Gudang Kantor Setda Jalan A. Yani Jalur II Kel. Bukit Betung (Lingk. Kantor Bupati Bangka)	30 m ²	<u>593.1/008/X/2019</u> <u>Tanggal 15-7-2019</u>	1 Tahun	15-Jul-19	14-Jul-20	1.920.000,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
7	Djaikem	Tempat Usaha Kantin	Kantin Dharma Wanita Jl. A. Yani Jalur II Kel. Bukit Betung (Lingk. Kantor Bupati Bangka)	84 m ²	<u>593.1/010/X/2019</u> <u>Tanggal 25-7-2019</u>	1 Tahun	25-Jul-19	24-Jul-20	5.376.000,00	Tanah Bagian Umum & Rumah Tangga Setda Bangka	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
8	Antini	Kegiatan Bisnis berupa Usaha Kantin	Jalan Diponegoro Kelurahan Bukit Betung Kec. Sungailiat (Sebagian Eks Kantor Bupati)	40,8 m ²	593.1/770/DKP/2019 tanggal 5-9-2019	1 Tahun	05-Sep-19	4-Sep-20	2.611.200,00	Tanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
9	Ris Suparman	Sewa menyewa tanah milik RSUD Sungailiat Pemkab. Bangka (Gerai ATM)	Jl. Jenderal Sudirman Sungailiat	45 m ²	445/008/RSUD/2015 007/CV.SR/Pemda-II/2015	5 Tahun	23-Mar-15	23-Mar-20	3.690.000,00	Tanah RSUD Depati Bahrin	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
TOTAL									67.116.609,88		

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian Habis Masa Perjanjian Gedung dan Bangunan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA (PERJANJIAN HABIS MASA) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA 2020

NO	MITRA	OBJEK YANG DIKELOLA/ PERUNTUKAN	ALAMAT OBJEK	LUAS	NOMOR PERJANJIAN	MASA	TANGGAL		NILAI ASET (Rp.)	SPESIFIKASI BARANG	KET.
							MULAI	BERAKHIR			
1	Antini	Kegiatan Bisnis berupa Usaha Kantin	Jalan Diponegoro Kelurahan Bukit Betung Kec. Sungailiat (Sebagian Eks Kantor Bupati)	40,8 m ²	593.1/770/DKP/2019 tanggal 5-9-2019	1 Tahun	5-Sep-19	4-Sep-20	24.174.000,00	Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengurangan nilai kemitraan (Perjanjian Habis Masa)
TOTAL									24.174.000,00		

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian Peralihan Antar OPD Aset Tanah TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD TANAH SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
PENGELOLA	79.936.000,00	ASET TETAP	DP2KBP3A	79.936.000,00	ASET TETAP
DINDIKPORA	203.968.000,00	ASET TETAP	DINPANPERTAN	203.968.000,00	ASET TETAP
DINPARBUDAYA	4.382.037.720,00	ASET TETAP	DINDIKPORA	4.382.037.720,00	ASET TETAP
SETDA	67.200.000,00	ASET TETAP	SETWAN	67.200.000,00	ASET TETAP
DPUPR	2.529.281.000,00	ASET TETAP	DINHUB	2.428.481.000,00	ASET TETAP
DPUPR		ASET TETAP	BPBD	100.800.000,00	ASET TETAP
PENGELOLA	551.938.000,00	ASET TETAP	DINPANPERTAN	399.140.000,00	ASET TETAP
		ASET TETAP	SETDA	152.798.000,00	ASET TETAP
BP2RD	130.624.000,00	ASET TETAP	BPPKAD	130.624.000,00	ASET TETAP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	217.639.000,00	ASET TETAP	UPT PSC-119	217.639.000,00	ASET TETAP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	820.164.000,00	ASET TETAP	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	820.164.000,00	ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
DINPEMDES	839.645.300,00	ASET TETAP	DINSOS	839.645.300,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	120.064.000,00	ASET TETAP	DINSOS	120.064.000,00	ASET TETAP
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	97.433.674,05	ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS PARIWISATA SUNGAILIAT)	97.433.674,05	ASET TETAP
RSUD DEPATI BAHRI	2.499.028.624,00	ASET TETAP	DINAS KESEHATAN	2.499.028.624,00	ASET TETAP
SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN

RSUD DEPATI BAHRIN	3.690.000,00	ASET LAINNYA/ TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	DINAS KESEHATAN	3.690.000,00	ASET LAINNYA/ TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
JUMLAH	12.542.649.318,05			12.542.649.318,05	

REKAPITULASI :

PERALIHAN KELUAR			PERALIHAN MASUK		
ASET TETAP TANAH	ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	TOTAL	ASET TETAP TANAH	ASET LAINNYA/TANAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	TOTAL
12.441.525.644,00	101.123.674,05	12.542.649.318,05	11.718.795.318,05	823.854.000,00	12.542.649.318,05

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Peralihan Antar OPD Aset Peralatan dan Mesin TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD ASET PERALATAN DAN MESIN SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
SETDA	1.254.170.357,14	ASET TETAP	BPBD	161.150.000,00	ASET TETAP
			BPPKAD	473.390.000,00	ASET TETAP
			DINSOS	332.500.000,00	ASET TETAP
			SETWAN	287.130.357,14	ASET TETAP
DINAS PERIKANAN	4.620.000,00	ASET TETAP	SETDA	4.620.000,00	ASET TETAP
SETWAN	94.585.000,00	ASET TETAP	Sekretariat Daerah	94.585.000,00	ASET TETAP
DINPERKPP	1.086.325.350,00	ASET TETAP	DPUPR	1.086.325.350,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	1.058.751.699,45	ASET TETAP	DINPANPERTAN	1.058.751.699,45	ASET TETAP
BPPKAD	182.500.000,00	ASET TETAP	Dinas Sosial	170.000.000,00	ASET TETAP
		ASET TETAP	Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda	5.000.000,00	ASET TETAP
		ASET TETAP	BKPSDMD	7.500.000,00	ASET TETAP
BP2RD	317.080.000,00	ASET TETAP	SETDA	580.830.000,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	263.750.000,00	ASET TETAP			
DINPANPERTAN	31.000.000,00	ASET TETAP	Sekretaris Daerah (Bupati)	10.500.000,00	ASET TETAP
			Sekretaris Daerah	20.500.000,00	ASET TETAP
BP2RD	173.650.000,00	ASET TETAP	DINDIKPORA	173.650.000,00	ASET TETAP
BP2RD	13.500.000,00	ASET TETAP	BKPSDMD	13.500.000,00	ASET TETAP
BP2RD	7.500.000,00	ASET TETAP	SATPOL PP	7.500.000,00	ASET TETAP
BP2RD	190.650.000,00	ASET TETAP	DINSOS	190.650.000,00	ASET TETAP
SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	421.902.800,00	ASET TETAP	SATPOL PP	421.902.800,00	ASET TETAP
BP2RD	4.910.734.138,67	ASET TETAP	BPPKAD	4.910.734.138,67	ASET TETAP
BP2RD	30.480.500,00	ASET TETAP	DINHUB	7.887.389.456,16	ASET TETAP
Setwan	184.211.400,00	ASET TETAP			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.672.697.556,16	ASET TETAP			
DINAS PANGAN	180.222.150,00	ASET TETAP	DINSOS	180.222.150,00	ASET TETAP
DINPEMDES	989.509.189,33	ASET TETAP	BKPSDMD	172.240.000,00	ASET TETAP
			Dinas Sosial	628.012.989,33	ASET TETAP
			KESBANGPOL	189.256.200,00	ASET TETAP
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	173.650.000,00	ASET TETAP	DINPEMDES	173.650.000,00	ASET TETAP
SATPOL PP	75.240.000,00	ASET TETAP	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	75.240.000,00	ASET TETAP
SATPOL PP	268.000.000,00	ASET TETAP	BPBD	268.000.000,00	ASET TETAP
DINAKERPERINDAG	205.920.000,00	ASET TETAP	Dinas PEMDES	205.920.000,00	ASET TETAP
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.850.000,00	ASET TETAP	DINAS KESEHATAN	59.810.301.367,49	ASET TETAP
RSUD DEPATI BAHRIN	59.802.451.367,49	ASET TETAP			
DINPARBUDAYA	1.300.616.075,36	ASET TETAP	DINDIKPORA	1.300.616.075,36	ASET TETAP
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.810.000,00	ASET TETAP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	168.810.000,00	ASET TETAP
DINDIKBUD	128.146.430,00		DINPARBUDAYA	128.146.430,00	ASET TETAP
BPPKAD	174.300.000,00	ASET TETAP	Sekretariat Daerah	174.300.000,00	ASET TETAP
DINAS KESEHATAN	460.500.000,00	ASET TETAP	PENGELOLA BMD	103.500.000,00	ASET TETAP
		ASET TETAP	SEKRETARIAT DAERAH	357.000.000,00	ASET TETAP
SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN

DP2KBP3A	71.378.179,00	ASET TETAP	Puskesmas Petaling	11.896.363,16	ASET TETAP
			Puskesmas Sinar Baru	11.896.363,16	ASET TETAP
			Puskesmas Baturusa	11.896.363,16	ASET TETAP
			Puskesmas Bakam	11.896.363,16	ASET TETAP
			Puskesmas Kenanga	11.896.363,16	ASET TETAP
			Puskesmas sungailiat	11.896.363,20	ASET TETAP
DINAS KESEHATAN	77.416.500,00	ASET TETAP	RUMAH DINAS BUPATI BANGKA	1.500.000,00	ASET TETAP
			KANTOR BUPATI	1.500.000,00	ASET TETAP
			RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	1.500.000,00	ASET TETAP
			SEKDA	1.500.000,00	ASET TETAP
			KEC. SUNGAILIAT	1.500.000,00	ASET TETAP
			MENDO BARAT	1.500.000,00	ASET TETAP
			MENDO BARAT	2.623.500,00	ASET TETAP
			KEC. SUNGAILIAT	2.475.000,00	ASET TETAP
			KEC. PUDING BESAR	2.623.500,00	ASET TETAP
			KEC. PUDING BESAR	1.500.000,00	ASET TETAP
			KEC. PEMALI	2.475.000,00	ASET TETAP
			KEC. PEMALI	1.500.000,00	ASET TETAP
			KEC. RIAU SILIP	2.475.000,00	ASET TETAP
			KEC. RIAU SILIP	1.500.000,00	ASET TETAP
			KE. MERAWANG	2.475.000,00	ASET TETAP
			KE. MERAWANG	1.500.000,00	ASET TETAP
			KEC. BAKAM	4.123.500,00	ASET TETAP
			KEC. BELINYU	4.123.500,00	ASET TETAP
			SATPOL PP	1.500.000,00	ASET TETAP
SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN

			BPBD	4.899.000,00	ASET TETAP
			PU	1.500.000,00	ASET TETAP
			DINSOS	1.500.000,00	ASET TETAP
			DINPAR	1.500.000,00	ASET TETAP
			BKPSDMD	1.500.000,00	ASET TETAP
			SETWAN	1.500.000,00	ASET TETAP
			DINDUKCAPIL	2.374.500,00	ASET TETAP
			KB	1.500.000,00	ASET TETAP
			DKP	1.500.000,00	ASET TETAP
			PENANAMAN MODAL	2.374.500,00	ASET TETAP
			PERIKANAN	1.500.000,00	ASET TETAP
			PERHUBUNGAN	2.374.500,00	ASET TETAP
			KOMINFOTIK	1.500.000,00	ASET TETAP
			BAPPEDA	1.500.000,00	ASET TETAP
			BPPKAD	1.500.000,00	ASET TETAP
			INSPEKTORAT	1.500.000,00	ASET TETAP
			DINAS PENDIDIKAN	1.500.000,00	ASET TETAP
			LH	1.500.000,00	ASET TETAP
			PEMDES	1.500.000,00	ASET TETAP
			PANGAN	1.500.000,00	ASET TETAP
			DINPERKPP	1.500.000,00	ASET TETAP
SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN

BP2RD	8.096.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	BPPKAD	8.096.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT
Dinkes (Puskesmas Belinyu)	192.000.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	PENGELOLA	192.000.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT
DPUPR	202.257.900,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	DINHUB	202.257.900,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT
RSUD DEPATI BAHRIN	5.562.641.803,81	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	DINAS KESEHATAN	5.562.641.803,81	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT
DINPARBUDAYA	42.904.568,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	DINDIKPORA	42.904.568,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN- LAIN/PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
BP2RD	60.205.949,23	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	BPPKAD	60.205.949,23	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
PANGAN	7.210.400,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINPANPERTAN	7.475.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAILIAT	264.600,00				
SETDA	70.077.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	SETWAN	70.077.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
DPUPR	1.153.039.735,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINHUB	1.153.039.735,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
DINPEMDES	14.690.929,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINSOS	14.690.929,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
DINDIKPORA	23.084.303,10	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINPARBUDAYA	23.084.303,10	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
DINPARBUDAYA	50.701.900,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINDIKPORA	50.701.900,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
RSUD DEPATI BAHRIN	199.421.729,75	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN	DINAS KESEHATAN	199.421.729,75	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN
DINPARBUDAYA	1.645.830,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA	DINDIKPORA	1.645.830,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
DPUPR	125.550,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT	DINHUB	125.550,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN RUSAK BERAT
JUMLAH	89.570.486.890,49			89.570.486.890,50	

REKAPITULASI :

PERALIHAN KELUAR						
ASET TETAP PERALATAN	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN RUSAK BERAT	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN TIDAK DIKETAHUI	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL RUSAK BERAT	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL TIDAK DIKETAHUI	TOTAL
81.982.118.692,60	5.964.995.703,81	42.904.568,00	1.578.696.546,08	125.550,00	1.645.830,00	89.570.486.890,49

PERALIHAN MASUK						
ASET TETAP PERALATAN	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN RUSAK BERAT	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/PERALATAN TIDAK DIKETAHUI	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL RUSAK BERAT	PERALATAN EKSTRAKOMPTABEL TIDAK DIKETAHUI	TOTAL
81.982.118.692,61	5.964.995.703,81	42.904.568,00	1.578.696.546,08	125.550,00	1.645.830,00	89.570.486.890,50

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Peralihan Antar OPD Aset Gedung dan Bangunan TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD ASET GEDUNG DAN BANGUNAN SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
BP2RD	2.034.837.065,78	ASET TETAP	BPPKAD	2.034.837.065,78	ASET TETAP
PENGELOLA	90.164.888,00	ASET TETAP	DP2KBP3A	90.164.888,00	ASET TETAP
PENGELOLA	1.392.454.552,00	ASET TETAP	SETDA	1.392.454.552,00	ASET TETAP
DINA KERPERINDAG	1.203.369.384,66	ASET TETAP	SETDA	1.203.369.384,66	ASET TETAP
DIN PARBUDAYA	42.916.236.537,00	ASET TETAP	DINDIKPORA	42.916.236.537,00	ASET TETAP
SETDA	842.586.576,00	ASET TETAP	SETWAN	842.586.576,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	911.847.000,00	ASET TETAP	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	911.847.000,00	ASET TETAP
DINDIKPORA (UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAILIAT)	420.079.608,50	ASET TETAP	DIN PANPERTAN	420.079.608,50	ASET TETAP
DPUPR	6.020.468.402,71	ASET TETAP	BPBD	312.076.801,20	ASET TETAP
DPUPR			DINHUB	5.708.391.601,51	ASET TETAP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.374.726.935,99	ASET TETAP	DINAS KESEHATAN (UPT PSC-119)	1.374.726.935,99	ASET TETAP
DINPEMDES	1.278.681.264,00	ASET TETAP	DINSOS	1.278.681.264,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	564.368.941,33	ASET TETAP	DINSOS	564.368.941,33	ASET TETAP
RSUD DEPATI BAHRIN	45.913.294.254,85	ASET TETAP	DINAS KESEHATAN	45.913.294.254,85	ASET TETAP
RSUD DEPATI BAHRIN	1.175.259.632,61	ASET LAINNYA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	DINAS KESEHATAN	1.175.259.632,61	ASET LAINNYA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
DPUPR	16.698.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	DINHUB	16.698.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT
RSUD Depati Bahrin	35.880.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT	DINAS KESEHATAN	35.880.000,00	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/GEDUNG DAN BANGUNAN RUSAK BERAT
DINPARBUDAYA	1.046.181.238,49	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/BANGUNAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KE PEMDES	DINDIKPORA	1.046.181.238,49	ASET LAINNYA/ASET LAIN-LAIN/BANGUNAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KE PEMDES
BP2RD	18.104.274,89	ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN	BPPKAD	18.104.274,89	ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
RSUD DEPATI BAHRIN	9.613.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN	DINAS KESEHATAN	9.613.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
JUMLAH	107.264.851.556,81			107.264.851.556,81	

REKAPITULASI :

PERALIHAN KELUAR					
ASET TETAP GEDUNG	ASET LAINNYA/GEDUNG KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	GEDUNG RUSAK BERAT	GEDUNG AKAN DIHIBAHKAN	GEDUNG EKSTRAKOMPTABEL	TOTAL
104.963.115.410,82	1.175.259.632,61	52.578.000,00	1.046.181.238,49	27.717.274,89	107.264.851.556,81

PERALIHAN MASUK					
ASET TETAP GEDUNG	ASET LAINNYA/GEDUNG KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	GEDUNG RUSAK BERAT	GEDUNG AKAN DIHIBAHKAN	GEDUNG EKSTRAKOMPTABEL	TOTAL
104.963.115.410,82	1.175.259.632,61	52.578.000,00	1.046.181.238,49	27.717.274,89	107.264.851.556,81

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Peralihan Antar OPD Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
DINDIKPORA	9.715.000,00	ASET TETAP	DINPANPERTAN	9.715.000,00	ASET TETAP
SETDA	29.700.000,00	ASET TETAP	SETWAN	29.700.000,00	ASET TETAP
DPUPR	12.476.233.655,00	ASET TETAP	DINHUB	12.476.233.655,00	ASET TETAP
PENGELOLA	74.770.000,00	ASET TETAP	SETDA	74.770.000,00	ASET TETAP
DINPARBUDAYA	143.351.800,00	ASET TETAP	DINDIKPORA	143.351.800,00	ASET TETAP
BP2RD	192.223.105,00	ASET TETAP	BPPKAD	192.223.105,00	ASET TETAP
DINAS PANGAN	18.350.000,00	ASET TETAP	DINSOS	18.350.000,00	ASET TETAP
RSUD DEPATI BAHRI	3.890.803.875,00	ASET TETAP	DINKES	3.890.803.875,00	ASET TETAP
DINAKERPERINDAG	9.677.750,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	SETDA	9.677.750,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
DPUPR	5.379.729.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	DINHUB	5.379.729.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
DINPARBUDAYA	2.000.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	DINDIKPORA	2.000.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
RSUD DEPATI BAHRI	6.050.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	DINAS KESEHATAN	6.050.000,00	ASET EKSTRAKOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
JUMLAH	22.232.604.185,00			22.232.604.185,00	

REKAPITULASI :

PERALIHAN KELUAR			PERALIHAN MASUK		
ASET TETAP JIJ	JIJ EKSTRAKOMPTABEL	TOTAL	ASET TETAP JIJ	JIJ EKSTRAKOMPTABEL	TOTAL
16.835.147.435,00	5.397.456.750,00	22.232.604.185,00	16.835.147.435,00	5.397.456.750,00	22.232.604.185,00

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Peralihan Antar OPD Aset Tetap Lainnya TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD ASET TETAP LAINNYA SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
DINDIKPORA	15.067.800,00	ASET TETAP	DINPARBUDAYA	15.067.800,00	ASET TETAP
JUMLAH	15.067.800,00			15.067.800,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Peralihan Antar OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020

PERALIHAN/MUTASI ANTAR OPD KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan SELAMA T.A 2020

SKPD ASAL	PERALIHAN KELUAR (Rp.)	KETERANGAN	SKPD TUJUAN	PERALIHAN MASUK (Rp.)	KETERANGAN
RSUD Depati Bahrin	98.751.500,00	ASET TETAP	DINAS KESEHATAN	98.751.500,00	ASET TETAP
JUMLAH	98.751.500,00			98.751.500,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Habis Masa Perjanjian Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin

DAFTAR RINCIAN PERALATAN DAN MESIN PINJAM PAKAI (HABIS MASA PERJANJIAN) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA. 2020

No.	Nomor Perjanjian	Mitra	Objek Pinjam Pakai	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nomor Mesin, Rangka, Polisi, dan BPKB	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	024//031/X/SETDA/2020	Pengadilan Agama Sungailiat	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA/ A/ KF70STD	1999	7K-0207715/ MHF11KF700002393 0/ BN 2249 BZ	5 Tahun	03 Maret 2015	29 Februari 2020	46.000.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
TOTAL NILAI ASET PERALATAN DAN MESIN DIPINJAMPAKAIKAN (HABIS MASA PERJANJIAN) PER 31 DESEMBER 2020										46.000.000,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Pengembalian Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin sebelum Habis Masa

DAFTAR RINCIAN PERALATAN DAN MESIN PINJAM PAKAI (PEMGEMBALIAN SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA. 2020

No.	Nomor Perjanjian	Mitra	Objek Perjanjian	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nomor Mesin, Rangka, Polisi, dan BPKB	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	024/089/X/2019	KAPOLRES	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA/ INNOVA	2015	1TR-8013551 / MHFXW42G3F2312264/ BN 1032 QZ	5 Tahun	23 Desember 2019	22 Desember 2024	280.390.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
2	024/025/XI/PB/2016	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA/ INNOVA	2012	1TR-7381698 / MHFXW42G6C2234858 / BN 1568 QZ	5 Tahun	09 Februari 2016	08 Februari 2021	250.250.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
TOTAL NILAI ASET PERALATAN DAN MESIN DIPINJAMPAKAIKAN (PEMGEMBALIAN SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR) PER 31 DESEMBER 2020										530.640.000,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Perjanjian Baru Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin

DAFTAR RINCIAN PERALATAN DAN MESIN PINJAM PAKAI (PERJANJIAN BARU) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP TA 2020

No.	Nomor Perjanjian	Mitra	Objek Perjanjian	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nomor Mesin, Rangka, Polisi, dan BPKB	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	032/1355/BPPKAD/2020	KEPALA KANTOR ATR / BPN KAB. BANGKA	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA / NEW VELOZ	2012	DDA5845 / MHKM1CA4JCK02146/ BN 1596 QZ	5 Tahun	30 November 2020	30 November 2025	173.650.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
2	032/1356/BPPKAD/2020	KOMANDAN LANAL BANGKA BELITUNG	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	ISUZU/PHANTER	2006	E-275975 / MHCTBR54EGK275975 / BN 1510 QZ	5 Tahun	30 November 2020	30 November 2025	329.600.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
3	032/1023/BPPKAD/2020	KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	DAIHATSU/XENIA	2009	DN94431 / MHKV1AA1J9K004047 / BN 1039 QZ	5 Tahun	03 Agustus 2020	03 Agustus 2025	134.875.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
4	024/043/X/2019	KEPALA BNNKBKA	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA / AVANZA 1.3G M/T LUX/VIN/2015/HITAM	2015	K3MF53360 / MHKM1BA3FJ107652 / BN 1044 QZ	2 Tahun	25 Maret 2019	25 Maret 2021	175.230.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
5	024/045/XI/PB/2019	KOMANDAN KORAMIL 413-06 SUNGAILIAT	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA/AVANZA G	2011	DH96871 / MHFM1BA3JBK341100 / BN 1537 QZ	1 Tahun	15 April 2020	14 April 2021	155.271.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)

No.	Nomor Perjanjian	Mitra	Objek Perjanjian	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nomor Mesin, Rangka, Polisi, dan BPKB	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	024/005/X/2020	KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Minibus	TOYOTA / AVANZA G	2011	DH80960 / MHFM1BA3JBK331840 / BN 1532 QZ	5 Tahun	02 Januari 2020	01 Januari 2025	155.271.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
7	032/029/BPPKAD/2020	KEPALA LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	Kendaraan Roda 3 (tiga)	SANEX	2008	162FMJ40001157 / MGJT15MR17J0001157 / BN 5836 BZ	5 Tahun	11 Juni 2020	10 Juni 2025	15.870.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
8	024/043/X/2019	KEPALA KANTOR BNN KAB. BANGKA	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Suzuki / FW 110 D	2012	E4701D298546 / MH8BE4TACJ130003 / BN 7325 BZ	2 Tahun	25 Maret 2019	25 Maret 2021	14.000.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
9	024/043/X/2019	KEPALA KANTOR BNN KAB. BANGKA	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Suzuki / FW 110 D	2012	E4701D301507 / MH8BE4TACJ130457 / BN 7326 BZ	2 Tahun	25 Maret 2019	25 Maret 2021	14.000.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
TOTAL NILAI ASET PERALATAN DAN MESIN DIPINJAMPAKAIKAN (PERJANJIAN BARU) PER 31 DESEMBER 2020										1.167.767.000,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Perjanjian Baru Pinjam Pakai Tanah

DAFTAR RINCIAN MUTASI TANAH PINJAM PAKAI (PERJANJIAN BARU) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP

No	Nomor Perjanjian	Mitra	Objek Perjanjian	Alamat	Penggunaan	Luas Objek	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	032/3641/BPPKAD/2020	KETUA KPU	Tanah Bangunan Gedung KPU	Jalan. A. Yani Jalur II Bukit Betung	Kantor KPU	1.812 m ²	5 Tahun	28 Juli 2020	28 Juli 2025	204.288.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
TOTAL NILAI ASET TANAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN PER 31 DESEMBER 2020										204.288.000,00	

Lampiran : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Perjanjian Baru Pinjam Pakai Gedung dan Bangunan

DAFTAR RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PINJAM PAKAI (PERJANJIAN BARU) YANG MEMPENGARUHI NILAI ASET TETAP

Perjanjian											
No	Nomor	Dengan	Objek	Alamat	Penggunaan	Luas Objek	Jangka Waktu	Mulai	Berakhir	Nilai Aset	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	032/3641/BPPKAD/2020	KETUA KPU	Bangunan Gudang KPU	Jalan. A. Yani Jalur II Bukit Betung	Kantor KPU	200 m ²	5 Tahun	28 Juli 2020	28 Juli 2025	246.400.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
2	032/3641/BPPKAD/2020	KETUA KPU	Pagar KPU	Jalan. A. Yani Jalur II Bukit Betung	Kantor KPU	-	5 Tahun	28 Juli 2020	28 Juli 2025	99.600.000,00	Sekretaris Daerah (Bagian Keuangan dan Aset)
TOTAL NILAI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIPINJAMPAKAIKAN PER 31 DESEMBER 2020										346.000.000,00	

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, mampu dimengerti dan menjadi alat untuk evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk perbaikan di masa yang akan datang.

SUNGAILIAT, MEI 2021

BUPATI BANGKA,

MULKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	1,140,955,837,297.00	1,136,647,395,404.40	99.62	1,258,858,376,953.78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	126,497,504,000.00	155,729,845,760.46	123.11	144,668,128,852.62
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	51,960,117,000.00	60,672,648,246.45	116.77	59,371,242,190.48
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7,542,425,000.00	8,218,105,256.00	108.96	10,377,273,660.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4,427,500,000.00	4,806,743,535.90	108.57	5,078,294,605.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	62,567,462,000.00	82,032,348,722.11	131.11	69,841,318,397.14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	970,647,643,297.00	937,414,954,495.94	96.58	1,075,408,393,302.76
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	803,506,147,597.00	761,255,023,545.00	94.74	853,236,403,540.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	68,789,506,000.00	46,960,833,204.00	68.27	23,702,397,096.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	65,401,755,900.00	55,788,531,415.00	85.30	113,614,535,120.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	500,682,611,000.00	498,137,263,000.00	99.49	552,780,809,000.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	168,632,274,697.00	160,368,395,926.00	95.10	163,138,662,324.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	111,747,740,000.00	111,747,740,000.00	100.00	119,427,990,000.00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	111,747,740,000.00	111,747,740,000.00	100.00	119,427,990,000.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	50,082,355,700.00	59,568,265,950.94	118.94	72,958,179,327.42
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	50,082,355,700.00	59,568,265,950.94	118.94	72,958,179,327.42
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5,311,400,000.00	4,843,925,000.00	91.20	29,785,820,435.34
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5,311,400,000.00	4,843,925,000.00	91.20	29,785,820,435.34
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	43,810,690,000.00	43,502,595,148.00	99.30	38,781,854,798.40
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	1,235,690,000.00	940,135,148.00	76.08	0.00
4.3.4	Hibah Dana BOS	42,575,000,000.00	42,562,460,000.00	99.97	38,781,854,798.40
5	BELANJA	1,140,863,689,098.23	1,022,675,825,831.02	89.64	1,106,321,263,978.50
5.1	BELANJA OPERASI	990,053,335,880.03	887,667,309,983.50	89.66	916,655,251,633.79
5.1.1	Belanja Pegawai	468,637,709,510.01	420,696,684,957.94	89.77	433,542,911,119.63
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	479,445,039,170.02	428,928,679,230.56	89.46	449,677,367,947.16
5.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	37,660,587,200.00	35,015,292,795.00	92.98	30,305,311,667.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,310,000,000.00	3,026,653,000.00	70.22	3,129,660,900.00
5.2	BELANJA MODAL	146,173,948,438.20	133,634,821,447.52	91.42	189,666,012,344.71
5.2.1	Belanja Modal Tanah	445,000,000.00	144,421,000.00	32.45	1,375,062,500.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58,602,765,713.20	54,209,532,248.00	92.50	46,469,698,481.18
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,404,672,925.00	60,097,868,448.99	93.31	53,887,849,397.90
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,607,992,800.00	18,188,903,369.53	84.18	84,834,217,385.63
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,113,517,000.00	994,096,381.00	89.28	2,946,685,082.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	152,499,498.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4,636,404,780.00	1,373,694,400.00	29.63	0.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,636,404,780.00	1,373,694,400.00	29.63	0.00
6	TRANSFER	129,978,039,600.00	129,978,039,600.00	100.00	136,258,081,332.80
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5,950,254,200.00	5,950,254,200.00	100.00	9,275,340,000.00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5,196,011,700.00	5,196,011,700.00	100.00	8,438,488,000.00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	754,242,500.00	754,242,500.00	100.00	836,852,000.00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	124,027,785,400.00	124,027,785,400.00	100.00	126,982,741,332.80
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	124,027,785,400.00	124,027,785,400.00	100.00	126,198,410,500.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	784,330,832.80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(129,885,891,401.23)	(16,006,470,026.62)	12.32	16,279,031,642.48
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130,393,875,401.23	131,157,002,485.23	100.59	114,114,843,758.75
7.1.1	Penggunaan SILPA	130,393,875,401.23	130,393,865,708.23	100.00	113,604,900,821.75
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	763,136,777.00	0.00	509,942,937.00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	507,984,000.00	507,984,000.00	100.00	0.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	0.00
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	7,984,000.00	7,984,000.00	100.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	129,885,891,401.23	130,649,018,485.23	100.59	114,114,843,758.75
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	114,642,548,458.61	0.00	130,393,875,401.23



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020 APBD	2019 APBD
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2 <i>Arus Kas Masuk</i>		
3 Pendapatan Pajak Daerah - LRA	60,672,648,246.45	59,371,242,190.48
4 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8,218,105,256.00	10,378,098,660.00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4,806,743,535.90	5,078,294,605.00
6 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	82,019,548,122.11	15,662,037,961.14
7 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	761,255,023,545.00	853,236,403,540.00
8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	111,747,740,000.00	119,427,990,000.00
9 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	59,568,265,950.94	72,958,179,327.42
10 Bantuan Keuangan - LRA	4,843,925,000.00	29,785,820,435.34
11 Pendapatan Hibah - LRA	940,135,148.00	0.00
12 Pengembalian Tahun Berjalan	1,983,252,210.51	1,048,918,967.63
13 <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>1,096,055,387,014.91</i>	<i>1,166,946,985,687.01</i>
14		
15 <i>Arus Kas Keluar</i>		
16 Belanja Pegawai	420,869,363,444.94	433,614,385,483.63
17 Belanja Barang dan Jasa	400,239,581,347.07	369,446,558,022.51
18 Belanja Subsidi	0.00	0.00
19 Belanja Hibah	35,618,422,359.00	30,408,039,000.00
20 Belanja Bantuan Sosial	3,031,253,000.00	3,149,660,900.00
21 Belanja Tak Terduka	1,419,717,400.00	0.00
22 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5,196,011,700.00	8,438,488,000.00
23 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	754,242,500.00	836,852,000.00
24 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	124,027,785,400.00	126,198,410,500.00
25 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	975,325,232.60
26 Belanja Bagi Hasil Ke Prop/Kab/Kota/Desa	0.00	0.00
27 <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>991,156,377,151.01</i>	<i>973,067,719,138.74</i>
28		
29 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	104,899,009,863.90	193,879,266,548.27
30		
31 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
32 <i>Arus Kas Masuk</i>		
33 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	6,097,100.00	8,845,000.00
34 Hasil Penjualan Tanah - LRA	0.00	0.00
35 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	0.00	639,150,000.00
36 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
37 <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>6,097,100.00</i>	<i>647,995,000.00</i>
38		
39 <i>Arus Kas Keluar</i>		
40 Belanja Modal Tanah	144,421,000.00	1,375,062,500.00
41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,812,191,672.00	34,664,510,751.18
42 Belanja Modal Gedung dan Banunan	60,102,300,720.99	54,283,366,925.91
43 Belanja Modal Jalan, Iriqasi dan Jaringan	18,208,898,369.53	84,836,520,199.45
44 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	994,096,381.00	2,946,685,082.00
45 Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	152,499,498.00
46 Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00
47 <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>124,261,908,143.52</i>	<i>178,258,644,956.54</i>
48		
49 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124,255,811,043.52)	(177,610,649,956.54)
50		
51 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
52 <i>Arus Kas Masuk</i>		
53 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	763,136,777.00	509,942,937.00
54 <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>763,136,777.00</i>	<i>509,942,937.00</i>
55		
56 <i>Arus Kas Keluar</i>		
57 Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500,000,000.00	0.00
58 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	7,984,000.00	0.00
59 <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>507,984,000.00</i>	<i>0.00</i>
60		
61 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	255,152,777.00	509,942,937.00
62		
63 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
64 <i>Arus Kas Masuk</i>		
65 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69,216,917,132.00	76,950,673,898.00
66 <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>69,216,917,132.00</i>	<i>76,950,673,898.00</i>
67		
68 <i>Arus Kas Keluar</i>		
69 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69,216,917,132.00	76,950,673,898.00
70 Kiriman Uang Keluar	0.00	0.00
71 <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>69,216,917,132.00</i>	<i>76,950,673,898.00</i>
72		
73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00
74		
75 Kenaikan / (Penurunan) Kas	(19,101,648,402.62)	16,778,559,528.73
76 Saldo Awal Kas di BUD	127,383,906,918.23	98,928,587,906.58
77 Saldo Akhir Kas di BUD	108,282,258,515.61	127,383,906,918.23
78 - Kas di Kas Daerah	78,538,878,786.49	115,707,147,435.31
79 - Kas di BLUD RSUD	-	8,589,169,387.32
80 - Kas di BLUD DINKES	29,743,379,729.12	3,087,590,095.60
81 Kas di Bendahara Penerimaan	18,529,500.00	17,378,000.00
82 Kas di Bendahara Pengeluaran	60,603.00	2,391.00
83 Setara Kas	0.00	0.00
84 Kas Lainnya	96,532,169.92	88,987,294.92
85 Kas di Rekening BOS APBN	6,336,208,443.00	2,992,590,483.00
86 Kas di Bendahara Pengeluaran BOS Lainnya	36,000.00	0.00
87 Saldo Akhir Kas	114,733,625,231.53	130,482,865,087.15



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	130,393,875,401.23	113,604,900,821.75
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	130,393,865,708.23	113,604,900,821.75
Sub Total	9,693.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	114,642,548,458.61	130,393,875,401.23
Sub Total	114,642,558,151.61	130,393,875,401.23
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	9,693.00	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
Koreksi Pendapatan	0.00	0.00
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Koreksi Saldo Awal BOS APBN	0.00	0.00
Koreksi BLUD DINKES	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	114,642,548,458.61	130,393,875,401.23



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	1,179,368,790,966.96	1,346,861,712,375.18	(167,492,921,408.22)	(12.44)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	151,698,370,689.08	143,002,335,813.95	8,696,034,875.13	6.08
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	61,786,249,450.92	61,098,199,308.35	688,050,142.57	1.13
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8,204,001,145.50	9,968,495,108.50	(1,764,493,963.00)	(17.70)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4,806,743,535.90	5,078,294,605.00	(271,551,069.10)	(5.35)
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	76,901,376,556.76	66,857,346,792.10	10,044,029,764.66	15.02
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	922,059,955,156.93	1,110,888,116,385.21	(188,828,161,228.28)	(17.00)
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	743,612,707,926.00	894,814,573,508.00	(151,201,865,582.00)	(16.90)
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	111,747,740,000.00	119,427,990,000.00	(7,680,250,000.00)	(6.43)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	61,855,582,230.93	66,859,732,441.87	(5,004,150,210.94)	(7.48)
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	4,843,925,000.00	29,785,820,435.34	(24,941,895,435.34)	(83.74)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	105,610,465,120.95	92,971,260,176.02	12,639,204,944.93	13.59
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	63,048,005,120.95	54,148,963,711.62	8,899,041,409.33	16.43
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	40,441,666.00	(40,441,666.00)	(100.00)
8.3.4	Hibah Dana BOS - LO	42,562,460,000.00	38,781,854,798.40	3,780,605,201.60	9.75
9	BEBAN	1,188,284,951,339.19	1,231,011,173,861.96	(42,726,222,522.77)	(3.47)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	420,713,752,957.94	433,542,911,119.63	(12,829,158,161.69)	(2.96)
9.1.2	Beban Persediaan	142,373,994,770.79	102,958,498,265.60	39,415,496,505.19	38.28
9.1.2	Beban Jasa	221,555,087,901.38	219,045,286,759.90	2,509,801,141.48	1.15
9.1.2	Beban Pemeliharaan	15,776,663,898.00	46,387,472,852.76	(30,610,808,954.76)	(65.99)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	60,383,076,829.00	88,830,263,321.33	(28,447,186,492.33)	(32.02)
9.1.3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5	Beban Hibah	35,724,706,779.00	30,449,208,392.00	5,275,498,387.00	17.33
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	3,026,653,000.00	3,129,660,900.00	(103,007,900.00)	(3.29)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152,534,506,351.04	141,068,312,931.03	11,466,193,420.01	8.13
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	4,670,739,149.60	5,225,412,924.33	(554,673,774.73)	(10.61)
9.1.9	Beban Lain-lain	1,547,730,102.44	24,116,065,062.58	(22,568,334,960.14)	(93.58)
9.2.1	Beban Transfer	129,978,039,600.00	136,258,081,332.80	(6,280,041,732.80)	(4.61)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8,916,160,372.23)	115,850,538,513.22	(124,766,698,885.45)	(107.70)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	639,150,000.00	(639,150,000.00)	(100.00)
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	158,174,672.95	0.00	158,174,672.95	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	2,892,214,236.23	934,220,779.58	1,957,993,456.65	209.59
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,050,388,909.18)	(295,070,779.58)	(2,755,318,129.60)	933.78
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11,966,549,281.41)	115,555,467,733.64	(127,522,017,015.05)	(110.36)
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	1,373,694,400.00	0.00	1,373,694,400.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1,373,694,400.00)	0.00	(1,373,694,400.00)	0.00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,340,243,681.41)	115,555,467,733.64	(128,895,711,415.05)	(111.54)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	2,035,251,322,027.61	1,874,786,306,120.71
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,340,243,681.41)	115,555,467,733.64
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	50,164,813.61	(100,372,199.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	(8,234,605,984.01)	5,864,832,117.00
Kewajiban yang dikonsolidasikan	0.00	0.00
Koreksi Aset Masuk dan Keluar	211,729,000.74	(376,544,754.46)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Masuk dan Keluar	2,658,355,512.50	1,122,845,691.99
Koreksi Penyesuaian Piutang	(49,699,639,914.01)	7,673,809,326.00
Koreksi Penyisihan Piutang	2,250,434,423.99	1,089,213,259.82
Koreksi Penyesuaian Nilai Investasi	21,327,536.00	362,775,884.00
Koreksi Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	3,208,897.47
Koreksi Utang beban Barang dan Jasa	0.00	2,215,935,130.00
Koreksi Penyesuaian Nilai Aset	537,396,659.97	28,099,015,452.60
Koreksi Penyesuaian Akumulasi Aset	(16,097,357,345.09)	(1,045,177,465.16)
Koreksi Dana BOS	(9,693.00)	6,833.00
Koreksi Persediaan Masuk dan Keluar	0.00	0.00
Koreksi Piutang Masuk dan Keluar	0.00	0.00
Koreksi Penyisihan Piutang Masuk dan Keluar	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR	1,953,608,873,356.90	2,035,251,322,027.61



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	78,538,878,786.49	115,707,147,435.31
Kas di Bendahara Penerimaan	18,529,500.00	17,378,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,603.00	2,391.00
Kas di BLUD	29,743,379,729.12	11,676,759,482.92
Kas di Bendahara FKTP	0.00	0.00
Kas di Bendahara BOS	6,336,244,443.00	2,992,590,483.00
Kas Lainnya	96,532,169.92	88,987,294.92
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	94,608,767,910.44	162,684,107,710.38
Piutang Lainnya	568,443,611.96	576,843,611.96
Penyisihan Piutang	(17,638,055,593.71)	(15,226,150,868.10)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	22,508,733,037.53	18,939,217,472.16
JUMLAH ASET LANCAR	214,781,514,197.75	297,456,883,013.55
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	17,338,283,215.00	18,101,419,992.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	17,338,283,215.00	18,101,419,992.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	55,649,815,141.00	55,137,987,605.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	55,649,815,141.00	55,137,987,605.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	72,988,098,356.00	73,239,407,597.00
ASET TETAP		
Tanah	252,179,216,223.17	252,901,121,909.93
Peralatan dan Mesin	371,429,444,565.97	328,713,999,757.89
Gedung dan Bangunan	899,219,415,094.77	854,633,880,395.47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,569,582,823,142.87	1,514,007,680,374.22
Aset Tetap Lainnya	48,859,776,206.09	46,705,660,972.41
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,732,356,497.00	3,103,385,640.00
Akumulasi Penyusutan	(1,518,908,625,360.12)	(1,349,649,790,981.92)
JUMLAH ASET TETAP	1,637,094,406,369.75	1,650,415,938,068.00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	1,627,487,250.00	1,383,167,250.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19,643,451,958.83	18,921,560,106.79
Aset Tidak Berwujud	509,817,735.00	673,545,763.00
Aset Lain-lain	33,021,130,154.91	15,323,149,372.15
JUMLAH ASET LAINNYA	54,801,887,098.74	36,301,422,491.94
JUMLAH ASET	1,979,665,906,022.23	2,057,413,651,170.49
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88,980,461.92	88,980,461.92
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	4,618,208,926.63	3,661,492,718.96
Utang Beban	8,357,397,819.79	14,067,754,976.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	12,992,445,457.00	4,344,100,986.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,057,032,665.34	22,162,329,142.88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	26,057,032,665.34	22,162,329,142.88
EKUITAS		
EKUITAS	1,953,608,873,356.90	2,035,251,322,027.61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,979,665,906,022.23	2,057,413,651,170.49